

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

59.823 3

S

Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta



TANGGAL	No. INDEK
7 AUG 1984	1086

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
1977 / 1978

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/1978 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan :

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional".

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah, yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL,
- Adat-istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH,
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH,
- Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1977/1978, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen P. dan K. di

Daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah—naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P. dan K. Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari:
 - 1) Drs. Tashadi sebagai Ketua
 - 2) Drs. Suratmin sebagai Anggota
 - 3) Mulyono, BA sebagai Anggota
 - 4) Soekirman, BA sebagai Anggota
 - 5) Sasmanung sebagai Anggota
 - 6) Toliman, BA sebagai Anggota
6. Tim penyempurna naskah di Pusat terdiri dari:
 - Konsultan/Anggota : 1. Prof. Dr.I.B. Mantra
2. Dr. Astrid S. Susanto
3. Abdurachman Suryomi-hardjo
4. A.B. Lopian
 - Ketua : Sutrisno Kutoyo
 - Sekretaris : M. Soenjarta Kartadarmadja
 - Anggota : 1. Anhar Gonggong
2. Mardanas Safwan
3. Masjkuri
4. Surachman
5. Muchtaruddin Ibrahim
6. Sri Sutjiatiningsih
7. Editor : Sutrisno Kutoyo

8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo
NIP 130117589

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUJUAN PENELITIAN	1
B. MASALAH	3
C. RUANG LINGKUP	4
D. PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN	5
E. HASIL AKHIR	6
 BAB II KEADAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYA- KARTA PADA AKHIR ABAD 19.	 8
A. PEMERINTAHAN	8
B. SOSIAL-BUDAYA	18
1. <i>Pendidikan</i>	18
2. <i>Seni Budaya</i>	25
C. KEHIDUPAN EKONOMI	31
D. PERKEMBANGAN ALAM FIKIRAN DAN KEPERCAYAAN	36
 BAB III KEADAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DARI TAHUN + 1900 - 1928 ..	 40
A. PENGARUH POLITIK ETIKA DI DAERAH	40
B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERGAYUTAN (RELEVAN) DENGAN ATAUPUN YANG MERUPAKAN EMBRIO DARI KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH	44
C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BERDIRINYA PARTAI/ORGANISASI	47
1. <i>Budi Utomo</i>	47
2. <i>Syarekat Islam</i>	52
3. <i>Indische Partij</i>	55
4. <i>Muhammadiyah</i>	56
5. <i>Gerakan Ratu Adil</i>	59
6. <i>Taman Siswa</i>	60
7. <i>Organisasi Kepemudaan</i>	65
8. <i>Partai Komunis Indonesia</i>	68

9.	<i>Gerakan Perburuhan</i>	69
10.	<i>Gerakan Wanita</i>	70
11.	Partai Nasional Indonesia	72
D.	KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914-1918) DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD	76
1.	<i>Sikap Pemerintah Hindia Belanda</i>	76
2.	<i>Keadaan Masyarakat</i>	79
3.	<i>Hubungan dengan Volksraad</i>	87
4.	<i>Dewan-dewan (Raad)</i>	88
E.	PERJUANGAN DI DAERAH	89
1.	<i>Interaksi dengan pemogokan— pemogokan di sekitar tahun 1923</i>	89
2.	<i>Interaksi dengan pemberontakan tahun 1926/1927</i>	93
3.	<i>Sikap masyarakat terhadap azas non Koperasi dan koperasi terha— dap Pemerintah Hindia Belanda</i>	96
4.	<i>Interaksi dengan Permufakatan Per— himpunan—perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)</i>	96
5.	<i>Interaksi dengan Sumpah Pemuda</i>	98
6.	<i>Kegiatan Masyarakat pada berbagai bidang kehidupan</i>	107
a.	Ekonomi	107
b.	Sosial	110
c.	Pendidikan	111
d.	Budaya	113
e.	Agama	114

BAB IV KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 - 1942.

A.	PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA TAHUN ± 1930	117
1.	<i>Politik keras terhadap gerakan non- koperasi</i>	117
2.	<i>Undang-undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonantie</i>	119
B.	DEPRESI EKONOMI DI DAERAH	124

C.	INTERAKSI TERHADAP KEPARTAIAN/ ORGANISASI	127
1.	<i>PNI Baru</i>	127
2.	<i>Partai Sarekat Islam Indonesia</i>	128
3.	<i>Parindra</i>	132
4.	<i>Gapi</i>	135
5.	<i>M I A I</i>	136
6.	<i>Petisi Soetardjo</i>	137
7.	<i>Gerakan Indonesia Berparlemen</i>	138
D.	KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG	139
1.	<i>Sikap Pemerintah Hindia Belanda</i>	139
2.	<i>Keadaan masyarakat</i>	145
3.	<i>Sikap masyarakat terhadap Pemerin- tah Hindia Belanda</i>	153
4.	<i>Keadaan Pemerintah Hindia Belanda di Daerah pada saat terakhir</i>	154
a.	Sesudah Perang Dunia II pecah di Daerah	154
b.	Sesudah Negeri Belanda di- duduki Nazi Jerman	154
c.	Sesudah Perang Pasifik pecah	155
E.	KEDATANGAN PASUKAN PEN- DUDUKAN JEPANG	156
1.	<i>Propaganda Jepang yang terasa di Daerah</i>	156
2.	<i>Waktu kedatangan pasukan Jepang</i> ...	157
3.	<i>Sikap Jepang terhadap aparatur Pemerintah Hindia Belanda</i>	159
4.	<i>Sikap Jepang terhadap bangsa Indonesia</i>	159
5.	<i>Sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang</i>	166

BAB V	PENUTUP	168
	DAFTAR CATATAN	170
	DAFTAR SUMBER	174
	LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Sejarah periode Pergerakan/Kebangkitan Nasional merupakan suatu periode yang amat penting dan menarik di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan pengakuan yang diberikan oleh seorang ahli berkebangsaan Belanda yaitu D.M.G. Koch¹⁾ yang pada masa awal abad-20 ikut menyaksikan dengan mata kepala sendiri segala peristiwa yang terjadi di Indonesia pada masa Kebangkitan Nasional itu.

Periode Kebangkitan Nasional mempunyai arti yang sangat penting di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, karena ternyata segala peristiwa dan kejadian pada masa itu akhirnya dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Indonesia. Kenyataan ini dapat kita ketahui dengan adanya pengakuan yang secara resmi dan tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (alinea kedua) sebagai berikut:

' dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan sebagainya. dan seterusnya'. Dari kalimat tersebut, nyata dan jelas adanya suatu pengakuan yang secara resmi terhadap peranan perjuangan pergerakan Indonesia, sebagai perintis yang mengantarkan, bangsa ke depan pintu gerbang kemerdekaan dengan segala pengorbanannya. Karena itu pengetahuan dan penelitian yang mendalam tentang pergerakan kebangsaan merupakan syarat mutlak (*Conditio sine qua non*) untuk dapat memahami dan mengerti fenomena historis tentang peristiwa-peristiwa sekitar dan saat teretusnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Demikian pula, penelitian dan pengetahuan yang mendalam tentang pergerakan kebangsaan yang terjadi di daerah-daerah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai peranan dan arti yang sangat penting terutama dalam rangka penyusunan Sejarah Nasional, khususnya pada periode tahun 1900-1942. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian yang tertuang di dalam

buku *Pola Penelitian dan Kerangka Laporan Tematis*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen P dan K, tahun 1977/1978 sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:

Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

2. Tujuan Khusus:

a. Mengumpulkan dan menyusun bahan sejarah daerah tentang zaman Kebangkitan Nasional di Daerah untuk melengkapi sejarah nasional dan memantapkan konsep-konsep yang relevan.

b. Dan seterusnya dan seterusnya.²⁾

Di samping hal tersebut di atas mempelajari dan meneliti sejarah khususnya periode pergerakan kebangsaan, adalah berhubungan erat dan tak dapat dipisahkan dengan manfaat serta guna ilmu sejarah bagi kehidupan umat manusia. Selama manusia sebagai obyek dan subyek sejarah masih mempunyai keinginan dan hasrat untuk mengetahui perbuatan serta peristiwa masa lampau bangsanya, selama itu akan terasa perlunya mempelajari sejarah bangsanya. Dan manfaat yang besar yang dapat kita peroleh dari sejarah adalah bahwa kita dapat mengkaji, bercermin dan menilai perbuatan mana yang mempunyai 'Nilai positif' dan 'Negatif'. Juga kita dapat mengetahui perbuatan mana yang merupakan 'keberhasilan' dan mana yang merupakan 'Kegagalan'. Dengan demikian kita akan dapat bertindak lebih berhati-hati dalam menentukan sikap dan langkah selanjutnya. Tepatlah apa yang dikatakan oleh seorang sejarawan besar berkebangsaan Inggris, yaitu Sir John Seeley dalam bukunya yang berjudul *The Expansion of England*, yaitu:

"We study history that we may be wise before the event", bahwa kita mempelajari sejarah, agar kita bijaksana lebih dahulu dan juga agar kita tahu ke mana kita harus berjalan".

Selanjutnya John Seeley berkata, bahwa orang yang tidak mempelajari atau mengambil pengajaran dari sejarah sebetulnya orang yang tidak bijaksana.

Jelaslah bahwa di samping tujuan yang telah tersimpul di dalam buku Pola Penelitian, maka di dalam penelitian dan penyusunan Sejarah Zaman Kebangkitan Nasional di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, secara tidak langsung diperoleh suatu manfaat yang besar, yaitu berupa pelajaran sejarah yang mempunyai nilai positif dan konstruktif. Dan manfaat ini pun dapat pula kita jadikan sebagai salah satu tujuan penelitian, agar dalam memberikan penilaian terhadap data dan faktor sejarah dapat diusahakan seobyektif mungkin.

B. MASALAH

Sebagaimana telah disinggung di muka yaitu dalam tujuan penelitian, sejarah zaman Kebangkitan Nasional yang merupakan sebagian dari perjuangan bangsa Indonesia mempunyai nilai kesejarahan yang penting, karena dasar-dasar dari kenegaraan, dan kebudayaan Indonesia dimantapkan pada zaman itu ($\pm$ tahun 1900 – 1942). Kecuali itu secara tegas dapat dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian pada zaman itu merupakan "perintisan" hingga teretusnya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dan perjuangan kebangkitan nasional itu sendiri, ternyata terjadi di seluruh daerah-daerah di Indonesia termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan berbagai corak dan ragamnya dan juga dengan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Dengan adanya keanekaragamnya corak dan bentuk pergerakan yang terjadi di daerah-daerah, dengan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda pula, maka ini adalah merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan penelitian guna pemecahannya oleh karena itulah diperlukan suatu penelitian tentang sejarah Zaman Kebangkitan Nasional di daerah-daerah secara lebih luas terperinci dan mendalam, untuk lebih mendapatkan pengertian yang mendalam mengenai zaman-zaman sesudahnya, yaitu: Zaman pendudukan Jepang dan Zaman Kemerdekaan.

Di samping masalah tersebut di atas, dalam melaksanakan penelitian Sejarah Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat juga masalah-masalah yang langsung dirasakan oleh tim, yaitu antara lain:

1. Sumber-sumber tertulis yang berupa sumber primer sangat sulit didapatkan. Sebagian besar data yang digunakan adalah

dari sumber sekunder, lebih-lebih data yang menyajikan peristiwa daerah.

2. Sumber-sumber lisan yang berasal dari para informan yang menghayati pada masa Kebangkitan Nasional itu sudah jarang kita jumpai.
3. Pada umumnya beberapa peristiwa secara analog sama seperti peristiwa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dan yang beruang lingkup nasional. Sehingga mendaerahkan peristiwa tersebut terasa tidak jujur dan kurang tepat. Tetapi walaupun demikian dalam beberapa peristiwa tidak mungkin dihindari.
4. Uraian ceritera sejarah daerah tidak mungkin melepaskan "Konteks" dan "Isi" sejarahnya dengan sejarah yang beruang-lingkup nasional.
5. Uraian ceritera sejarah daerah, khususnya pada periode sejarah -Zaman kebangkitan Nasional, ada beberapa peristiwa yang beruang lingkup nasional ternyata tidak terjadi/terdapat di daerah.

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan penelitian ini mempunyai ruang lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun obyek penelitiannya adalah Sejarah Daerah khususnya periode Kebangkitan Nasional yang terjadi dalam kurun waktu antara ± tahun 1900 – 1942 dan yang meliputi segi-segi kehidupan pemerintahan kenegaraan, masyarakat, ekonomi, seni budaya dan agama/kepercayaan.

Secara garis besar, segi-segi yang menjadi ruang lingkup penelitian tersebut akan dicoba dibicarakan:

1. Kehidupan Pemerintahan dan kenegaraan yang antara lain berisi hal-hal: pertumbuhan negara, perkembangannya sehingga menjadi negara besar, susunan pemerintahan: Status dari pimpinannya atau pemerintahan, Pengaturan di dalam negara dan hubungannya dengan negara lain.
2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat. Khususnya mengenai masalah ini akan dicoba diuraikan antara lain: pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, organisasi masyarakat, nilai-nilai sosial dan pola kehidupannya.
3. Kehidupan seni budaya. Salah satu aspek kebudayaan adalah

kegiatan kesenian yang timbul dari impuls rasa indah yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam kehidupan akan dicoba dibicarakan masalah pendidikan yang menyangkut tentang pertumbuhan dan perkembangannya, khususnya dalam masa kebangkitan nasional.

4. Alam pikiran dan kepercayaan. Tentang masalah ini akan dicoba diuraikan tentang latar belakang sejarahnya, sistem kepercayaannya termasuk pemuka agama/kepercayaan dan kegiatannya.
5. Dan lain-lain yang merupakan aktivitas sosial politik yang terjadi di daerah dalam masa kebangkitan nasional.

D. PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

1. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian sejarah Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah:
 - a. Tahap pengumpulan data, ditempuh dengan dua cara, yaitu:
 - 1) Studi Literatur, merupakan kegiatan pencatatan dan pengumpulan fakta dan data daerah serta penelitian fakta dan data tersebut yang dapat digunakan.
 - 2) Studi lapangan, terbatas pada wilayah kabupaten dan merupakan kegiatan pelengkap/tambahan dalam rangka "menguji" dan "mencek" terhadap fakta dan data yang telah ada. Kecuali itu juga merupakan usaha kegiatan untuk mencoba menggali dan melengkapi fakta dan data yang baru.
 - b. Tahap pemilihan/penyeleksian fakta dan data.
 - c. Tahap pengolahan/penyusunan fakta dan data (*Draft data/naskah*).
 - d. Tahap penelitian draft.
 - e. Tahap editing naskah.
2. Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari:
 - a. Ketua Tim : Drs. Tashadi (Cabang I, Lembaga Sejarah dan Antropologi, Yogyakarta).

- b. Anggota : Drs. Soeratmin
Mulyono B.A.
Soekirman B.A.
Sasmangun
Poliman B.A.
Semuanya berasal dari Cabang I Lembaga
Sejarah dan Antropologi, Yogyakarta.

3. Metode:

Dalam melaksanakan penelitian ini metode yang digunakan adalah: Eksplorasi literatur deskriptif, (*Comparative methode*) Metode perbandingan.

Adapun analisa yang digunakan adalah "deskriptif-Sejarah".

E. HASIL AKHIR

Naskah ini pada akhirnya merupakan hasil kerja sama antara berbagai pihak. Naskahnya yang asli digarap oleh suatu Tim Penyusunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang penggarapannya mengikuti Pola dan kerangka seperti ditentukan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Pusat. Selanjutnya terhadap naskah ini di dalam penyempurnaan dan penilaian bersama, baik oleh Tim dari Pusat (P3KD) maupun oleh Tim Penyusun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penyempurnaan dan penilaian itulah yang dijadikan pedoman untuk lebih menyempurnakannya lagi dalam pekerjaan editing.

Sedangkan mengenai pekerjaan editing itu sendiri kegiatannya diarahkan kepada beberapa segi, yaitu: materi atau bahan, kebahasaan dan pendekatan. Segi materi didasarkan pada hasil penilaian, sedang segi kebahasaan diperhatikan beberapa hal seperti: ejaan, istilah dan keterbacaan. Dalam menulis naskah sejarah daerah, kiranya pendekatan regio sentris merupakan cara yang wajar, dan dari naskah ini dapatlah dikemukakan, bahwa para penyusun sudah berusaha mendekati permasalahannya dengan cara demikian.

Selanjutnya naskah ini hendaknya dipandang sebagai pembuka jalan atau perintisan ke arah penelitian dan penyusunan sejarah daerah yang lebih baik dengan berbagai kemungkinan yang lebih kaya, lebih beragam dan lebih memenuhi sasaran. Perlu juga dikemukakan, bahwa meskipun di dalam naskah ini hal-hal mengenai sejarah nasional masih kelihatan agak jelas, namun hendaknya

dilihat, sebagaimana dikemukakan oleh Tim Penyusunnya sendiri, dalam hubungannya dengan latar belakang peristiwa ataupun konteks permasalahan kesejarahannya. Sebaliknya bahan-bahan mengenai sejarah daerah itu sendiri akan merupakan bahan yang berguna untuk menyusun sejarah nasional pada tema kebangkitan Nasional. Hasil akibat ini secara keseluruhan dapat dipandang sebagai sesuai dengan *Terms of Reference* sebagaimana dijabarkan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

BAB II

KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD 19

A. PEMERINTAHAN

Pada akhir abad 18 dan tepatnya pada tahun 1799 VOC dibubarkan dengan menanggung saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Dengan demikian maka secara resmi pemerintahan di Indonesia pindah dari tangan VOC ke tangan pemerintahan Belanda. Sejak itu, yaitu pada awal abad 19 mulailah pemerintahan kolonial baru Hindia Belanda di Indonesia sebagai penguasa dalam melaksanakan pemerintahan kolonialnya itu, ditunjuklah seorang Gubernur Jendral.

Agar mendapatkan gambaran dan pengertian yang lebih terang dan jelas, di sini akan kami berikan sedikit uraian tentang struktur pemerintahan Hindia Belanda sebagai berikut:

Sebagai tanah jajahan, Indonesia diperintah dari negeri Belanda. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang Undang Dasar Belanda. Untuk melaksanakan pemerintahan kolonialnya itu, kemudian dibuatlah "Reglement Pemerintahan Hindia Belanda". Pemerintahan Hindia Belanda itu secara administratif ada di bawah Kementerian Jajahan di Den Haag.

Tentang anggaran Belanja pemerintahan Hindia Belanda sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus mendapat pengesahan dari Staten Generaal di negeri Belanda. Untuk lebih tertib dan lancarnya jalannya pemerintahan Hindia Belanda, maka dibentuklah aparat-aparat pemerintahan dengan struktur sebagai berikut:

Pemerintahan dikepalai oleh Gubernur Jendral, dengan di sampingnya terdapat *Raad van Indie* (Dewan Hindia) dan yang terdiri dari empat anggota. Di bawahnya terdapat berbagai departemen dari pemerintahan umum, yaitu:

1. Departemen Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Departemen Keuangan.
3. Departemen Justisi.
4. Departemen Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan (Urusan Perekonomian)
5. Departemen Pengajaran, Kesehatan dan Ibadat.
6. Departemen Pekerjaan Umum.

7. Departemen Perusahaan Gubernemen.
8. Departemen Pertambangan.

Terlepas dari aparat pemerintahan tersebut di atas terdapatlah apa yang dinamakan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Pengawas Keuangan Umum.

Di antara Departemen-departemen tersebut, maka Departemen Pemerintahan Dalam Negeri merupakan aparat pemerintahan yang sangat penting, karena instansi tersebut berhubungan dan berfungsi memelihara kontak langsung dengan penduduk Indonesia. Kontak ini dilakukan melalui korps pejabat pamongpraja Belanda, Residen, Asisten Residen, kontrolir dan korps pejabat pamongpraja Indonesia yaitu: Bupati, Wedana, Asisten Wedana dan seterusnya. Keadaan ini berlaku baik di daerah-daerah di Jawa maupun di luar Jawa, dengan kemungkinan terdapat perbedaan tentang nama pangkat pejabat-pejabat bumi putera itu.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, di samping adanya "pemerintahan" di bawah kekuasaan Residen dan Gubernur Jenderal dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda, juga terdapat "pemerintahan Kesultanan/Kerajaan". Pemerintahan Kesultanan yang kemudian dikenal dengan "Kerajaan Mataram" didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1575. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung (tahun 1613–1645). Pada waktu itu wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Barat. Dalam perkembangannya, ternyata keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan dan dikembangkan lebih besar lagi oleh para raja penggantinya. Melainkan makin lama makin mengalami kemunduran dan daerah wilayahnya makin sempit. Hal ini di samping faktor "intern" yaitu faktor pribadi dari para raja penggantinya, juga karena faktor "ekstern" yaitu makin kuatnya kedudukan pemerintah kolonial Belanda yang selalu berusaha menanamkan pengaruh dan melemahkan kekuatan kerajaan.

Untuk itulah maka Belanda sering mencampuri urusan pemerintahan kerajaan, dan sedikit demi sedikit mengadakan intervensi yang berakibat makin menyempitnya wilayah kekuasaan kerajaan, karena aneksasi yang dilakukan oleh Belanda. Satu demi satu daerah Mataram jatuh ke tangan kekuasaan Belanda. Akhirnya terjadi keadaan yang sangat menyedihkan yaitu dengan berakhirnya Perang Giyanti pada tahun 1755, maka Kerajaan Mataram dipecah

menjadi dua bagian, ialah Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Dan pada tahun 1757 wilayah Kerajaan Surakarta terpecah lagi dengan munculnya kekuasaan Mangkunegaran. Demikian pula nasib yang dialami oleh kerajaan Yogyakarta. Dalam tahun 1813 kerajaan Yogyakarta terpecah lagi dengan munculnya kekuasaan Paku Alam. Dengan demikian sejak tahun 1813 di Daerah Yogyakarta terdapat tiga kekuasaan yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Pakualaman dan Pemerintahan Kolonial Belanda dengan Residen¹⁾ sebagai alat kekuasaannya. Jelaslah bahwa di samping kekuasaan Belanda, daerah Yogyakarta menurut sejarahnya terdapat dua pemerintahan yang telah berdiri lama dan mempunyai kekuasaan otonom, yaitu pemerintahan Kasultanan Yogyakarta dan Pemerintahan Pakualaman.

Dalam pemerintahan kerajaan raja mempunyai kekuasaan sentral. Mula pertama, pada waktu kerajaan didirikan, kedudukan dan kekuasaan raja didasarkan pada kharisma dari kelebihan kemampuan pribadinya (Panembahan Senopati). Tetapi selanjutnya, yaitu pada masa-masa kemudiannya otoritas raja itu telah diinstitusikan menjadi "tradisi"²⁾. Dengan demikian maka pengangkatan raja baru, lebih didasarkan pada keturunan atau hak waris menurut tradisi. Jadi kesahan (*legitimacy*) kedudukan dan kekuasaan raja itu didapatkan karena warisan menurut tradisi. Sudah barang tentu hal yang demikian ini membawa akibat yang positif dan negatif. Karena sesuai dengan kenyataannya, bahwa ada juga di antara raja-raja tersebut yang mempunyai kecakapan dalam pemerintah, kebermanian, kepribadian maupun sifat-sifat yang baik, tetapi ada pula raja-raja yang mempunyai pribadi dan sifat yang sebaliknya. Sehubungan dengan itu, maka kepribadian dan sifat yang baik serta kemampuan atau kecakapan dalam memerintah mempunyai pengaruh besar atas otoritas dan wibawa raja. Demikian pula loyalitas baik dari kalangan istana, para pejabat birokrasi maupun rakyat akan dapat dipelihara dan dijaga. Sebaliknya, sifat pribadi dan tindakan yang tidak baik dan tidak bijaksana dari raja, akan dapat menimbulkan ketegangan dan rasa tidak puas kalangan istana, para pejabat birokrasi maupun di kalangan rakyat.

Menurut tradisi yang berlaku di dalam istana, yang berhak menjadi pengganti raja adalah putra laki-laki tertua atau satu-satunya putra laki-laki dari raja dengan isteri permaisuri (*garwa padmi*). Tetapi apabila permaisuri tidak mempunyai putra laki-laki, maka putra laki-laki tertua dari isteri selir (*garwa ampeyan*)

dapat diangkat sebagai pengganti raja. Apabila kedua-duanya tidak ada, maka yang berhak sebagai pengganti raja adalah saudara laki-laki dari raja, paman atau saudara tua dari ayahnya. Syarat dan ketentuan itu tidak boleh diubah ataupun diganggu-gugat, karena sudah merupakan tradisi yang harus ditaati. Walaupun demikian, sering pula terjadi penyimpangan dari ketentuan tradisi tersebut, bilamana calon pengganti raja misalnya sakit ingatan, cacad badan dan sebagainya.

Di dalam Keraton, Sultan atau raja mempunyai kedudukan yang istimewa, karena jabatan Sultan atau raja itu merupakan jabatan yang tertinggi dan dianggap keramat.

Kekuasaan dan kewibawaan raja diperkuat dengan adanya pandangan yang terdapat di kalangan masyarakat bahwa raja adalah sebagai pusat kosmos dan dari diri raja terpancar kekuatan yang berpengaruh terhadap alam maupun masyarakat sekitarnya. Kecuali itu adanya anggapan yang ditanamkan dari kalangan keluarga raja, bahwasanya raja adalah keturunan nabi dan dewa, dan yang kemudian dikaitkan dengan anggapan kepercayaan magis dari rakyat tentang *wahyu raja (puhung ratu)* serta konsep tentang "pewaris keturunan darah raja" (*trahing kusuma rembesing madu*) maka akan lebih memperkuat dan memperkokoh *legitimacy* (kesahan) - nya sebagai Raja.³⁾

Kewibawaan raja ini lebih diperbesar lagi dengan adanya benda-benda pusaka keraton yang dianggap keramat. Juga anggapan adanya hubungan mitis antara raja-raja Mataram dengan Ratu Kidul (Dewi Lautan Selatan) yang diwujudkan misalnya dalam bentuk *tradisi upacara Labuhan* yang dilakukan oleh Kasultanan Yogyakarta, menunjukkan masih dipeliharanya hubungan antara kerajaan manusiawi dengan kerajaan roh halus (Ratu Kidul). Hubungan mitis seperti ini menempatkan diri raja sebagai manusia yang memiliki kemampuan dan kekuatan di atas kodrat.

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda, sebelum raja atau Sultan memerintah maka terlebih dahulu harus mengadakan pernyataan politik dan menanda tangani kontrak politik tentang kekuasaan Sultan. Isi kontrak politik ini ditentukan oleh Gubernur Jendral yang mendapat persetujuan dari Sultan. Pengangkatan Sultan dilakukan dalam suatu upacara penobatan dengan disaksikan oleh Residen/Gubernur. Yang membacakan surat keputusan pengangkatan dari pemerintah Hindia Belanda adalah Sekretaris Daerah bangsa Belanda. Surat itu menyatakan bahwa putra mah-

kota dinobatkan menjadi Sultan dengan gelar *Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah* yang ke . . . Gelar ini menunjukkan bahwa Sultan bertindak selaku Panglima Perang berkewajiban sebagai pengatur agama serta menunjukkan bahwa dirinya masih keturunan Nabi. Setelah dinobatkan, Sultan kemudian duduk di *Dampar Kencana* dan selanjutnya Gubernur menyematkan bintang pusaka kerajaan Yogyakarta di dada Sri Sultan. Upacara ini diakhiri dengan pembacaan doa kesejahteraan oleh pengulu. Setelah selesai Sultan kembali ke Keraton dan kemudian mengucapkan sumpah serta menandatangani kontrak politik di muka Residen/Gubernur.

Dalam melaksanakan pemerintahan, raja atau Sultan dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi yang berada di bawahnya dan juga oleh para kerabatnya.⁴⁾ Adapun hierarki jabatan-jabatan itu mengikuti sistem pembagian wilayah, sebagai berikut:

1. Wilayah *Kutanegara* atau disingkat *Kutagara* merupakan pusat kerajaan. Di situ tinggalah raja beserta keluarganya dan para pejabat tinggi kerajaan. Daerah wilayah ini sering pula disebut Daerah "*Norowito*", yang berarti daerah tempat orang mengabdikan.
2. Wilayah *Negara Agung* merupakan daerah yang ada di sekitar Kutagara. Wilayah Kutagara dengan wilayah Negara Agung ini dapat dikatakan sebagai daerah inti kerajaan. Di kedua wilayah ini terdapatlah *tanah-tanah lungguh* para bangsawan Kraton atau para pejabat tinggi kerajaan.⁵⁾
3. Wilayah *Mancanegara* adalah daerah yang berada di luar Negara Agung, tetapi tidak termasuk daerah pantai. Daerah wilayah ini dibagi dalam dua bagian yaitu Wilayah *Mancanegara Wetan* (meliputi daerah-daerah yang berada di Jawa Timur) dan Wilayah *Mancanegara Kilen* (meliputi daerah-daerah yang berada di Jawa Tengah).⁶⁾
4. Wilayah *Pasisiran* adalah wilayah kerajaan yang terletak di sepanjang pantai utara. Daerah wilayah ini dibagi dalam dua bagian ialah daerah *Pasisiran Wetan* dan daerah *Pasisiran Kilen*.⁷⁾ Kedua daerah ini dibatasi oleh sungai Tedunan atau Serang yang mengalir di antara Demak dan Jepara.

Berdasarkan adanya pembagian wilayah tersebut di atas,

maka pejabat-pejabat negara di kerajaan Mataram disusun sebagai berikut:

1. Pejabat-pejabat dalam Keraton dan Daerah Kutagara:

Untuk pemerintahan dalam istana pengurusannya dibebankan pada empat orang *Wedana Dalam (Wedana Lebet)* ialah: *Wedana Gedong Kiwo, Wedana Gedong Tengen, Wedana Keparak Kiwo* dan *Wedono Keparak Tengen*. Pada sebelum tahun 1744 di atas ke-empat jabatan itu ada jabatan *Patih Dalam (Patih Lebet)* yang tugasnya mengkoordinasi tugas *Wedono-wedono* tersebut. Tetapi sejak tahun 1755 jabatan *Patih Lebet* tersebut dihapuskan.

Para *Wedana Gedong* bertugas mengurus masalah keuangan dan perbendaharaan Kraton, sedang *Wedana Keparak* bertugas mengurus masalah keprajuritan dan Pengadilan. Adapun pembagian tugas antara *kiwa* dan *tengen* dari Kawedanan-kawedanan tadi adalah kurang jelas. Biasanya para *Wedana Lebet* itu memakai gelar *Tumenggung*, dan jika masih termasuk keluarga raja memakai gelar *Pangeran*.

Untuk mengurus pemerintahan di Kutagara, raja mengangkat dua orang *Tumenggung*. Kedua orang *Tumenggung* ini langsung di bawah perintah raja. Kedudukan kedua *Tumenggung Kutaraga* ini cukup penting dan bersama-sama dengan ke-empat *Wedana Lebet* mereka merupakan anggota *Dewan Tertinggi Kerajaan*.

2. Pejabat-pejabat dalam Negara Agung:

Pejabat tertinggi yang bertugas mengurus administrasi pemerintahan Negara Agung adalah *Patih Jawi*.

Dialah yang bertanggung jawab secara langsung kelancaran jalannya pemerintahan di luar Kutagara. Kecuali itu ia bertanggung jawab pula atas kelancaran dan keberhasilan urusan pajak dan penyerahan tenaga lasykar.

Di bawah kedudukan *Patih Jawi* terdapat para *Wedana Jawi*. Yang jumlahnya sama dengan jumlah bagian-bagian yang ada di dalam Negara Agung. Sedang namanya menurut nama daerah yang menjadi wewenangnya. Selanjutnya di tiap daerah dalam Negara Agung ada *Bupati* dengan pejabat-pejabat bawahannya. Sedang di tiap tanah lungguh milik bangsawan Kraton diangkatlah seorang pejabat dengan gelar *Demang* atau *Kyai Lurah*.

3. Pejabat-pejabat di wilayah Mancanegara.

Baik di daerah-daerah wilayah Mancanegara Wetan maupun Mancanegara Kilen masing-masing dikepalai oleh seorang atau lebih dari seorang Bupati dan yang biasanya memakai gelar Tumenggung atau *Raden Arya*. Jumlah Bupati di tiap daerah tidak sama, tergantung pada luas atau tidaknya daerah yang diurusnya. Sebagai contoh daerah Kediri yang luasnya 4.000 karya hanya dikepalai oleh seorang Bupati, sedang daerah Madiun yang luasnya 16.000 karya, dikepalai oleh dua orang Bupati. Dan daerah yang tidak begitu luas, cukup dikepalai oleh seorang Mantri atau seorang Kliwon

Para Bupati di wilayah Mancanegara tersebut dikepalai oleh seorang Wedana Bupati Mancanegara yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi semua Bupati bawahannya. Ia bertanggung jawab pada raja atas keberhasilan pemerintahan daerah dan kelancaran pengumpulan penghasilan daerah yang harus diserahkan ke pusat.

4. Pejabat-pejabat di daerah Pesisiran.

Di tiap daerah wilayah Pesisiran ini masing-masing dikepalai oleh seorang Wedana Bupati. Untuk wilayah Pasisiran Wetan, Wedana Bupati bertempat kedudukan di Jepara, sedang untuk Pasisiran Kilen berkedudukan di Tegal. Sebagaimana halnya dengan Wedana Bupati di wilayah Mancanegara, maka Wedana Bupati Pasisiran juga bertugas mengawasi dan mengkoordinasi Bupati-bupati Kepala Daerah yang ada di bawah yurisdiksinya.

Penguasa-penguasa daerah Pasisiran ini selain memakai gelar Adipati atau Tumenggung, mereka ada juga yang memakai gelar *Kyai Demang* atau *Kyai Ngabehi*. Gelar ini terutama digunakan bagi mereka yang menjabat sebagai Bupati. Sebagai contoh Kyai Ngabehi Wongsorojo yang menjabat Bupati Semarang pada sekitar tahun 1677.

Selain jabatan-jabatan Kepala Daerah tersebut di atas, masih terdapat pula jabatan lainnya baik tingkat tinggi maupun tingkat menengah dan tingkat bawah, yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri dalam birokrasi kerajaan.

Demikianlah keadaan susunan pemerintahan dan hierarki jabatan-jabatan birokrasi yang terdapat pada jaman kera-

jaan Mataram. Keadaan yang demikian itu tidaklah selalu stabil melainkan selalu mengalami perubahan sesuai dengan situasi politik pada jamannya. Dengan adanya intervensi dan aneksasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kolonial Belanda dan juga campur tangannya pemerintahan kolonial terhadap urusan pemerintahan Kerajaan, menyebabkan makin mengecilnya wilayah kerajaan.

Kecuali itu dengan adanya perombakan dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Daendels, maka terjadilah perubahan pemerintahan di Jawa. Oleh Daendels Pulau Jawa dibagi atas sembilan prefektur dan masing-masing prefektur dibagi atas 31 kabupaten. Dan Bupati-bupati serta pegawai-pegawai itu kemudian digaji dan mereka berstatus sebagai *gouvernement ambtenaren* (pegawai pemerintah). Mereka tidak diperkenankan menerima hadiah, upeti atau sejenisnya baik yang berasal dari bawahan atau rakyatnya. Tindakan pelanggaran dari ketentuan tersebut, akan mendapatkan sanksi hukum yang berat. Sebagai usaha preventif untuk mencegah adanya tindakan korupsi dan jenis-jenis penyelewengan lain, maka selalu diadakan kenaikan upah terhadap gaji pegawai tersebut.

Pegawai-pegawai dan Bupati-bupati itu tidak dapat lagi bertindak bebas di daerahnya, sehingga pengaruh mereka di kalangan rakyat menjadi berkurang. Bahkan lebih jauh lagi Daendels berusaha mematahkan hubungan antara Bupati dengan rakyatnya yaitu dengan tindakannya yang berupa mengubah *hubungan ketuanan* menjadi *hubungan kepegawai-an* antara bupati dengan pemerintah.

Terhadap raja-raja Jawa termasuk pula Kesultanan Yogyakarta, Daendels sering melakukan tindakan yang sangat merugikan dan bahkan kadang-kadang merendahkan dan menjatuhkan kewibawaan raja. Sebagai contoh: Sebelum Daendels datang Residen-residen Belanda di Jawa bila mereka mengunjungi raja dengan resmi, diharuskan:

- a. Berdiri mempersembahkan minuman, sedangkan raja-raja tetap tinggal duduk.
- b. Berjalan kaki dan tidak boleh naik kereta, melalui Alun-alun.
- c. Duduk lebih rendah daripada tempat duduk para raja.

Ketentuan dan tata cara tersebut di atas menurut Daendels sangat merendahkan derajat kekuasaan Belanda atau *het Nederlandsch gezag*. Karena itulah kemudian Daendels menetapkan peraturan tentang upacara baru pada tanggal 28 Juli 1808.⁸⁾ Dalam peraturan itu ditetapkan bahwa Residen dilarang mempersembahkan sendiri minuman atau sirih melainkan menyuruh salah seorang pesuruh untuk mempersembhkannya (kepada raja). Jika Residen atau Menteri hendak mengunjungi Keraton, ia harus datang dengan kereta dan dengan disertai 12 orang penunggang kuda. Tempat duduk Residen harus sejajar dengan tempat duduk raja. Jika Residen sampai dekat raja, maka raja harus berdiri menyambutnya.

Ketentuan dan peraturan baru Daendels tersebut membuat hati Sultan menjadi geram dan marah. Sultan menganggap bahwa Daendels dengan peraturan barunya itu sangat menghinakan dan merendahkan martabat dan kewibawaan raja. Ia dengan tegas menolak peraturan baru tersebut. Dengan demikian maka timbul perselisihan antara Sultan Yogyakarta yang pada waktu itu Sultan Hamengku Buwono II dengan menteri yang ditempatkan di Yogyakarta. Adanya perselisihan ini dianggap bahwa Sultan telah menentang Belanda, akibatnya Sultan dipanggil ke Batavia, tetapi melarikan diri. Sultan Yogyakarta dimintai pertanggungjawaban atas kejadian itu dan Belanda mengajukan tuntutan kepadanya. Karena Sultan menolak tuntutan Daendels, maka Daendels mengambil tindakan dan Sultan diturunkan dari tahtanya dan diganti oleh putra mahkota.

Demikianlah tindakan dan campurtangan pemerintah kolonial terhadap pemerintahan Kasultanan Yogyakarta yang ternyata sudah terlalu "jauh" dan "dalam". Jelaslah bahwa walaupun menurut kenyataan di Yogyakarta berdiri pemerintahan Kasultanan dan Pakualaman, tetapi ternyata tidak mendapatkan otonomi yang penuh karena ruang gerak dan kebebasannya sangat terbatas. Kecuali itu selalu ikut campurtangannya pemerintah kolonial terhadap segala urusan pemerintahan Kasultanan dan Pakualaman benar-benar sangat menyakitkan dan menjengkelkan serta menimbulkan pertentangan, dan perasaan dendam yang mendalam. Campurtangannya pemerintah kolonial terhadap pemerintahan kerajaan

ini, ternyata dilakukan pula oleh Raffles.

Pada waktu Raffles berkuasa di Indonesia (tahun 1811 – 1816), yang menjadi raja di Yogyakarta adalah Sultan Sepuh atau Sultan Hamengku Buwono II. Beliaulah yang dulu diturunkan dari tahtanya oleh Daendels, tetapi setelah Daendels meninggalkan Jawa, kemudian beliau menduduki kembali tahtanya. Pada mulanya Raffles mendiamkan dan menyetujui tindakan Sultan Sepuh tersebut.⁹⁾ Tetapi ketika Sultan Sepuh dalam pemerintahannya melakukan tindakan yang tidak menyenangkan Raffles maka Yogyakarta kemudian diserang (tahun 1812) dan harta benda serta kekayaan keraton dirampasnya. Walaupun pertahanan Keraton diperkuat dengan 8.000 prajurit, ternyata dapat dihancurkan oleh tentara Raffles. Sultan kemudian diturunkan dari tahtanya dan selanjutnya dibuang ke Pulau Pinang, dan kemudian dipindahkan ke Ambon. Sebagai penggantinya kemudian diangkatlah Sultan Raja, dan setelah menduduki tahtanya kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono III. Tetapi sebagai imbalannya, ia harus menandatangani suatu perjanjian dengan Raffles yang sangat merugikan bagi Sultan.¹⁰⁾

Sementara itu Pangeran Notokusumo, seorang tokoh yang pro Inggris dan selalu membantu Inggris dengan setia maka atas jasa dan kesetiaannya itu, kemudian Raffles mengangkat beliau menjadi raja dengan gelar Paku Alam. Adapun daerah kekuasaannya adalah sebagian tanah dari Sultan Raja yang diberikan kepadanya dan yang disebut daerah Paku Alaman.

Perubahan dan perombakan dalam bidang pemerintahan yang dulu pernah dirintis oleh Daendels, maka oleh Raffles dilanjutkan dan bahkan lebih diperinci lagi. Daerah-daerah yang dulu disebut prefektur kemudian diganti menjadi residensi dan dikepalai oleh seorang Residen. yang diberi kekuasaan atas daerahnya serta bertanggungjawab kepada gubernemen Inggris. Tiap residensi dibagi atas distrik (sebutan sekarang ialah Kabupaten) yang dikepalai oleh seorang Bupati dan sebuah distrik dibagi atas *divisien* (sekarang disebut Kecamatan), yang dikepalai oleh seorang Wedana. (sekarang disebut Camat). Adapun penduduk tiap desa berhak memilih kepala desanya sendiri, tetapi bila kepala desa ini tidak disetujui oleh Residen, maka penduduk harus memilih orang lain.

Dengan demikian jelas menunjukkan bahwa Raffles telah berusaha dan mencoba mengetrapkan tata cara baru dan sistem modern dalam bidang pemerintahan.

B. SOSIAL BUDAYA (PENDIDIKAN, SENI-BUDAYA)

1. Pendidikan

Pada abad XIX pendidikan dan pengajaran di Indonesia (pada waktu itu Hindia Belanda) boleh dikata masih sangat kurang. Hal ini selaras dengan politik pemerintah pada waktu itu yang menghendaki agar rakyat Indonesia sebagai rakyat yang terjajah, tetap bodoh dan terbelakang. Sebab apabila rakyat Indonesia diberikan pendidikan dan pengajaran yang baik, maka dikhawatirkan akan dapat mendesak dan menghancurkan pemerintah kolonial Belanda. Adanya perasaan dan pikiran yang demikian itu benar-benar tertanam di dalam kalbu pejabat-pejabat pemerintah kolonial dan sangat menghantui jalan pikirannya. Karena itulah rakyat Indonesia tetap dibiarkan bodoh dan melarat.

Dengan adanya perubahan politik yang terjadi di negeri Belanda pada pertengahan abad XIX, yaitu dengan kemenangan yang dicapai oleh golongan Liberal, maka terjadilah perubahan terhadap politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Khususnya dalam bidang pendidikan, mulai pula diadakan, walaupun masih dalam tingkat yang minimal. Dapat dikatakan bahwa baru pada tahun 1850 pemerintah Hindia Belanda mulai mencantumkan dalam anggaran belanjanya sebagian kecil untuk kepentingan pendidikan anak-anak Indonesia.¹¹⁾ Menurut kenyataan, menunjukkan bahwa dalam tahun 1900 anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan dan pengajaran kepada rakyat Indonesia baru 1,1%¹²⁾ Jelaslah bahwa walaupun sudah kurang lebih 50 tahun lamanya sejak pendidikan pertama kali diberikan kepada rakyat ternyata anggaran yang diberikan untuk itu masih sangat minim.

Dalam pada itu dengan diintroduksikannya "Politik Etika" oleh Van Deventer, di mana dalam salah satu triloginya terdapat unsur *educatie*, maka masalah pendidikan bagi rakyat makin mendapat perhatian. Kecuali itu dengan makin kompleksnya sistem pemerintahan kolonial dan juga makin pesatnya pertumbuhan perusahaan asing di Indonesia (Hindia Belanda), maka kebutuhan akan tenaga pegawai yang sedikit terdidik makin dirasakan. Hal itulah yang sedikit banyak ikut mendorong didirikannya sekolahan.

Pada mulanya pemerintah kolonial mengadakan pendidikan dalam taraf pendidikan rendah, tetapi kemudian ternyata memerlukan pula tenaga terdidik dalam taraf menengah dan akhirnya pendidikan tinggi. Semua tingkat pendidikan ini diadakan semata-mata untuk memenuhi keperluan pemerintah kolonial sendiri. Kecuali itu menurut apa yang dikatakan oleh van der Prijs, juga "untuk membentengi Belanda dari *Volkano Islam*"¹³⁾

Pada waktu itu sekolah yang mula-mula diperkenalkan ialah Sekolah Kelas Dua, yang akan mendidik calon-calon pegawai rendah dan Sekolah Kelas Satu, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan masyarakat atasan. Di samping itu ada pula Sekolah Rendah yang khusus disediakan bagi anak Eropa. Adapun mata pelajaran yang diberikan di sekolah itu hanyalah sekedar supaya dapat membaca, menulis dan sedikit pengetahuan berhitung.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan masyarakat Jawa khususnya dan keadaan rakyat Indonesia umumnya terutama dalam lapangan pendidikan pada akhir abad XIX dan awal abad XX, di sini akan kami kutipkan catatan hasil penelitian tentang orang-orang yang dapat membaca dan menulis di pulau Jawa, yang pernah dilakukan oleh Mahlenfeld dan termuat dalam harian de Locomotief sebagai berikut:¹⁴⁾

Di pulau Jawa dari 1000 orang, rata-rata hanya 15 orang yang dapat membaca dan menulis. Bila perempuan turut dihitung, jumlahnya jadi 16. Di daerah Madiun dari 1000 orang hanya 24 yang tidak buta huruf, di Jakarta hanya 9 orang, di daerah Madura 6 orang, di daerah Tangerang 1 orang, di daerah Jatinegara 1 orang dan di daerah Karawang juga 1 orang".

Melihat hasil catatan-catatan tersebut di atas sungguh sangat menyedihkan. Keadaan yang demikian itu menunjukkan betapa kejamnya politik pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Mereka semata-mata hanya mengeksploitasi tenaga dan kekayaan rakyat, tetapi sama sekali tidak atau memikirkan nasib rakyat.

Bagaimanakah halnya dengan keadaan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan yang terdapat di daerah Yogyakarta pada sekitar abad 19 itu? Apakah juga mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh daerah-daerah yang lain?

Untuk daerah Yogyakarta pertumbuhan dan perkembangan pendidikan pada abad 19 dan awal abad 20 itu, agak berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Mengingat bahwa Yogyakarta merupakan pusat Keraton (Kasultanan dan Pakualaman) maka keadaan pertumbuhan dan perkembangan pendidikannya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Sebelum tahun 1900 di dalam kota Yogyakarta terdapat *Sekolah Asli* yaitu *Sekolah Tamanan* dan *Sekolah Madyapenganti*. Kecuali itu juga ada dua Sekolah Gubermen (Sri Menganti dan Pagelaran), dua Sekolah Partikelir (dalam daerah Kasultanan). Jadi kesemuanya berjumlah 12 buah sekolah. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan pendidikan dan pengajaran di daerah Yogyakarta, di sini akan kami kemukakan jenis Sekolah-sekolah yang terdapat di daerah Yogyakarta sebagai berikut:

a. Sekolah Tamanan

Sekolah Tamanan ini terdapat di dalam Istana (Keraton) Yogyakarta dan didirikan sejak tahun 1757. Adapun daftar mata pelajaran yang diberikan di sekolah ini sebagai berikut:

- 1) Bahasa dan Kesusasteraan Jawa Baru dan Kawi.
- 2) Sejarah Keraton-keraton di tanah Jawa.
Kedua pelajaran tersebut di atas diberikan oleh para abdi dalem *Reh Kawedanan Kapunjanggaan* yang diketuai oleh Tumenggung Tambakbojo.
- 3) Menyanyi (nembang) bagian teori. Pelajaran ini diberikan oleh para pesinden, abdidalem Kawedanan Reh Karawitan, yang dipimpin oleh seorang Wedana.
- 4) Tata Negara.
- 5) Undang-Undang Sepuluh.
- 6) *Angger Pradata* dan *Angger Pidana* (Hukum Perdata dan Hukum Pidana). Pelajaran yang tersebut pada nomor 4 s/d 6 diberikan oleh para *Jaksa* dan *Suragama*. Kedua golongan ini adalah merupakan abdidalem *Kawedanan Reh Pancaniti* yang diketuai oleh Tumenggung Sudjanapura.
- 7) Keagamaan/mengaji. Pelajaran ini diberikan oleh para abdidalem *Reh Kawedanan Rapangulon*, yang dipimpin oleh Kangjeng Kyai Pengulu Diponingrat.

8) Mata pelajaran tentang ketenteraan, pertanian dan kebudayaan.

Jika dilihat dari mata pelajaran yang diberikan di Sekolah Tamanan tersebut di atas nampak bahwa sekolah ini telah dapat dikatakan maju. Tetapi sayang sekali dalam perkembangannya mata pelajaran yang diberikan makin lama makin dikurangi jumlahnya. Dan sejak Ngabei Djajengwisraba menjabat Kepala Sekolah Tamanan tersebut, matapelajaran yang diberikan tinggal dua macam yaitu membaca huruf Jawa dan agama/mengaji (membaca huruf Arab). Bahkan akhirnya sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, Sekolah Tamanan ini tidak dapat hidup lanjut.

b. Pendidikan dalam Pura Paku Alaman

Semenjak Pemerintah Kadipaten Paku Alaman berdiri (tahun 1813) maka sangat dirasakan kebutuhan akan tenaga pegawai yang terdidik. Untuk itulah maka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arja Paku Alam I (Kangjeng Pangeran Notokusumo) dengan dibantu oleh beberapa orang pegawai di antaranya Ngabei Kawiredjo dan Kyai Haji Mustahak, memberikan pelajaran kepada para putra dan sentana. Ternyata usaha ini dapat membawa hasil yang baik dan dapat berjalan terus dalam lingkungan Pura Paku Alaman. Bahkan pada masa KGPAA Paku Alam II perkembangan dan kemajuannya dapat menunjukkan hasil yang memuaskan. Akhirnya dalam perkembangannya sejak awal abad 20 yaitu masa pemerintahan KGPAA Paku Alam VII, dikembangkanlah pendidikan kebangsaan yang berhubungan langsung dengan adat naluri, kebudayaan dan kesenian peninggalan dari para leluhurnya.

c. Sekolah Partikelir

Yang dimaksud dengan Sekolah Partikelir ini adalah sekolah-sekolah yang didirikan atas inisiatif rakyat sendiri. Berdasarkan penyelidikan sekolah-sekolah partikelir (Sekolah Rakyat) ini telah ada dan berdiri baik di dalam maupun di luar kota Yogyakarta pada sebelum tahun 1900.¹⁵⁾

Tentang kapan dan oleh siapa sekolah-sekolah itu didirikan, serta sampai seberapa tinggi dan luasnya mata pelajaran yang diberikan masih belum dapat diketahui dengan pasti. Adapun tentang keadaan dan berdirinya sekolah-sekolah tersebut dapat

kita ketahui dari orang-orang yang pernah belajar di sekolah itu sebagai berikut:

- 1) Gedung sekolah
Pada tiap rumah bangsawan dan pembesar baik yang berada di dalam maupun di luar kota, selalu terdapat suatu bangunan yang khusus disediakan untuk rumah sekolah.
- 2) Alat-alatnya
Terdiri dari beberapa meja pendek dan panjang dan yang dapat digunakan untuk duduk bersila kurang lebih lima orang anak. Satu papan tulis untuk tiap klas. Kapur tulis yang masih *prongkolan* (masih berupa batu).
- 3) Daftar pelajaran
Pada waktu itu mata pelajaran yang diberikan ialah membaca, menulis huruf Jawa, bahasa, berhitung, nembang (menyanyi).
- 4) Guru
Para guru terdiri dari Kepala Sekolah dan dibantu oleh beberapa orang guru. Sedangkan tentang asal pendidikan dari para guru itu tidak dapat diketahui dengan jelas. Berbeda dengan pendidikan dewasa ini, maka tahun permulaan pelajaran pada waktu itu dimulai pada 1 Syawal dan berakhir pada akhir bulan Ruwah.
- 5) Uang Sekolah
Khususnya tentang uang sekolah, diadakan suatu peraturan sebagai berikut: Bagi anak-anak priyayi diwajibkan membayar uang sekolah sebesar f.0,25, dan bagi anak rakyat harus membayar uang sekolah sebesar f.0,15 tiap bulan.

d. Sekolah Gubermen

Riwayat tentang keadaan dan adanya Sekolah Gubermen ini dapat kita ketahui dari :¹⁶⁾

- 1) R. Ardjosewojo, pensiunan Kepala Sekolah.
- 2) R. Rio Kusumowidjojo
- 3) Rd. Dibjo Hardjijo
- 4) R.M. Purwodiprodjo.

Menurut keterangan orang-orang tersebut di atas,¹⁷⁾ dikatakan bahwa pada akhir tahun 1900 di kota Yogyakarta terdapat

dua sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang kemudian dikenal dengan nama Sekolah Gubermen. Sekolah ini berderajat Sekolah kelas I dan II serta bertempat di:

- 1) Sri Manganti, berada pada sebagian ruang bangsal Trajumas (di antara regol Sri Menganti dengan regol Donopranoto). Sekolah Kelas I Sri Menganti itu hanya untuk keturunan Raja, dan anak abdidalem (hamba Keraton) yang berpangkat tinggi.
- 2) Pagelaran, bertempat di Bangsal Pengapit sebelah Barat di ruang Pagelaran.
Sekolah Pagelaran ini berderajat Sekolah Kelas II dan disediakan bagi anak-anak pegawai menengah dan pegawai rendah.

Tentang mata pelajaran yang diberikan di kedua sekolah itu ialah: membaca (huruf Jawa dan Latin), menulis (huruf Jawa dan Latin), berhitung, bahasa Jawa dan Melayu, ilmu bumi seluruh Indonesia, menggambar, ilmu hayat, *nembang* (seni suara), sejarah Keraton Ngayogyakarta, ilmu ukur dan sebagainya.

e. Sekolah-sekolah Partikelir dalam daerah Yogyakarta.

- 1) Sekolah Jero Gede, bertempat di sebelah Tenggara Bangsal Sewa-Taman (Pandopo Pura Paku Alaman). Yang menjadi guru-guru terakhir pada sekolah ini ialah:
 - a. Raden Djajengmandarjo Kepala Sekolah
 - b. R.M. Prawiraningrat
 - c. R.M. Djajengutara
 - d. Djojoprayitno
 - e. Martiatmo
 - f. Sastrosutardjo
 - g. Tukinun
 - h. Mangil
- 2) Sekolah Padmosekarnan
Letak sekolah ini berada di sebelah Timur jalan Gunungketur dan masih berada dalam lingkungan rumah Ngabei Padmosekarnan (seorang Wedana Reh Reksowibowo dan merangkap Reh Langenprojo pada masa pemerintahan KGPAA Paku Alam V). Kemungkinan besar nama sekolah ini diambilkan dari nama Ngabei Padmosekarno tersebut.

f. Sekolah-sekolah Partikelir di dalam daerah Kasultanan.

Sekolah-sekolah ini bertempat di:

- 1) Mangkubumen. Sebelum tahun 1900 Sekolah di Mangkubumen ini telah dihapus.
- 2) Suranegaran. Gedung Sekolah ini berada pada muka sebelah timur. Sekolah ini ada di bawah pengawasan Bupati Kawedanan Ageng yang bergelar Kangjeng Raden Tumenggung Suronegoro.
- 3) Yudonegaran. Bertempat di ruangan sebelah muka pendapa dan yang di sebelah timur pintu (*regol*). Sekolah Yudonegaran ini dipimpin oleh Bandara, yaitu pemimpin Kawedanan Ageng Reh Kori (suatu Badan Pemerintahan Kasultanan yang merupakan penghubung antara Keraton dengan Residen).
- 4) Menduran. Semula sekolah ini ada dalam lingkungan *Cepuri* (halaman) Kepatihan Danurejan, dan kemudian dipindahkan ke kampung Menduran. Adapun tentang kapan dan apa sebabnya dipindahkan masih belum dapat diketahui.
- 5) Jayengbratan. Sekolah ini ada di kampung Panembahan dan yang terletak di sebelah Timur Istana (Keraton). Dinamakan sekolah Jayengbratan karena sekolah ini bertempat di rumah R.M. Djajengbrata. Gedung sekolahnya merupakan peninggalan rumah Kangjeng Pangeran Panembahan yang hidup pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V.
- 6) Kemendaman. Gedung sekolah ini terletak di sebelah Selatan Benteng Keraton dan berada di halaman Kemendaman. Kata Kemendaman adalah berasal dari kata Komendan (Komandan). Murid-murid sekolah ini sebagian besar terdiri dari anak-anak para prajurit.

Kecuali sekolah-sekolah tersebut di atas, masih ada beberapa sekolah partikelir yang didirikan oleh para Nayaka dan para Bupati. Jelaslah bahwa pada abad 19 itu di kota Yogyakarta telah terdapat dan berdiri sekolah-sekolah yang menjadi tempat dan pusat pendidikan bagi anak-anak. Tetapi walaupun demikian, sekolah-sekolah yang ada itu ternyata jumlahnya sama sekali tidak mencukupi, karena penyelenggaraannya hanya sekedar dihubungkan untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai-pegawai pemerintah dan Kraton serta perusahaan-perusahaan asing.

2. Seni Budaya

Salah satu hal yang menonjol dan nampak jelas dalam kehidupan Seni budaya pada abad 19 adalah makin meluasnya pengaruh kehidupan Barat dalam lingkungan kehidupan tradisional. Karena itu timbullah perasaan khawatir di kalangan sementara penguasa bumi putera bahwa pengaruh kehidupan Barat itu dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Sehubungan dengan itu maka tentangan yang kuat terutama datang dari pemimpin-pemimpin agama, yang memandang bahwa kehidupan Barat itu bertentangan dengan norma-norma dalam ajaran agama Islam. Orientasi keagamaan seperti ini ternyata terdapat juga di kalangan para bangsawan dan pejabat birokrasi kerajaan yang patuh pada agama. Adanya perasaan, anggapan dan pandangan seperti itu memang tidak dapat dihindari.

Tetapi seharusnya kita tidak perlu merasa takut dan khawatir terhadap adanya pengaruh kebudayaan Barat kepada kebudayaan kita. Sebab seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. R.M. Sutjipto Wirjosuparto MA. Ph.D.¹⁸⁾ bahwa:

"However, we do not worry at all that conflicts occur when our culture meets Western Civilization, because we are convinced that the Indonesian culture is flexible enough to accept foreign cultural elements but which in the course of time certainly will be moulded into the pattern of the culture of Indonesia.

Bahkan apabila kita perhatikan bagaimana perkembangan pertumbuhan kebudayaan kita dari masa ke masa, maka tampak adanya berbagai tantangan dan pengaruh dari luar. Baik yang berupa kontak dan pengaruh yang berasal dari kebudayaan India, Islam maupun kebudayaan Barat. Dan ternyata dalam menanggapi kontak dan pengaruh itu semua, kebudayaan Indonesia tetap dapat bertahan dan bahkan semakin kaya. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Dr. Sutjipto Wirjosuparto tersebut di atas, yang selanjutnya mengatakan bahwa:¹⁹⁾

"The Culture of Indonesia, in the past as well as in the present, has always been in contact with foreign cultures, but the pattern of the original culture remains the same, obviously because it is strong enough to mould the foreign cultural elements into its own pattern".

Sementara itu pada abad 19 Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran dan kebebasan khususnya dalam bidang seni budaya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan subur.

Untuk Daerah Yogyakarta sampai dengan awal abad 19 kehidupan pertumbuhan dan perkembangan kebudayaannya tidak dapat hidup dan berkembang dengan subur karena kurang mendapat perhatian dari masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dimengerti karena Kerajaan Yogyakarta sebagai sumber dan wadah seni budaya pada waktu itu sedang menghadapi bermacam-macam kesulitan antara lain timbulnya berbagai macam pemberontakan dan peperangan misalnya: pemberontakan yang dilakukan oleh R.M. Guntur alias Pangeran Surjokusumo bersama-sama R. Sudiroputra, Pangeran Ngabei Warih Kusumo di Gunung Kidul, Ki Secoyudo alias Panembahan Kawah di Kedu, R. Suwarjo ipar Ki Tumenggung Mertoloyo, Perang Diponegoro dan sebagainya. Kesemuanya itu ternyata mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan dan pertumbuhan kebudayaan di daerah Yogyakarta. Baru sejak bertahtanya Sri Sultan Hamengku Buwono ke V kehidupan dan pertumbuhan seni budaya mulai menampakkan hasilnya secara teratur dan nyata.

Adapun hasil-hasil itu antara lain ialah:

a. Seni Karawitan

Daerah Yogyakarta yang merupakan pusat dari kerajaan Mataram, maka khususnya dalam bidang seni karawitan juga mendapatkan tempat dan perhatian dari pemerintah. Ini terbukti setelah Sri Sultan Hamengku Buwono I memindahkan pusat pemerintahannya dari Pasanggrahan Ngambar Ketawang ke Keraton Yogyakarta maka benda-benda atau perabot dan produk seni seperti gamelan, wayang, tari-tarian dan sebagainya tak luput pula dari perhatian Sultan. Benda-benda tersebut di samping benda pusaka yang lain, berfungsi sebagai penambah dan penguat kewibawaan Sultan/Keraton. Khususnya perabot yang berupa gamelan, yang mula-mula diperlukan pada waktu itu ialah *gamelan monggang* yang diberi nama *Kangjeng Kyai Kebo Ganggang* dan gamelan Sekaten yang diberi nama Kyai Guntur Madu dan *Kangjeng Kyai Nogowilogo*.

Seni Karawitan ini mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang pesat pada waktu pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwo-

no VII. Pada waktu itu R.T. Kertonegoro, Bupati Nayoko Lurah Bumijo mengayunkan langkah pertama dengan memulai meneliti serta menghimpun segala gending baik Slendro maupun Pelog, berikut kendangnya untuk dihimpun dalam buku. Di kala itu *tanda titi raras* masih berupa huruf Jawa. Selain itu ada pula yang disebut *titi raras rantai* atau *noten balk*, ciptaan R.T. Wiroguno yang dibantu oleh M.L. Puspakanti, M.L. Brantamara, M. Panewu Demang Mangun-gending, R.L. Babarlayar.

Beliau juga menyesuaikan gending-gending untuk tari golek di antaranya golek Jangkung Kuning, Layongsari dan lain-lainnya. Seni karawitan ini lebih berkembang lagi pada awal abad 20 yang pada waktu itu banyak diadakan kegiatan seni Karawitan dan juga didirikannya berbagai badan perkumpulan antara lain sebuah badan yang bernama Hermani (tahun 1919 berganti nama Mardi Guno), perkumpulan "Dayapradonggo" dan sebagainya.

b. Seni Tari

Sejak berdirinya Keraton Yogyakarta hingga tahun 1918, seni budaya yang khusus berupa Seni Tari terutama adalah "Tari Bedaya" dan "Tari Serimpi". Kedua seni tari ini pada waktu itu menjadi milik Keraton dan tidak diperkenankan keluar dari Istana. Berkat jasa dan hasil usaha dari perkumpulan Krida Beksa Wirama yang didirikan sejak tanggal 17 Agustus 1918, maka seni tari di daerah Yogyakarta dapat berkembang dengan pesat.

1) Tari Bedaya

Tari Bedaya dilakukan oleh sembilan orang putri atau putra. Sedangkan di luar keraton dilakukan oleh tujuh orang. Pada jaman sebelum pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Bedaya putri tidak berbaju kotang, sebaliknya Bedaya putra bahkan memakai baju kotang. Sedangkan sanggul yang digunakan oleh Bedaya putri diatur seperti pengantin wanita. Dan sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Bedaya putra sudah tidak berlaku lagi. Isi ceritera Tari Bedaya diambil dari ceritera Tambo, sejarah dan ceritera lainnya. Biasanya tarian Bedaya ini terbawa oleh gending-gending yang dipakai untuk mengiringi.

2) Tari Serimpi

Tari ini dilakukan oleh empat orang putri yang meng-

gambarkan perangnya pahlawan-pahlawan dalam ceritera Menak, Wayang purwa dan sebagainya. Pelaku-pelaku dalam tari Serimpi ini dipilih puteri-puteri yang memiliki keistimewaan dan memenuhi persyaratan tertentu. Tarian Serimpi banyak macam ragamnya dan sesuai dengan kisah cerita yang dibawakannya. Misalnya Tarian Serimpi Renggawati. Tarian Serimpi Renggawati ini diambil dari kisahnya Angling Darma, yang menceritakan bahwa pada suatu ketika Angling Darma mendapat upata dari Dewa dan berubah menjadi burung mliwis. Burung mliwis ini akhirnya bisa kembali menjadi Angling Darma setelah badannya tersentuh tangan seorang putri yang cantik jelita (Dewi Renggawati).

c. Wayang

Wayang merupakan warisan seni budaya dari nenek moyang kita yang memiliki "nilai-nilai" yang tak terhingga. Baik yang berupa nilai spiritual (pembentukan mental keagamaan, pembentukan watak dan kepribadian) maupun nilai seni.

Di daerah Yogyakarta terdapat berjenis pertunjukan wayang antara lain *wayang purwo*, *wayang gedog*, *wayang wong* (orang), *wayang klitik* atau *wayang krucil*, *wayang golek*, *wayang madya*, Wayang Purwo atau wayang kulit, isi ceriteranya bersumber pada Mahabarata, Ramayana dan Arjuna Sasrabahu.

Wayang gedog ialah pertunjukan wayang kulit dengan ceritera Panji. Sedangkan wayang madya menggunakan ceritera yang bersumber pada puisi epik karya pujangga Ronggowarsito. Wayang klitik atau wayang krucil adalah wayang yang terbuat dari kayu yang berbentuk pipih, terukir dan tersungging serta lengannya terbuat dari pada kulit. Sedang isi ceriteranya diambil dari ceritera Damarwulan.

Adapun wayang golek adalah wayang yang berujud boneka kayu, berdimensi tiga dan diberi pakaian. Isi ceriteranya adalah mengambil ceritera Menak. Wayang Wong atau wayang orang secara etimologis berasal dari kata wayang dan wong. Wayang berarti boneka kulit atau bayangan, sedang *wong* berarti orang. Jadi wayang wong adalah suatu drama tari yang dibawakan oleh manusia. Wayang orang ini sebagai pertunjukan istana sudah ada sejak abad 18, diciptakan oleh Sultan Hamengku Buwono I. Mula-mula yang dipergelarkan hanya lakon yang diambil dari Mahabara-

ta, tetapi kemudian pada awal abad 20 dipergelarkan juga lakon yang diambil dari ceritera Ramayana.

Pertunjukan wayang orang di istana Yogyakarta selalu diadakan di *Tratag Bangsal Kencana*, yang biasa disebut pula *Tratag Wetan* (Tratag Timur). Tratag adalah sebuah ruangan yang tidak berdinding, dengan tiang-tiang besi di bagian tepinya dan berbentuk segi panjang. Semula tratag ini tidak berlantai. Tetapi setelah wayang orang mengalami perkembangan yang baik, maka tratag tersebut kemudian diberi lantai marmer. Kemudian setelah wayang orang itu dipertunjukkan di luar istana, biasanya diadakan di Pendopo, atau di atas panggung.

Wayang orang Yogyakarta adalah suatu drama tari Jawa klasik yang berdialog dengan bahasa Prosa. Kecuali drama tari wayang orang di daerah Yogyakarta juga tumbuh dan berkembang jenis drama tari lain yaitu *Langen mondoro Wanara*. Drama tari ini merupakan drama tari opera yang lahir dan berkembang di luar istana dan yang mempunyai ciri yang unik. Dialognya dipergunakan tembang macapat sedang tarinya dilakukan dalam posisi jongkok. Lakonnya diambil dari ceritera Ramayana. Adapun penciptanya adalah Patih Kasultanan Kangjeng Pangeran Adipati Aryo Danurejo VII dan diciptakan pada tahun 1890²⁰⁾

Secara etimologis, istilah *Langen mondoro wanara* terbentuk dari kata-kata: *langen* (*lelangen*) yang berarti hiburan, *mondoro* yang berarti banyak dan *wanara* yang berarti kera. Jadi artinya hiburan banyak kera, maksudnya bahwa dalam pertunjukan tersebut banyak dipertunjukkan tarian kera.

Perlu dicatat di sini bahwa sebelum lahirnya *Langen Mondoro Wanoro*, di Yogyakarta telah lahir pula suatu jenis drama tari yang disebut *Langen driyo*, yang diciptakan oleh Raden Tumenggung Purwodiningrat pada tahun 1876. Isi ceriteranya diambil dari ceritera Damarwulan, dan posisi penarinya juga berjongkok. Sayangnya sekali drama tari *Langen Driyo* ini tidak dapat berkembang dengan baik, karena kemudian terdesak oleh *Langen Mondoro Wanoro*.

d. Pedalangan

Menurut K.R.T. Jayadipura sejak Sri Sultan Hamengku Buwono I, pedalangan telah ada. Tetapi sampai dengan pemerintahan Sultan Raja (Sultan Hamengku Buwono III) masalah pedalangan

ini tidak mengalami perkembangan yang baik. Atas inisiatif dan usaha yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono V, barulah masalah pedalangan ini dapat berkembang dengan baik. Pada jaman ini pula atas inisiatif Sultan Hamengku Buwono V terciptalah "Serat Purwakanda" yang ditulis oleh seorang Pangeran bernama Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi, putra dari Sri Sultan VI dan cucu dari Sri Sultan V.

Adapun dalang-dalang yang hidup antara tahun 1830 sampai dengan 1925 dan yang memiliki keistimewaan serta kemahiran antara lain:

- 1) Ki Rediguno di Sanasewu. Keistimewaan yang dimilikinya ialah panah wayang dapat terpaku di tiang rumah, dan dapat mendatangkan hujan.
- 2) Ki Jayengtaryono, dalang Paku Alaman, termashur bagus pakelirannya.
- 3) Ki Somataruna, Dagen, termashur lucunya.
- 4) Ki Lurah Girisa I, termashur keseluruhan pedalangannya.
- 5) Ki Sopawiro, Sambilegi, termashur dengan ilmu kebatinannya.
- 6) Ki Somakariyo, termashur bila *menganggit* adegan percintaan.

e. Seni Sastra

Sewaktu pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V, Kesusasteraan Keraton berkembang dengan subur. Salah satu hasil karangan beliau yang termashur adalah *Serat Purwakanda*. Juga dalam bidang seni sastra ini, Pengaruh Pura Paku Alaman terhadap perkembangan kesusasteraan ternyata sangat luhur. Ketika Keraton Yogyakarta terlibat dalam kegelapan kabut politik, kesusasteraan di Pura Paku Alaman bahkan dapat berkembang dengan subur. Adapun yang menjadi peletak dasar dalam bidang kesenian dan kesusasteraan di Pura Paku Alaman adalah Pangeran Notokusumo. Peninggalan-peninggalan dalam dunia sastra ini sampai sekarang masih dapat kita saksikan dan tersimpan di dalam gedung perpustakaan Pura Paku Alaman. Salah satu kitab yang termashur ialah "Serat Darmowirajat" (*tembang*) ciptaan KGPA Alaman III.

C. KEHIDUPAN EKONOMI

Penulisan tentang kehidupan ekonomi yang terjadi pada abad 19 tidak dapat terlepas dengan keadaan sosial politik yang terjadi pada waktu itu. Sebagaimana kita ketahui dengan dibubarkannya VOC pada tahun 1799 dan berkuasanya Pemerintahan Hindia Belanda, maka sejak abad 19 itu, terjadilah perubahan mendasar di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi itu misalnya dalam sistem nilai, struktur masyarakat, relasi interpersonal dan ekonomi. Khususnya dalam masalah ekonomi, maka pemerintah Hindia Belanda pada awal abad 19 itu tetap berpegang pada politik eksploitasi, yaitu berusaha mengeruk kekayaan daerah jajahan sedalam-dalamnya. Bahkan sebelumnya dengan itu sampai-sampai Menteri Jajahan Barat pada waktu itu mengibaratkan "Java sebagai gabus tempat Nederland berapung". Maksudnya Jawa adalah merupakan sumber kehidupan bagi Nederland.

Sejalan dengan itu maka kepentingan pokok dari pemerintahan kolonial adalah mengadakan eksploitasi daerah jajahan untuk memberikan hasil dan keuntungan kepada negeri induk. Adapun cara dan pelaksanaannya dalam masa antara 1800 dan 1816 ternyata tetap meneruskan cara yang dilakukan oleh VOC. Dengan demikian sistem dagang dengan pengerahan paksa serta *Contingenten* seperti yang dijalankan oleh VOC tetap dilanjutkan. Karena sistem eksploitasi seperti itu ternyata dapat menjadikan daerah jajahan produktif. Untuk lebih memperlancar politik ekonominya itu, kemudian Daendels memperkenalkan "sistem komunikasinya", yaitu dibukanya jalan raya baru yang kemudian terkenal dengan jalan Raya Daendels. Dengan dibukanya jalan-jalan raya baru, ini berarti memperlancar jalannya perekonomian. Hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain makin terbuka dan lancar. Kecuali itu pembukaan jalan-jalan raya baru itu dimaksudkan oleh Daendels untuk kepentingan pertahanan, yaitu dalam usahanya untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.

Dalam pada itu dengan jatuhnya kekuasaan Belanda ke tangan Inggris, maka pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia kemudian diserahkan-terimakan kepada Inggris.

Thomas Stamford Raffles (1811 – 1816) diangkat sebagai Letnan Gubernur Jendral untuk mewakili raja muda Lord Minto yang berkedudukan di Calcutta. Seperti halnya Daendels, Raffles juga mempunyai keyakinan akan kebaikan sistem pemerintahan Barat.

Dalam bidang ekonomi, Raffles berusaha menghapuskan sistem penyerahan paksa dan jasa-jasa perseorangan serta mengusahakan diadakannya kebebasan dalam perdagangan dan bercocok tanam. Sehubungan dengan itu maka diusahakan pula untuk membatasi kekuasaan para Bupati, yaitu hanya berfungsi sebagai pegawai pemerintah yang digaji secara tetap.

Kecuali itu usaha Raffles yang besar dalam bidang ekonomi ialah dilakukannya "sistem pemungutan pajak tanah" (*landrente*). Menurut peraturannya penduduk diwajibkan menyerahkan $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$ atau $\frac{1}{3}$ dari hasil tanamannya (panen) dan dalam bentuk uang atau beras. Pemungutan pajak tanah ini dilakukan secara perseorangan. Dalam pelaksanaannya sistem ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, antara lain karena belum adanya pengukuran tanah yang tepat, dan juga tidak diperhitungkannya hak milik atas tanah seperti yang berlaku menurut adat. Juga karena pemungutan itu dilakukan oleh para pegawai yang sebagian besar belum memiliki kesadaran yang baik, maka terjadilah tindakan yang negatif berupa penyelewengan, korupsi dan tindakan sewenang-wenang. Gagalnya sistem pajak tanah ini, sebab yang paling pokok dan ternyata tidak disadari, oleh Raffles ialah bahwa pada waktu itu ekonomi desa belum memungkinkan petani memperoleh uang sebagai ganti dari hasil buminya. Memang uang sebagai alat penukar dalam perdagangan belum dikenal oleh penduduk di desa.

Sebagaimana kita ketahui pada sekitar awal abad 19 kehidupan ekonomi di Jawa termasuk pula Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat suatu kehidupan ekonomi desa yang masih sederhana di mana penduduk tani menghasilkan barang untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan dan cara produksi mereka itu ditentukan oleh tradisi. Dalam kehidupan ekonomi yang demikian ternyata sifat kegotong royongan dan tolong-menolong masih kuat dan tebal di kalangan penduduk tani. Demikian pula masalah menyewakan tanah pada umumnya masih jarang terjadi. Tetapi di Daerah Yogyakarta masalah persewaan tanah ternyata sudah menjadi kebiasaan, yaitu yang dilakukan oleh para pemegang *apanage* (*apanage* berarti tanah lungguh) dari raja-raja. Bahkan dalam tahun 1816 di daerah Yogyakarta terjadi persewaan tanah secara besar-besaran.

Dalam kehidupan ekonomi yang sederhana itu, perdagangan dan lalu lintas masih belum begitu ramai. Penduduk tani itu pada

umumnya melakukan pertukaran hasil tanahnya di antara penduduk dalam satu desa, atau di antara penduduk beberapa desa. Tentang pasar sebagai pusat perdagangan pada waktu itu masih belum begitu banyak. Dalam suasana kehidupan ekonomi yang demikian itu, maka faktor produksi dan hasil tanah hampir tidak diperjual belikan. Karena itu uang hanya mempunyai peranan yang kecil sekali dalam kehidupan ekonomi pada masa itu.

Di dalam pergaulan hidup desa seperti itu kebutuhan akan organisasi ekonomi sedikit sekali. Karena kebutuhan seperti itu sudah dapat dicukupi melalui tolong-menolong dan kegotongroyongan. Adapun adat organisasi yang terpenting terdiri dari ikatan komunal yaitu rasa persaudaraan di antara penduduk desa yang merupakan ikatan atau hubungan horisontal, dan rasa kepatuhan, tunduk serta ketaatan kepada kepala desa atau kepala adatnya, yang merupakan ikatan atau hubungan vertikal. Kehidupan desa yang demikian itu merupakan rangka-antar-hubungan yang tidak terpisah-pisah dan berlangsung turun temurun (mentradisi). Adanya rasa persaudaraan dan rasa kepatuhan di antara penduduk desa itu oleh Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo.²¹⁾ kemudian dinamakan "ikatan desa"

Dalam abad ke 19 itu pula, kecuali terdapat ekonomi desa yang sederhana, terdapat pula kehidupan ekonomi yang teratur, yang mengatur kebutuhan pemerintah "Indonesia" dan Hindia Belanda. Adapun alat organisasi kehidupan ekonomi yang teratur itu, terutama terdiri atas hubungan kekuasaan dan ketaatan yang timbul dari kekuasaan raja-raja dan bupati-bupati juga pejabat-pejabat yang termasuk dalam lingkungan kerajaan serta Kabupaten atau setidak-tidaknya yang berada lebih tinggi daripada lingkungan desa. Hubungan kekuasaan dan ketaatan yang demikian itu disebut "ikatan feodal".²²⁾

Kehidupan ekonomi seperti tersebut di atas, merupakan ciri umum yang terdapat di Jawa dan termasuk pula di Daerah Istimewa Yogyakarta pada abad 19. Keadaan yang demikian itu kemudian digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk melaksanakan politik ekonominya. Dengan melalui dan menggunakan penguasa feodal serta kepala adat, pemerintah kolonial berusaha mengeruk kekayaan dan tenaga penduduk. Keadaan dan nasib penduduk pribumi (Indonesia) lebih buruk dan bertambah menderita tatkala pemerintah kolonial melaksanakan "Politik Tanam Paksa" atau *Cultuur Stelsel*. Pada masa dilaksanakannya sistem

Tanam Paksa, seperti halnya daerah-daerah lain yang terkena sistem ini, maka daerah Yogyakarta tak luput pula dari praktek-praktek Tanam Paksa. Penduduk yang memiliki tanah diwajibkan menanam sebagian tanahnya ($\frac{1}{5}$ dari tanahnya) dengan tanaman yang telah ditetapkan jenisnya oleh pemerintah Belanda, yakni kopi, tebu, kapas dan sebagainya. Sedangkan bagi penduduk yang tidak mempunyai tanah, harus mengerjakan "rodi" selama 6 hari dalam satu tahun. Tetapi kenyataannya, peraturan Tanam Paksa itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, melainkan sering terjadi penyimpangan. Sebagai contoh, seringkali penduduk diwajibkan menanam tanahnya lebih dari ketentuan yang ada dengan tanaman wajib. Demikian pula dengan pengerahan tenaga rodi penduduk, kadang-kadang di samping tempat bekerja yang jauh dari tempat tinggalnya, juga waktunya melebihi ketentuan yang ada. Oleh karena itulah pada masa dilaksanakannya Tanam Paksa, sering terjadi bencana dan bahaya kelaparan yang banyak membawa korban manusia. Untuk daerah Yogyakarta, yang paling menderita dalam masa Tanam Paksa ini adalah penduduk daerah Gunung Kidul.

Sementara itu, dengan kemenangan yang dicapai oleh golongan liberal sejak tahun 1849 di negeri Belanda, maka terjadilah perubahan politik Kolonial di Indonesia. Sedikit demi sedikit Tanam Paksa dikurangi dan akhirnya dihapuskan. Kemudian muncullah peraturan baru yang mengatur tentang kehidupan sosial, politik dan ekonomi negara jajahan. Pertama-tama dikeluarkan Peraturan Pemerintah tahun 1854, yang kemudian menjadi perundang-undangan di Indonesia, dan yang mengatur mulai dari Pengumuman Raja, tindakan mahkota, keputusan Gubernur Jenderal dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang jasa kerja, hutan dan tanah. Peraturan tersebut kemudian diikuti dengan peraturan baru yang dikeluarkan pada tahun 1864 yang terkenal dengan "*Comptabiliteits Wet*" yaitu suatu peraturan atau perundang-undangan yang mewajibkan agar anggaran belanja pemerintah Hindia Belanda (Indonesia) disahkan oleh Parlemen.²³⁾

Selanjutnya pada tahun 1870 dilaksanakan pula peraturan baru yang terkenal dengan *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria). Undang-undang ini pada pokoknya menetapkan tentang prinsip dasar dari Politik tanah.²⁴⁾ Hal yang penting dari Undang-undang ini bahwa para pengusaha dapat menyewa tanah dari pemerintah untuk masa 75 tahun. Di samping itu penduduk pri-

bumi dijamin hak-hak miliknya atas tanah menurut hukum adat, dan ditetapkan pula bahwa tanah yang bukan milik perseorangan penduduk merupakan tanah milik negara (pemerintah atau tanah domein).

Sebagai akibat adanya Undang-Undang Agraria tersebut, maka membanjirlah modal asing ke Indonesia. Daerah Yogyakarta yang merupakan daerah yang subur dan banyak memiliki kekayaan bahan tambang, tak luput pula dari sasaran modal asing. Sebagai contoh Daerah Kabupaten Kulon Progo yang daerahnya memiliki bahan tambang mangaan maka banyaklah pengusaha yang ingin menanamkan modalnya untuk dapat menguasai pertambangan tersebut. Kecuali bahan tambang mangaan, Daerah Kulon Progo juga memiliki kekayaan alam lainnya, misalnya uranium, *volksaarde*, batu gamping, bahan cat dan sebagainya. Menurut penyelidikan para ahli ada pula daerah yang diduga mengandung tambang mas/intan yaitu di daerah-daerah Kokap, Pengasih, Sentolo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh.

Demikianlah dengan masuknya modal asing dan pengusaha swasta ke daerah Yogyakarta (misalnya NV AIME yang membuka pertambangan mangaan di daerah Kliripan Kulon Progo), maka secara tidak langsung dapat mengubah kehidupan ekonomi desa yang tradisional. Penduduk desa yang tadinya dengan tenang dan tenteram bekerja di sawah dan ladang serta mengerjakan kerajinan rakyat, maka dengan adanya praktek Tanam Paksa dan masuknya modal asing, menyebabkan mereka harus meninggalkan sawah ladangnya untuk bekerja di perkebunan, pabrik dan tempat pertambangan. Mereka digaji dengan upah yang sangat rendah. Karena itu kehidupan mereka pun jauh di bawah kehidupan yang layak. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh Dr. Huender dan kemudian dikutip oleh Ir. Sukarno, rata-rata penghidupan petani seharusnya per orang 8 sen. Dari perhitungan ini nampak bahwa kehidupan petani sangat buruk dan menyedihkan. Jelaslah sistem politik sosial dan ekonomi yang diintroduksi oleh pemerintah kolonial pada abad 19 itu, pada hakekatnya tidak membawa kemakmuran bagi rakyat melainkan makin menyengsarakan kehidupan rakyat. Penderitaan rakyat makin bertambah berat, makin melarat dan makin bodoh. Keadaan semacam ini ternyata tidak hanya terdapat di daerah-daerah di Yogyakarta melainkan sudah meluas dan dialami oleh seluruh daerah di Nusantara.

D. PERKEMBANGAN ALAM FIKIRAN DAN KEPERCAYAAN

Pada abad 19, pertumbuhan dan perkembangan alam pikiran dan kepercayaan di daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat antara lain pada timbul berkembangnya keagamaan dan aliran-aliran kepercayaan. Sebagaimana kita ketahui, pada waktu itu di dalam masyarakat di daerah Istimewa Yogyakarta telah hidup dan berkembang berbagai agama seperti Islam, Hindu Budha, Katholik, Kristen Protestan dan juga aliran kepercayaan. Kesemuanya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ada yang dapat tumbuh dan berkembang dengan subur, tetapi ada pula yang mengalami kelambatan dalam pertumbuhannya.

Pada mulanya masyarakat Jawa, termasuk pula masyarakat di daerah Istimewa Yogyakarta telah mengenal suatu kepercayaan yang bersumber pada animisme dan dinamisme. Kedua macam kepercayaan ini menjadi dasar alam pikiran masyarakat Jawa pada waktu itu. Dalam perkembangannya, dengan masuknya agama Hindu dan Budha yang berasal dari India, di kalangan masyarakat Jawa, maka ternyata dapat memperkaya alam pikiran dan kepercayaan masyarakat. Kecuali itu masuknya agama Hindu Budha juga disertai dengan masuknya seni budaya India. Terjadilah perpaduan antara seni budaya India dengan seni budaya asli yang terdapat dalam masyarakat, sehingga menyebabkan seni budaya asli makin bertambah kaya. Demikian pula keadaan alam pikiran dan kepercayaannya. Berbagai macam hasil karya yang merupakan buah pikiran pada masa itu yang berujud seni sastra dan seni budaya lainnya, adalah suatu bukti adanya pertumbuhan dan perkembangan alam pikiran. Juga adanya kehidupan agama yang berkembang dengan pesat dengan bukti banyaknya bangunan suci dan tempat pemujaan membuktikan bahwa pada masa itu agama dan kepercayaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pula.

Dengan masuknya agama Islam yang membawa ajaran baru, dengan disertai budaya Islam maka lebih menyempurnakan keyakinan rohani bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Jawa khususnya. Berkat keahlian para mubaliq, lebai, wali, ulama-ulama dan kyai, agama Islam dapat berkembang dengan pesat. Ternyata prestasi para wali, kyai, lebai dan mubaliq dalam menyebarkan

agama Islam dengan gaya *penetration pasifique* yang terkenal itu, dapat diterima oleh masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Akhirnya, terjadi perpaduan antara unsur kebudayaan Islam, Hindu dan asli yang kemudian lebih dikenal dengan Sinkretisme yang dapat ikut memperkaya perbendaharaan baru serta memperkaya nilai-nilai kerokhanian yang telah lama mereka hayati. Gejala ini sebagian besar terdapat di kalangan penduduk pedalaman, termasuk di kalangan penduduk di daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi yang demikian itu mudah sekali menerima aliran yang mengajarkan prinsip *Manunggaling Kaula lan Gusti*; yaitu salah satu *Tasawuf* yang lahir dalam perkembangan agama Islam yang dipelopori oleh Al Haladj dari Bagdad. Aliran ini berkembang dengan pesat sejak periode Pajang. Dari aliran inilah yang kemudian berkembang dan melahirkan bermacam-macam aliran kepercayaan, misalnya *Ilmu Sejati*, *Sumarah*, *Pangestu* dan sebagainya. Pada hakekatnya aliran yang mengajarkan tentang prinsip "Manunggaling Kaula lan Gusti" ini, merupakan pelajaran yang berisi soal-soal ketuhanan yang bertalian dengan hasrat manusia karena dorongan perasaan cinta dan rindunya terhadap Tuhan maka berusaha untuk mencari dan mendekatkan diri kepada Nya dengan melalui jalan-jalan yang suci.²⁵⁾ Dalam perkembangannya, aliran ini banyak mendapatkan reaksi dan tantangan, terutama dari para penganut Islam yang ingin mempertahankan ajaran Islam secara murni.

Tetapi di daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah pedalaman, di mana suasana feodal masih kuat terutama di hati rakyat, maka aliran kepercayaan dan kebatinan dapat tumbuh dengan subur. Karena itu, selama periode Mataram aliran yang mengikuti garis kebijaksanaan Sunan Kalijaga yang sangat moderat dalam cara penyebaran agama Islam, dapat diterima dengan mudah dan mengalami perkembangan yang subur. Akhirnya Islam dapat diterima di kalangan istana dan dengan resmi menjadi agama Kerajaan. Ini terbukti dari gelar yang digunakan oleh Sultan-Sultan Mataram, yang menunjukkan bahwa Sultan ikut berkewajiban sebagai "pengatur Agama" (*Sayidin Panatagama*). Islam mencapai puncak kebesaran dan kejayaannya pada saat pemerintahan Sultan Agung. Pada jaman Sultan Agung yang dapat diibaratkan sebagai lambang kerajaan Islam maka pada masa itu diresmikanlah suatu tarikh yang kemudian dikenal dengan Tarikh Jawa, yaitu suatu tarikh yang merupakan perpaduan antara

Tarikh Saka dengan Tarikh Hijriyah. Nama-nama bulan maupun hari diambilkan dari tarikh Hijriyah yang disesuaikan pada perjalanan bulan mengitari bumi. Sedangkan *titi mangsa* tetap memakai tahun Saka yang mempunyai selisih waktu sekitar 78 tahun, bila dibandingkan dengan tahun Masehi. Dengan demikian maka sesudah itu, masyarakat Indonesia umumnya dan Jawa khususnya mengenal empat buah tarikh yaitu Masehi, Saka, Hijriyah dan tarikh Jawa.

Sementara itu dengan datangnya bangsa Barat yang di pelopori oleh orang Portugis dan kemudian diikuti oleh orang Belanda, maka dalam perawatannya itu ternyata selalu diikuti oleh para rokhaniawan baik yang beragama Kristen Protestan maupun Katholik. Pada mulanya para rokhaniawan itu hanya melayani orang-orang Eropa (Portugis, Belanda) karena mereka belum memiliki kebebasan bergerak di kalangan masyarakat. Rakyat masih belum dapat menerima agama baru itu, karena agama itu dianggap sebagai agama Kompeni yang menurut pandangan rakyat pada waktu itu dianggap kafir. Namun dalam perkembangannya, berkat keuletan dan kegigihan para rokhaniawan, akhirnya agama baru itu dapat pula masuk di kalangan rakyat. Masuknya agama Kristen di tengah kalangan orang Jawa ini baru berlangsung sekitar abad 19. Dan pada masa ini nampak pula adanya pengaruh agama Kristen dalam kesusasteraan Jawa, misalnya dalam tulisan Ranggawarsita (1803 - 1873) yaitu antara lain dari karangannya tentang "Paramayoga". Dalam salah satu bab terakhir dari buku tersebut ia melukiskan, bagaimana Ki Jaka Sengkala, yang menurut takdir Illahi keturunannya akan memenuhi pulau Jawa, berkenalan dengan ajaran Isa. Jaka Sengkala yang sedang merantau, mencari pengetahuan yang sejati, diisyrati oleh Batara Wisnu untuk berguru pada seorang nabi "di tanah orang Ibrani", karena nabi dari sana lebih bersakti daripada Batara Wisnu. Kemudian Jaka Sengkala mendapatkan ajaran dari Nabi Isa. Ajaran tersebut berkisar pada "pembebasan rohani" dan akhirnya timbullah hasrat dalam hati Ki Jaka untuk menjadi murid Nabi Isa.

Untuk lebih jelasnya di sini kami kutipkan beberapa kalimat dalam kitab Paramayoga yang menunjukkan bagaimana pandangan Ranggawarsita terhadap agama Kristen, dan juga adanya pengaruh Kristen dalam Kesusasteraan Jawa, sebagai berikut:

"Enggaling carios Jaka Sengkala sampun puruhita dateng raja pandita angangge agama Ngisa. Lajeng kawulang ing

ngelmi kalepasaning budi, sampurnaning kasidan andadosa-ken mareming manahipun Jaka Sengkala. Malah lajeng karem dateng ngelmi mangsuding agami, sareng sampun sawatawis lami Jaka Sengkala gadah kajeng bade nyakabat Kangjeng Nabi Ngisa.²⁶⁾

Apabila kita perhatikan, maka dalam buku tersebut terdapat sesuatu yang sangat menarik perhatian, yaitu bahwa ajaran Isa itu oleh Ranggawarsita dilukiskan sebagai "pembebasan budi" dan "kepergian yang sempurna". Menurut pandangan Ranggawarsita, agama Kristen adalah merupakan suatu bentuk baru mengenai pengetahuan mistik. Selanjutnya pujangga ini mengatakan bahwa sesudah Nabi Isa, maka di tanah Jawa akan muncul seorang Nabi lain yang mengajarkan "pengetahuan yang sama".

Jelaslah bahwa, dengan masuk dan diterimanya agama Kristen di kalangan orang Jawa di samping memperkaya perbendaharaan kebudayaan Jawa khususnya dan Indonesia umumnya, juga ikut memperkaya nilai kerokhanian masyarakat Jawa khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Memang pada dasarnya di daerah-daerah di seluruh Indonesia termasuk pula di daerah Istimewa Yogyakarta, agama-agama itu dapat hidup berdampingan, saling hormat menghormati sesuai dengan sikap bangsa Indonesia yang toleran.



BAB III

KEADAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DARI TAHUN + 1900 - 1928

A. PENGARUH POLITIK ETIKA DI DAERAH

Apakah Politik Etika itu dan bagaimanakah pelaksanaan serta pengaruhnya di daerah-daerah di Indonesia, khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta?

Pada bagian di muka telah disinggung bahwa dengan kemenangan yang dicapai oleh orang Liberal sejak tahun 1848 di Negeri Belanda, maka haluan politik kolonial Belanda diubah berdasarkan dan sejalan dengan politik kaum Liberal. Perubahan politik ini, melahirkan wajah baru imperialisme Belanda di Indonesia, yakni yang dikenal dengan *Politik Etika* atau "*Eticche Politiek*" atau "*Etische koers*" atau bahkan ada yang menyebutkannya dengan politik paternalistik.¹⁾ (Berasal dari perkataan pater = father = ayah, yang maksudnya bahwa tujuan dari politik ini ialah menuntun bangsa Indonesia ke arah kemajuan, tetapi nantinya tetap bernaung di bawah penjajahan Belanda). Perkataan Etika berasal dari bahasa Belanda *Ethisch* yang berarti ajaran yang bersendikan ketinggian jiwa manusia.²⁾

Aliran Politik Etika ini pada hakekatnya menghendaki adanya perubahan politik kolonial di daerah jajahan dan menekankan pada kesejahteraan penduduk bumi putera. Untuk itulah maka Van Deventer sebagai pendukung ide politik kolonial baru dan sebagai pemimpin liberal menganjurkan agar pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan materi dan moril penduduk pribumi, mengadakan desentralisasi pemerintahan serta penggunaan tenaga pribumi dalam pemerintahan/kepegawaian. Karangannya yang sangat tajam dan dikenal adalah yang berjudul *Een Eereschuld* (Hutang Budi atau Hutang Kehormatan) dan yang ditulis dalam tahun 1899. Dalam karangannya itu dijelaskan bahwa bangsa Indonesia telah banyak mengalami penderitaan dan kekayaannya berjuta-juta *gulden* telah mengalir ke negeri Belanda.

Karena itu sudah selayaknya apabila pemerintah Belanda merasa berhutang budi, kepada bangsa Indonesia. Dan sebagai imbalannya maka Van Deventer menganjurkan agar diadakan perbaikan yang meliputi bidang pengairan (irigasi), bidang pendidikan (educatie) dan perbaikan kesehatan rakyat, emigrasi. Dengan adanya gerakan politik etis itu, kemudian dilancarkan pula agar segera diadakan ;

1. Perubahan sistem pemerintahan.
2. Politik desentralisasi.
3. Otonomi Hindia Belanda.
4. Pemisahan anggaran belanja negeri Belanda dengan Hindia Belanda (Indonesia).

Pemerintah kolonial Belanda yang menyadari akan kebenaran politik etika, serta mengetahui perkembangan situasi pada masa itu, kemudian menerimanya. Tetapi walaupun begitu tidak sepenuhnya diterima, melainkan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan politik kolonialnya. Ini terbukti, bahwa di dalam praktek yang terjadi dan berlangsung di daerah-daerah termasuk pula di Daerah Istimewa Yogyakarta semua kegiatan pemerintah kolonial Belanda dalam penyelenggaraan politik etika ini, ternyata hanya sebagai kedok. Sebagai contoh di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di daerah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, perbaikan pengairan juga dilaksanakan, tetapi semata-mata untuk melayani kebutuhan penguasa Belanda/ asing yang membutuhkan pengairan untuk kebun tebu, nila dan kopi serta keperluan di pabrik dan sebagainya. Jadi perbaikan pengairan yang dilaksanakan itu tidak langsung menyangkut kepentingan rakyat.

Tentang perbaikan dalam masalah pendidikan juga diadakan. Sejak dilancarkannya politik etika, maka masalah pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda dalam daerah Keresidenan Yogyakarta (sekarang Daerah Istimewa Yogyakarta) mulai memperbanyak sekolah kelas dua, untuk segala rakyat dengan tidak mengingat keturunan. Sekolah-sekolah yang didirikan itu antara lain: Sekolah klas II di Margoyasan (tahun 1901), Sekolah Klas II di Jetis, Sekolah Klas II di Ngabean dan sebagainya, yang makin lama makin tersebar luas di

kalangan masyarakat. Menurut catatan, pada tahun 1919 - 1942 jumlah Sekolah Klas II di dalam Kota Yogyakarta ada 13 tempat dan tersebar di seluruh kota. Di samping itu terdapat pula jenis-jenis sekolah yang lain yaitu: Sekolah Klas I, Sekolah Desa yang lain yaitu (Sekolah-sekolah yang didirikan di desa atau di luar kota dan hanya sampai Klas III), *Eerste Inlandsche School* (didirikan di Yogyakarta pada tahun 1909), *Kweekschool* (didirikan di Yogyakarta pada tahun 1898), *Normaalcursus* (+ tahun 1907) dan sebagainya.

Walaupun keadaan pendidikan di daerah Yogyakarta berkembang dengan pesat, tetapi ternyata taraf hidup rakyat tetap rendah. Mereka masih tetap melarat dan miskin. Apa sebabnya? Sebagaimana di muka telah dikatakan bahwa pelaksanaan politik etis ini pada hakekatnya didasarkan pada kepentingan pemerintah kolonial. Kepentingan dan kebutuhan akan tenaga pegawai yang semakin mendesak merupakan problema baru bagi pemerintah sebagai akibat makin kompleksnya sistem pemerintahan kolonial, dan makin meluasnya modal asing masuk ke daerah-daerah. Sehubungan dengan itu maka pengadaan dan penambahan jumlah sekolah, dimaksudkan agar pemerintahan mendapatkan tenaga yang sedikitnya terdidik, untuk dipekerjakan di pabrik dan kantor pemerintah, karena itu sifat pendidikan yang diberikan kepada rakyat hanya sekedar agar dapat membaca, menulis dan sedikit berhitung. Memang kecuali sekolah rendah (Sekolah Desa, Sekolah Klas dua) yang khusus disediakan untuk anak orang kebanyakan di daerah Yogyakarta juga didirikan sekolah untuk anak Belanda, anak Eropa dan anak bangsawan serta pegawai pemerintah (misalnya HIS, ELS Sekolah Klas I dan sebagainya). Adanya diferensiasi di dalam pendidikan ini sengaja ditanamkan oleh pemerintah agar terjadi jurang pemisah antara penduduk dari kalangan kebanyakan dengan kaum bangsawan dan pegawai pemerintah. Dengan demikian maka pemerintah kolonial akan dengan mudah melaksanakan senjatanya yang ampuh yakni politik *divide et impera*.

Mengingat bahwa pendidikan yang diberikan kepada rakyat hanya sekedar agar dapat membaca, menulis dan sedikit berhitung, maka keadaan seperti itu tidak akan dapat menaikkan derajat rakyat dan membawa kemakmuran bagi rakyat, melainkan membuat rakyat makin tertindas dan tertekan hidupnya.

Karena dengan pengetahuan yang begitu minim mereka hanya tetap menjadi kuli dan buruh pabrik serta pegawai rendahan dengan upah yang sangat rendah. Keadaan seperti ini membawa akibat bagi kehidupan rakyat tetap melarat dan miskin.

Sementara itu timbul pula keresahan di kalangan kaum bangsawan, para Bupati dan pejabat-pejabat pemerintahan serta kepala-kepala adat di Daerah Yogyakarta khususnya, sebagai akibat adanya usaha pemerintah untuk mengadakan penghapusan kefeodalan dan mengadakan modernisasi kehidupan masyarakat dalam segala-galanya. Sebenarnya usaha ini pertama kali, telah dirintis oleh Daendels dan kemudian dilanjutkan oleh Raffles. Tetapi pelaksanaan usaha tersebut mencapai bentuknya yang nyata, setelah dilaksanakannya Politik Kolonial Baru, yaitu Politik Etika dan Politik Pintu Terbuka. (+ tahun 1870). Usaha penghapusan kefeodalan ini pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengurangi dan menghilangkan pengaruh serta kewibawaan para kepala kepada rakyatnya. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mengurangi dan menghilangkan kekuasaan para Kepala yang pada umumnya bertindak sewenang-wenang dan kejam terhadap rakyat. Sebagai realisasi dari pada usaha ini, maka sedikit demi sedikit hak kaum feodal dikurangi dan akhirnya dihapuskan adapun cara yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Kebebasan formal yang dimiliki kaum feodal terus dikurangi.
2. Memberantas tindakan sewenang-wenang yang dijalankan oleh kaum feodal.
3. Dalam tahun 1870 tanah jabatan para Kepala (Bupati, dan pejabat-pejabat pemerintah) dihapuskan.
4. Jumlah para pekerja wajib (*pancen*) di rumah-rumah para Kepala dan di Keraton ditetapkan banyaknya, dan bahkan pada tahun 1882 dihapuskan sama sekali.
5. Jasa-jasa atau penyerahan dari rakyat dilarang.

Dengan adanya ketentuan dan tindakan itu, maka akhirnya kedudukan kaum feodal makin mundur dan bentuk-bentuk feodal lainnya menjadi merosot.

Demikianlah gambaran tentang keadaan masyarakat di daerah Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya,

setelah dilaksanakannya Politik Etika. Memang secara teoritis gagasan pembaharuan yang dilancarkan oleh kaum *ethici* itu pada hakekatnya baik, tetapi dalam praktek yang dijalankan ternyata sering terjadi penyimpangan dan penyelewengan, sehingga menyebabkan keadaan rakyat makin bertambah sengsara dan melarat.

B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERGAYUTAN (RELEVAN) DENGAN ATAUPUN YANG MERUPAKAN EMBIO DARI KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada abad 19 nampak suatu keadaan yang menunjukkan bahwa kekuasaan Belanda makin meluas, sedang di pihak lain kekuasaan tradisional makin merosot. Keadaan seperti itu meliputi pelbagai segi kehidupan: politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Di bidang politik menunjukkan bahwa pengaruh Belanda makin luas dan kuat, berkat intervensi yang secara aktif dan intensif dilakukan dalam hal mencampuri persoalan intern kekuasaan tradisional, seperti misalnya pergantian takhta, pengangkatan pejabat birokrasi kerajaan, persoalan kebijaksanaan politik pemerintahan dan sebagainya. Adanya campur tangan ini membawa akibat yang merugikan bagi kekuasaan tradisional yaitu timbulnya aneksasi yang dilakukan oleh kekuasaan Belanda terhadap wilayah kerajaan. Sehingga wilayah kerajaan makin sempit dan penguasa tradisional makin tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan soal pemerintahan makin menipis pula.

Di bidang sosial-ekonomi nampak suatu keadaan yang menunjukkan makin melemahnya kedudukan kepala daerah bumi putera. Di satu pihak secara berangsur kekuasaan mereka dikurangi dan ditempatkan di bawah pengawasan pejabat asing. Dan di pihak lain kerja mereka dilibatkan dalam sistem eksploitasi ekonomi. Kecuali itu pengaruh mereka terhadap rakyat juga makin dijauhkan. Sedangkan bagi para petani dan penduduk di kalangan kebanyakan, kontak dengan Barat itu ternyata membawa akibat buruk bagi kehidupan mereka. Para petani dibe-

bani tugas mengolah sebagian dari tanahnya untuk ditanami dengan tanaman ekspor dan diharuskan pula menyumbangkan tenaga kerjanya secara paksa pada penguasa kolonial. Di daerah Yogyakarta, keadaan penduduk di kalangan kebanyakan dan para petani lebih menyedihkan. Hal ini disebabkan di samping adanya ketentuan tersebut di atas, juga adanya tindakan yang dilakukan oleh kaum bangsawan untuk menyewakan tanah lungguhnya kepada para penguasa asing. Menurut ketentuan yang berlaku tanah lungguh yang disewakan itu meliputi pula penduduknya. Dengan demikian maka penduduk di daerah tanah lungguh itu berada di bawah kekuasaan pengusaha asing tersebut. Mereka tidak dapat lagi hidup secara bebas, melainkan sangat terikat dan tertekan.

Di bidang budaya nampak bahwa pengaruh kehidupan Barat makin meluas dalam lingkungan kehidupan. Adanya campur tangan kekuasaan Belanda terhadap tradisi yang berlaku baik di dalam kerajaan maupun dalam masyarakat, sehingga menyebabkan timbulnya kekhawatiran di kalangan para penguasa bumi putera dan pemimpin agama, yang menganggap bahwa pengaruh dan kontak itu dapat merusakkan nilai kehidupan tradisional.

Sebagai reaksi terhadap keadaan yang demikian tadi, maka timbullah kegiatan dan usaha untuk melakukan penentangan. Untuk daerah Yogyakarta kegiatan yang menjurus ke arah penentangan terhadap kekuasaan Belanda, pertama-tama datang dari kalangan kerajaan dan lingkungan pondok pesantren.

Sebagaimana kita ketahui di dalam keraton, baik Kasultanan maupun Paku Alaman telah berdiri sekolah-sekolah sebagai tempat belajar bagi anak keluarga Keraton, para pejabat Keraton dan anak para abdi dalem. Melalui pendidikan di sekolah-sekolah ini sedikit demi sedikit ditanamkanlah perasaan cinta terhadap Tanah Air, rasa kebangsaan dan pengenalan terhadap sejarah nenek moyangnya.

Sedangkan di luar lingkungan Keraton, terdapat pula kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai Keraton Reh Kadipaten, pegawai Kawedanan Kejaksanaan dan pegawai Kawedanan Punokawan, yang dengan sukarela terjun di masyarakat untuk memberikan pelajaran kepada penduduk kampung. Pekerjaan ini biasanya dilakukan pada sore hari mulai jam delapan ma-

lam. Dengan penuh ketekunan dan pengabdian mereka. (Guru-guru Kampung) memberi pendidikan dan pengajaran kepada segenap penduduk tanpa membedakan kelas dan tingkatan. Dengan adanya Guru-guru kampung dalam kota Yogyakarta, maka sejak itu dengan tidak terasa semua lapisan masyarakat bersama-sama turut mengenyam pendidikan budi pekerti, rasa kebangsaan dan rasa tanggung jawab bersama atas kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu di pondok pesantren Krapyak Yogyakarta, makin lama makin berkembang dengan pesat dan menunjukkan aktifitasnya yang nyata. Sebagaimana kita ketahui pondok pesantren di samping berfungsi sebagai tempat penanaman kader-kader pemimpin agama. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila kepemimpinan dari gerakan agama banyak muncul dari lingkungan pondok pesantren. Lebih-lebih dengan makin dalamnya penetrasi Barat, maka banyak pemimpin agama merasa ter-panggil untuk memproklamasikan dirinya sebagai "pemimpin mesianistis" Tokoh-tokoh seperti ini misalnya Kyai Kasan Mukmin, yang memproklamasikan dirinya sebagai Imam Mahdi, setelah beliau berhubungan dan berguru pada Kyai Ngabduliusul dari pondok pesantren Krapyak Yogyakarta.

Pangeran Diponegoro juga dipandang oleh masyarakat pada waktu itu sebagai Ratu Adil yang dapat menyelamatkan rakyat dari tekanan dan penindasan kekuasaan Belanda. Karena itu penyerangan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan dan bantuan dari segenap lapisan masyarakat.

Tokoh mesianistis lain yang muncul di daerah Yogyakarta yaitu yang bernama Dietz dan yang mengaku sebagai satu-satunya putra Ratu Kedaton, permaisuri Sultan Hamengkubuwono V. Gerakan tokoh ini nanti akan dibicarakan tersendiri pada bagian di belakang.

Dalam pada itu di Yogyakarta sudah nampak pula tanda adanya "kebangunan nasional", yaitu adanya usaha yang dilakukan oleh suatu golongan terkemuka yang sibuk berusaha menyiapkan berdirinya *Studiefonds* ³⁾ Termasuk dalam kelompok golongan ini antara lain Pangeran Notodirodjo (dari Pakualaman) R. Ng. Dwidjosewojo, Mas Budiardjo, R. Sosrosugondo, dan lain-lain. Sedangkan pusat dari golongan ini tak lain dan tak bukan adalah Mas Ngabehi Sudirohusodo alias Dokter Wahidin. Untuk mempropagandakan berdirinya *Studiefonds* tadi, pada

tahun 1906 Dokter Wahidin mengadakan perjalanan mengelilingi seluruh Jawa, untuk mempropagandakan cita-citanya tersebut, dan sekaligus untuk mencari dukungan serta menarik perhatian para bupati dan orang-orang terkemuka. Aksi dan usaha tersebut tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan dan bantuan dari para bupati serta orang-orang terkemuka. Walaupun demikian tak dapat diingkari bahwa usaha ini pada hakekatnya merupakan benih atau embrio dari pada Kebangkitan Nasional.

Kecuali itu di Yogyakarta pada menjelang lahirnya Kebangkitan Nasional, terdapat pula adanya usaha untuk meneruskan cita-cita R.A. Kartini, yaitu yang dilakukan oleh puteri-puteri Pakualaman Yogyakarta. Mereka kemudian berusaha mengadakan persatuan di kalangan wanita, dan mengadakan kegiatan yang relevan dengan cita-cita R.A. Kartini. Seperti halnya yang diadakan oleh Dr. Wahidin, maka usaha puteri-puteri Pakualaman tersebut juga mengalami kegagalan karena tidak mendapat sambutan yang diperlukan dari kalangan kaum wanita zaman itu

C. INTERAKSI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN BERDIRINYA PARTAI/ORGANISASI

1. *Budi Utomo*

Dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, dan yang didirikan oleh para pelajar STOVIA yaitu Soetomo, M. Suradji, M. Muhamad Saleh, M. Suwarno, M. Gunawan, R.M. Gumbreg, Suwarno dan R. Angka, maka akhirnya dapat dibentuk susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua	: R. Sutomo
Wakil Ketua	: M. Suleman
Sekretaris I	: Suwarno
Sekretaris II	: M. Gunawan
Bendahara	: R. Angka
Komisaris	: M. Suwarno, M. Muhamad Saleh dan lain-lain.

Komisaris Budi Utomo berdiri. Maka pada tanggal 29 Agustus 1908 Dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan Cabang Budi Utomo di Kota Yogyakarta. ⁴⁾ Adapun berita tentang berdiri-

nya Budi Utomo Cabang Yogyakarta ini dapat kita baca dari laporan Budi Utomo Cabang Yogyakarta sebagai berikut:

"Kita penduduk bumi putera di Yogyakarta, kebanyakan priyayi-priyayi *Gouvernement* dan Pakualaman, suka hati sekali mendengar kabar yang baik itu (yang dimaksud adalah berdirinya Budi Utomo dan seruannya kepada semua pelajar-pelajar) akan tetapi meskipun mereka itu terlalu pandai sekalipun, dari sebab hampir semuanya orang muda-muda belaka, menjadi kita menaruh khawatir kalau-kalau mereka itu terlalu berani menempuh jalan yang gawat (banyak bahayanya). Agustus 1908 didirikan *afdeling* Yogya dengan maksud sedapat-dapatnya menolong ikhtiar supaya maksud orang-orang muda itu boleh menjadi selamat yaitu dengan menumpulkan maksud Presiden kita (yang dimaksud di sini ialah Dr. Wahidin sebagai Ketua Budi Utomo Cabang Yogya), 2 perkara: *Studiefonds* dan tatakrama Jawa"⁵⁾

Sementara itu pada tanggal 8 Agustus 1908 diadakanlah rapat persiapan di Jakarta (Batavia) yang membicarakan tentang rencana kongres Budi Utomo. Hadir dalam pertemuan itu antara lain pengurus Budi Utomo Cabang Jakarta dan Wahidin. Dalam pertemuan itu dicapailah kata sepakat untuk memilih Dr. Wahidin sebagai pimpinan kongres dan kota Yogyakarta sebagai tempat kongres.

Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta dibuka dengan resmi pada tanggal 3 Oktober 1908 jam 21.00 malam, dan berlangsung hingga tanggal 5 Oktober 1908 serta bertempat di Gedung *Kweekschool* (Sekolah Guru) Jetis, Yogya.⁶⁾ Dalam kongres itu hadir kurang lebih 300 peserta, di antaranya 20 orang wanita Jawa, dan datang dari Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Surabaya, Probolinggo dan dari Yogya. Para bangsawan dari Pakualaman, pembesar-pembesar Belanda, para Bupati Temanggung, Blora dan Magelang juga ikut hadir dalam Kongres itu. Nampaklah bahwa kongres Budi Utomo yang pertama itu, ternyata dikunjungi oleh wakil-wakil dari segala lapisan rakyat, kaum tua dan muda, golongan Islam, Kristen dan Katholik, golongan-golongan rakyat, mulai dari yang tak bergelar sampai para pangeran.⁷⁾

Adapun yang menjadi pembicara utama dalam Kongres tersebut ialah:

- a. R. Sutomo (Stovia Jakarta)
- b. R. Saroso (*Kweekschool* Yogyakarta)
- c. R. Kamargo (*Hoofd der School* Magelang)
- d. Dr. M. B. Mangunhusodo (Dari Surakarta).
- e. M. Gunawan Mangunkusumo (Stovia Jakarta)

Dalam pidato pembukaan, Dr. Wahidin Sudirohusodo selaku Ketua Penyelenggara Kongres, membentangkan secara panjang lebar tentang tujuan perkumpulan. Selanjutnya, R. Sutomo Ketua Cabang Jakarta, sebagai pembicara kedua, mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Dan kekurangan pengetahuan menjadikan rakyat sebagai umpan obyek eksploitasi bangsa asing. Di Jawa Barat hasrat untuk belajar sangat besar dan sudah umum”.

Dalam kongres itu, pembicara yang paling banyak mendapat reaksi adalah pidato Rajiman Mangunhusodo,^{7a)} yang dalam uraiannya menekankan pada nasionalitet Jawa, perkembangan kesadaran nasional dengan semboyan ”Bangsa Jawa tetap Jawa”. Akibat dari pidatonya yang banyak mengandung unsur reaksioner, aristokratis dan konservatif, maka menimbulkan reaksi dan bantahan antara lain datang dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Dengan tegas Dr. Cipto menolak pendirian Radjiman, yang mengemukakan bahwa ada perbedaan antara bakat bangsa Barat dan Timur dan pengetahuan Barat tidak sesuai pada bangsa Jawa serta tidak memberikan hasil. Dr. Tjipto dengan tegas mengatakan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang besar dan bangsa Jawa perlu mengambil keuntungan dari kemajuan Barat untuk memperbaiki tingkat penghidupannya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa organisasi harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi tiap anak Indonesia. Organisasi ini harus menjadi pimpinan bagi rakyat banyak dan jangan mencari hubungan dengan golongan atasan, bupati dan pegawai-pegawai tinggi lainnya.

Dari Kongres itu jelas sudah nampak adanya suasana yang demokratis. Hal ini terlihat dari pembicaraan yang dilakukan secara bebas, pertukaran pikiran terus terang, argumentasi yang beralasan dalam mempertahankan pendirian, dan lebih-lebih cara melahirkan perasaan terbuka.

Demikianlah setelah melalui pertentangan pendapat dan perdebatan antara kaum muda dan kaum tua akhirnya dapat

dihasilkan suatu pengurus besar pertama yang bercorak "Koalisi" dan yang terdiri dari sembilan orang anggota, ialah:

- a. R.T.A. Tirtokusumo (Bupati Karanganyar) sebagai Ketua.
- b. Dr. Wahidin Sudirohusodo (Dokter pensiun dari Yogyakarta) sebagai Wakil Ketua.
- c. M. Ng. Dwidjosewojo (Guru *Kweekschool* Yogyakarta) sebagai Sekretaris I.
- d. Sosrosugondo (Guru *Kweekschool* Yogyakarta) sebagai Sekretaris II.
- e. Gondoatmodjo (dari Pakualaman) sebagai "*de Thesaurier*" atau Bendahara.
- f. Djojosubroto sebagai Komisaris.
- g. Gondosumarjo (dari Kejaksaan Surakarta) sebagai Komisaris.
- h. Tjipto Mangunkusumo (Dokter dari Demak) sebagai Komisaris.
- i. Soerjodiputro (Kepala Kejaksaan Bondowoso) sebagai Komisaris.

Kecuali itu, Kongres berhasil pula menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar Budi Utomo, yang pada pokoknya menetapkan tujuan perhimpunan sebagai berikut:

"Kemajuan yang selaras (harmonis) buah negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, tehnik dan industri, kebudayaan (kesenian dan ilmu)" 8)

Semangat dan jiwa Kongres Budi Utomo yang diputuskan di Yogyakarta itu ternyata mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat setempat, dan bahkan akhirnya meluas ke berbagai penjuru daerah di Indonesia.

Dalam pada itu rapat-rapat Pengurus Besar segera dilaksanakan. Rapat pertama diadakan pada tanggal 19 – 20 Desember 1908, kedua: 29 Mei 1909 dan ketiga: tanggal 21 – 22 Agustus 1909. Pada rapat yang ketiga dibicarakan suatu ikhtisar untuk mendirikan sebuah surat kabar resmi Budi Utomo, berbahasa Belanda, Melayu dan Jawa. Dan dalam rapat yang terakhir yaitu 9 September 1909 di Yogyakarta, dibicarakanlah persiapan menjelang Kongres II, yang juga akan diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 11 – 12 Oktober 1909. Dalam rapat itu, Sdr. Tjipto Mangunkusumo, mengajukan usul, supaya Budi Utomo lebih

memperluas keanggotaannya, yakni membuka pintunya bagi "India", "Anak-anak Hindia", yaitu bagi semua orang yang lahir, hidup, mati dan dikubur di tanah Hindia (Indonesia). Karena usul tersebut, timbulnya perdebatan sengit antara Dokter Tjipto Mangunkusumo sebagai pemuka politik dan Dokter Radjiman Widyodiningrat sebagai pemuka Kebudayaan.

Pada tanggal 11 – 12 Oktober 1909 diselenggarakanlah Kongres Budi Utomo yang kedua di kota Yogyakarta. Dalam kongres itu Dr. Tjipto Mangunkusumo, R. Soetomo dan M. Goenawan ikut hadir, tetapi tidak ikut menjadi pembicara utama. Yang menjadi pembicara utama tiga orang, ialah Dwidjosewojo, Mohammad Tohir dan Sastrowidjono.

Pada garis besarnya, yang pertama membicarakan laporan pertanggungjawaban masalah keuangan dan organisasi, yang kedua mengulas bidang pendidikan dengan membuat suatu kesimpulan bahwa bantuan keuangan kepada pemuda lebih baik jika dipergunakan untuk belajar ke negeri Belanda, dan yang terakhir mengambil tema, "Bagaimana membina bangsa Jawa"

Pada awal pertumbuhannya, Budi Utomo dapat berkembang dengan pesat, dan pada akhir tahun 1909 telah mempunyai 40 Cabang dengan anggota $\pm$ 10.000 orang. Tetapi keadaan yang demikian ini ternyata tidak dapat dipertahankan, karena terbukti gerak dan langkah Budi Utomo selanjutnya menunjukkan tendensi yang menurun dan sangat lemah. Aktivitasnya hanya terbatas pada penerbitan, majalah bulanan Goeroe Desa dan beberapa petisi yang dibuatnya kepada pemerintah berhubungan dengan usaha meningkatkan mutu sekolah menengah pertama.

Sementara itu dengan berhentinya Tirtokusumo sebagai Ketua Budi Utomo, maka pada tahun 1912 Pangeran Ario Noto Dirodjo dari Pakualaman tampil dan terpilih sebagai Ketua Budi Utomo yang baru. Beliau berusaha dengan sepenuh tenaga mengejar ketinggalan yang dialami Budi Utomo. Hasil yang pertama dicapainya ialah perbaikan tiga buah sekolah netral, satu di Solo dan dua di Yogyakarta. Usaha ini bisa berjalan berkat adanya tunjangan dan bantuan dari Sultan Yogyakarta berupa sebidang tanah seharga f.100.000,- dan derma uang sebanyak f.45.000,- Di samping itu Budi Utomo juga berhasil mendirikan organisasi dana belajar Darmoworo. Usaha ini kemudian mendapat bantuan dari pemerintah berupa uang sebesar f.50.000,- Tetapi dalam perkem-

bangannya, usaha ini tidak banyak membawa hasil.

Akhirnya dengan munculnya berbagai pergerakan politik seperti Sarekat Islam (pada tahun 1912), *Indische Partay* (pada tahun 1912) dan sebagainya yang berhasil menarik massa dan berkembang dengan pesat, menyebabkan Budi-Utomo makin mundur dan pengaruhnya di masyarakat makin berkurang.

Demikianlah gerakan Budi-Utomo yang telah mengawali timbulnya pergerakan nasional di Indonesia, walaupun kedudukannya secara politik kurang begitu penting, 54 hal namun satu hal yang penting dari Budi-Utomo ialah bahwa *di dalam tubuhnya telah ada benih semangat nasional yang pertama dan karena itu ia dapat dipandang sebagai induk pergerakan nasional.* 9)

2. Syarekat Islam

Berdirinya Syarekat Islam sebenarnya merupakan kelanjutan dari pada Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 di kota Solo. Adapun yang melatar belakangi timbulnya perkumpulan ini adalah "Faktor ekonomi", yaitu mengadakan perlawanan terhadap "pedagang perantara" (pedagang Cina) yang memegang peranan penting di dalam lapangan perdagangan.

Di samping itu, sesuai dengan nama organisasinya, maka dari faktor agama di sini menunjukkan adanya perbedaan, baik dengan pedagang Cina maupun dengan penguasa Eropa. Jelaslah bahwa perlawanan yang diadakan itu tidak semata-mata ditujukan kepada pedagang Cina, melainkan perlawanan terhadap semua bentuk penindasan dan kesombongan rasial, seperti misalnya perlawanan terhadap rencana *Kerstenings-politiek* (politik peng-kristenan) dari kaum zending, perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan dari pihak ambtenar-ambtenar Bumi Putera dan Eropa.

Oleh karena itu maka dalam waktu yang singkat perkumpulan ini dapat berkembang dengan pesat dan bahkan keanggotaannya tidak terbatas di lingkungan kaum pedagang Islam saja, melainkan sampai di kalangan rakyat jelata. Mengenai perkembangan keanggotaan S.I. dapat dikemukakan bahwa pada saat didirikan (10 September 1912) S.I. mempunyai anggota ± berjumlah 60.000 orang dan selama tahun-tahun pertama kehidupannya anggota SI bertambah dengan pesat dan berlipat ganda

jumlahnya. Dengan pertumbuhan yang begitu pesat dialami SI itu, menyebabkan Sarekat Islam menjadi organisasi raksasa dengan keanggotaan yang meliputi seluruh lapisan masyarakat. Apa akibatnya? Keadaan ini menyebabkan pemerintah Hindia Belanda menjadi khawatir dan penuh kecurigaan. Segala tindakan dan langkah SI selalu diawasi dan diikuti dengan penuh kewaspadaan.

Pada waktu Syarekat Islam mengadakan Kongresnya yang pertama di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913, maka Tjokroaminoto sebagai pemimpin kongres dengan tegas menerangkan bahwa Syarekat Islam bukan partai politik dan tidak beraksi melawan pemerintah Belanda.¹⁰⁾ Dalam kata pembukaannya beliau antara lain menegaskan bahwa:

"Kami bersikap loyal terhadap Gubernemen. Kami senang di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda. Bohong jika ada yang berkata, bahwa kami hendak merusak keamanan. Tidak benar kami hendak bertempur. Yang menyangka demikian adalah orang gila! Tidaklah pemberontakan atau kekacauan yang kami maksud, sekali-kali tidak!".¹¹⁾

- Tampak di sini pendirian pemimpin-pemimpin Syarekat Islam kelihatan masih bersifat lemah dan meminta perlindungan dari pemerintah. Tetapi walaupun begitu, dengan agama Islam sebagai lambang persatuan dan dengan penuh kemauan mempertinggi derajat rakyat, maka Kongres itu dapat mencapai hasil yang besar dan Cabang Syarekat Islam tersebar di seluruh Jawa sebagai banjir yang hebat.

Sebenarnya Syarekat Islam pada dasarnya tentu menentang penjajahan Belanda, tetapi keadaan pada tahun 1913 tidak mengizinkan untuk bertindak terlalu keras dan ceroboh.

Kongresnya yang kedua diadakan di Solo antara lain memutuskan bahwa Syarekat Islam hanya terbuka bagi bangsa Indonesia yang bukan pegawai pemerintah. Tindakan ini diambil untuk tidak mengubah corak Syarekat Islam sebagai Organisasi rakyat. Dalam hal ini menyebabkan pemerintah kolonial tidak senang dan makin khawatir melihat pertumbuhan Syarekat Islam yang makin besar.

Dalam pada itu, permintaan Syarekat Islam untuk mendapatkan status badan hukum masih belum dapat diluluskan dan bahkan akhirnya ditolak oleh Gubernur Jendral Idenburg. Dan pada tanggal 30 Juni 1913 Pemerintah menetapkan, bahwa Cabang-

cabang Syarekat Islam di daerah-daerah harus berdiri sendiri. Ini berarti bahwa Pemerintah memberikan *Rechts-persoon* kepada masing-masing cabang Syarekat Islam daerah. Bagi Syarekat Islam tindakan Pemerintah itu merupakan taktik politik untuk mematikan benih kesatuan nasional, jadi suatu praktek dari sistem *divide et impera*.

Walaupun demikian, ternyata arus gerakan Syarekat Islam ini tidak dapat dibendung lagi. Ini terbukti dari makin banyaknya cabang Syarekat Islam yang minta *Rechtspersoon* kepada Pemerintah. Dalam tahun 1914 saja telah ada 56 perkumpulan lokal Syarekat Islam yang mendapatkan *rechts-persoon*.¹²⁾

Sesuai dengan anjuran pemerintah maka dimulailah usaha untuk membentuk Central Syarekat Islam (CSI), yang beranggota Syarekat-Syarekat Islam lokal.

Sementara itu pada tanggal 18 s/d 20 April 1914 di Yogyakarta diadakan rapat untuk menetapkan Anggaran Dasar – Central Syarekat Islam. Dalam rapat itu dibentuk juga suatu pengurus yang diketuai oleh Oemar Said Tjokroaminoto, R. Goenawan sebagai Wakil Ketua dan R. Achmad sebagai Sekretaris. Sedang H. Samanhudi diangkat sebagai anggota kehormatan, dan H. Moh. Dahlan sebagai penasehat. Sementara itu Sentral Syarekat Islam mengajukan permintaan pengakuan *rechtspersoon* dan permintaan itu baru dikabulkan oleh Pemerintah dengan beslit tanggal 18 Maret 1916. Di dalam beslit itu ditegaskan bahwa pengurus CSI diwajibkan untuk mengawasi tindakan dari pada Pengurus atau anggota daripada Syarekat Islam lokal. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu di cabang yang tidak diharapkan, CSI-lah yang harus mempertanggungjawabkannya.

Dari sini kelihatan betapa licinnya taktik yang dilancarkan oleh tokoh-tokoh Syarekat Islam, untuk menerobos akal Pemerintah yang berusaha memecah belah tubuh Syarekat Islam. Kecuali itu di pihak lain nampak pula ketajaman penglihatan Gubernur Jendral Idenburg. Sebab sekalipun Central Syarekat Islam berupa Pengurus Besar yang mengadakan kongres dan yang dikunjungi oleh utusan-utusan dari seluruh cabangnya, dan sekalipun pada kongres-kongres itu dihasilkan keputusan yang dijadikan pedoman bersama, namun ternyata CSI, tidak mempunyai kontrol yang betul dan tidak dapat mengadakan disiplin yang teratur atas cabang-cabangnya. Dengan demikian maka susunan Syarekat Islam tinggal lemah. Walaupun lemah tetapi organisasi ini menunjukkan

bahwa sejak lahirnya telah menimbulkan kebingungan dan kekawatiran baik di kalangan penduduk asing maupun di kalangan pemerintah sendiri.

Central Syarekat Islam mengadakan kongresnya pertama di Bandung, pada tanggal 17 – 24 Juni 1916. Kongres itu dihadiri oleh ± 80 utusan dari Syarekat Islam Lokal yang mewakili jumlah anggota ± 600.000. Kongres ini disebut sebagai Kongres Nasional Syarekat Islam yang pertama". Menurut keterangan Tjokroaminoto, disebut "Nasional" karena Syarekat Islam bertujuan pada pembentukan kesatuan erat dari semua suku bangsa di Indonesia, untuk bersama-sama menjunjung bangsa sebagai suatu *nation*.¹³⁾ Adapun hasil yang menonjol dari pada kongres ini antara lain ialah:

- a. Zelfbestuur (Pemerintahan sendiri)
- b. Tuntutan adanya wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan.
- c. Desentralisasi.
- d. Otonomi.

Dari hasil kongres itu makin nampak bahwa langkah politik Central Syarekat Islam makin tegas dan progresif. Namun demikian, pada waktu itu Syarekat Islam (CSI) belum berani secara terang terang menamakan dirinya sebagai "Partai Politik",¹⁴⁾ tetapi sifat yang nampak pada dirinya jelas merupakan gerakan yang bersifat "religious, nationalistis, demokratis dan ekonomis".

Ketika Central Syarekat Islam mengadakan kongres di Surabaya (tahun 1918), maka mulai terjadi perpecahan politik di dalam tubuhnya. Perpecahan ini timbul karena adanya oposisi, yang dilakukan oleh Semaun dengan kawan-kawannya. Adanya perpecahan ini jelas sangat merugikan perjuangan dan cita-cita Syarekat Islam. Akhirnya, makin lama pengaruh dan peranan Syarekat Islam sebagai partai yang besar makin menjadi mundur.

3. Indische Partij (IP)

Menurut saat berdirinya, *Indische Partij* merupakan kumpulan ketiga sesudah Budi Utomo dan Syarekat Islam, dan yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dr. Douwes Dekker alias Danudirdjo Setia Buddhi, Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat alias Ki Hajar Dewantoro.

Berbeda dengan Budi Utomo dan Syarekat Islam, maka *Indische Partij* didirikan dengan tujuan yang khusus bercorak

politik ialah memperbaiki posisi sosial dengan cara melawan politik Belanda.¹⁵⁾ Sedang semboyannya yang terkenal ialah: "Hindia untuk Indiers". Artinya 58 hal "Hindia" (nama Indonesia pada waktu itu) harus dianggap sebagai Tanah Air oleh mereka yang lahir dan bertempat tinggal di sini, tanpa pengecualian jenis kebangsaan mereka (baik mereka itu golongan Indo-Eropa, Indo-Cina dan sebagainya).

Sementara itu untuk persiapan didirikannya *Indische Partij*, maka Douwes Dekker mengadakan perjalanan propaganda di pulau Jawa yang dimulai pada tanggal 15 September dan berakhir pada tanggal 3 Oktober 1912. Di dalam perjalanan propaganda inilah ia bertemu dengan Dokter Tjipto Mangunkusumo, yang segera mengadakan pertukaran pikiran mengenai soal-soal yang bertalian dengan pembinaan partai yang bercorak nasional. Di samping itu, di Bandung ia juga bertemu dan sekaligus mendapat dukungan dari Suwardi Surjaningrat dan Abdul Muis. Sedangkan pada waktu berada di Yogyakarta ia mendapatkan sambutan yang hangat dari para pengurus Budi Utomo. Sebagai hasil yang nyata dari perjalanan propaganda Dr. Douwes Dekker ini, ialah didirikannya *Indische Partij* pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung, dan kemudian diikuti berdirinya Cabang dengan anggota kurang lebih berjumlah 7300 orang, kebanyakan Indo-Belanda. Sedangkan jumlah anggota bangsa Indonesia adalah 1500 orang.

Sebenarnya jiwa pendorong dan penggerak dari *Indische Partij* terletak pada para pendirinya yaitu Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat. Adapun kegiatan dan usaha dari cabang-cabangnya termasuk pula *Indische Partij* Cabang Yogyakarta boleh dikata tidak berarti dan bahkan tidak nampak nyata. Oleh karena itu tatkala ketiga tokoh *Indische Partij* tadi ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda, maka kegiatan *Indische Partij* makin lama makin menurun. Akhirnya setelah kehilangan ketiga pimpinannya tadi *Indische Partij* berganti nama menjadi Partai Insulinde. Setelah Douwes Dekker kembali dari negeri Belanda, maka pada bulan Juni 1919 berganti nama lagi menjadi *National Indische Partij* (NIP). Dalam perkembangannya ternyata partai ini tidak mempunyai pengaruh di kalangan rakyat banyak, melainkan hanya merupakan perkumpulan orang terpelajar.

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai suatu organisasi yang bergerak di

lapangan sosial, pendidikan dan keagamaan didirikan dengan resmi oleh K.H. Akhmad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912 atau bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1330 H di Yogyakarta. Susunan pengurus yang pertama itu adalah sebagai berikut: H.A. Dahlan, Abdullah Sirad, H. Ahmad, H. Abdurahman, R.H. Sarkowi, H. Muhammad, R.H. Djaelani, H. Anis dan H.M. Fakili.

Adapun yang mendorong berdirinya Muhammadiyah itu disebabkan karena:

- a. Ummat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Qur'an dan Hadisth Nabi, sehingga menyebabkan perbuatan *syirik*, *bid'ah* dan *khurafat* makin merajalela. Akibatnya Islam berada dalam keadaan beku dan tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi.
- b. Keadaan masyarakat Islam sangat menyedihkan baik dalam soal politik, ekonomi, sosial maupun budaya, akibat dari adanya penjajahan di Indonesia.
- c. Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara ummat Islam akibat dari tidak tegaknya *ukhuwah Islamiyah* serta tidak adanya suatu organisasi Islam yang kuat.
- d. Kegagalan daripada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak memenuhi tuntutan kemajuan jaman akibat dari sikap mengisolasi dari pengaruh luar serta disebabkan adanya sistem pendidikan kolot yang tidak lagi sesuai dengan panggilan jaman.
- e. Karena keinsyafan akan adanya bahaya yang mengancam kehidupan agama Islam, berhubungan dengan kegiatan Missi dan Zending Kristen di Indonesia yang makin lama makin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat.

Memang keadaan masyarakat Islam pada waktu kelahiran Muhammadiyah sangat menyedihkan, karena ditimpa oleh berbagai krisis. Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Qur'an dan Hadisth. Ummat Islam hidup dalam alam kebekuan dan kemunduran. Di mana-mana merajalela *bid'ah*, *syirik* dan *khurafat*, sehingga ummat Islam hidup di dalam alam dan suasana yang penuh diliputi oleh konservatisme, formalisme dan tradisionalisme. Dalam suasana masyarakat yang demikian itu, maka K.H. Akhmad Dahlan, kemudian mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Muhammadiyah.

Kemudian pada tanggal 20 Desember 1912 yaitu sesudah Muhammadiyah berdiri dengan resmi, maka K.H. Akhmad Dahlan mengajukan surat permintaan *rechtspersoon* kepada pemerintah kolonial Belanda. Mula-mula ijin yang diberikan hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta, yaitu dengan beslit tanggal 22 Agustus 1914.

Dalam perjuangannya, usaha dan kegiatan Muhammadiyah tidak hanya terbatas dalam tabligh dan dakwah, tetapi meliputi berbagai kegiatan yang menyangkut segi keagamaan, sosial dan pendidikan. Dalam segi keagamaan, kegiatan tabligh dan dakwah lebih diintensifkan, antara lain dengan jalan memberikan kursus dan pelajaran agama Islam di kota sampai ke pelosok kampung, dari lapisan bawah hingga ke atas. Sedang dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Muhammadiyah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan agama, dan sekaligus berusaha mendirikan berbagai sekolah agama dan madrasah. Pendek kata masalah pendidikan dan pengajaran mendapatkan tempat yang istimewa dalam perkumpulan. Oleh karena itu maka pada tahun 1923, mulai tanggal 30 Maret hingga 2 April secara mendalam dibicarakan lembaga yang menentukan corak masyarakat di kemudian hari, sehingga akhirnya pada tanggal 14 Juli 1923, berdirilah suatu badan yang diberi nama "Majelis Pimpinan Pengajaran Muhammadiyah". Orang pertama yang menempati kursi ketua ialah: M.Ng. Djojosingito.

Di bidang Sosial, Muhammadiyah dengan giat mendirikan poliklinik, rumah sakit, memelihara anak yatim-piatu, menerbitkan buku agama, bacaan dan surat kabar dan lain sebagainya.

Mengingat bahwa perkembangan perkumpulan Muhammadiyah makin meluas dan tersebar hingga di luar daerah Yogyakarta (misalnya Pekalongan, Sala, Garut dan sebagainya) maka K.H. Akhmad Dahlan mengajukan permohonan ijin agar Muhammadiyah di luar daerah Yogyakarta tersebut dapat berdiri. Permohonan ini dikabulkan dengan beslit dari Pemerintah Hindia Belanda No.40 tanggal 16 Agustus 1920. Kemudian pada 7 Mei 1921, beliau mengajukan permohonan ijin lagi untuk kesempurnaan maksud dan tujuan perkumpulan Muhammadiyah serta ketegasan berdirinya cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia (dulu Hindia Belanda). Permohonan ini juga dikabulkan dengan beslit nomor 3 tanggal 2 September 1921.

Demikianlah, walaupun Muhammadiyah sebagai Organisasi tidak bergerak di lapangan kegiatan politik, tetapi Muhammadiyah

selamanya tidak pernah menentang politik, dan bahkan pengikutnya dengan leluasa diperbolehkan masuk dalam perkumpulan politik.

5. Gerakan Ratu Adil

Gerakan ini pada umumnya berasal dari seseorang yang menerima peranan sebagai pemimpin agama, nabi atau juru selamat, dan diikuti oleh segolongan orang yang percaya kepadanya. Gerakan ini selalu bersandar pada segi-segi gaib dan umumnya menjelma dalam segi-segi eskatologis dan milenaristis. Memang gerakan itu harus dipandang sebagai gerakan yang bersifat revolusioner dalam pengertian bahwa gerakan itu menghendaki suatu perubahan mutlak. Secara singkat gerakan itu menghendaki munculnya suatu *milenium*, yaitu harapan terhadap datangnya jaman keemasan yang tidak mengenal penderitaan rakyat dan serba ketidak-adilan.

Untuk daerah Yogyakarta, gerakan seperti ini timbul pada sekitar tahun 1918, yaitu dengan munculnya orang yang bernama Dietz. Ia mengaku sebagai satu-satunya putra Ratu Kedaton, permaisuri Sultan Yogyakarta yang telah wafat, Hamengku Buwono V. Ia dibuang ke Menado bersama-sama ibunya dan kemudian ia diangkat sebagai anak oleh pensiunan Opsir Kesehatan Mayor Dietz, karena itulah ia kemudian disebut dengan nama Dietz. Nama sebenarnya ialah Gusti Muhammad dan ketika berusia 15 tahun ia memakai nama Pangeran Suryengalogo.

Agaknya Dietz alias Gusti Muhammad itu ingin menuntut hak penggantian takhta kraton Yogyakarta, dan memegang peranan sebagai dukun dan *guru ngelmu* serta menyebut dirinya sebagai Gusti Muhammad Herutjokro. Dengan gelarnya itu ia bertujuan untuk menjadi juru selamat. Karena kepandaiannya dalam masalah pengobatan, dan lagi ia memiliki ajaran mistik yang terkenal dengan nama *ilmu kamuksan*, maka ia dapat memperoleh pengikut dan pengaruh yang luas. Juga karena gelar kebangsawannya yang tinggi itu pula menyebabkan ia dapat menarik beberapa pengikut di lingkungan tertentu dari daerah Yogyakarta.

Pengikut dari gerakan Ratu Adil ini pada dasarnya terdiri dari segolongan anggota bangsawan yang rendah dan sejumlah pengikut yang berasal dari golongan masyarakat yang rendah atau orang kebanyakan.

Dalam gerakannya itu ia mengumpulkan pengikutnya dengan mengumumkan dirinya sebagai Ratu Adil dan calon pemegang

takhta di Yogyakarta. Meluasnya gerakan ini ke seluruh daerah Jawa Tengah Selatan, diikuti dengan meluasnya mitos tentang kepemimpinannya sebagai juru selamat, dengan segala ajaran dan petunjuknya kepada rakyat. Sebagai contoh di daerah Surakarta tersebar berita bahwa pewaris kesultanan yang sebenarnya adalah Pangeran Surjengalogo yang meninggal dalam beberapa tahun sebelumnya, tetapi ia telah menjelma kembali ke dalam diri Gusti Muhammad Herutjokro yang akan menjadi Ratu Adil dan akan membawa keselamatan ummat. Kedatangannya itu sebelumnya akan didahului oleh suatu bencana, karena itu dianjurkan agar orang mau menjadi pengikut Gusti Muhamad supaya selamat. Selain itu juga terdapat kepercayaan bahwa dengan memakai minyak sempurna yang dibawa oleh Ratu Adil itu, maka orang dapat menyelamatkan diri dari bencana. Bahkan tersebar pula kepercayaan bahwa Gusti Muhamad itu seorang pemimpin bala tentara siluman yang tidak dapat kelihatan. Gerakannya ini ternyata berhasil memikat pengikut-pengikutnya dari daerah Semarang, Kedu, Yogyakarta dan Surakarta. Sedangkan secara terperinci tidak terdapat catatan mengenai aktivitas dan tindakan dari gerakan ini. Hanya saja, dapat disebutkan bahwa pada saat ia tiba di Surakarta ia disambut oleh dua ribu orang, dan ada pengerahan tenaga dari Yogyakarta sebanyak dua ratus orang, dan dua ratus lima puluh orang lainnya berasal dari tempat lain yang dipekerjakan dalam pembangunan istananya. Selain itu di Klaten terdapat pula pengikutnya sebanyak tiga ratus orang, dan di daerah Wonogiri sebanyak seratus lima puluh orang. Jadi dengan demikian karena adanya nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam gerakan ini, yaitu sebagai pewaris takhta kerajaan di Yogyakarta, ditambah dengan ajaran mesionistis, maka kedudukan pemimpin gerakan tersebut sangat diperkuat.

Demikianlah sekilas tentang adanya gerakan Ratu Adil di daerah Yogyakarta, dan ternyata gerakannya itu mempunyai pengaruh dan pengikut yang luas terutama di daerah Jawa Tengah bagian Selatan.

6. Taman Siswa

Sebelum Perguruan Taman Siswa berdiri, maka di Yogyakarta telah berdiri suatu himpunan yang dikenal dengan nama "Paguyuban Selasa Kliwon"

Anggota-anggota himpunan ini bermaksud pada tiap hari Selasa

Kliwon dan memperbincangkan cara-cara terbaik untuk mengembangkan semangat kemerdekaan dan untuk memperoleh kebahagiaan perorangan, bangsa-bangsa dan ummat manusia. Kecuali itu, himpunan ini juga mempelajari cara-cara pendidikan yang tepat dan baik agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai bagi generasi-generasi muda.¹⁶⁾

Pengurus Himpunan Selasa Kliwon itu ialah: Ketua Ki Ageng Surjomataram dengan anggota-anggotanya Ki Sutatmo Surjokusumo, Ki Pronowidigdo, Ki Prawirowiworo, Raden Mas Gondomatmodjo, Raden Mas Subono, Ki Surjoputro, Ki Surjodiputro, Sutopo Wonobojo, Surjodirdjo dan Ki Hadjar Dewantoro. Setelah Taman Siswa berdiri yaitu pada tanggal 3 Juli 1922 dan yang didirikan oleh Raden Mas Suwardi Surjaningrat di Mataram, Yogyakarta, maka Himpunan se Selasa Kliwon tersebut kemudian dibubarkan. Dengan demikian Taman Siswa dapat dianggap sebagai penerus Himpunan Selasa Kliwon. Pada mulanya Perguruan Taman Siswa itu bernama *Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa* (Instituut Pendidikan Nasional Taman Siswa) dan pada waktu berdirinya, hanya bermodalkan satu kelas Taman Indria dengan 20 orang murid.

Adapun yang menjadi azas Taman Siswa tahun 1922 itu secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷⁾

Pasal ke 1 dan ke 2 mengandung dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Bila ditetapkan kepada pelaksanaan pengajaran, maka hal itu merupakan usaha mendidik murid-murid supaya dapat berperasaan, berpikiran dan bekerja merdeka di dalam batas-batas tujuan mencapai tertib damainya hidup bersama. Di dalam pasal 1 termasuk juga dasar kodrat alam, yang diterangkan perlunya, agar kemajuan sejati dapat diperoleh dalam perkembangan kodrati, yang terkenal sebagai "evolusi". Dasar ini mewujudkan "sistem among", yang salah satu seginya ialah mewajibkan guru-guru sebagai "pemimpin yang berdiri di belakang", tetapi mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak didik untuk berjalan sendiri. Inilah yang disebut dengan semboyan "*Tut Wuri Handayani*". Di samping itu diharapkan pula, agar guru dapat membangkitkan pikiran murid bila berada di tengah-tengah murid dan memberi contoh bila berada di depan mereka.

Pasal 3 menyinggung kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi dan politik. Kecenderungan bangsa kita untuk menyesuaikan

diri dengan hidup dan penghidupan ke barat-baratan menimbulkan pelbagai kekacauan. Sistem pengajaran yang timbul dianggap terlampau mementingkan kecerdasan pikiran yang melanggar dasar-dasar kodrati yang terdapat dalam kebudayaan sendiri, sehingga tidak menjamin keserasian dan dapat memberi kepuasan. Inilah yang disebut dasar budaya.

Pasal 4 mengandung dasar kerakyatan. Tidak ada pengajaran bagaimanapun tingginya, dapat berguna, apabila hanya diberikan kepada sebagian kecil orang dalam pergaulan hidup.

Pasal 5 merupakan asas yang sangat penting bagi semua orang yang ingin mengajar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya. Pokok dari asas ini ialah percaya kepada kekuatan sendiri.

Pasal 6 berisi persyaratan dalam mengejar kemerdekaan diri dengan jalan keharusan untuk membelanjai sendiri segala usaha.

Pasal 7 mengharuskan adanya keikhlasan lahir-batin bagi guru-guru untuk mendekati anak didiknya.

Sebenarnya asas-asas Taman Siswa tersebut merupakan perpaduan antara pengalaman dan pengetahuan Suwardi Suryaningrat tentang aliran pendidikan Barat dengan aliran kebatinan yang mengusahakan "kebahagiaan diri bangsa dan kemanusiaan"

Dengan berdirinya Taman Siswa, maka timbul berbagai kritik dan dukungan. Beberapa pihak mengeritik dan menuduh Ki Hadjar Dewantara akan mendirikan Sekolah Komunis. Ada pula kritik yang mengatakan bahwa pernyataan Asas Taman Siswa itu berarti memutar jarum ke belakang.

Semua kritik itu tidak mendapat jawaban dan tanggapan Ki Hadjar Dewantara, bahkan beliau mengajurkan semboyan "delapan tahun berdiam diri" dan bekerja sekuat-kuatnya serta tidak boleh berpropaganda dengan mengadakan rapat-rapat umum.

Adapun kegiatannya selama delapan tahun berdiam diri itu adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Desember 1922 Ki Hadjar Dewantara membicarakan kegiatan masa depan Taman Siswa dengan Surjokusumo. Hasil pembicaraan itu ialah dibentuknya Badan Pusat Taman Siswa pada tanggal 6 Januari 1923. Anggota badan ini adalah Surjokusumo sebagai Ketua, Surjoputro sebagai Wakil Ketua, Ki Hajar Dewantara sebagai Sekretaris, dan Komisariss-komisariss: Pronowidagdo, Sutopo Wonobojo, Subono Rudjito dan Wirjodihardjo.

Di samping itu Badan Pusat juga memutuskan untuk memberikan "hak leluasa" kepada Ki Hajar Dewantara, sehingga dia mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memutuskan perihal perguruan Taman Siswa.

Dari tanggal 20 sampai 22 Oktober 1923 Taman Siswa mengadakan Kongres di Yogyakarta dengan hasil terpenting sebagai berikut:

- a. Mengumumkan bahwa Taman Siswa merupakan "badan wakaf" (*instituut* pendidikan yang berdiri sendiri bebas dari pemerintah).
- b. Menyatakan prinsip-prinsip pokok dari Taman Siswa.
- c. Menyusun kembali *Instituutraad* menjadi *Hoofdraad* (Majelis Tinggi), yang kemudian diubah lagi menjadi Majelis Luhur sekarang ini.

Sesudah Kongres Taman Siswa berakhir, maka perguruan ini mengalami perkembangan yang pesat dan di mana-mana berdiri cabang-cabangnya, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera dan kemudian sampai Kalimantan. Sedang perguruan Taman Siswa di Yogyakarta yang pada mulanya hanya membuka bagian Taman Anak dan Taman Guru karena terdorong oleh keadaan yang mendesak maka kemudian membuka bagian Taman Muda dan Taman Dewasa. Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta itu terdiri dari sebuah MULO dengan 238 murid, Sekolah rendah dengan 362 murid, dan *Schakelschool* dengan 97 murid. Dalam pada itu di kota-kota seperti Surabaya, Jakarta, Tegal dan Malang, Sekolah-sekolah Taman Siswa juga mengalami sukses yang besar. Di Surabaya misalnya, terdapat Taman Indria dengan tujuh guru, dan 420 murid, Sekolah rendah di Pasarkeling dengan satu guru dan 32 murid. Di Jakarta terdapat Taman Anak-anak dengan 60 murid di Kemayoran dan Sekolah Rendah (semacam HIS) dengan 200 murid di Jatibaru.

Jelaslah bahwa dalam pertumbuhannya perguruan Taman Siswa makin lama makin bertambah besar dan jumlah muridnya pun makin bertambah banyak pula. Menjalarnya Taman Siswa di mana-mana itu tidak hanya menggembirakan hati tetapi sebaliknya seringkali juga membawa kesukaran. Karena itu dan ditambah pula oleh perkembangan keadaan yang terjadi di waktu-waktu terakhir, maka diusulkan agar segera diadakan Kongres Taman Siswa.

Kongres Nasional pertama Taman Siswa diadakan pada tanggal 6 sampai 15 Agustus 1930 di perguruan pusat Taman Siswa di Yogyakarta. Para peserta datang dari 52 buah cabang, yakni 23 dari Jawa Timur, 13 dari Jawa Tengah, 9 dari Jawa Barat, 3 dari Sumatra, 3 dari Kalimantan dan dari Madura. Ternyata kongres itu dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mencetuskan keputusan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan Taman Siswa seluruhnya. Adapun hasil utama dari kongres adalah sebagai berikut:

- a. Menerima baik alasan-alasan berdirinya Taman Siswa.¹⁸⁾
- b. Mengemukakan prinsip-prinsip pedoman pendidikan Taman Siswa. Dan yang menjadi sendi-sendi pendidikan Taman Siswa ini adalah:
 - 1) Taman Siswa bertujuan perkembangan nasional berlandaskan ketujuh prinsip pokok yang diterima baik dalam kongres tahun 1923.
 - 2) *National Onderwijs Instituut* diganti menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa berpusat di Yogyakarta.
 - 3) Taman Siswa merupakan suatu Yayasan yang berdiri sendiri.
 - 4) Taman Siswa membentuk suatu konsolidasi di mana setiap cabang diintegrasikan ke dalamnya di bawah bimbingan perguruan pusat.
 - 5) Taman Siswa merupakan suatu keluarga, di mana Ki Hajar Dewantara adalah Bapak, dan Taman Siswa di Yogyakarta sebagai ibu.
 - 6) Tiap-tiap Cabang Taman Siswa mesti membantu cabang-cabang lainnya atau berprinsip saling bahu membahu.
 - 7) Taman Siswa mesti diurus sesuai dengan demokrasi akan tetapi demokrasi haruslah tidak mengganggu ketertiban dan perdamaian Taman Siswa sebagai keseluruhan.
- c. Memilih anggota-anggota *Hoofdraad*. Untuk ini maka terpilihlah anggota-anggota Majelis Luhur sebagai berikut:
 - 1) Badan Pusat Ketua I: K.H. Dewantara.
Ketua II: Pronowidagdo, Ketua III: Tjokrodirdjo. Anggota-anggota: Sadikin, Puger, Kadirun, Safiudin, dan

Sarmidi Mangunsarkoro.

- 2) Sekretariat: Ketua: K.H. Dewantara, Komisaris-komisaris: Sudarminta, Sukemi dan Sayoga.
- 3) Dewan Penasehat: Seksi Pendidikan: Hardjosusastro, Seksi Administrasi: Rudjito, Seksi Hukum: Sujudi.
- 4) Dewan Daerah: Jawa Barat, Sarmidi Mangunsarkoro, Jawa Tengah: Sukemi, Jawa Timur: Djojoprajitno dan Safiudin Surjoputro.

Demikianlah sekilas perkembangan dan pertumbuhan Perguruan Taman Siswa hingga Kongres nasionalnya yang pertama, dan ternyata dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat serta mendapat dukungan di kalangan masyarakat biasa maupun tokoh-tokoh pergerakan pada waktu itu.

7. Organisasi Kepemudaan

Tidak dapat diingkari bahwa Budi Utomo merupakan pergerakan pemuda yang pertama didirikan, karena pada waktu lahirnya (20 Mei 1908) sebagian besar daripada pendirinya ialah: para pelajar dari STOVIA. Tetapi dalam perkembangannya Budi Utomo tidak dapat mempertahankan sifat dan semangat kepemudaan dan bukan lagi merupakan perkumpulan pemuda, melainkan merupakan perkumpulan kaum tua. Karena sejak kongres di Yogyakarta (5 Oktober 1908) sebagian besar anggota Budi Utomo terdiri dari ambtenar dari golongan bangsawan dan pimpinannya dipegang oleh kaum tua.

Makin lama golongan pemuda yang merasa tidak puas terhadap Budi Utomo, kemudian mendirikan organisasi pemuda baru, yaitu "Tri Koro Darmo", didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta oleh beberapa orang pemuda antara lain Dr. R. Satiman Wiryosandjoyo, Kadarman, Sumardi.

Yang diterima menjadi anggota perkumpulan ini hanyalah anak sekolah yang berasal dari Jawa dan Madura. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tri Koro Darmo merupakan perkumpulan pemuda pertama yang sesungguhnya.

Asas dan tujuan organisasi ini, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, ialah:

- a. Menimbulkan pertalian antara murid-murid Bumiputra pada sekolah menengah dan kursus vak keguruan.

- b. Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya.
- c. Membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan ketiga asas itulah maka organisasi ini dinamakan Tri Koro Darmo.

Perkumpulan ini dalam waktu yang singkat telah berkembang dan mempunyai cabang-cabangnya antara lain di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan di berbagai kota besar di Jawa lainnya. Untuk menghindari timbulnya kesan yang Jawa-sentris maka dalam kongresnya di Solo tanggal 12 Juni 1918 namanya diubah menjadi *Jong Java*.

Jong Java ini pada pokoknya bergerak dalam lapangan kebudayaan, pendidikan dan olah raga. Hal ini selaras dengan ketetapan kongres bulan Mei 1922 yang menetapkan untuk tidak mencampuri urusan politik, dan tidak memperkenankan anggota-anggotanya mengambil bagian aktif dalam politik. Namun demikian, dengan makin meningkatnya perjuangan kemerdekaan nasional, maka memaksa *Jong Java* untuk ikut bergerak dalam lapangan politik. Hal ini terlihat dalam pidato-pidato yang bersifat politik yang selalu terdengar di berbagai kongresnya, bahkan pada tahun 1926 dengan tanpa dinyatakan *Jong Java* juga ikut dalam politik.

Yogyakarta sebagai kota pergerakan dan kota budaya tak luput pula dari pada kegiatan *Jong Java*. Di kota ini pula sampai dua kali *Jong Java* mengadakan kongresnya, yaitu Kongres yang diadakan pada bulan Desember 1924 dan kongres pada tanggal 25 -- 31 Desember 1928. Kedua kongres yang diadakan di Yogyakarta ini mempunyai arti penting bagi *Jong Java* karena: kongresnya pada bulan Desember 1924 itu terdapat suatu pidato politik yang dikemukakan oleh pemuda Darsono, di mana ia memberikan penjelasan. Pidato itu mendapat reaksi hebat dari Mangkunegoro VII selaku pelindung *Jong Java*, yang dengan tegas menolak *Jong Java* ikut dalam politik.

Sedangkan pada kongresnya tanggal 25 -- 31 Desember 1928, juga mempunyai arti penting karena dalam kongres itu telah berhasil mengambil keputusan untuk menyetujui "jalan fusi" dalam menyatukan organisasi pemuda. Ini menunjukkan bahwa dalam diri *Jong Java* telah timbul kesadaran adanya perasaan satu Tanah

Air, satu bangsa dan satu bahasa. Sebagai realisasi dari kesadarannya itu maka pada tanggal 27 Desember 1929, *Jong Java* dengan resmi dibubarkan dan kemudian menyerahkan seluruh bagian dan cabang-cabangnya kepada Komisi Besar Indonesia Muda.

Kecuali *Jong Java* di Yogyakarta pada periode tahun 1900 – 1928 itu terdapat pula organisasi pemuda lain yang bernama *Jong Islamieten Bond*. Organisasi ini pada hakekatnya merupakan "pemisahan" dari pada pemuda-pemuda Islam yang semula bergabung dalam *Jong Java*, dan yang merasa dirinya lebih tepat kalau mendirikan organisasinya sendiri

Adapun tujuan *Jong Islamieten Bond* sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan mendorong hidupnya kembali agama Islam dengan toleransi terhadap agama lain.
- b. Memupuk dan menaikkan simpati terhadap pemeluk agama Islam dan pengikut-pengikutnya di samping kesabaran terhadap golongan lain.
- c. Mengorganisasi kursus-kursus Islam, darma wisata, sport dan dengan jalan agama Islam.
- d. Meningkatkan kemajuan jasmani dan rokhani anggota-anggotanya dengan jalan menahan diri sendiri dan sabar.

Kongres *Jong Islamieten Bond* yang pertama diadakan pada bulan Desember 1925 di Yogyakarta. Kongres ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, antara lain H.O.S. Tjokroaminoto, Surjopranoto, Dwidjosewojo, Suwardi Surjaningrat, Haji Agus Salim, Haji Fahrudin dari Muhammadiyah dan Mirza Wali Ahmad Beij seorang propagandis gerakan Ahmadiyah.

Dari anggaran dasarnya yang kemudian disahkan dalam kongresnya itu, menunjukkan bahwa *Jong Islamieten Bond* tidak mencampuri politik praktis. Tetapi walaupun demikian organisasi ini memperbolehkan anggotanya ikut dalam gerakan politik dan bahkan organisasi ini sendiri selalu berusaha meningkatkan pengertian politik para anggotanya.

Dengan berdirinya *Jong Islamieten Bond* ternyata kemudian mendorong pemuda-pemuda dari agama lain membentuk organisasinya sendiri-sendiri. Dan dalam tahun-tahun berikutnya berdirilah organisasi Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Kristen, Pemuda Katholik dan Organisasi Muslimin.

8. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pada tahun 1913 berdirilah suatu organisasi yang berhaluan sosialis, yang bernama "*Indische Sosial Demokratische Vereniging*" (ISDV) Perkumpulan ini didirikan oleh beberapa orang Belanda, yaitu Sneevliet, Brandsteder Dekker dan orang Indonesia Semaun. Pada waktu itu belum ada disiplin partai, sehingga Semaun sebagai anggota pengurus besar ISDV masih dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Serikat Islam Lokal Semarang.

Sementara itu dengan makin meningkatnya proses perjuangan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia dan berhasil pula membentuk susunan pengurusnya yang baru antara lain: Semaun sebagai Ketua, Darsono sebagai Wakil Ketua, Bergsma sebagai Sekretaris, Dekker sebagai Bendahara, Boars, Sugono dan lain-lain sebagai anggota. Dan pada bulan Maret 1923 namanya diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia.¹⁹⁾ Walaupun demikian, lahirnya Partai Komunis Indonesia ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1920 yaitu ketika organisasi ISDV mengganti namanya menjadi Partai Komunis Hindia.

Dalam pada itu, Semaun sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia dan juga notabene sebagai Ketua Serikat Islam lokal di Semarang, berusaha keras untuk menanamkan politik dan pengaruhnya di lingkungan Syarekat Islam. Akibatnya terjadilah pergeseran pandangan yang kemudian menimbulkan perpecahan di dalam tubuh Syarekat Islam, sehingga timbullah dua macam aliran yaitu SI "kiri" atau SI "merah" SI afdeling B bukan SI merah, dan SI "kanan" atau SI "putih".

Dengan adanya tindakan tegas yang dikeluarkan oleh SI dalam kongresnya di Madiun pada bulan Pebruari 1923, tentang disiplin partai, maka berakhirlah pengaruh PKI di dalam tubuh Syarekat Islam. Untuk menyaingi Kongres SI tahun 1923 di Madiun itu, golongan Semaun dengan PKI nya kemudian mengadakan Kongres di Bandung pada bulan Maret 1923. Dalam Kongres itu diputuskan bahwa semua Syarekat Islam lokal pengikut Semaun (SI "Merah" atau SI "kiri"), yang berhaluan Komunis, berganti nama "Sarekat Rakyat", dan yang kemudian merupakan barisan bawah dari PKI.

Sementara itu di Yogyakarta usaha PKI untuk menanamkan pengaruhnya di kalangan masyarakat, mendapatkan rintangan dan

saingan berat baik dari Syarekat Islam, Budi Utomo maupun Muhammadiyah. Hal ini terbukti pada waktu PKI mengadakan kongresnya pada tanggal 31 Agustus 1924, di Yogyakarta, kongres ini tidak dapat terus karena adanya kekacauan yang ditimbulkan oleh pengikut-pengikut SI., Budi Utomo dan Muhammadiyah.²⁰⁾ Akibat adanya peristiwa ini, maka pengurus besar PKI mengambil keputusan akan menghentikan segala usaha untuk mempengaruhi partai-partai politik, dan selanjutnya diambil keputusan sebagai berikut:

- a. Memperkuat barisan sendiri dan
- b. Mempengaruhi perkumpulan-perkumpulan sekerja supaya bersifat komunis.

Mengenai keputusan yang kedua ini di Yogyakarta, usaha PKI juga mendapatkan rintangan terutama dari Surjopranoto dan Agus Salim yang telah berhasil menggabungkan Sarekat-sarekat Sekerja seperti Sarekat Sekerja Pegawai Pabrik Gula, Sarekat Sekerja Pegadaian, Sarekat Sekerja Pekerjaan Umum dan Sarekat Sekerja Guru dalam vak sentral dan yang berlandung di bawah pimpinannya.

9. Gerakan Perburuhan

Gerakan buruh di Indonesia pada umumnya dan di daerah Yogyakarta khususnya, sangat erat hubungannya dengan gerakan-gerakan partai politik. Dengan kata lain kesadaran kaum buruh bersamaan pula dengan kesadaran partai-partai politik. Kalau kaum buruh cenderung menentang Kapitalisme dalam bidang ekonomi, maka partai politik menentang imperialisme di bidang politik. Oleh karena itulah kedua gerakan ini selalu berjalan bersama dan berjaln dengan eratnya. Bahkan sering pula terjadi bahwa gerakan buruh itu selalu cenderung untuk ikut politiknya salah satu partai politik. Untuk ini maka kadang-kadang ada yang secara jelas organisatoris, tetapi ada pula yang hanya mengikuti garis ideologinya.

Di Yogyakarta, gerakan buruh ini diawali dengan berdirinya bermacam-macam Sarekat Sekerja antara lain Sarekat Sekerja Pegawai Pabrik Gula, Sarekat Sekerja Pegadaian, Sarekat Sekerja Guru, Sarekat Sekerja Pekerjaan Umum dan sebagainya.

Sementara itu Sarekat Islam mulai pula ikut memperhatikan gerakan buruh atau Sarekat Sekerja tersebut. Sehubungan dengan

itu maka pada tahun 1916 didirikanlah Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putera (PPPB) yang berada di bawah Syarekat Islam dan yang diketahui oleh Sosrokardono.

Dalam pada itu pada kongres PPPB bulan Mei 1919 di Bandung, dianjurkanlah agar supaya semua perkumpulan sekerja dijadikan satu federasi dalam satu badan sentral. Sehubungan dengan itu maka atas prakarsa Syarekat Islam pada bulan Desember 1919 didirikanlah Sarekat Sekerja yang berpusat di Yogyakarta dengan nama: *Persatuan Pergerakan Kaum Buruh* (PPKB). Tulang punggung dari perkumpulan ini ialah: V.S.T.P. (Vereniging Van Spoor en Tram Personeel) PPPB., SSPPG. (Serikat Sekerja Pegawai Pabrik Gula), dan lain-lain organisasi buruh yang kecil-kecil. Pengurus PPKB ini ialah: Semaun sebagai Ketua, Surjopranoto sebagai Wakil ketua, dan H.Agus Salim sebagai Sekretaris.

Dengan timbulnya perpecahan yang terjadi dalam tubuh Syarekat Islam, maka konsentrasi gerakan buruh ini juga ikut mengalami perpecahan hal.73. Kemudian timbullah apa yang dinamakan *Revolutionnaire Vak Centrale (RVC)* di bawah Semaun yang berkedudukan di Semarang dan yang berhasil menguasai Sarekat Sekerja Kereta Api, Sarekat Sekerja Kehutanan, Sarekat Sekerja Pelabuhan dan Sarekat Sekerja Sopir dan Kusir. Sedang Surjopranoto dan H.Agus Salim berhasil pula menguasai Sarekat Sekerja Pegawai Pabrik Gula, Sarekat Sekerja Pegadaian, Sarekat Sekerja Pekerjaan Umum dan Sarekat Sekerja Guru untuk bergabung dalam *Vak Centrale* yang berkedudukan di Yogyakarta.

10. Gerakan Wanita

Kesadaran nasional bukanlah hanya merupakan hak dan monopoli kaum lelaki. Kaum wanita pun berhak dan berkewajiban untuk ikut terjun dalam kancah perjuangan.

Demikianlah maka, dalam arusnya kancah perjuangan nasional, ternyata kaum wanita ikut pula berpartisipasi di dalamnya. Pada mulanya, awal kebangkitan pergerakan wanita itu hanya terbatas di lapisan atas. Tetapi kemudian, dalam perkembangannya makin meluas ke lapisan bawah dan dengan tujuan yang makin bertambah dan mantap. Adanya perubahan seperti ini tidak saja mendatangkan perbaikan nasib tetapi juga menambah kesanggupan dan kecakapannya dalam hal berorganisasi. Pelbagai

perkumpulan tumbuh di sana sini, baik yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian daripada partai politik atau organisasi lainnya yang anggota-anggotanya terdiri dari kaum pria. Perkumpulan yang terakhir inilah yang merupakan pergerakan nasional bagian wanita.

Sementara itu di Yogyakarta, sebelum timbulnya pergerakan nasional, terdapat usaha yang dilakukan oleh putri-putri Pakualaman, Yogyakarta (sebelum 20 Mei 1908) untuk mengadakan persatuan kaum wanita, guna meneruskan cita-cita almarhumah R.A. Kartini. Sayang usaha ini gagal, karena tak dapat sambutan yang diperlukan dari kalangan kaum wanita jaman itu.

Dalam pada itu dengan makin meningkatnya perjuangan nasional dan timbulnya pelbagai perkumpulan dan organisasi, maka berdiri pula perkumpulan-perkumpulan wanita. Demikianlah, Partai Syarekat Islam mempunyai bagian wanitanya yang bernama Wanita Oetama (kemudian menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia), Muhammadiyah mempunyai Aisiyah. *Jong Islamieten Bond* mempunyai *Jong Islamieten Bond Dames Afdeling*, Jong Java mempunyai *Meisjeskring*, Pemuda Indonesia mempunyai Putri Indonesia dan Taman Siswa dengan Wanita Taman Siswa. Kecuali perkumpulan wanita tersebut di Yogyakarta masih terdapat beberapa perkumpulan wanita lainnya seperti Wanita Katholiek (Mataram), Wanita Moeljo (Mataram), dan Nahdatoel Fataat (Mataram).

Pada mulanya, awal gerakan wanita itu umumnya bertujuan untuk mengadakan perbaikan kedudukan dalam perkawinan dan hidup keluarga. Tetapi dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan jaman dan suasana perjuangan politik yang makin meningkat, maka timbullah kesadaran nasional kaum wanita. Adapun manifestasi daripada kesadaran nasional kaum wanita ini, tercermin dalam kongresnya yang pertama yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 – 25 Desember 1928. Kongres ini kemudian terkenal dengan nama "Kongres Perempuan Indonesia". Hadir dalam kongres ini kurang lebih 29 perkumpulan wanita antara lain: Poetri Indonesia (Mataram), Wanita Katholik (Mataram), Wanita Moeljo (Mataram), Wanita Oetomo (Mataram), Roekoen Wanodijo (Jakarta), Boedi Rini (Malang), Poetri Indonesia (Surabaya), Wanita Sedjati (Bandung), Poetri Boedi Sedjadi (Surabaya), Kesoemo Rini (Kudus), Aisjah (Solo), Wanita Taman Siswa (Mataram) dan sebagainya.

Kecuali itu, dalam kongres ini hadir pula perkumpulan laki-laki, antara lain: Budi Utomo, PNI, PSI, PI Muhammadiyah sebagainya. Kongres Perempuan Indonesia yang pertama ini dipimpin oleh R.A. Soekanto, sebagai Ketua; St. Moendjiah sebagai Wakil Ketua, St. Soekaptinah sebagai Sekretaris I dan R.A. Hardjodiningrat sebagai Bendahara I.

Tujuan dari kongres ini ialah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Dalam kongres ini berhasil diputuskan untuk mendirikan gabungan atau federasi perkumpulan wanita dengan nama: "Perikatan Perempuan Indonesia" (PPI) dan yang berkedudukan di Yogyakarta. Di samping itu, diputuskan pula hendak mendirikan *Studiefonds* untuk anak-anak perempuan yang pandai tetapi tidak mampu memberantas perkawinan anak-anak dan memajukan kepanduan untuk anak-anak perempuan.

Kongres Perempuan Indonesia yang pertama ini juga berhasil menetapkan pengurus barunya yang terdiri dari: R.A. Soekanto sebagai Ketua, R.A. Soejatin sebagai Wakil Ketua, St. Soekaptinah sebagai Sekretaris I, Moego Roemah sebagai Sekretaris II, R.A. Hardjodiningrat sebagai Bendahara, Nyi Ajar Dewantoro sebagai Komisaris dan St. Moedjiah sebagai Komisaris. Adapun anggota-anggotanya ialah: Nyi Hadja Dewantoro, Nynya Ali Sastroamidjojo, Hajinah, Ismoedijati, Rosida yang Soemarjati.

Sementara itu dengan diadakannya Kongres Perikatan Perempuan Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 – 31 Desember 1929 maka nama perkumpulan ini kemudian diubah menjadi *Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia* atau disingkat dengan PPII.

Demikianlah sejak adanya peristiwa tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta, maka setelah Indonesia Merdeka tanggal dan bulan tersebut diperingati sebagai "Hari Ibu", hingga sekarang.

11. Partai Nasional Indonesia

Sesudah Partai Komunis Indonesia (PKI) dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah, akibat pemberontakan yang dilakukannya pada tahun 1926/1927, maka dirasakan perlunya suatu wadah baru untuk menyalurkan segala kodrat dan aspirasi rakyat yang tidak mungkin ditampung oleh organisasi-organisasi politik yang ada pada waktu itu. Sejalan dengan hal itu maka tim-

bullah gagasan nasionalisme modern di Indonesia yang memberikan jalan ke arah terbentuknya suatu gerakan yang bergerak nasional murni dan bersifat radikal. Pengambil inisiatif gerakan ini ialah Ir. Soekarno yang pada tahun 1925 mendirikan *Algemeene Studie Club* di Bandung. Kemudian sebagai penjelmaan dari *Algemeene Studie Club* ini lahirlah Perserikatan Nasional Indonesia,²¹⁾ yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Ir. Soekarno, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Ir. Suwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunario, Mr. Budiarto dan Dr. Samsi.

Para pendiri PNI itu sebagian besar adalah bekas anggota dari Perhimpunan Indonesia di Nederland. Dengan demikian sudah barang tentu PNI didirikan untuk melanjutkan dan melaksanakan cita-cita yang disebarkan dan dihidupkan oleh Perhimpunan Indonesia di Nederland. Setidak-tidaknya PNI dijiwai oleh para pendirinya yang kebanyakan merupakan bekas anggota dari Perhimpunan Indonesia di Nederland. Maka dari itu PNI dengan tegas mencanangkan tujuannya ialah untuk mencapai Indonesia Merdeka. Sedang yang menjadi asasnya ialah *selfhelp* (prinsip untuk menolong diri sendiri), non kooperasi dan Marhaenisme.

Dalam usahanya untuk menarik massa dan memperkenalkan PNI di kalangan masyarakat, maka pemimpin-pemimpin PNI antara lain Ir. Soekarno sering mengadakan rapat umum di berbagai kota, dan ternyata semuanya mendapatkan hasil yang besar serta dikunjungi oleh beribu-ribu orang yang sangat gembira. Rapat-rapat itu antara lain diadakan di Bandung pada tanggal 25 Agustus 1927, di Yogyakarta pada 9 Oktober 1927 di Jakarta pada 4 Desember 1927 dan sebagainya. Khususnya rapat umum yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1927, maka rapat ini diadakan di pendopo rumah seorang bupati kasultanan, yaitu R.T. Djodipuro. Sebetulnya Bupati ini bukanlah seorang politik. Ia lebih terkenal sebagai seniman Jawa yang ulung. Tetapi walaupun demikian, beliau di Yogyakarta terkenal juga sebagai seorang pendukung pergerakan kemerdekaan nasional dan selalu meminjamkan pendopo rumahnya yang besar untuk rapat umum partai-partai politik. Perlu pula diketahui bahwa di zaman kolonial *rapat umum* atau *rapat terbuka* harus diadakan di dalam gedung atau ruangan yang ada atapnya. Rapat umum yang diadakan di luar gedung atau tanah lapang harus mendapatkan ijin terlebih dahulu.

Di pendopo Djodipuran inilah Ir. Soekarno sebagai pemim-

pin PNI berbicara dan berpidato dengan berapi-api. Pidatonya sangat menarik dan mempersona tiap orang yang mendengarkan. Pandai benar beliau menjelaskan teori-teorinya yang muluk-muluk kepada rakyat secara sederhana. Bahasa yang dipakai ialah bahasa rakyat yang dibumbui dengan contoh-contoh dari cerita pewayangan. Buat rakyat Yogyakarta dan Jawa Tengah pada umumnya, cara demikian adalah sangat menarik dan tepat sekali. Dengan demikian tercapailah maksudnya, supaya rakyat mengerti akan asas dan tujuan PNI. Pidatonya itu memakan waktu kurang lebih tiga jam walaupun rapat umum itu mendapatkan penjagaan yang ketat dari Polisi PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*, semacam badan penyelidikan yang bertugas mengawasi gerakan-gerakan nasional), dan dalam suasana yang tegang, tetapi ternyata dapat berjalan lancar dan berhasil dengan sukses yang besar.

Sementara itu PNI berhasil pula mengadakan kongresnya yang pertama pada tanggal 27 – 30 Mei 1928 di Surabaya. Dalam kongres itu disusunlah program PNI di berbagai bidang yaitu:

Pertama, di bidang politik:

- a. Memperkuat perasaan kebangsaan dan perasaan persatuan Indonesia.
- b. Menyebarkan pengetahuan dan ilmu tentang sejarah nasional dan memperbaiki hukum-hukum nasional.
- c. Mempererat perhubungan antara bangsa-bangsa di Asia.
- d. Menuntut kemerdekaan diri, kemerdekaan pers, kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Kedua, di bidang ekonomi:

- a. Berusaha untuk mencapai perekonomian nasional yang dapat berdiri sendiri.
- b. Menyokong perdagangan dan perindustrian nasional.
- c. Mendirikan bank nasional dan koperasi-koperasi.

Ketiga, di bidang Sosial:

- a. Memajukan pengajaran nasional.
- b. Memperbaiki kedudukan wanita.
- c. Memajukan Serikat Buruh dan Serikat Tani.
- d. Memperbaiki kesehatan rakyat.

e. Mengajukan monogami.

Dengan adanya program yang mantap itu dan ditambah dengan keuletan para pemimpinnya dalam menarik dan memikat massa maka dalam waktu yang singkat PNI telah meluas dan tersebar di mana-mana. Demikianlah Cabang-cabang PNI kemudian tumbuh dan berdiri seperti cendawan di musim hujan. Mula-mula didirikan tujuh buah cabang yaitu di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Pekalongan dan Palembang. Selanjutnya menyusul empat calon cabang ialah Air-Itam (dekat Palembang), Cirebon, Garut dan Semarang. Di samping itu ada pula beberapa *kring* (anggota pengurus belum lengkap) di Surakarta, Makasar (Ujung Pandang), Buol dan Banyuwangi. Menurut catatan hingga akhir tahun 1929 anggota PNI sudah mencapai jumlah kurang lebih 10.000 orang, dan 6.000 orang di antaranya ada di daerah Priangan.

Dengan makin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan PNI maka pemerintah kolonial Belanda mulai kuatir dan curiga. Kekuatiran dan kecurigaan pemerintah lebih bertambah sesudah di kalangan tentara dan polisi terdapat pula pengaruh propaganda PNI. Sehubungan dengan itu maka pemerintah dengan terus terang menyatakan kecurigaannya terhadap PNI (9 Juli 1929). Bahkan lebih daripada itu diambil pula tindakan yang lebih keras, yaitu antara lain tindakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat untuk "melarang polisi menjadi anggota PNI" (akhir Oktober 1929).

Dalam pada itu tersebar pula desas-desus di kalangan rakyat bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada tahun 1930. Karena adanya desas-desus ini maka pemerintah menjadi lebih takut, dan kemudian diadakanlah tindakan tegas seperti misalnya penangkapan dan pengeledahan, antara lain di Jakarta (dilakukan 50 pengeledahan dan penangkapan), di Bandung, di Cirebon, di Pekalongan, di Sukabumi, Cianjur, Surakarta, Medan, Ujung Pandang, Padang, di Semarang dan di banyak tempat lainnya di Indonesia yang jumlah semuanya lebih kurang 400 penangkapan. Di Yogyakarta tak luput dari dan pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan polisi PID. Terutama terhadap para pengurus PNI Cabang Yogyakarta antara lain Mr. Ali Sastraamidjaja, Mr. Sujudi, Ki Suwandi dan sebagainya. Bahkan pada waktu polisi PID mengadakan pengeledahan di rumah kediaman Mr. Sujudi yaitu pada

tanggal 29 Desember 1929, Ir. Soekarno dan Gatot Mangkupraja berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Bandung serta ditahan di penjara Banceui bersama-sama dengan Maskun dan Supriadinata.

Penangkapan atas pemimpin-pemimpin PNI ini ternyata merupakan pukulan yang sangat hebat bagi PNI dan akhirnya pada Kongres Luar biasa ke II di Jakarta, diambilah keputusan pada tanggal 25 April 1931 untuk membubarkan PNI karena keadaan memaksa.

D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914 – 1918) DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD.

1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda.

Sebelum pecah Perang Dunia I, rakyat Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mempertahankan kelangsungan kekuasaannya ini, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Hindia Belanda ialah tetap mempertahankan "sistem feodalisme". Justru sistem inilah yang kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda digunakan sebagai "alat" untuk melaksanakan "sistem eksploitasinya." Sementara itu, dengan dilaksanakannya "politik pintu terbuka" (*Open door policy*) yaitu pada tahun 1870, maka berduyun-duyunlah modal asing masuk ke Indonesia. Kapital-kapital asing ini berusaha menanamkan modalnya sampai ke pelosok-pelosok desa. Akibat langsung yang dirasakan oleh rakyat, ialah adanya pengerahan tenaga rakyat untuk dipekerjakan di pabrik, perkebunan, pertambangan yang diusahakan dari modal asing tersebut. Keadaan ini mengakibatkan penderitaan rakyat makin bertambah-tambah. Sebab, di samping tenaga dan kekayaannya dieksploitasi oleh penguasa kolonial, juga dilakukan pula oleh pengusaha-pengusaha asing tersebut.

Dengan demikian terciptalah dasar baru bagi gerakan kemerdekaan nasional. Gerakan kemerdekaan nasional ini mendapat dorongan pula dari kejadian-kejadian yang bersifat internasional di Asia Timur. Rusia di bawah kekuasaan Tsar yang dianggap kuat waktu itu, dapat dikalahkan oleh negeri Jepang pada tahun 1905. Kesadaran bangsa-bangsa Timur timbul, demikian pula kepercayaan akan berhasilnya gerakan kemerdekaan menjadi bertambah kuat. Kelompok-kelompok baru muncul

di Indonesia menyiapkan diri untuk memegang tampuk kendali perlawanan menghadapi penjajahan.

Berturut-turut berdirilah Budi Utomo pada tahun 1908, Syarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912) dan kemudian susul-menyusul berdiri organisasi lainnya yang kesemuanya berusaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan menjunjung tinggi martabat bangsa yang telah lama ditindas oleh pemerintah kolonial.

Dengan pecahnya Perang Dunia I tahun 1914 – 1918 pertentangan makin menjadi tajam, karena pertama disebabkan kesengsaraan yang harus diderita oleh rakyat Indonesia. Kedua disebabkan oleh adanya kemungkinan baru untuk mengadakan perubahan yang radikal. Perjuangan kemerdekaan mendapat bentuk yang lebih nyata dan semangatnya yang radikal tampak lebih jelas terutama pada saat itu di kalangan Syarekat Islam. Dalam waktu yang singkat saja cabang-cabang Syarekat Islam tumbuh di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur meluas menjadi organisasi massa yang mencerminkan jiwa revolusioner rakyat sehingga menggetarkan seluruh penduduk bangsa Eropa.

Juga di kalangan bangsa Indo Belanda timbul suatu gerakan yang dipimpin oleh Douwes Dekker dengan didirikannya *Indische Partij* pada tahun 1912. Kelompok ini pada waktu itu menjalankan politik progresif dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Tidak mengherankan bahwa *Indische Partij* pada 6 September 1912 dilarang, sedangkan beberapa pemimpinnya ditawan. Douwes Dekker sendiri diharuskan meninggalkan Indonesia, dan baru pada tahun 1918 akhir Perang Dunia I boleh datang lagi di Indonesia dari negeri Belanda, sesudah nyata-nyata, kaum Indo dan partai "Insulinde" menjalankan politik reformistis.

Syarekat Islam menjadi makin besar dan tujuannya yang pertama adalah melawan penjajahan Belanda. Di beberapa tempat tentara pemerintah harus bertindak terhadap kaum tani yang memberontak karena tekanan pajak yang amat berat bagi penduduk. Kongres Syarekat Islam yang dilangsungkan di Bandung antara 17 - 24 Juli 1916 dikunjungi oleh wakil-wakil dari daerah di seluruh pelosok Indonesia yang mewakili tidak kurang dari 360.000 anggota.

Demikian pula dalam bulan Mei 1914 berdiri ISDV yaitu *Indische Sociaal Democratische Vereniging* di mana terhimpun

tenaga-tenaga intelektual Indonesia dan Belanda. ISDV inilah yang kemudian mendirikan serikat-serikat sekerja.

Tuntutan kemerdekaan bagi Indonesia makin tegas dan nyata adalah suatu pernyataan yang disambut rakyat dengan baik karena adanya penindasan yang dilakukan kaum kolonial. Kritik yang pedas ditujukan kepada penindasan Belanda, pada pengusaha onderneming Barat, kapital finans dan pada sisa-sisa feodal dalam perekonomian rakyat. Tuntutan untuk turut serta dalam pemilihan Dewan daerah dan nasional makin santer, perbaikan pendidikan dan pengajaran, pemberian hak yang sama antara rakyat Indonesia dan Eropa, penurunan pajak, penghapusan tanah partikelir dan pemberian bantuan kepada pertanian rakyat makin keras.

Dalam keadaan yang semacam ini maka pemerintah Belanda memutuskan untuk mendirikan Dewan Rakyat (*Volksraad*).

Pada periode 1914 - 1918 yang memegang pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia ialah Gubernur Jendral Graaf van Limburg Stirum. Ia adalah seorang penganut Politik Etis, maka sikapnya terhadap bangsa Indonesia umumnya dan kepada Kasultanan Yogyakarta khususnya tidak menunjukkan gejala menekan. Bahkan pemerintah pada waktu itu berusaha mengambil hati bangsa Indonesia untuk bekerja membantu usaha pemerintah dengan memberikan janji untuk turut serta dalam mengatur jalannya pemerintah Hindia Belanda yang kemudian janji itu terkenal dengan istilah *November Belofte*.

Politik Etis ini sebenarnya telah berlangsung sebelum pecah Perang Dunia I. Sering-sering dalam rapat terbuka para pemimpin bangsa pribumi mensitir ucapan dari Graaf van Limburg Stirum tentang janji yang pernah diucapkannya.

Maka setelah selesai Perang Dunia I tahun 1918, sebagai usaha untuk memenuhi janjinya Pemerintah mengikut sertakan perwakilan bangsa Indonesia dalam *Volksraad*. Namun dari kalangan Kasultanan Yogyakarta tidak ada yang duduk dalam *Volksraad* tersebut. Kalau toh ada penduduk Kasultanan Yogyakarta, tetapi perwakilannya itu karena tunjukan, mungkin dari wakil organisasinya pegawai-pegawai pemerintah (*Gupernemen*): ialah R. Ng. Jaya Ahmad Hudaya. Menurut keterangan dari Nn. Ken Suryodiningrat R.Ng. Jaya Ahmad Hudaya adalah wakil *Praja Kajawen* (wakil para raja dan Gubernur, jadi bukan wakil rakyat).

Jadi Pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia I berkecamuk, menunjukkan sikapnya yang lunak, dengan tujuan agar rakyat membantu pemerintah.

Pada tahun 1919 wakil Pemerintah Hindia Belanda dalam *Volksraad* mengemukakan tentang adanya perbaikan-perbaikan dan tentang hak memiliki tanah bagi pejabat-pejabat Kasultanan maupun bagi daerah-daerah di luar Jawa yang mempunyai pemerintahan sendiri. Keterangan seperti itu dikemukakan pula pada Pidato Penobatan tahun 1909 dan 1914, dan berlaku sejak tahun 1910 baik bagi daerah di luar Jawa maupun bagi daerah Kasultanan.

Sejak tahun 1917 pengadilan *Bale Mangu* hanyalah berhak mengadili soal-soal yang berhubungan dengan tanah sedang yang lain-lainnya (hal perkara perdata), pindah pada pengadilan *Landraad*, yang dulunya tidak berhak mengadili soal perdata untuk penduduk pribumi (*kawula dalem*) Yogyakarta.

2. Keadaan Masyarakat.

a. Ekonomi

Kebetulan bahwa pada tahun-tahun terakhir Perang Dunia I itu, di daerah Kasultanan Yogyakarta terjadi wabah penyakit semacam influenza, yang disebut: *Spaanse griep*. Wabah penyakit ini cukup mengerikan karena benar-benar terjadi istilah kata-kata: *esuk lara sore mati, sore lara esuk mati* (pagi sakit sore mati, sore sakit pagi mati), sehingga penduduk merasa sangat cemas.

Adanya wabah penyakit yang sangat mengerikan itu berakibat pula di Daerah Kasultanan Yogyakarta ini mengalami kekurangan beras, sehingga perlu mendatangkan beras dari luar, yang selanjutnya dibagi-bagi kepada penduduk. Pelaksanaan pembagian beras itu mengambil tempat di Masjid Besar Yogyakarta, sehingga beras pembagian tadi terkenal dengan istilah beras masjid. Memang pada saat itu di muka masjid tersebut ada tempat menyimpan beras yang akan dibagikan kepada penduduk. Dengan adanya pembagian beras itu benar-benar rakyat dapat menikmati makan nasi yang pada waktu itu sangat sulit dicari.

Untuk masyarakat Yogyakarta masa itu terkenal sekali dengan istilah *jaman kabluk* (Jawa). Dalam keadaan yang penuh

kepedihan itu, maka penduduk luar kota, antara lain penduduk Gunungkidul banyak yang mengalir menuju ke kota untuk mencari selamat mendapat makan, dan bertempat tinggal di mana saja.

b. Sosial

Keadaan penduduk, terdiri atas orang-orang asing (Belanda, Cina, Arab), yang semuanya itu mempunyai peraturan, hak dan wewenang yang tersendiri, langsung dengan pemerintah Gubernemen.

Di samping penduduk asing itu maka di Yogyakarta penduduk pribumi yang memiliki tugas dan kewajiban sendiri-sendiri ialah:

- 1). ada yang menjadi pegawai Gubernemen,
- 2). ada yang menjadi pegawai Kasultanan Yogyakarta,
- 3). ada yang menjadi orang swasta (buruh, *tulang*, petani, dan sebagainya).

Yang termasuk orang asing, kedudukan lebih tinggi, misalnya: kereta api kelas I hanya untuk orang asing. Mereka tidak berhak bertempat tinggal di dalam benteng (Kecamatan Kraton). Bagi anak-anak yang berasal dari penduduk pribumi yang gajinya kurang dari Rp. 30,- sebulan tidak berhak memasuki pada HIS. Yang boleh mengunjungi sekolah-sekolah pemerintah ialah anak orang Belanda dan anak bangsa Indonesia yang tertentu saja.

c. Pendidikan

Hingga tahun 1919 sampai seterusnya ialah tahun 1942 di kota Yogyakarta terdapat 13 Sekolah Rakyat yang terkenal dengan Sekolah Kelas II (*Sekolah angka loro*) yang tersebar di seluruh kota. Tiap sekolah itu diambil rata-rata bermurid 200 orang dan terdiri dari lima kelas.

Sekolah-sekolah kelas II tersebut mengambil tempat: Di Margo-yasan, Jetis, Ngabean, Paku Alaman, Gading, Sosrowijayan, Tamansari, Lempuyangan, Kintelan, Kranggan, Tegalpanggung, Timuran, dan Panembahan.

Selain di kota, pada masing-masing Kabupaten juga diadakan sekolah kelas II. Sedang masing-masing Kawedanan dan

Kapanewon, seluruh daerah Kasultanan dan Paku Alaman diadakan Sekolah Klas I (terdiri dari klas I, II dan III). Untuk guru Sekolah Klas I ini, berasal dari lulusan Sekolah klas II, ditambah kursus ilmu guru enam bulan atau yang berijazah *kweekling* atau guru bantu.

Pada pemerintahan Hamengku Buwono VII dalam daerah Keresidenan Yogyakarta mulai timbul Sekolah Kasultanan dan Sekolah Paku Alaman. Sekolah-sekolah ini bertempat pada tiap Kawedanan dan Kapanewon di luar kota. Walaupun sekolah ini hanya sampai kelas III, tetapi merupakan tenaga pertama bagi rakyat di luar kota untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai kawan-kawannya yang ada di dalam kota.

Di Ibukota Kabupaten Wates, Bantul, Wonosari telah didirikan Sekolah Klas II. Karena pengajaran pada sekolah tersebut di muka hanya merupakan pengajaran rendah pertama, maka guru-gurunya berasal dari:

- 1). Tamatan Sekolah klas I dan Sekolah klas II ditambah kursus ilmu guru 6 bulan, atau
- 2). Yang berijazah *kweekling*, atau
- 3). Yang berijazah Guru Bantu.

Guru-guru tersebut di atas mempunyai kedudukan sebagai pegawai negeri dan mendapat surat keterangan dari pemerintahnya masing-masing. Guru-guru Sekolah Kasultanan mendapat Piagam dari Pemerintah Kepatihan, ditanda-tangani oleh Papatih Dalem. Guru-guru Sekolah Paku Alaman ditandatangani oleh Kiangjeng Pangeran Arya Notodijoyo.

Aturan gaji Guru Sekolah Kasultanan dan Paku Alaman adalah sama dan berdasarkan ijazah. Penjabat Kepala Sekolah bergaji F. 15,— Guru-guru pembantu bergaji f. 7,50, ialah untuk mereka yang berijazah Sekolah klas I dan II. Tetapi mereka yang berijazah *Kweekling* dengan mendapat tambahan f.2,50 tiap bulan, sedang yang berijazah Guru Bantu mendapat tambahan f. 5,— tiap bulan.

Pada tahun 1909 di Yogyakarta lahirlah sekolah rakyat yang berkelas enam, dan mulai kelas 3 ke atas diberi pelajaran bahasa Belanda. Sekolah itu disebut *Eerste Inlandsche School*, bertempat di kampung Kintelan. Kepala Sekolahnya yang pertama dari sekolah ini mudah sekali diterima menjadi pegawai negeri di pelbagai kantor. Dengan keadaan itu, maka rakyat

Yogyakarta sangat terpengaruh pada pengajaran bahasa Belanda.

Karena dorongan perkumpulan Budi Utomo, maka pada tahun 1915 Pemerintah Hindia Belanda memperbanyak pendirian sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sekolah ini bernama *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) yang pelajarannya dicapai dalam tujuh tahun. Gedung sekolah ini bertempat di Jetis, sekarang Gedung SPG Negeri. Adapun *Eerste Inlandsche School* di Kintelan dihapuskan menjelma menjadi Sekolah klas II.

Sekolah Sri Menganti yang berderajat *Eerste Inlandsche School* pada tahun 1915 juga menjelma menjadi HIS, dengan nama Keputran School, dan berpindah tempat ke gedung baru, di sebelah timur Pagelaran.

Dengan adanya sekolah HIS di Jetis dan Keputran masih terasa sangat kurangnya untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Kira-kira pada tahun 1920 di kota Yogyakarta dibuka lagi sekolah HIS. Sekolah ini untuk sementara waktu bertempat di Bintaran di belakang Gereja Katolik. Setelah gedung persediaannya selesai dikerjakan, lalu pindah dari Bintaran, ke pojok Benteng bagian Timur di kampung Danudiningratan, yang terkenal dengan nama HIS Tungkal.

Untuk mencukupi kebutuhan anak-anak yang tidak mendapat tempat di HIS atau anak-anak dari Sekolah klas II yang ingin meneruskan belajar bahasa Belanda, maka oleh *Neutrale Onderwijs Stichting* diteruskan. Lama pelajarannya dicapai dalam empat tahun, sedang yang diterima adalah anak-anak murid Sekolah klas II, yang sudah duduk di kelas 3. Jadi pelajarannya tiga tahun ditambah empat tahun atau tujuh tahun, sepadan dengan pelajaran HIS. Sedang Sekolah Missi dalam kota Yogyakarta mulai dibuka pada tahun 1917.

Adapun Sekolah Guru B yang ada di Jetis berdiri sejak tahun 1897, dan merupakan yang tertua di Indonesia. Sekolah Teknik Pertama atau disebut *Ambachtschool voor Inlanders*. Yang pertama-tama dibuka di Yogyakarta tahun 1919 dan pada tahun 1932 namanya diganti menjadi *Ambachtsleergang*. Barulah pada jaman Jepang nama sekolah tersebut diganti Sekolah Menengah Teknik Pertama (*Koya Gakko*), keadaannya tidak berubah.

Semasa Perang Dunia I di Yogyakarta semula ada *Normaal Cursus* untuk menambah pengetahuan para guru bantu sebanyak

3 buah, kemudian dihapuskan. Pada tahun 1909 dan tahun 1912 didirikan Sekolah Swasta khusus memberi pelajaran bahasa Belanda di Lempuyangwangi dan di Klitren Kidul. Nama tokohnya antara lain R. Rio Gondoatmojo.

d. B u d a y a.

Sejak tahun 1908 di Yogyakarta berdiri sebuah Badan yang disebut "Her-mane" oleh R.M. Joyodipuro bersama-sama R.M. Prawirodipuro, R.L. Prawiroatmojo dan Lie Jeng Kiem yang bertujuan membina dan memajukan kesenian dan seni kerajinan. Pada tahun 1919 Badan tersebut berganti nama "Mardi Guno" dan pada tahun 1926 di samping pemeliharaan kerawitan, maka dicantumkan pula pelajaran tari menari. Pameran pertama berupa wayang orang pada tahun 1930. Untuk menarik para turis, maka atas usaha Mardi Guno telah dipersingkat pertunjukan yang lamanya 12 jam menjadi dua jam saja. Ternyata dalam waktu yang dua jam itu telah dapat diperoleh bermacam-macam tarian baik yang gagahan maupun yang alusan. Begitu pula dimaksudkan supaya tarian klasik yang sepanjang sejarah tidak dipertunjukkan kepada khalayak ramai dapat dikenal dan dinikmati oleh umum. Atas ijin Sri Sultan usaha yang baik itu dapat dilaksanakan.

Berkat kemajuan tehnik yang sangat pesat baik di darat, di laut dan udara serta atas dukungan Sri Sultan buah hasil manusia yang bersifat seni di Yogyakarta mau tidak mau harus mengikuti jalannya sejarah serta menyelaraskan diri dengan alam dan jaman. Dengan adanya siaran dari NIROM, SRVI, MAVRO. dan lain-lain, maka terasa oleh para ahli serta pecinta seni, bahwa telah tiba saatnya untuk berlomba-lomba memajukan kesenian daerahnya masing-masing sesuai dengan kemajuan masa.

Dalam masa mendahsyatnya siaran radio itu, maka berdirilah di Yogyakarta sebuah Badan Kerawitan yang disebut *Dayapradangga* di bawah pimpinan Lie Jeng Kiem. Dayapradangga ini merupakan suatu ikat pertalian erat, bersatu padunya yang kuat antara penabuh-penabuh dari Kraton Paku Alaman dan Kepatihan. Dayapradangga inilah yang secara tegas berani melangkahkannya geraknya untuk mempelajari serta membunyikan gending-gending dari daerah Kedu dan Surakarta. Setelah berdirinya Dayapradangga ini secara susul menyusu-

sul timbullah berbagai badan kesenian lainnya anatar lain Laras Madya, Nindya Yatmoko, Mardawagita, Murbararas, Krukusuk Raras, Mardi Wirama dan lain sebagainya.

1). Seni Tari

Pada mulanya pusat seni tari gaya Yogyakarta, hanya terdapat di Istana Yogyakarta. Pimpinannya hanya dipegang oleh keluarga raja dan para abdidalem.

Demikian juga yang belajar menari, hanya keluarga/kerabat raja, dan para putra abdidalem. Atas usaha Krida Beksa Wirama, yaitu suatu perkumpulan seni tari yang didirikan sejak tanggal 17 Agustus 1918 terutama tari bedaya dan srimpinya, yang dipelihara dalam Istana, dan masih merupakan larangan itu telah dapat dinikmati dan diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Dari usaha perkumpulan inilah maka kini ditengah masyarakat Yogyakarta masih tegak berdiri perkumpulan-perkumpulan tari kita.

Dorongan untuk mendirikan perkumpulan seni tari Krida Beksa Wirama, adalah karena sejak berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1918 tidak ada seorangpun yang berminat memberi pelajaran seni tari itu. Maka atas desakan dari Pergerakan Pemuda *Jong Java* yang meminta diberi pelajaran seni tari dan gamelan, kemudian mengirimkan utusannya yang terdiri dari dua pemuda, ialah R. Wiwoho dan R.M. Notosutarso maka akhirnya berdirilah KBW dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

B.P.H. Suryadiningrat	: Ketua
G.P.H. Tejokusumo	: Pemimpin pelajaran tari.
K.R.T. Wiroguno	: Pemimpin pelajaran gamelan.
K.R.T. Joyodipuro	: Pemimpin Kapujanggan.
R.W. Suryamurcita	: Sekretaris.
(K.R.T. Wiranegara)	
K.R.T. Puspadiningrat	: Bendahara
R.T. Atmowiyoga	: Komisaris
R.W. Puspodirjo	: Komisaris
R.W. Sastrasuprpta	: Komisaris
R.L. Jayapragola	: Komisaris

Krida Beksa Wirama mengambil tempat di dalam Tejaku-

suman ini memberikan pelajaran tari baik tari untuk anak putri maupun tari untuk putra. Muridnya siapa saja yang berminat mempelajari tari, bahkan ada yang berasal dari luar Indonesia. Juga penari-penari wayang topeng yang semula adalah dalang. Selanjutnya juga dari beberapa keluarga Paku Alaman dan Mangkunegaran.

KBW dan *Jong Java* bekerja sama dalam menyelenggarakan seni tari ini; KBW menyediakan guru-guru dan *Jong Java* menyiapkan muridnya dari sekolah-sekolah lanjutan. Selain memberikan pelajaran seni tari wayang orang KBW juga memberi pelajaran tari Bedaya Srimpi hal. 82. Usaha KBW ini mendapat restu dari Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, sehingga perkembangannya bertambah meningkat.

2) Bahasa Jawa

Untuk pengajaran bahasa Jawa di Sekolah klas II, maka telah diterbitkan buku *Layang Paramasastra Jawa*, yang terdiri atas dua jilid, karangan Mas Ngabei Dirjasewayaya di Yogyakarta 1 Agustus 1914, dan yang telah dicetak-ulang, berangka tahun 1923, oleh percetakan N.V. Uitg Mij H. Buning.

Dengan adanya kitab *Layang Paramasastra Jawa* ini, maka pelajaran Tatabahasa serta penulisan bahasa Jawa dengan huruf Jawa cukup mendapat perhatian. Sehingga lulusan Sekolah klas II, biasanya telah mempunyai dasar yang kuat untuk pengetahuan bahasa Jawa, misalnya: hal tulis menulis huruf Jawa, tata bahasa Jawa, kesusasteraan Jawa, misalnya hal *tembang macapat, tengahan, gede*, dengan segala pedoman-pedomannya, demikian pula hal *unggah-ungguhing* basa Jawa. Sehingga apabila anak lulusan Sekolah klas II, boleh dikata, Bahasa Jawanya sudah kuat.

Jadi dengan melalui kesenian ini dimaksudkan untuk menanamkan rasa nasionalisme. Perasaan ini pada waktu itu belum tampak dengan menonjol sekali, tetapi masih secara halus melalui kesenian dan juga dengan pendidikan. Berdirinya KBW ini menggugah anak-anak kita senang akan tari dan tidak melupakan kebudayaannya sendiri.

Dengan pendidikan orang mudah didasarkan dan mudah diajak untuk membicarakan hal-hal yang menjadi keperluan bernegara nanti. Dalam melawan Belanda, dicapai cara yang sa-

ngat halus. Biasanya di dalam tujuan anggaran dasar tiap perkumpulan hanya dicantumkan untuk menjunjung tarap hidup rakyat dengan melalui bermacam-macam jalan seperti pendidikan, kebudayaan dan kesenian.

e. A g a m a

Tentang perkembangan agama pada periode Perang Dunia I itu berjalan dengan baik. Agama yang pada waktu itu ialah Islam, Kristen dan Katolik diberi hak hidup dan mengembangkan agamanya masing-masing. Gerakan agama Islam pada waktu itu diusahakan oleh Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah ini secara resmi berdiri pada 18 Nopember 1912 atau bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1330 H di Yogyakarta.

Pada waktu kelahiran Muhammadiyah itu agama Islam menunjukkan kepudaran dan kesuraman. Umat Islam waktu itu hidup dalam kekolotan dan kebekuan. Karenanya kelahiran Muhammadiyah di masa itu bertugas menghilangkan suasana yang penuh kesuraman dan kepudaran yang melingkupi kehidupan agama Islam di tanah air kita umumnya dan di Daerah Yogyakarta khususnya. Dengan kata lain Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang hendak mengadakan reformasi dan modernisasi dalam Islam.

Gerak amalnya antara lain mengadakan pengajian baik untuk laki-laki maupun wanita dari segala tingkatan, tidak membedakan derajat dan kekayaan, semua mendapat pembinaan dari K.H. Ahmad Dahlan.

Kaum buruh batik dan pembantu-pembantu rumah tangga dibinanya juga. Bahkan dalam kota Yogyakarta K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan adanya jemaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam menurut kemampuannya, dengan nama masing-masing yang mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, seperti:

Ikhwanul-Muslimin, Taqwinuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Khayatul-Qulub, Priya-Utama, Dewan Islam, Wal Fajri, Wal Ashri, Jam-iyatul Ummahat, Jam-iyatul Muslimin, Syarihatul Mabtadi dan lain-lainnya.

Dengan kegiatan Muhammadiyah yang demikian cepat itu maka agama Islam berkembang sampai di pelosok desa, bukan hanya di daerah Yogyakarta, tetapi tersebar ke seluruh Ja-

wa dan luar Jawa.

Bagi agama Katholik di Daerah Yogyakarta pada waktu itu dipimpin oleh Pastur Van Driesen. Pastur Van Driesen ini sangat terkenal karena biasa masuk kampung ke luar kampung di rumah-rumah rakyat dengan mengajak berbicara dengan cara silaturahmi. Dengan penyiaran Pastur yang menarik ini sampai-sampai banyak pula orang yang didatanginya mengikuti agamanya. Pastur ini memang pandai dalam hal sopan santun dengan sangat halusny. Sosiologinya benar-benar dikuasainya.

Dengan kehadiran Ki Hajar Dewantara dalam pergerakan agama Islam juga dapat berkembang tetapi sudah bercampur dengan politik. Ki Hajar Dewantara waktu kecil mendapat pendidikan agama dari orang tuanya P. Suryaningrat dengan baik. Tetapi pengamalan agama Islam ini sudah bercampur dengan berbagai unsur Kejawen.

Adapun penyebaran agama Kristen dilakukan oleh Zending telah mengambil langkah melalui penerangan di gereja-gereja dan juga di desa-desa. Para penguasa Pemerintah Kolonial yang sebagian besar orang Belanda telah turut membantu tersebarnya agama tersebut. Namun perkembangannya belum begitu cepat.

3. Hubungan dengan Volksraad

- a. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta ada seorang anggauta Volksraad, bernama: Ahmad Hudaya, menjabat Wedana Kotagede. Beliau tidak mewakili rakyat Yogyakarta, tetapi atas tunjukan para pamong praja.
- b. Sidang perwakilan dari daerah *Vorstenlanden* (daerah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta), adalah seorang Pangeran berasal dari Surakarta bernama: G.P.H. Hadiwijaya dan seorang lagi bernama: Amongsaputro
- c. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta semasa itu, baik pada tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kotamadya tidak ada *Provinciale Raad* maupun *Gemeente Raad*. Hal ini terbentur adanya peraturan khusus *Zelfsbestuur*.
- d. Untuk Yogyakarta pemerintahannya berbentuk Kanayakan. Yang mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasultanan Ngayogyakarta) di Volksraad tidak ada. Anggota

Volksraad yang bertempat tinggal di daerah Kasultanan Yogyakarta, ialah Ahmad Hudaya, seorang Wedana di Kotagede. Yang mewakili *Vorstenlanden* masa itu berasal dari Surakarta, ialah: G.P.H. Hadiwijaya. Apakah beliau mewakili juga kraton Yogyakarta dan mewakili rakyat daerah Yogyakarta belum dapat diketahui dengan pasti.

4. *Dewan-dewan di Daerah.*

Di daerah Kasultanan Ngayogyakarta, tidak ada dewan-dewan, seperti di daerah lain, misalnya: *Provinciale Raad*, *Gemeente Raad* dan sebagainya. Keadaan ini berlaku demikian, karena di Yogyakarta merupakan daerah *Zelfbestuur*.

Susunan pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta mempunyai corak tersendiri, ialah: *Pemerintahan berbentuk Kanayakan*. Disamping kekuasaan *Pepatih Dalem* sebagai pemegang pemerintahan di Yogyakarta, di bawahnya berdiri delapan orang *Nayaka* yang bertanggung jawab terhadap *Pepatih Dalem*.

Adapun delapan Kanayakan itu ialah :

- a. *Kanakayakan Gedongkiwo*, dan
- b. *Gedongtengen*, mengurus soal-soal hasil dan keuangan.
- c. *Kanayakan Keparak Kiwo* dan
- d. *Keparak Tengen*, mengurus soal-soal yayasan dan pekerjaan umum.
- e. *Kanakayan Bumijo* dan
- f. *Slitisewu*, mengurus soal-soal tanah dan praja.
- g. *Kanayakan Panumping* dan
- h. *Numbakanyar*, mengurus soal-soal pertahanan dan ketentaraan.

Semasa pemerintahan Hindia Belanda pernah pula diusulkan agar di Kota Yogyakarta dibentuk *Gemeente Raad*. Pada waktu itu untuk seluruh Jawa dibagi menjadi tiga propinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang masing-masing mempunyai *Provincie Raad*. Kemudian Provinsi ini dibagi lagi menjadi beberapa Residensi. Bila keresidenan itu kotanya besar maka dibentuklah *Gemeente Raad*, seperti Semarang, Madiun dan Magelang. Sedangkan untuk Yogyakarta pada waktu itu tidak ada *Gemeente Raad*. Di dalam kota Yogyakarta ada *Bupati Kuto*, tetapi tidak mempunyai *Gemeente Raad*.

Pada waktu itu Kasultanan Yogyakarta dibagi-bagi menjadi beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Kuto, Kabupaten Kalasan, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian dengan adanya pengecilan daerah maka Kabupaten Sleman dan Kalasan menjadi satu, sedang Kabupaten lainnya tetap berdiri sebagai Kabupaten sendiri.

Dalam hal pemerintahan, Daerah Kasultanan Kepala Daerahnya adalah Sultan. Sultan diwakili oleh Patih. Patih inilah yang mengadakan kontak kerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda dalam hal ini Residen. Bila tidak ada hal-hal yang istimewa maka pekerjaan Sultan cukup diselesaikan dan ditangani oleh Patih.

Untuk melaksanakan pemerintahan dan sekaligus mengadakan pengawasan langsung maka pemerintah mengangkat pembantu Residen yang disebut Asisten Residen untuk mendampingi Bupati, baik Bupati Kuto maupun Bupati di tiap daerah. Hanya di Sleman dan Bantul pada waktu itu tidak ada Asisten Residen. Di Kabupaten Gunung Kidul ada Asisten Residen.

Bila ditilik secara mendalam maka pada hakekatnya Asisten Residen itu oleh pemerintah Hindia Belanda bukan hanya sekedar sebagai pendamping, tetapi mempunyai tujuan politik yaitu untuk mengawasi secara langsung jalannya pemerintahan di kabupaten.

E. PERJUANGAN DI DAERAH

1. Interaksi dengan pemogokan-pemogokan di sekitar tahun 1923.

Setelah Perang Dunia I selesai apa yang dijanjikan untuk mengadakan perubahan dan memajukan pemerintahan Hindia Belanda hingga memuaskan keinginan rakyat dari Gubernur Jendral J.P. van Limburg Stirum hanyalah omong-kosong. Kaum SI yang revolusioner dan tetap bersikap non koperasi lalu tertawa melihat sandiwara *Volksraad* itu. Cokroaminoto yang masuk menjadi anggota *Volksraad* dijadikan olok-olok kaum Syarikat Islam non koperator seperti Semaun, Muso, Alimin dan kawan-kawannya. Karena mengalami pahit itu kemudian Cokroaminoto, Abdul Muis dan beberapa pemimpin lainnya lagi me-

ninggalkan *Volksraad*.

Dengan masuknya Sneevliet seorang Belanda yang berfaham komunis, akhirnya banyak dari anggota Syarikat Islam masuk dalam gerakannya. Bahkan kemudian terbentuklah perkumpulan *Indische Sosiaal Democratische Vereniging* (ISDV) yang bertujuan menyebarkan pikiran-pikiran Sneevliet. Pada tahun 1920 ISDV dilebur menjadi partai Komunis Indonesia. Dengan demikian dalam tubuh SI timbul perpecahan.

Cokroaminoto yang melihat pengaruh komunis masuk ke dalam tubuh SI lalu mengadakan disiplin partai. Anggota-anggota SI tidak boleh memasuki partai lain. Kristalisasi partai ini ditentang oleh Semaun dan kawan-kawannya. Maka dengan pertentangan itulah lalu timbul Partai Komunis Indonesia.

Antara PKI dan SI Cokroaminoto berebut pengaruh dalam masyarakat. Keadaan masyarakat setelah Perang Dunia I sangat jeleknya, maka pada tahun 1919 berdirilah Persatuan Pergerakan Kaum Buruh. Karena jeleknya keadaan perekonomian rakyat, maka pada tahun tersebut lalu timbul pemogokan-pemogokan akibat terjadinya jurang kemewahan yang dalam antara penjajah dan rakyat yang dijajah. Pada waktu itu kaum modal bertambah sangat besar akibat dari banyaknya permintaan barang-barang ekspor dari Indonesia. Sebaliknya arti upah kaum buruh sangat rendah dan tidak setimpal. Pemogokan ini mula-mula dilakukan oleh anggota-anggota PFB (*Personeel Fabriek Bond*). Perkumpulan ini berdiri pada tahun 1919 dengan tujuan memberi pertolongan kepada keluarga buruh pabrik di daerah Yogyakarta, tetapi lalu dengan cepatnya tersebar di seluruh Jawa. Pimpinan pemogokan ini adalah Suryopranoto Komisaris CSI dari Yogyakarta. Pada tahun 1920 perkumpulan ini minta kepada penguasa dan pengurus perusahaan kebun dan sindikat gula agar mengakui PFB sebagai badan perwakilan para buruh. Kecuali itu diminta pula supaya upah kaum buruh dinaikkan. Karena kaum pengusaha kebun tidak menuruti permintaannya, maka PFB pada tanggal 7 Agustus 1920 terpaksa mengajukan ultimatum.

Dalam situasi yang demikian itu pemerintah Belanda berdiri di samping kaum modal gula serta berusaha menekan serta melarang pemogokan tersebut. Pemerintah berbuat demikian meskipun tahu bahwa turunnya arti upah itu nyata sesuai

dengan yang dikemukakan sendiri. Hal ini merupakan perbedaan yang sangat ganjil terhadap keuntungan luar biasa yang didapat oleh perusahaan gula pada waktu itu. Larangan dikeluarkanya, katanya atas pertimbangan bahwa aksi ini bukan untuk perbaikan nasib kaum buruh, tetapi sebetulnya aksi politik untuk mengadakan kerusuhan, Tetapi seiring dengan itu pemerintah merasa perlu mengingatkan, bahwa perusahaan gula sebaiknya menambah upah buruhnya.

Pada 1 Agustus 1920 diadakan Konggres Persatuan Pergerakan Buruh (PPKB) yang mewakili 22 serikat sekerja dengan jumlah anggota 72.000 yang diselenggarakan di Yogyakarta (pusat SI) sebagai kedudukan pengurus Besar PPPKB. Adapun susunan pengurus perkumpulan tersebut adalah sebagai berikut: Ketua: Semaun (Komunis), Ketua Muda: Suryopranto (SI) dan Sekretaris. Agus Salim (SI).

Perjuangan antara SI dan Komunis untuk mendapat pengaruh dalam merebut massa berjalan terus. Dalam rapat umum sentral Sarekat Sekerja PPKB tanggal 18 - 20 Juni 1921 di Yogyakarta terjadi perpecahan. Semaun dengan perkumpulan lainnya yang cocok dengan pendapatnya sejumlah 14 mengikutinya. Perkumpulan buruh yang tergabung ialah VSTP, perkumpulan buruh pelabuhan dan buruh tambang, Sarekat Sopir, Sarekat Buruh Cetak, penjahit dan sebagainya ke luar dari PPKB dan membentuk gabungan baru dengan nama *Revolutionaire Vakcentrale* berkedudukan di Semarang. Sedang Suryopranto dan Salim meneruskan PPKB di Yogyakarta dengan pegawai pegadaian sebagai tulang punggungnya.

Semaun berusaha keras merebut kekuasaan dalam SI dan dalam PPKB (Sentral Sarekat Sekerja Yogyakarta). Ini terbukti dengan turut campurnya dalam pemogokan pegawai pegadaian bulan Januari 1922. Dalam pemogokan ini ikut 100 orang yaitu 20% dari semua pegawai. Para pemogok terus dilepas sebagai pegawai Pemerintah. Pemogokan ini bukan karena hal gaji tetapi oleh karena sikap kepala pegadaian bangsa peranakan yang meremehkan dan menghina pegawai Indonesia. Di sinilah VSTP yang komunistis dan juga SI turut membantu para pemogok karena pemogokan itu sangat berfaedah bagi perjuangan nasib buruh. Karena pemogokan ini sangat membahayakan maka Pemerintah kemudian mengasingkan pemimpin pemogokan itu ialah Tan Malaka dan Bergsma. Tan Malaka dibuang ke Kupang,

tetapi akhirnya memilih ke luar Indonesia.

Pemogokan pada tahun 1923 merupakan peristiwa pemogokan kaum buruh kereta api yang dipimpin oleh Semaun. Peristiwa ini untuk daerah Yogyakarta tidaklah berdiri sendiri tetapi merupakan kelanjutan dari keadaan yang tidak memuaskan sebelumnya.

Seperti kita ketahui setelah Gubernur Jendral J.P. van Limburg Stirum habis dinasny sebelum memenuhi "janji Nopember" ia digantikan oleh D. Fock. Gubernur Jendral baru ini lebih reaksioner daripada J.P. van Limburg Stirum. Politik tangan besi mulai dijalankan. Janji Nopember sudah beku. Tindakan kekerasan itu menimbulkan kemarahan rakyat. Di sana sini terjadi sabotase. Di daerah Surakarta banyak kejadian kebun tebu terbakar habis, kereta api ke luar dari rel. Demikian pula pada waktu Fock berkunjung ke Yogyakarta dilempari dengan bom. Pada waktu itu memang telah disiapkan bom yang dibuatnya sendiri. Peristiwa pembunuhan Fock ini terjadi di Kotabaru dan di Alun-alun Yogyakarta.

Keadaan yang buruk ini memberi pengaruh di berbagai tempat. Seperti terjadi pula pemogokan pegawai pegadaian di Ngupasan Yogyakarta yang kemudian tersusul dengan pemogokan kereta api. Tentang pemogokan Ngupasan Yogyakarta itu asal mulanya sebagai berikut: Pada waktu itu bila di pegadaian akan diadakan lelangan, maka yang disuruh mengambil barang-barang dari atas rak itu ialah pegawai-pegawai dari bangsa Indonesia. Perintah yang semena-mena itu dirasakan sebagai perlakuan yang memperkuda. Mereka disuruh mengangkati kenceng, periuk tembaga dan sebagainya dari rak-rak. Karena mereka merasa diperlakukan yang tidak sesuai, akhirnya mereka mogok tidak mau melaksanakan tugas tersebut. Fihak orang Belanda yang merasa berkuasa mengeluarkan ancaman. Karena ancaman inilah mereka serentak mengadakan pemogokan. Akibat adanya pemogokan ini mereka banyak yang dipecat. Di antara tokoh yang ikut memimpin pemogokan tersebut ialah Martadirja. Kantor pegadaian pada saat itu berada di muka Taman Siswa Yogyakarta.

Demikianlah interaksi pemogokan kereta api yang terjadi tahun 1923 di daerah Yogyakarta pun merupakan rentetan peristiwa yang sangat komplek merundung kehidupan masyarakat kecil dan kaum buruh dari berbagai bidang dan jawatan. Se-

bagai kelanjutan dari peristiwa pemogokan tahun itu, maka berdasarkan kongres PKI Desember 1924 di Kotagede Yogyakarta telah memutuskan untuk mengulangi lagi memperhebat aksi kecil di kalangan buruh perusahaan pemerintah, perusahaan pengangkutan, industri dan tambang. Menghadapi gerakan rakyat yang bertubi-tubi, pemerintah kolonial merasa ketakutan. Maka tidak ada jalan lain mereka mengadakan penangkapan terhadap pemimpinnya.

2. Interaksi dengan Pemberontakan tahun 1926 - 1927.

Tekanan pemerintah jajahan terhadap pergerakan kemerdekaan makin keras. Bahaya komunis menjalar ke mana-mana. Kejahatan penjajah dan kapitalis dibeberkan di hadapan khlayak bangsa Indonesia. Kaum pergerakan sangat mengagumkan keberaniannya menghadapi pemerintah Belanda dan rakyat makin terbuka hatinya menyadari nasibnya sebagai bangsa yang dijajah. Dalam karikatur tindakan kapitalis Belanda dilukiskan sebagai seorang tuan yang gendut perutnya, dengan saluran karet ia menghisap darah kaum melarat yang kurus kering, disuruh mencangkul di sawah, lehernya dikalungi besi berat (pajak) dan mulutnya dibungkem (art 153 bis dan ter).

Dalam tahun 1925 tekanan pemerintah kepada PKI makin keras. Banyak pemimpin PKI yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Keaktifan PID dan kaki tangannya menyebabkan gerakan kaum pergerakan mengalami rintangan yang sangat berat. Rapat umum tidak dapat langsung karena selalu dibubarkan polisi. Bukan PKI dan Sarekat Rakyat saja yang ditekan, tetapi juga partai politik lainnya tidak luput dari kekangan. Hak bersidang dan berkumpul yang menurut undang-undang diberi hak kebebasan yang luas, tetapi dalam praktek hak itu hampir lenyap. Banyak ambtenar bumi putera yang berjiwa melebihi Belanda sendiri.

Proses kekeruhan itu berjalan hingga tahun 1926. Jurang pertentangan antara rakyat dan pemerintah makin lebar. Corak pemerintahan Hindia Belanda hampir menyerupai sebuah negara polisi (*politiestaat*) yang menekan segala perkembangan rakyat di berbagai lapangan. Tangan besi Gubernur Jenderal Fock berlaku makin ganasnya. *Volksraad* hanya semacam komidi omong kosong yang impoten, malah adanya *Volksraad*

itu dapat digunakan oleh kaum pengusaha onderneming asing untuk memperjuangkan kepentingannya agar keuntungan yang sudah diperoleh bertambah banyak lagi.

Bulan September 1926 berakhirlah masa kerja Mr. D. Fock sebagai Gubernur Jendral, lalu digantikan oleh Gubernur Jenderal A.C.D. De Graeff. Orang baru ini mengetahui kegelisahan rakyat karena akibat tangan besi Fock lalu diusahakannya akan mengambil hati rakyat. Dikatakannya bahwa kedatangannya justru untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Ia akan menjalankan politik lunak dan akan mengajak kerja sama dengan segenap lapisan rakyat guna memajukan negeri ini.

Tetapi kaum pergerakan telah lama tidak percaya kepada Belanda. Pergantian Gubernur Jenderal itu dianggapnya sepi saja, karena biar bagaimanapun macamnya Gubernur Jenderal itu, namun jiwanya pun tetap Belanda, dan Indonesia tidak akan merdeka dengan pergantian gubernur jenderal saja. Hampir sepuluh tahun *Volksraad* berjalan ternyata, tidak ada perubahan apa-apa kecuali beban pajak yang makin memberati rakyat. Janji Nopember dulu merupakan janji kosong belaka.

Karena adanya beberapa hal tersebut di atas, maka pada tanggal 12 dan 13 Nopember 1926 meletuslah Pemberontakan di Jawa Barat yang mula-mula direka oleh kaum komunis. Pemberontakan tahun 1926 itu lebih tepat dikatakan Pemberontakan di Banten dan Jawa Barat, karena di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak seberapa terjadi huru-hara. Pemberontakan ini seperti halnya terjadi di Sumatera dalam tahun 1927 dan terbatas di daerah Minangkabau hingga lazim disebut "Pemberontakan Silungkang" karena yang paling hebat terjadi di Silungkang dalam bulan Januari 1927. Banyak Pamong praja di Sumatera Barat yang mati terbunuh dan hubungan kereta api terganggu. Pada pemberontakan itu beratus-ratus orang dalam malam hari penyerang penjara Glodog untuk mengeluarkan orang hukuman di sana. Saat itu terjadilah tembak-menembak. Karena segera datang bala bantuan dari tangsi militer, maka percobaan merebut penjara Glodog dapat digagalkan. Kaum pemberontak terusir pergi. Esok harinya baru diketahui bahwa bukan di daerah Jakarta saja yang mengalami huru-hara, tetapi meluas di Banten, Menes, Labuhan dan Serang. Di Priangan pemberontakan meletus di Ciamis, Cimahi, Nagrek, sedang di

daerah Jakarta paling hebat di Tangerang. Jumlah kaum pemberontak itu mencapai ribuan. Wedono Menes dan *Opzichter* S.S. di Menes Benyamins mati dicincang. Beberapa orang Pamong Praja ikut menjadi korban huru-hara itu. Di Jakarta percobaan merebut kantor telepon dapat digagalkan.

Pemberontakan ini merupakan puncak kemarahan rakyat yang telah lama ditahan dalam hati. Akibat dari pemberontakan ini timbullah di pelbagai sektor kerusakan yang berat. Rakyat yang marah itu menyerang pos-pos polisi, memutuskan kawat telepon, merusak jalan kereta api dan jembatan. Pada beberapa jalan diadakan rintangan dengan pohon-pohon. Pembunuhan kian hari kian banyak. Sampai 14 Nopember yang ditawan ada 300 penduduk.

Di antara orang-orang pemerintah timbul kekacauan besar, karena mereka tak dapat menggambarkan berapa besarnya gerakan pemberontak yang timbul di beberapa daerah. Pemberontakan di Jakarta dalam tempo yang singkat dapat ditindas, sedang pemberontakan di Banten berlangsung sampai satu bulan lamanya.

Banyak warga desa yang melibatkan diri pada pemberontakan dan ikut perang gerilya. Juga jalan-jalan dan perkebunan dibakar. Di Priangan kekacauan berjalan sampai 18 Nopember 1926, sedang di Jawa Tengah termasuk di daerah Yogyakarta, Surakarta pemberontakan baru timbul beberapa waktu sesudah Jawa Barat (17 Nopember 1926).

Kebanyakan yang ikut memberontak itu ialah orang kampung yang tidak terpelajar menurut faham Barat termasuk haji dan santri serta kaum buruh. Maka dapatlah dikatakan bahwa pemberontakan ini merupakan perlawanan rakyat yang mula-mula direka oleh kaum komunis tetapi selanjutnya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat luas, karena sebenarnya kaum komunis sendiri sejak awal pemberontakan sudah kehilangan kontrol dan inisiatif. Pemberontakan ini kelihatan tidak diatur secara teliti, terbukti hanya timbul di beberapa daerah, sedang persenjataannya sangat terbatas. Mereka dapat membeli beberapa ribu peluru dari pedagang Cina.

Para pemberontak kemudian ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda lalu dibunuh dan dipenjara serta banyak pula yang dibuang ke Digul. Pemberontakan ini gagal, lebih banyak kerugian daripada keuntungan dan kemudian menjadi hancur

luluh.

3. Sikap Masyarakat terhadap Asas non Koperasi dan Koperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Masyarakat pada umumnya lebih-lebih yang ada di pedesaan belum seluruhnya dapat mengikuti dan memahami gerak langkah serta usaha kaum pergerakan dalam menghadapi pemerintah kolonial, kecuali dari mereka yang telah mendapat pendidikan dan terbina dalam suatu organisasi partai politik. Maka dalam hal menanggapi asas non koperasi dan koperasi ini ada kelompok yang mau bekerja sama dengan pemerintah, tetapi ada pula yang menentang kerja sama itu. Kelompok yang mau bekerja sama ini biasanya disebut *kaum sana*, sedang yang melawan terkenal dengan *kaum sini*. Pamong Praja yang tergabung dan B.B. tergolong pihak kaum sana. Sedang kaum sini ialah kaum Nasionalis yang benar-benar bersikap tegas menghadapi pemerintah kolonial. Golongan Pamong Praja ini, pegawai-pegawai pabrik dan juga *Regent-regent* mereka tergabung dalam PEB:

Polotieke Economische Bond Kaum B.B. otomatis masuk dalam PEB ini. Dan di antara kelompok ini ada yang progresif, ada pula yang tidak progresif terhadap pemerintah Belanda.

4. Interaksi dengan Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

Setahun sebelum Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) ini dibentuk telah ada rintisan suatu penggabungan dalam *studieclub-studieclub* yang bekerja atas asas persatuan dalam pergerakan membebaskan bangsa Indonesia. Maka untuk mempelajari tentang kemungkinan diadakannya persatuan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia di Bandung setelah Agustus 1926 didirikan Komite Persatuan Indonesia, sedang di Surabaya dalam bulan September tahun itu pula lahirlah *Komite Persatuan Indonesia* pula. Dalam Komite itu turut duduk semua *Studeclub*, SI, Muhammadiyah, *Jong Islamieten Bond*, Pasundan, Persatuan Minahasa, Serikat Ambon dan Sarekat Madura, yang akan mengusahakan adanya persatuan yang diinginkan itu bagi Pergerakan Indonesia. Tetapi satu organisasi saja atau satu gabungan (*federasi*) tak dapatlah diwujudkan oleh badan ini.

Baru pada tahun 1927 hasil Kongres Syarikat Islam di Pekalongan dapat menerima ide tentang badan gabungan tersebut. Maka sesudah disusun persatuan buat sementara yang dikerjakan oleh PNI bersama-sama dengan PSI Ir. Sukarno dan Dr. Sukiman dan setelah peraturan itu dikirimkan kepada semua pengurus besar partai yang berjenis-jenis itu maka pada 17 Desember 1927 lahirlah PPPKI. Yang menjadi anggotanya ialah PNI (diwakili Ir. Sukarno, Mr. Iskaq; dari *Algemeene Studieclub* oleh Mr. Sartono, Mr. Budiarto dan Mr. Samsi ketiga-tiganya anggota PNI); PSI (Dr. Sukiman dan Syahbudin Latif), BU (Kusumo Utojo dan Sutopo Wonoboyo). Pasundan (Otto Iskandardinata, Bakri Suryaatmaja dan S. Sanjaya). Sarekat Sumatera (Parada Harahap, Dahlan Abdullah), Kaum Betawi (Thamrin); *Indonesische Studieclub* (Suyono Gondokusumo dan Sunyoto). Persatuan Minahasa dan Sarekat Ambon tidak memasuki gabungan ini. Kemudian masuk lagi Sarekat Madura, Tirtayasa (sebuah organisasi orang Banten) dan Perserikatan Celebes.

Daerah Yogyakarta tidak ketinggalan menyambut lahirnya PPPKI. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggabungan Muhammadiyah beserta organisasi lain dalam Badan tersebut. Kecuali itu dengan diselenggarakannya Konperensi PPPKI di Yogyakarta 29 – 30 Maret 1929 dan telah mengambil beberapa keputusan yang tegas antara lain:

- a. Agar para pemimpin bangsa Indonesia yang diasingkan ke Digul itu diperiksa betul-betul, karena mungkin tidak beresalah. Tetapi pemerintah tidak mengijinkan surat-surat itu diperiksa.
- b. Selanjutnya diambil keputusan, supaya selambat-lambatnya pada 1 Mei 1929 dilakukan aksi yang sudah dirancang untuk menentang pasal-pasal 153 bis dan tersebut 161 bis dari Undang-undang Hukum Pidana (tentang hasutan yang bersifat revolusioner dan ajakan mengadakan pemogokan) di kota-kota yang penting (aksi ini benarlah kejadian). Tat kala hal ini dimasukkan ke Dewan Rakyat dan Pemerintah akan menyerahkan hal ini kepada suatu panitia istimewa supaya memeriksanya, maka PPPKI berhenti melakukan aksi itu.
- c. Juga Konperensi ini akan mendirikan Fonds Nasional un-

tuk membelanjai propaganda di Indonesia dan di luarnya serta untuk menyokong sekolah kebangsaan, sedang akhirnya oleh konperensi ini atas anjuran PNI diangkatlah Perhimpunan Indonesia menjadi pengawal yang paling depan (di Eropa) bagi pergerakan kebangsaan Indonesia. Ini terjadi atas pertimbangan:

- 1). Besarlah faedahnya Eropa itu mengetahui keadaan yang merajalela di Indonesia (*poenale sanctie*, rodi, rintangan bagi kemerdekaan berbicara dan sebagainya).
- 2). Melalui Perhimpunan Indonesia supaya PPPKI dapat mengetahui sebaik-baiknya kejadian dalam kalangan politik di Eropa yang dirasa penting bagi Indonesia.

Pada 2 April 1929 Perhimpunan Indonesia diangkat dengan resmi menjadi wakil PPPKI dengan mendapat mandat terbatas. PI dapat menjalankan aksi di Eropa atas nama PPPKI terhadap *poenale sanctie* dan ketiga pasal dari Undang-undang Hukum Pidana yang tersebut di atas tadi.

5. Interaksi dengan Sumpah Pemuda

Dengan berhasilnya Konggres ke II Pemuda-pemuda Indonesia yang melahirkan Sumpah Pemuda dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, maka pemuda Indonesia mempunyai pegangan dan landasan yang sama dan kuat dalam perjuangannya. Usaha merealisasi ide persatuan lebih dipermudah dengan adanya landasan ideal yang sama itu.

Usaha untuk mempersatukan organisasi pemuda-pemuda dengan sungguh-sungguh dilaksanakan setelah Konggres II ini. Dalam Konggres ke II Pemuda Indonesia yang dilangsungkan pada tanggal 24 - 28 Desember 1928 di Jakarta masalah jalan "fusi" atau "federasi" diajukan sebagai salah satu masalah yang utama.

Sementara itu *Jong Java* dalam Konggresnya ke XI yang diadakan pada tanggal 15 - 31 Desember 1928 di Yogyakarta (dalam Jayadipuran) telah menerima jalan untuk menyatakan organisasi pemuda dengan fusi. Keputusan ini juga dikawatkan kepada Konggres Pemuda Indonesia. Dengan diterimanya prinsip ini oleh *Jong Java* sebagai salah satu organisasi pemuda yang terbesar dan berpengaruh pada waktu itu, mem-

percepat dan melancarkan jalannya usaha untuk mempersatukan organisasi pemuda.

Jejak untuk menempuh jalan fusi keputusan dari Yogyakarta segera juga diikuti oleh pemuda Sumatera dalam putusannya pada pertengahan bulan Pebruari 1929 dan kemudian oleh Jong Celebes. Prinsip fusi telah diterima oleh empat organisasi pemuda, tinggal menanti pelaksanaan fusi itu.

Untuk ini pada tanggal 23 April 1929, wakil organisasi pemuda *Jong Java*, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia mengadakan pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu juga mereka namakan Sidang fusi yang pertama. Sidang fusi ini menerima dengan bulat untuk membentuk Komisi Besar. Tugas Komisi Besar ini ialah melaksanakan fusi di antara organisasi baru yang akan lahir itu yang kemudian bernama "Indonesia Muda" Organisasi ini terbentuk pada tahun 1930.

Dalam anggaran Dasarnya disebut bahwa Indonesia Muda hanya menghimpun pemuda-pemuda pelajar sekolah menengah. Sebagai organisasi ia melarang anggota-anggotanya mengambil bagian aktif dalam politik.

Ketentuan kedua ini diambil sebagai usaha untuk menyelamatkan diri berhubung dengan situasi politik pada waktu itu, yaitu saat pemerintah kolonial Belanda melakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PNI. Dalam perkembangan selanjutnya Indonesia Muda juga menerima keanggotaan dari pemuda biasa. Putusan ini disambut dengan gembira oleh pemuda-pemudi umumnya. Aksi politik juga dilakukan oleh IM maupun oleh anggotanya secara perorangan.

Indonesia Muda secara aktif membantu dan ikut serta melancarkan perjuangan menentang "Ordonansi Sekolah Liar" (*Wilde Scholen Ordonantie*), dan menganjurkan anggotanya untuk mendaftarkan diri sebagai guru cadangan kalau sampai terjadi penangkapan terhadap guru-guru yang membangkang mematuhi Ordonansi tersebut. IM juga mempunyai kegiatan yang luas dalam kebudayaan, kesenian, olah raga dan lain-lain. Sangat terkenal juga kejayaan kesebelasan Indonesia Muda Yogyakarta. Usaha lain juga menolong korban Merapi, dan usaha sosial lainnya juga mendapat perhatiannya. IM juga kerap kali mengadakan aksi serentak untuk mengadakan rapat-rapat di semua cabangnya, misalnya dalam bulan Agustus IM mengadakan aksi serentak di 30 tempat.

Lahirnya Indonesia Muda (IM) adalah suatu langkah yang maju berupa tanggapan terhadap ide persatuan dalam organisasi pemuda. Tetapi sebagai organisasi baru yang dilahirkan dalam syarat yang lebih maju pada permulaannya mempunyai beberapa kelemahan, sehingga sebagai cetusan tidak adanya kepuasan itu sejumlah pemuda di Malang mendirikan organisasi Suluh Indonesia Muda.

Dalam perkembangannya Suluh Indonesia Muda ini berada di bawah pengaruh Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) Suluh Indonesia anggotanya lebih luas lagi yaitu terdiri dari segala lapisan pemuda. Sikapnya pun lebih radikal melawan kekuasaan kolonial Belanda, maka SPI ini juga ditakuti oleh pemerintah kolonial dan bersamaan itu pula mendapat pengawasan keras. SPI juga dikenakan larangan berapat (*Vergader Verbod*).

Menanggapi lahirnya SPI ini ternyata Yogyakarta telah menyambutnya ialah dengan diselenggarakannya kongresnya II tahun 1933 di kota Yogyakarta. Kongres mengambil keputusan: 1 walaupun menghadapi tekanan yang keras SPI akan melanjutkan perjuangannya, menyusun organisasi yang demikian rapinya yang menjamin melintasi garak dalam menghadapi berbagai macam tekanan, pengejaran dan penangkapan PID; 2. mengintensifkan pendidikan kader, dengan cara dalam jumlah kecil, 3. majalah SPI "Suluh" perlu diperkuat dan diusahakan terbitnya lebih teratur.

Ketidakpuasan pemuda pada umumnya terhadap organisasi pemuda yang sudah ada bukan hanya tercermin dengan berdirinya SPI tetapi juga dengan berdirinya organisasi pemuda yang lain-lain, yang bersifat lebih radikal.

Untuk merealisasi ide mempersatukan pemuda tanpa membedakan lapisan, kedudukan sosial dan pendidikannya, maka oleh sejumlah pemuda di Yogyakarta antara lain Martoro Tirtonegoro, Muhammad Sunarman, Sahudoro, S.W. Legiono, Kotot Sukardi, Utomo dan Suryo, pada tahun 1931 didirikan organisasi pemuda yang baru. Organisasi pemuda yang baru ini pada permulaannya bernama "Persatuan Pemuda Mataram" Pengurus-pengurusnya terdiri dari semua pendiri-pendirinya.

Untuk merealisasi ide perlunya ada organisasi pemuda yang dapat menghimpun massa pemuda yang luas, maka nama organisasi dalam tahun itu juga diubah menjadi "Persatuan Pemu-

da Rakyat Mataram” sedangkan susunan pengurusnya disempurnakan sebagai berikut: Ketua, Mantoro Tirtonegoro; Sekretaris, Sukahar; Bendahara, Utomo; Komisaris, S.W. Lagiono, Sudaryo, Kotot Sukardi, Sahudoro.

”Persatuan Pemuda Rakyat Mataram” berusaha keras untuk meluaskan sayapnya. Pada waktu liburan Sekolah bulan Juli 1931 pemuda-pemuda ini menyebar ke berbagai daerah di Jawa Tengah untuk menjelaskan dan menerangkan tujuan organisasi. Mereka yang disebar ini antara lain ialah. Sutomo Johar Arifin, Sudimulyono, Ismail Wijoyo, Dastirin, Siti Suwarni dan Darmiyati ke Semarang; Bambang Setiawan dan lain-lainnya ke Purwodadi; Trubus dan lain-lainnya ke Magelang; Husein, Sarwono dan lain-lain ke Purworejo. Mereka berhasil membentuk persiapan Cabang di berbagai daerah itu.

Setelah berdiri persiapan Cabang ini, maka pada permulaan tahun 1930 diadakan konferensi besar di Yogyakarta yang dihadiri utusan semua persiapan cabang. Dalam konferensi ini diputuskan.

- a. nama organisasi diubah menjadi ”Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia” dengan disingkat PERPRI,
- b. Tujuan organisasi mencapai Indonesia yang sempurna dengan mempersatukan semua lapisan pemuda.
- c. Sebagai lambang organisasi yang menyatukan organisasi pemuda ditetapkan Gambar Kesatuan PENA dengan ARIT.
- d. Azas Organisasi ialah: Persatuan, Kebangsaan, Kerakyatan.

Sedang asas perjuangannya: Radikal Revolusioner yang bersendi pada keteguhan iman dan kesucian hati. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan usaha:

- 1). Mendidik anggota-anggotanya supaya pemuda yang berjuang untuk tanah air dan bangsanya, dengan jalan mengadakan kursus pengetahuan umum.
- 2). Mengadakan bagian yang dinamakan KB (Kesehatan Badan) yang bertugas untuk mendidik anak-anak di kampung dan desa dalam olah raga dan berbaris.
- 3). Mengadakan kerja sama dengan berbagai organisasi pemuda dalam kegiatan sosial, pendidikan dan lain-lain.

Konferensi Besar ini juga memilih pengurusnya sementara yang terdiri: Ketua I, Sutomo Johar Arifin; Ketua II, Muhammad Sunarman; Sekretaris I, Mantoro Tirtonegoro; Sekretaris II Cipto Laso (Abdul Gafur Moftah); Bendahara Sudi Mulyono; Pembantu-pembantu, Dastirin, Siti Suwarni, Darmiyati (Ny. Hadiprabowo), Sahudoro

Sedangkan untuk memperhatikan dan memelihara Daerah Yogyakarta khususnya ditugaskan kepada S.W. Lagiono, Sudaryo, Subarsono, Utomo dan Kotot Sukardi. Pengurus Besar PERPRI berkedudukan di Yogyakarta. PERPRI kerap kali mengadakan rapat umum di mana kejahatan pemerintah kolonial dibebaskan dan ide perlawanan dipropagandakan.

Karena asas dan tujuannya serta sepak terjangnya yang memperlihatkan sifat anti kolonial itu, maka PERPRI dalam waktu yang singkat mendapatkan simpati yang cukup luas dari kalangan pemuda dan organisasinya pun makin meluas. Fitnahan, tekanan dan usaha pemecahbelahan dari pihak kolonial Belanda tidak membuat pemuda itu menjadi mundur bahkan sebaliknya memupuk pemuda dan kader-kadernya makin menjadi berani dan gigih melawannya. Banyak pemuda yang masuk PERPRI.

Sesuai dengan asas dan tujuannya, maka PERPRI sudah sejak Konferensi Besar di Yogyakarta banyak melakukan kegiatan politik. Aktivitas ini antara lain yang menonjol ialah ikut sertanya PERPRI dalam perjuangan menentang Ordonansi Sekolah Liar bersama dengan organisasi pemuda lainnya. Sebagai hasil dari perlawanan rakyat termasuk pemudanya yang gigih itu maka pemerintah Belanda terpaksa mundur dan tidak melaksanakan organisasi itu. PERPRI juga mengadakan rapat-rapat yang bersifat umum untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Pada tahun 1933 majalah "REVOLUSIONER" dikenakan pelanggaran pers (*pers delict*). Pemimpin redaksinya dikenakan hukuman, Sutomo Johar Arifin dihukum 1 tahun, Sudi-mulyono dan Cipto Lasso masing-masing 6 bulan. Dalam keadaan mengalami tekanan dan pemimpin-pemimpin Pengurus Besarnya masih dalam penjara ini PERPRI mengadakan konferensinya di Magelang. Dalam konferensi ini pemuda Mantoro Tirtonegoro dan Mohamad Sunarman minta di non aktifkan untuk sementara waktu dengan alasan mengha-

dapi ujian sekolah. Konferensi memutuskan untuk memilih pengurus besar baru, meluaskan pekerjaan sosial di kota maupun di desa, meluaskan anggota dengan mengutamakan memasukkan pemuda tani, mempererat hubungan dengan organisasi pemuda lainnya. Pada akhir 1933 di kota Yogyakarta dijadikan ajang penyelenggaraan konferensi PERPRI.

Sebulan sesudahnya kongres, PERPRI dikenakan "larangan berapat" (*Vergader Verbod*) dengan alasan PERPRI mengadakan kongres secara ilegal. Dua bulan sesudah itu pemerintah kolonial Belanda menangkap pemuda-pemuda Ngahadno, Mantoro Tirtonegoro, Mohamad Sunarman, Sahudoro, Joko Hasan, Dastirin, Siti Suwarni dan beberapa pemuda anggota Indonesia Muda, seperti Pandu Kartowiguno, Sukarni, Salam Siswapi, Saleh Rais dan lain-lain. Setelah mereka ditahan satu tahun dengan tanpa proses, mereka dilepaskan, tetapi PERPRI dinyatakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai organisasi terlarang dan harus dibubarkan. Juga anggota PERPRI yang mengajar di sekolah dikenakan larangan mengajar.

Karena hampir semua pengurus dan kader PERPRI diawasi maka organisasi ini praktis tidak dapat melakukan aktivitasnya. Anggota PERPRI selanjutnya melakukan kegiatan perseorangan dan tersebar di berbagai daerah. Karena kegiatannya ini banyak pemimpin dan kader PERPRI pada pertengahan dan akhir tahun 1936 ditangkap seperti Sumarno, Sunarno, dan Mufandi ditangkap di Yogyakarta; Sudi Mulyono dan lain-lain di Semarang, Saleh Rois di Bandung, dan masih banyak lagi di berbagai tempat. Ngahadno tidak ditangkap dan masih dapat melanjutkan kegiatannya. Mereka yang ditangkap itu setelah ditahan lebih 11 bulan, dilepaskan kecuali Sudi Mulyono dan Saleh Rois yang terus dibuang ke Digul.

Pemuda-pemuda dari Taman Siswa juga berusaha mendirikan organisasinya sendiri sesuai dengan sifat-sifat Taman Siswa. Organisasi Pelajar Taman Siswa ini diberi nama *Pemuda Pelajar Taman Siswa* dengan disingkat PPTS, yang berdiri pada tanggal 29 Juni 1933 dengan berpusat di Yogyakarta. PPTS berasaskan: 1. kebangsaan yang seluas-luasnya dengan mengingat hak kemanusiaan, 2. kemerdekaan diri yang dibatasi oleh tertib dan damai; 3. persaudaraan yang berarti: sebangsa, setanah air, senasib, sependidikan dan secita-cita; 4. persa-

maan yang tidak bertentangan dengan keadaan dan kodrat alam.

Dari asas dasar yang tersebut di atas maka jelaslah bahwa PPTS bertujuan mempertinggi, memperdalam semangat dan jiwa kebangsaan guna mewujudkan persatuan di kalangan Pemuda Pelajar Taman Siswa khususnya dan pemuda Indonesia umumnya.

Dengan berdasarkan asasnya ini PPTS juga mengambil bagian aktif dalam gerakan pemuda Indonesia umumnya dan pelajar khususnya PPTS ikut serta ambil bagian dalam gerakan menentang berbagai "Ordonansi Sekolah Liar", ikut serta aktif dalam aksi-aksi menentang pengekangan, ikut serta aktif dalam gerakan kaum fasis Belanda yang bernama "*Anti Inlander*" dan gerakan menentang bahaya agresi fasis Jepang di kemudian hari.

Kecuali ini PPTS juga mempunyai kegiatan dalam kesenian dan olah raga sebagaimana gerakan pemuda pelajar pada umumnya. Dalam melakukan kegiatan kebudayaan ini PPTS juga ikut serta mengorganisasi latihan tari daerah, pencak silat, musik dan lain-lain.

Dengan melalui pendidikan seperti ini maka PPTS ikut ambil bagian dalam meningkatkan kesadaran politik nasional pemuda pemuda terutama para anggotanya sendiri. Karena dasar-dasar pendidikan Taman Siswa sendiri dan ditambah kegiatan PPTS ini maka pemuda-pemuda pelajar lulusan Taman Siswa umumnya tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi pegawai negeri pemerintah kolonial Belanda, dan melakukan pekerjaan partikelir. Hal ini makin memperkuat barisan penentang kekuasaan Belanda dalam masa itu, dan melahirkan pemimpin yang mempunyai kesadaran politik nasional yang patriotik.

Pemimpin Pemuda Pelajar Taman Siswa antara lain ialah: Syamsu Harya Udaya, Suwardi, Supardo, Suwarti, Srikaton, Isnaeni, Jaenap, Surip, Tahir Husein, Suhardi, Abu dan lain-lainnya.

Demikianlah sebagai interaksi adanya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 di Jakarta telah mendapat respon para pemuda pelajar di daerah Yogyakarta dengan didirikannya berbagai organisasi dan dengan segala gerak langkahnya untuk meningkatkan perjuangan menuju kebebasan terbelenggunya

bangsa dari pemerintah kolonial Belanda; meskipun mereka mendapat tekanan dan ancaman, tetapi hal ini diterima sebagai konsekwensi dengan hati rela dan keberanian.

Biasanya setiap akan diselenggarakan Konggres maka persiapan segala sesuatunya dibantu oleh para pandu yang berada di Yogyakarta. Misalnya menyiapkan kursi dan lain sebagainya. Ini telah menunjukkan suatu kerjasama bergotong-royong dari berbagai pihak.

Untuk membantu gerak langkah dan memelihara kehidupan organisasi pemuda itu, maka para Nasionalisten dan orang-orang terkemuka dari Syarekat Islam memberikan donasinya setiap bulan. Di antaranya orang-orang yang selalu memberikan donasi itu ialah Dr. Sukiman, Mr. Suyudi dan lain sebagainya. Demikianlah para pemimpin kita membina generasi muda.

Interaksi terhadap Sumpah Pemuda bukanlah hanya terjadi di kalangan organisasi pelajar, tetapi di kalangan kepanduan pun demikian pula. Maka hampir bersamaan waktunya, pada permulaan tahun 1922 di Yogyakarta di bentuk: *Nationale Padvindery* di bawah pimpinan Daslam Adiwersita, *Wiro Tamtomo* dengan promotornya A Zarkasi; *Hisbul Wathon* diasuh oleh Jumaeni, *Hisbul Anzor* dengan Muslimin almarhum sebagai pemukanya dan *Sarekat Pemuda* di bawah komando Suyar. Di Yogyakarta terdapat juga Cabang *De Nederlands-Indische Padvinder - Vereniging (NIPV)* yang pusatnya berada di Betawi (Jakarta) tetapi jumlah anggotanya dari bangsa kita sangat terbatas.

tiap-tiap kepanduan itu berbeda-beda haluannya menurut induk organisasinya dan bahkan tidak boleh menyimpangnya. Oleh karena selama jaman penjajahan kepanduan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak NIPV dari pemerintah kolonial maka mendapat penilaian dengan dasar yang kurang baik.

Sesudah perkumpulan pelajar yang hampir semuanya berpusat di Jakarta antara lain *Jong Java*, *Jong Indonesia*, *Jong Islamieten Bond*, membentuk bagian kepanduan sendiri-sendiri, maka demikian pula kepanduan yang berada di daerah Yogyakarta mengalami perkembangan pula. Di mana tempat-tempat ada cabang organisasi itu, kemudian perkumpulan *Jong Java*, *Jong Indonesia*, *Jong Islamieten Bond* di Yogyakarta tidak ketinggalan

membentuk kepanduannya. Sampai akhir 1929 di Yogyakarta terdapat kepanduan-kepanduan:

- a. *Nationale Padvinderij* (akhirnya melebarkan diri ke dalam NIPV).
- b. Syarekat Islam Afd. Padvinderij (penjelmaan dari Wiro Tamtomo)
- c. Hisbul Wathon.
- d. *Indonesisch Padvindere Organisatie* (peleburan dari YIPO dan NPO).
- e. Pandu kebangsaan (gantinya FYP)
- f. *National Islamietische Padvinderij*. (Natipij).
- g. Al Kasyaaf.
- h. Tri Darma (dari golongan Protestan).
- i. Kepanduan Anak Katholik Indonesia (KAKI).
- j. *Nederlands - Indische Padvinder Vereeniging* (NIPV)

Kepanduan Sarekat Pemuda dan Hisbul Ansor terpaksa bubar karena organisasinya selalu mendapat rintangan dari pihak yang berwajib. Dengan berdirinya KBI dalam tahun 1930 di Jakarta, maka Cabang INPO dan PK menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) Cabang Yogyakarta. Dari sekian banyaknya perkumpulan kepanduan Indonesia yang ada di Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga golongan menurut asasnya sendiri, keagamaan, kebangsaan dengan kerjasama dengan kepanduan Belanda.

Di kalangan pelajar puteri yang ikut dalam perkumpulan banyak juga yang terjun dalam kepanduan. Bahkan tidak hanya terbatas pada kaum pelajarnya. Beberapa orang guru puteri memimpin secara aktif. Di antara pelopor pandu puteri Yogyakarta ialah Siti Rakhmah, Hafnizarah, Ismudiati, Majarumah (alm) dan juga Bu Ruswo. Beliau berkecimpung dalam kalangan KBI.

Suatu keuntungan demi kemajuan pergerakan pemuda Yogyakarta termasuk kepanduannya, bahwa di sini banyak berdiam para pemimpin rakyat seperti: Mr. Suyudi, Ki Hajar Dewantara, Rujito, B.P. Suryadiningrat, Gondotmojo, Dr. Sukiman, Cokroadikusumo. dan lain sebagainya. Beliau-beliau itulah

yang menjadi pendukung dan pendorong, sumber segala kekuatan lahir dan batin bagi hidupnya pergerakan pemuda di Yogyakarta umumnya.

Cita-cita Indonesia bersatu, yang dilahirkan di medan Kerapatan Besar Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928 dengan pernyataan Satu Bangsa, Satu bahasa, dan Satu Tanah Air Indonesia di sambut oleh kepanduan-kepanduan di Yogyakarta dengan mendirikan *Badan Persaudaraan Kepanduan Mataram (BPKM)*. Pada 1930 BPKM berganti nama PAPIM (*Persaudaraan Antara Pandu Indonesia Mataram*).

Dengan gerakan ini, maka bukan hanya organisasi yang tergabung dalam politik, kelompok pemuda, kelompok sosial lainnya yang mendapat rintangan dari pihak pemerintah kolonial Belanda. tetapi juga termasuk kepanduannya. Larangan yang sangat berat dirasakan di kalangan kepanduan, umpamanya tidak boleh mengadakan api unggun; pandu-pandu, di larang berbaris; pada waktu latihan tidak boleh mengibarkan bendera Sang Merah Putih, tidak boleh menyanyikan Lagu Indonesia Raya; dilarang berziarah ke makam pahlawan dan lain-lain sebagainya. Pendek kata segala tindakan dan upacara yang meresapkan dan menebalkan perasaan kebangsaan dikenakan larangan. Memang dari pihak pemerintah ada tendens akan meniadakan kepanduan yang berasas kebangsaan. Ini semua dialami oleh kepanduan di Yogyakarta,

Dengan adanya larangan itu kepanduan tidak makin mundur melainkan makin berani. Hubungan antara para pemimpin di Jakarta makin bertambah giat.

Demikianlah terjalin kerjasama yang baik dan bertambah rapat, dan anggotanya bahkan makin bertambah besar jumlahnya. Dalam usaha menggalang kesatuan dan persatuan untuk menghadapi kekejaman penjajah Belanda, maka pemuda- pemuda di Yogyakarta telah tampil ke depan dan bergabung dalam perkumpulan kepanduan.

6. Kegiatan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan

a. Ekonomi

Dilihat dari sudut geografi Indonesia terletak di daerah tropis. Tanahnya sebagian besar untuk pertanian, maka kehi-

dupan penduduk, termasuk yang bertempat tinggal di daerah Yogyakarta, adalah bercocok tanam. Rakyat yang tinggal di desa menjadi petani, tetapi mereka sebagai petani kecil. Perkembangan penduduk terlalu cepat dan menghendaki perluasan sawah. Perluasan sawah di luar desa sudah terbentur adanya perkebunan, karena berdasarkan peraturan pemerintah sejak tahun 1870 semua tanah menjadi hak milik pemerintah sehingga dapat disewakan kepada pengusaha perkebunan. Keadaan yang demikian ini tidak menguntungkan perkembangan masyarakat desa. Kehidupan perekonomian di desa makin hari makin merosot dan nasib rakyat desa makin terlantar.

Kerajinan tangan yang sejak dahulu menjadi penghidupan masyarakat desa di samping pertanian, terpaksa mati karena menghadapi saingan berat dari pemasukan barang industri dari luar negeri. Banjir barang hasil industri negeri Barat mendesak hasil kerajinan tangan di pedusunan. Untuk membuat industri, kekurangan modal. Untuk berdagang mendapat banyak kesulitan, karena di lapangan perdagangan mereka menghadapi bangsa Cina dan Arab yang sengaja dilindungi oleh bangsa Belanda, sehingga dengan demikian pedagang bumiputera tidak dapat timbul sebagai pedagang gurem suatu daerah berarti juga mengurangi yang kuat. Bahkan pedagang eceran pun sudah jatuh di tangan bangsa Cina. Pedagang Cina telah tersebar sampai pelosok-pelosok menguasai ekonomi desa. Perekonomian kita baik di atas maupun di tingkat bawah dikuasai oleh orang asing. Sebagian bangsa kita yang duduk dalam pemerintahan menjadi alat pemerintah untuk memeras rakyat, sehingga rakyat daya kreatifnya kurang berkembang.

Di samping bekerja sebagai petani maka untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonominya diperoleh sebagai pegawai pemerintah, buruh dalam perkebunan, usaha dalam batik dan juga ada yang bekerja di pertambangan.

Seperti kita ketahui bahwa salah satu daerah Kabupaten di daerah Yogyakarta, yaitu Kabupaten Kulon Progo alamnya mengandung banyak benda tambang penting mangan. Mangan merupakan bantuan penting bukan saja untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga keperluan negara lainnya. Dengan adanya tambang mangan ini, maka akan melibatkan penduduk dalam pekerjaan yang hasilnya dapat dipergunakan memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Hasil mangan ini diperdagangkan secara

besar-besaran dan mendatangkan keuntungan yang besar.

Untuk menambah kecukupan perekonomiannya maka rakyat Kulon Progo berusaha dalam pertanian; berdagang; ble-res kelapa; buruh; pegawai sebagian kecil; mencari ikan laut membuat *garam samper* di pantai selatan, menggali mangaan dan sebagian lagi ada yang menanam panili, kapulogo, cengkeh, lada dan kopi. Hasil perkebunan ini merupakan barang dagangan yang bernilai. Daerah-daerah yang cocok iklimnya untuk jenis tanaman ini adalah daerah Kapanewon Samigaluh, Kenteng, Kalibawang dan Kokap.

Kecuali mangaan, maka kekayaan alam yang terkandung di pegunungan Kulon Progo itu ialah: uranium, volksaarde, batugamping, bahan cat dan sebagainya.

Menurut penyelidikan beberapa daerah di Kabupaten Kulon Progo ialah di Kapanewon: 1. Kokap, 2. Pengasih, 3. Sentolo, 4. Naggulan, 5. Kalibawang, 6. Samigaluh mengandung bahan mas.

Di daerah Penggung Kliripan yang terletak di Kapawon Kokap pada tahun 1912 juga telah dibuka sebuah tambang mangaan oleh perseorangan bernama Ir. Van Welsen. Usahnya telah mendapat ijin dari Kasultanan yang diberikan oleh Sri Paduka Sultan Yogyakarta dengan akte tertanggal 30 Mei 1893 dan diperkenankan dengan *Gouvernement - besluit* 12 September 1893 No. 26. Pertambangan mangaan ini dinamakan konsesi Penggung Kliripan yang mengerjakan sebuah areal seluas ± 3600 ha, meskipun daerah Kulon Progo itu yang mengandung mangaan luasnya ± 21.4156 ha. Oleh karena Van Delsen meninggal dunia tahun 1918, maka eksploitasi tambang mangaan ini dilanjutkan oleh sebuah badan yang bernama N.V.A. I.M.E. pada tahun itu juga, yang direksinya terdiri dari Kramers Cs. dari Banka Tinwiniring, duduk di antaranya Ir. Fermid. Mulai saat itu Kliripan dikerjakan dan pengambilan mangaan di daerah Krengseng yang dieksploitasi sampai dengan tahun 1928 secara besar-besaran.

Ditinjau dari usaha ini serta melihat perkembangan selanjutnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

- 1). Mangaan merupakan bahan yang penting baik untuk keperluan dalam negeri maupun untuk diekspor. Di antara sekian banyak barang produksi yang dibuat dari

mangaan ialah : batere lampu, pensil, mangaan semen dan lain-lain.

- 2) Daerah Kulon Progo yang mengandung biji mangaan merupakan gudang kekayaan yang terpendam bagi daerah Yogyakarta.

Pertambangan itu dapat memecahkan masalah sosial yang berhubungan dengan kepadatan penduduk, pengangguran, penempatan tenaga. Kekurangan tanah untuk pertanian akan dapat secara berangsur-angsur diselesaikan, sehingga persentase pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin.

Pertambangan mangaan ini juga mempunyai pengaruh bagi penghidupan dan kehidupan rakyat di daerah-daerah yang di ambil batu mangaannya. Bagi segi ekonomi - sosial memberi pertolongan bagi rakyat sekitarnya, sekalipun belum mencapai taraf yang boleh dikatakan baik, sebab paling sedikit mengurangi pengangguran. Dengan kurangnya pengangguran ini berarti beban pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat di-
peringan.

b. Sosial

Kegiatan di bidang sosial diusahakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat tetapi belum memadai, akibat kurangnya perhatian pemerintah jajahan. Gerakan itu antara lain berupa pemeliharaan anak yatim piatu dan pendirian rumah untuk fakir miskin. Gerakan Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 1912 di Yogyakarta telah banyak menaruh perhatian terhadap usaha sosial tersebut di antaranya pemeliharaan anak yatim piatu di Tungkak Yogyakarta. Sultan pada waktu itu memperlihatkan gerakan yang baik itu, maka kemudian memberikan bantuannya. Tetapi rupa-rupanya pemerintah Belanda menaruh kecurigaan adanya hubungan dan bantuan yang diberikan kepada anak yatim piatu lewat usaha yang ditangani Muhammadiyah itu. Tetapi usaha untuk menghalangi agar Sultan tidak erat hubungannya dengan Muhammadiyah dengan pemberian sumbangan kepada anak yatim piatu itu telah terjawab, bahwa bantuan itu ditujukan kepada rakyatnya yang melarat dan memerlukan pertolongan.

Usaha lain ialah dengan diselenggarakan rumah sakit Pe-

nolong Kesengsaraan Umum (PKU) yang sampai kini merupakan rumah sakit yang telah memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Adanya Penolong Kesengsaraan Umum yang ditangani gerakan Muhammadiyah ini menunjukkan adanya kegiatan dalam masyarakat.

c. Pendidikan

Berbicara tentang pendidikan di daerah Yogyakarta dalam arti formal pada jaman berlakunya pemerintahan kolonial Belanda ini sangat kurangnya. Kesempatan untuk mengikuti belajar belum terbuka bagi anak rakyat. Hal ini tidak mengherankan menjadikan perhatian dari para pemimpin pergerakan bangsa kita di antaranya Kyai H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 mendirikan perkumpulan Muhammadiyah dan bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Dengan jalan demikian ini kesadaran dapat ditanamkan sehingga derajat rakyat menjadi terangkat lebih tinggi, kebobrokan kaum penjajah akan lebih diketahuinya.

Pondok yang pada waktu sedang berkembangnya Muhammadiyah telah dapat diselenggarakan, di antaranya pondok yang diusahakan oleh Nyai Ahmad Dahlan dirumahnya. Kecuali berfungsi sebagai tempat memberikan pendidikan, juga mempunyai nilai-nilai perjuangan kebangsaan, maka makin besarliah arti pendirian pondok (asrama) dan pesantren pada waktu itu sebagai tempat pendidikan kader-kader bangsa baik pria maupun wanita.

Selain pendirian pondok pesantren, maka Muhammadiyah dan Aisyiyah telah pula mendirikan sekolah-sekolah sebagai berikut:

- 10 Pada tahun 1923 sebuah *Kweekschool Muhammadiyah Perempuan* (Sekolah Guru Wanita) berdiri di Yogyakarta yang pada tanggal 1 Januari 1932 dengan resmi menjadi "Madrasah Muallimat Muhammadiyah".
- 2) Tahun 1926 didirikan Bustanul Atfal (Taman Kanak-kanak Muhammadiyah) yang pertama di Yogyakarta.
- 3) Tahun 1927 di Yogyakarta sudah berdiri sekolah-sekolah sebagai berikut:

Kweekschool
HIS

2 buah
3 buah

<i>Schakel school met den Qur'an</i>	1 buah
<i>Standaardschool met den Qur'an</i>	5 buah
<i>Volkschool met den Qur'an</i>	5 buah

Kecuali penyelenggaraan pendidikan yang diusahakan oleh Muhammadiyah, maka pada 3 Juli 1922 berdirilah Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara di kota Yogyakarta. Saat itu adalah saat besarnya hasrat orang Indonesia akan pengajaran, sedangkan Departemen Pengajaran Pemerintah Hindia Belanda tidak mampu/mau memenuhinya. Tak terbilang banyaknya anak yang minta masuk sekolah terpaksa kecewa tidak dapat diterimanya. Tak ada tempat bagi mereka untuk bersekolah. Batas maksimum yang sudah ditentukan tidak bisa lebih menerimanya.

Terutama terhadap pengajaran Barat (Belanda) sangat besar hasrat orang. Orang ingin belajar Bahasa Belanda karena itulah satu-satunya tujuan untuk mendapat jabatan yang baik dan gaji yang baik. Sedang usaha meningkatkan kebudayaan bangsa asing belum terpikirkan.

Karena kaum menengah maupun priyayi Jawa yang anaknya tidak dapat diterima di sekolah pemerintah akhirnya di mana-mana berdiri "sekolah swasta" sebagai "perusahaan sekolah" dari guru-guru pensiunan yang memberi pelajaran privat, dengan tarif bayaran yang tinggi. Mulailah timbul keberanian beberapa orang Indonesia untuk mendirikan sekolah sendiri, tanpa subsidi Pemerintah. Memang tidak mudah waktu itu orang mendirikan sekolah yang bisa mendapat subsidi, karena untuk itu tidak tercantum dalam anggaran belanja Pemerintah. Contoh keberanian ini makin meluas dengan berdirinya "Sekolah-sekolah barat" swasta, yang diusahakan oleh orang Indonesia.

Datanglah jaman kesadaran nasional. Di mana-mana orang memikirkan, bahwa tugas pendidikan dan pengajaran adalah untuk memasukkan jiwa dan menyiapkan anak-anak buat masyarakat nasionalnya sendiri. Semboyannya ialah "kembali kepada yang nasional". Ini tidak berarti bahwa kita harus melemparkan yang berasal dari Barat semuanya, tetapi di samping mempelajari metode dan pengetahuan Barat tidak dilupakan jiwanya harus berdasarkan dan berorientasi pada milik sendiri. Itulah pertimbangan yang mendorong pendiri-pendiri Taman Siswa, untuk mendirikan "Lembaga pengajaran nasional" di Yogyakarta.

Pilihan Ki Hajar Dewantara untuk mengambil perjuangan pada lapangan pendidikan anak-anak kita, didasarkan atas perhitungan sesudah dipertimbangkan masak-masak, serta merasa bertanggung jawab atas nasib bangsa serta kemanusiaan umumnya; dengan melihat faktor-faktor obyektif yang ada dan terjadi dalam masyarakat kolonial, serta faktor-faktor subyektif dengan hasrat dan tekad bangsa Indonesia, untuk terus berjuang mencapai kemerdekaan.

Konsepsi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional sebagai hasil kupasan keadaan masyarakat dan kritiknya terhadap pendidikan Barat yang kolonialistis dan intelektualistis, disertai dengan peletakan dasar-dasar sistem untuk membela bangsanya hidup sebagai bangsa yang merdeka, maka tidak mau menerima campur tangan Pemerintah Hindia Belanda. Subsidi dari Pemerintah ditolaknya, karena pertimbangan bahwa dengan subsidi itu akan mengganggu pelaksanaan dasar kemerdekaannya dengan hak berdiri sendiri, dengan sistem bertanggungjawab sendiri, serta dengan metodik dan didaktik pendidikannya.

Sistem pendidikan Taman Siswa besar pengaruhnya dalam perjuangan nasional. Ini dapat dibuktikan:

- a. Berkembangnya Taman Siswa meskipun mendapat ringtangan hebat dari pemerintah kolonial di waktu itu.
- b. Pendidikan Taman Siswa mempengaruhi juga masyarakat dan organisasi-oraganisasi rakyat dalam perjuangan nasional waktu itu.
- c. Banyaknya pejuang-pejuang nasional yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh Taman Siswa dalam perjuangan kemerdekaan.

Demikian melalui media pendidikan Muhammadiyah dan Taman Siswa telah meningkatkan kesadaran serta membawa kemajuan bangsa Indonesia. Dengan perkembangannya yang pesat di mana-mana lalu tumbuh Sekolah Taman Siswa dan sekolah Muhammadiyah, menimbulkan ketakutan di pihak pemerintah kolonial Belanda.

- d. Budaya.

Perkembangan hasil budaya terutama seni tari yang ter-

gabung dalam Krida Beksa Wiromo kian hari makin bertambah maju. Pada tahun 1920, Krida Beksa Wiromo atau di singkat KBW telah membuka kesempatan bagi penggemar seni tari untuk memperdalam pengetahuan itu. Pada tahun itu KBW menerima sebagai murid putera dan puteri Sri Paku Alam VII yaitu:

- 1) RM Suryosularso, yang kemudian terkenal dengan Sri Paku Alam VIII.
- 2) RM Suryosutikno (PA Nototaruno).
- 3). RA Sulastri
- 4) RA Kussaban
- 5) RA Kuspinah

Selain dari itu PA VII juga mengirimkan seorang *bedaya* untuk mengikuti pelajaran tari bersama-sama dengan putera dan puteri tersebut.

Tahun-tahun berikutnya berdatanganlah di Yogyakarta dari India (Minalini) tahun 1929; seorang wanita dari Marokko Ny. Patmapani, mempelajari pelajaran tari Tunggal. Demikian pula datang murid tari dari Negeri Belanda, Vietnam dan Australia mengikuti pelajaran tari di Yogyakarta.

Bukan hanya tari yang terhimpun dalam KBW hidup dan tersebar di Yogyakarta, tetapi wayang orang, ketoprak dan dagelan Mataram merupakan kegiatan dalam pengembangan budaya bangsa. Ketoprak ini banyak tersebar di desa-desa, dan juga adanya Srandul juga masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Gerak budaya ini kecuali memberi hiburan kepada rakyat secara langsung, di dalamnya juga meningkatkan ketinggian kecerdasan. Bahkan secara samar-samar perkembangan kebudayaan ini merupakan alat dalam perjuangan melawan penjajahan pemerintah kolonial, meskipun dengan jalan halus sekali.

e. Agama

Gerakan agama terutama agama Islam di Yogyakarta di tangani oleh Muhammadiyah. Sebenarnya usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya itu bukanlah hanya bergerak dalam penyiaran agama, melainkan juga meliputi bidang pendidikan, kewanitaan, kepanduan, perekonomian, penerbitan, perpustakaan, kewartawanan dan kemasyarakatan lainnya.

Adapun luasnya kegiatan dan usaha Muhammadiyah ini

sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah yang berbunyi "Bahwa maksud dan tujuan perserikatan ini ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut dengan menempuh beberapa jalan, misalnya menyelenggarakan tabligh, pengajian, kursus agama, mendirikan madrasah dari tingkat bawah sampai atas, mengajarkan agama di sekolah umum, menggunakan perhitungan secara hisab dalam menentukan puasa Ramadhan atau hari-hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, memelopori sembahyang Id di tanah lapang untuk Ittiba Sunnah dan menunjukkan siar Islam.

Demikian juga siar agama Islam dipercepat melalui penerbitan buku-buku dan risalah-risalah tentang agama. Usaha yang lain melalui penerbitan surat kabar dan majallah-majallah Islam. Untuk penerbitan yang ada di Yogyakarta ialah Suara Muhammadiyah, Mutiara, Suara Aisyiyah, Metra, Pancaran, Berita H.W., Melati, Sinar, dan juga beberapa di kota besar lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dakwah agama Islam meluas dari kota ke pelosok desa sebagaimana telah dikunjunginya beberapa daerah oleh Nyai Ahmad Dahlan dan para pengurus Muhammadiyah lainnya, ke Kedungbanteng, Gamping, Gamplong, Pedes, Wates, Karangajen, Gesikan (Bantul), Kotagede, Imogiri, Sleman, Srandakan, Wonosari dan lain sebagainya. Kyai Haji Ibrahim, H. Fakhruddin adalah tokoh penggerak Islam di Yogyakarta yang terkenal.

Perkembangan agama Katholik dapat dilihat pula dengan berdirinya gereja yang ada di dalam kota Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya. Perkembangan agama Katholik ini ditangani oleh Missi. Seperti diketahui bahwa gereja yang terletak di sebelah timur Kantor Pos Besar Yogyakarta itu adalah yang tertua di daerah Yogyakarta. Pada waktu itu gedung inilah satu-satunya gereja Katholik di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru pada tahun 1928 disusul dengan berdirinya gereja Katholik Kotabaru, disusul pula dengan berdirinya gereja-gereja di Bintaran, Pugeran, dan Kemetiran yang semuanya terletak di dalam kota. Sedang di luar kota juga didirikan gereja Ganjuran (daerah Bantul), Boro dan Nanggulan (Kulon Progo Utara), Wates, Kalasan, Mlati, Somoitan di Sleman Utara, sehingga pada tahun 1952 ada 21 jumlahnya. Selain itu ada beberapa rumah di pelosok yang diper-

gunakan sebagai gereja pula sebanyak 26 tempat, tersebar di seluruh Daerah Yogyakarta.

Banyaknya orang Katholik adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1915	300 orang
Pada tahun 1925	10.000 orang
Pada tahun 1959	20.000 orang

Melihat angka-angka di atas, nyata bahwa perkembangan antara tahun 1925 - 1952, kurang lancar bila dibandingkan dengan antara tahun 1915 - 1925. Antara lain disebabkan penduduk Jepang di daerah ini yang sedikit banyaknya menghambat perkembangan agama tersebut. Pastoor-Pastoor baik yang berkebangsaan Belanda maupun yang bukan, semuanya menjadi musuh Jepang, dan karenanya banyak di tangkap diinternir. Dengan penangkapan pemimpin-pemimpin agama tersebut dengan sendirinya kekurangan pemimpin semakin besar. Gedung-gedung sekolah, kediaman Bruder-Bruder, biara Zuster-zuster, biara Zuster-Zuster diduduki dengan tidak mendapat ganti.

BAB IV

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 - 1942

A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA TAHUN ± 1930

1. Politik keras terhadap Gerakan non Koperasi

Sejak terjadinya Pemberontakan di tahun 1926 udara pergerakan politik di Indonesia agak sunyi. Banyak pemimpin pergerakan yang ditangkap dan dibuang. Yang masih tinggal bebas tidak dapat tampil ke muka. Palu godam pemerintah jajahan sangat keras menekan gerakan politik. Tiap ada suara yang sedikit menentang tentu akan ditangkap. Telah banyak korban dari bangsa Indonesia yang terkena Artikel 153 bis dan ter. Penjara Cipinang dan Sukamiskin penuh orang politik. Pemerintah Belanda dengan mudah menindas pergerakan kita. Tangan besi Mr. Dr Fock yang sedianya akan dilunakkan oleh Graeff dengan rencana "memulihkan kepercayaan rakyat" terpaksa diteruskan.

Suburnya gerakan kebangsaan menyebabkan pemerintah jajahan merasa gelisah. Bahasa yang mengancam Hindia Belanda karena perkembangan PNI yang dibentuk pada tahun 1927 tidak kurang besarnya. Maka dicarinya alasan untuk menindas pergerakan kebangsaan yang non kooperasi termasuk di dalam Partai Nasional Indonesia.

Pembersihan pertama dilakukan di Negeri Belanda. "Perhimpunan Indonesia" yang merupakan motornya gerakan kebangsaan di Indonesia, karena studenten Indonesia di sana terus giat menghidup-hidupkan perasaan kebangsaan Indonesia dan dengan tajam mengkritik *beleid* pemerintah jajahan, mulailah Perhimpunan Indonesia diamat-amati.

Demikianlah pada bulan Juni 1927 di Den Haag terjadi tindakan pertama atas orang-orang Indonesia, Penggeledahan serempak dilakukan di berbagai rumah studenten Indonesia. Muhammad Hatta dan beberapa kawannya ditangkap dan ditahan. Dalam pemeriksaan para terdakwa itu dibebaskan karena tidak ada bukti yang terang.

, Sementara itu di Indonesia pergerakan kebangsaan terus

berkembang. Haluan non koperasi lebih besar pengaruhnya dari pada haluan koperasi. Prestise *Volksraad* menjadi menurun. Beberapa pemimpin politik yang semula mencoba-coba mendekati Pemerintah kemudian meninggalkannya. Nopember Belofte disabot oleh Gubernur Jenderal Fock, Greeff dan de Jonge. Janji gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum yang pada mulanya sangat bagus dan menimbulkan harapan itu kemudian berobah menjadi "janji kosong". Sesudah Nederland terlepas dari kesukaran, akibat Perang Dunia 1914 - 1918, lalu janji-janji bagus didep saja, dan bahkan sebaliknya pemerasan atas kekayaan Indonesia makin hebat. Hasil ekspor dari Indonesia membanjiri pasar dunia karena sesudah perang dunia itu di Eropa perdagangan dari tanah jajahan menjadi ramai. Keuntungan Nederland dari Indonesia berlipat ganda melebihi di masa sebelum dan selama perang. Jerman menjadi bangkrut karena tanah jajahannya di Pasifik pindah ke tangan Inggris dan Amerika Serikat. Negara-negara di Eropa Barat kalau tidak mempunyai jajahan akan menjadi negara yang kurang terhormat.

Dalam tahun-tahun malaise 1929 dan 1930 pemerintah Hindia Belanda tetap menjalankan politik reaksioner dan tidak melihat kenyataan kebangunan bangsa Indonesia. Tuntutan rakyat tentang perbaikan nasib dan perobahan tata negara tidak dihiraukan.

Pada masa itu gerakan pemuda makin berkembang. *Jong Java* yang kemudian berfungsi ke dalam Indonesia Muda memperbesar gerakannya. Di samping itu pemuda-pemuda Muslim menggerakkan *Jong Islamieten Bond*, kemudian di Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya muncul kepanduan Siap dan Hisbul Wathon (WH) serta gerakan "Pemuda Muslimin Indonesia" sebagai bagian dari PSII menambah pesatnya gerakan pemuda Indonesia yang bercita-cita akan memperbaiki nasib bangsanya.

Karena kemajuan PNI tak dapat tertahan lagi, maka pemerintah Hindia Belanda menekan perkembangan gerakan kebangsaan yang non koperasi. PNI dinyatakan "tabu" bagi para ambotenar Hindia Belanda. Seperti PKI dan Sarekat Rakyat dinyatakan sebagai perkumpulan terlarang. Lagu Indonesia Raya dilarang dinyanyikan di rapat-rapat umum.

Dan akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929 pemerintah melakukan "tindakan kepolisian" pada PNI Ir. Sukarno, Gatot

Mangkuprojo, Maskun dan Supriadinata ditangkap. Pada waktu Ir. Sukarno akan mengadakan rapat PNI di Yogyakarta, maka pagi-pagi benar saat hari itu akan diselenggarakan rapat terbuka Bung Karno telah digropyok oleh PID di sebelah-menyebelah timur Stasiun Tugu Yogyakarta (sebelah selatan Kantor PNI) sekarang¹⁾ Kantor-kantor PNI digeledah, brosur-brosur dibeslah. "Pembersihan itu berjalan sampai pertengahan tahun 1930.

Untuk mencari bukti dan alasan maka P.I.D. dengan segala ketaatannya membuat laporan dan sumpah palsu, keterangan yang mengada-ada untuk memberatkan dakwaan bahwa PNI akan berontak²⁾. Akhirnya Ir. Sukarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan beberapa kawannya pun mendapat hukuman pula. Demikianlah tindakan pemerintah kolonial Belanda menghadapi gerakan bangsa Indonesia, telah bertindak sewenang-wenang tetapi meskipun demikian semangat untuk bergerak lebih maju bagi para pemimpin pergerakan tersebut tidak padam.

2 Undang-undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonantie)

Persebaran perguruan Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara makin hari bertambah pesat sehingga membuat gusar pemerintah Hindia Belanda. Dalam tempo sepuluh tahun saja perluasan pengaruh pendidikan nasional Taman Siswa sudah tersebar di mana-mana sampai di pelosok-pelosok tanah air. Dengan perkembangan yang demikian cepat itu, maka pemerintah Hindia Belanda merasa ketakutan dan akan membahayakan serta menyebabkan kemerosotan pendidikan kolonial yang diusahakannya. Karena itu, kewibawaan pemerintah akan menjadi merosot. Kemajuan Taman Siswa ini harus ditahannya. Pada tahun 1923 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pendidikan dan ordonansi pengawasan sekolah-sekolah liar (sekolah swasta tanpa bantuan pemerintah) yang bersifat represif. Hak mendirikan sekolah dapat dicabut, apabila terbukti bahwa pendidikan yang diselenggarakan dianggap membahayakan ketenteraman umum. Pada tanggal 1 Desember 1932 pemerintah Hindia Belanda dipimpin oleh gubernur Jenderal De Jonge mengeluarkan ordonansi sekolah liar yang bersifat preventif. Maksudnya permohonan izin untuk menyelenggarakan pendidikan

dapat ditolak atas dasar dugaan bahwa pendidikan yang akan diselenggarakan mungkin akan membahayakan. Rancangan Undang-undang sekolah liar yang demikian itu sebenarnya telah ditolak oleh Dewan Rakyat. Meskipun demikian undang-undang itu dikeluarkan juga sebagai ordonansi yang pengesahannya cukup oleh pemerintah Hindia Belanda, tanpa melalui Dewan Rakyat.

Jiwa ordonansi itu jelas bertentangan dengan perkembangan masyarakat yang haus akan pendidikan karena pemerintah Hindia Belanda tidak cukup menyelenggarakan pendidikan untuk rakyat. Justru sekolah swasta itu pada hakekatnya membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan. Semua badan pendidikan swasta merasa dirugikan dan ditahan untuk berkembang, terutama lembaga pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa merasa bahwa ordonansi itu terutama ditujukan untuk menahan perkembangannya. Ordonansi itu melukai hati para nasionalis, terutama Ki Hajar Dewantara.

Yang sangat mengherankan ialah bahwa dengan dikeluarkannya ordonansi tersebut tidak ada seorang pun di antara para anggota Dewan Rakyat yang memprotes meskipun mereka itu mengetahui bahwa ordonansi itu telah ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ketika dimajukan sebagai rancangan undang-undang. Suasana dingin di Dewan Rakyat itu menusuk Ki Hajar Dewantara. 3) Ki Hajar berkejakinan, bahwa ia tidak dapat mengharapkan apa-apa dari para wakil rakyat yang duduk di Dewan Rakyat, dalam soal ordonansi itu. Rasa kecewa memenuhi hatinya. Secara spontan tanpa minta pertimbangan lebih dulu kepada Majelis Luhur ia mengirimkan kawat kepada gubernur Jenderal yang isinya menolak secara tegas ordonansi tersebut, tepat pada hari akan berlakunya ordonansi. Penolakan itu disertai ancaman bahwa Taman Siswa akan melakukan *lijdelijk verzet*, jika ordonansi itu tidak dicabut. Yang dimaksud dengan istilah *lijdelijk verzet* ialah membangkang terhadap ordonansi yang dikeluarkan dan bersedia menjalani segala akibat dari pada pembangkangan itu seperti yang dicantumkan sebagai ancaman⁴⁾. Segera sesudah kawat itu dikirimkan, maka Majelis Luhur mengundang Persatuan Taman Siswa untuk mengadakan rapat lengkap di Tosari pada tanggal 15 - 16 Oktober 1932 dan konperensi pemimpin di Yogyakarta pada tanggal 29 - 31 Oktober, dengan mengambil acara tunggal: sikap terhadap ordonansi

tentang pengawasan sekolah-sekolah liar. Rapat paripurna Majelis Luhur dan konferensi pemimpin membenarkan kebijaksanaan pemimpin umumnya. Oleh karena itu setelah selesai konferensi, lembaga pendidikan Taman Siswa segera mengeluarkan pernyataan pembangkangan terhadap ordonansi tersebut dan memberikan instruksi kepada segenap para anggotanya. Para guru di pelbagai tempat tetap taat kepada instruksi Majelis Luhur. Mereka memasuki rumah-rumah perguruan masing-masing serta melakukan pekerjaannya seperti biasa seolah-olah tidak ada ordonansi sekolah liar. Mereka dijatuhi larangan mengajar, Dengan tegas Ki Hajar Dewantara memberikan penjelasan kepada para pemimpin rakyat bahwa Taman Siswa menjalankan pembangkangan demi kepentingan para anak didiknya. Segala pembangkangan yang bersifat aktif supaya dihindarkan. Manifestasi Taman Siswa itu mendapat sambutan baik sekali dari para pemimpin rakyat. Semua partai politik dan perkumpulan sosial ber-simpati kepada Taman Siswa. Seruan Ki Hajar Dewantara untuk memberikan bantuan materi kepada para korban pembangkangan disambut baik oleh perkumpulan Wanita Isteri Sedar dan PSII. Mereka semuanya mencap ordonansi itu sebagai penghalang usaha rakyat dalam bidang pendidikan yang diabaikan oleh pemerintah sendiri. Kiwiet de Jonge sebagai wakil pemerintah segera memenuhi Ki Hajar Dewantara untuk meredakan suasana. Namun usaha itu tidak berhasil. Dalam konferensi para pemimpin Taman Siswa di Yogyakarta yang berlangsung dari tanggal 29 sampai 30 Oktober 1932 rundingan antara Ki Hajar sebagai pemimpin umum Taman Siswa dan Kiwiet de Jonge selaku pemerintah dibahas secara mendalam. Taman Siswa tetap dalam pendiriannya; ordonansi itu tetap dianggap sebagai penghalang untuk menyelenggarakan pendidikan nasional. Satu-satunya jalan untuk menghindari pembangkangan ialah pencabutan ordonansi.

Masyarakat Indonesia membenarkan kebijaksanaan Ki Hajar Dewantara. Dalam menghadapi ordonansi sekolah liar masyarakat Indonesia seia sekata. Mereka menyokong penuh perjuangan Ki Hajar Dewantara baik materi maupun moril. Semua badan pendidikan nasional bersiap untuk mengikuti jejak Taman Siswa.

Sikap masyarakat yang demikian itu di luar dugaan pemerintah. Oleh karena itu cepat-cepat mengeluarkan surat edaran yang berisi, bahwa penolakan izin itu hanya akan dilakukan bila

pendidikan itu akan membahayakan ketenteraman umum. Surat edaran itu sebenarnya berupa pancingan, kalau-kalau dengan jalan demikian lembaga pendidikan Taman Siswa dan suara masyarakat agak reda. Namun surat edaran itu tidak mencapai tujuannya. PPPKI mengambil keputusan untuk menjalankan masa aksi, sedangkan Partindo siap untuk mengintensifkan perjuangan. Muhammadiyah terang-terangan mencela ordonansi tersebut. Ki Hajar Dewantara makin gigih menentang pelaksanaan ordonansi. Para guru swasta siap untuk menerima akibat dari pada pembangkangan. Dengan jalan demikian maka pemerintah Hindia Belanda kalang kabut menghadapi aksi rakyat. Badan-badan pendidikan swasta segan akan minta ijin untuk menyelenggarakan sekolah, meskipun para pengurusnya tahu dengan pasti bahwa permohonan ijin tidak akan ditolak. Sebagian besar dari badan pendidikan swasta bersikap solider terhadap Taman Siswa. Pergerakan pemuda yang tergabung dalam PERPRI tidak ketinggalan dengan pemuda-pemuda lainnya turut aktif memimpin aksi dan pidato-pidato di rapat-rapat umum di Semarang, Magelang dan Yogyakarta untuk menentang ordonansi Sekolah Liar tersebut. Dalam rapat-rapat Partindo di Joyodipuran Yogyakarta wakil dari Makasar dengan tegas berkata, "Indonesia Merdeka sekarang"⁵). Rapat mendapat teguran dari P.I.D. dengan keras.

Di dalam konferensinya di Taman Siswa yang diselenggarakan di Jalan Tanjung Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara, Moh. Syafei dari Kayutaman Sumatera, Moh. Asrar dari PBMTS (Persatuan Bekas Murid Taman Siswa) telah berpidato dengan membakar semangat para pemuda untuk menentang Ordonansi Sekolah Liar yang dipaksakan oleh pemerintah Belanda. Moh. Asrar dari Pimpinan PBMTS (Persatuan Bekas Murid Taman Siswa) di Taman Siswa tersebut berkata, "Leher kita persembahkan jika Ordonansi tidak ditarik kembali oleh Belanda"⁶). Dengan kata-kata tersebut maka para pemuda dan organisasi politik bersama Badan-badan Swasta menyelenggarakan pendidikan membulatkan tekad dan semangat melawan kekerasan Ordonansi tersebut. Menghadapi tekad serta semangat yang membaja dari bangsa kita itu akhirnya pemerintah Belanda bingung. Bagaimana seandainya ada sekolah yang didirikan tanpa ijin, apakah sekolah itu akan ditutup guru-gurunya dikenakan pidana, dipenjara atau dibiarkan saja.

Gerakan menentang ordonansi timbul juga di daerah Minangkabau di bawah pimpinan Dr. Haji Abdul Karim Amarullah yang menuduh bahwa pemerintah dengan ordonansi sekolah liar itu bermaksud untuk menghalang-halangi perkembangan agama Islam demi kepentingan agama Kristen. Suasana di Minangkabau sudah penuh dengan iklim yang demikian. Meskipun dari pihak pangreh praja di berikan penjelasan mengenai maksud pengeluaran ordonansi tersebut, namun masyarakat Minangkabau tidak percaya kepada maksud baik pemerintah. Ditambah pula ancaman perkumpulan Budi Utomo yang akan menarik wakil-wakilnya dari Dewan Rakyat, bila ordonansi itu tidak dicabut sebelum tanggal 31 Maret 1933. Justru dalam menghadapi ordonansi sekolah liar ini nampak adanya kumpulan bumiputera, semuanya berdiri di belakang Ki Hajar Dewantara. Di mana-mana berdiri panitya dari bermacam-macam perkumpulan baik politik maupun sosial, untuk menentang ordonansi sekolah liar. Pada tanggal 5 Pebruari 1933 mengalir protes dari pelbagai pihak dengan pernyataan bahwa maksud pemerintah memang untuk menghambat kemajuan rakyat. Di samping itu Ordonansi Sekolah Liar tidak lain untuk merintangi dan menindas tokoh-tokoh pergerakan yang jadi guru sebagai obyek. Karena pemerintah merasa kewalahan menghadapi keberanian dan tekad bangsa Indonesia, akhirnya Ordonansi tersebut dibekukan. Delapan bulan kemudian dicabut.

Dengan bangga dan puas Ki Hajar Dewantara berkata "Terbuktilah dari apa yang telah kami uraikan di atas itu, bahwa bersatunya massa dengan pimpinannya, berikhlasnya pimpinan untuk menyerahkan putusannya kepada pihak yang terpimpin untuk menerima koreksi jika perlu, ditambah pula dengan taatnya segenap anggota keluarga yang semuanya menetapi disiplin dengan tak berhasrat, sungguh benar memberi kekuatan lahir batin yang luar biasa, sehingga mendatangkan kemenangan yang gilang gemilang"⁷⁾.

Keberhasilan pembangkangan untuk menggagalkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga akhirnya pemerintah tunduk tidak dapat melaksanakan rencananya, ini merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah. Di sinilah di antara sifat kepahlawanan Ki Hajar Dewantara melawan penjajahan Belanda.

B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH

Antara tahun 1929 - 1930 terjadi depresi ekonomi dunia. Depresi ini menimbulkan beberapa akibat krisis ekonomi di seluruh pelosok tanah air baik dari kota yang paling besar sampai di pelosok yang terpencil. Krisis ekonomi merata di semua lapisan masyarakat termasuk daerah Yogyakarta dan desa-desa. Krisis ekonomi ini akibat logis dari keadaan pasaran hasil bumi dan hasil tambang di Eropa sehabis Perang Dunia pertama.⁸⁾ Pasaran hasil bumi dan tambang di Eropa sehabis Perang Dunia pertama menjadi lesu, akibatnya hasil ekspor turun. Untuk mengadakan imbang hasil ekspor dan impor, maka produksi barang ekspor diperbesar, perkebunan diperluas. Dengan jalan demikian keuntungan mencapai jumlah yang hampir sama dengan waktu sebelum krisis itu terjadi. Namun perluasan perkebunan minta banyak pengeluaran berupa upah tenaga kerja, tambahan barang impor untuk kepentingan hidup para pegawai dan tambahan modal untuk biaya eksploitasi. Oleh karena itu kehidupan perusahaan tidak menggairahkan, apalagi semenjak harga impor dan ekspor itu jatuh, kemerosotan harga barang ekspor jauh lebih hebat dari pada barang impor, sedangkan keperluan hidup rakyat sebagian besar harus dicukupi dari barang impor. Dengan kata lain untuk memperoleh barang rakyat harus menjual hasil buminya lebih banyak dari pada waktu sebelum krisis. Dalam keadaan krisis ini, hasil bumi Indonesia mengalir ke negeri Belanda.

Pemerintah berusaha untuk mengatasi keseimbangan antara uang masuk dan yang dikeluarkan. Untuk mengurangi biaya, pemerintah menempuh jalan yang paling gampang yakni menjalankan penghematan dalam bidang gaji para pegawai, penghematan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan penerangan untuk kepentingan pertanian. Akibat tindakan drastis itu yang menderita golongan Indonesia, dan bukan golongan Belanda. Pegawai atau buruh yang penghasilannya dikurangi atau dipecat ialah pegawai atau buruh Indonesia, bukan buruh Belanda. Akibat penghematan dalam bidang pendidikan yang terkena ialah para guru Indonesia dan anak-anak Indonesia. Guru dikurangi gajinya atau dihentikan, akan yang ingin bersekolah tidak mendapat tempat. Politik yang dijalankan pemerintah dalam mengambil tindakan drastis itu memang disengaja untuk menyelamatkan golongan Belanda yang ada di Indonesia.

Perpecahan secara besar-besaran dari buruh Indonesia di pelbagai perusahaan dan perkebunan menambah beratnya beban masyarakat Indonesia. Buruh-buruh yang dipecat itu kembali ke desanya masing-masing tanpa penghasilan, malah harus menumpang makan dan tidur pada sanak saudaranya yang hidupnya serba kekurangan.

Akibat adanya rasionalisasi dari berbagai bidang itu menciptakan banyak pengangguran di pulau Jawa termasuk daerah Yogyakarta. Pengangguran dalam masa krisis ekonomi dengan sendirinya mengakibatkan peningkatan kerusakan dan kejahatan di desa dan di kota. Pencurian, pembegalan dan penodongan terjadi dimana-mana.

Meskipun krisis telah mengganas sangat hebat dalam masyarakat rakyat jajahan, pemerintah tidak berusaha mengelakannya, bahkan mengadakan penekanan terhadap para petani. Mereka yang bekerja sebagai buruh harus bekerja keras dengan upah yang kecil. Akibat rasionalisasi para pekerja perkebunan banyak orang-orang Jawa dan juga yang berasal dari daerah Yogyakarta pulang ke desa. Bila dibandingkan mereka yang pulang dan yang meninggalkan pulau Jawa tidak seimbang, jauh lebih besar yang pulang dari perusahaan di Sumatera baik milik Belanda, Inggris maupun Perancis.

Pajak sangat berat harus dibayar dengan uang, pada hal uang sangat sulit dicarinya. Hasil panen sebagian besar dijual untuk membayar pajak. Sisanya tidak cukup untuk dimakan sampai menunggu datangnya masa panen lagi. Akibatnya timbul bahaya kelaparan di mana-mana, terutama di daerah minus seperti di Kabupaten Gunung Kidul. Gaplek menjadi makanan sehari-hari baik mereka yang tinggal di daerah minus maupun surplus. Karena persediaan makanan tidak cukup untuk waktu sampai datangnya panen lagi maka timbullah *sistem ijon* di desa-desa, menjual tanaman waktu masih hijau. Keadaan yang berat ini terasa sekali antara tahun 1930 - 1933. Kemerosotan penghasilan petani berarti kemunduran kesejahteraan desa. Demikianlah masyarakat di desa menderita sekali akibat terkikis oleh krisis ekonomi. Hasil kerajinan tangan dan penggarapan sawah sebagai kerja pokok masyarakat desa tidak lagi mencukupi untuk penutup kebutuhan hidup.

Kemiskinan merayap dalam masyarakat desa. Kelaparan berkecamuk di daerah minus seperti Gunung Kidul dan Bojonegoro.

Rakyat Gunung Kidul yang makan gaplek dan tidak kenyang itu masih lebih beruntung daripada rakyat Bojonegoro. Pada masa krisis itu rakyat makan ulat jati dan makan rumput teki, untuk pengisi perutnya. Banyak desa yang sepi kehilangan penduduk. Penghuninya mati kelaparan atau mati kena penyakit kolera dan disentri. Beberapa desa hanya didiami oleh dua atau tiga keluarga, yang sudah tidak lengkap lagi. Bahkan ada yang sama sekali desa itu ditinggalkan kosong, tidak ada orangnya. Di Gunung Kidul banyak rakyat mati kelaparan atau kena penyakit kolera dan disentri. Daerah itu memang daerah minus, tanahnya tandus.

Kehidupan rakyat di desa di daerah surplus seperti Sleman dan Pakem di wilayah Yogyakarta, yang dikatakan daerah makmur, juga menyedihkan. Dalam satu desa hanya beberapa keluarga saja yang setiap hari makan nasi dua kali sampai kenyang. Keluarga lainnya makan nasi sekali pada waktu siang, sorenya makan gaplek. Yang dikatakan sayur tidak lain daripada daun-daun dari pekarangan yang direbus dengan air bercampur garam dan santan sekedarnya. Lauk pauk ikan atau daging tidak dikenal. Tempe tahu sudah merupakan lauk yang istimewa. Hanya *prabot desa* yang sanggup makan nasi sampai kenyang dengan sekedar sayur dan lauk pauk tempe. Keluarga lainnya makan gaplek yang dibeli dari orang Cina dengan harga yang sudah mahal. Pakaian biasanya hanya selembat. Di rumah orang memakai celana kolor, buka baju. Inipun tidak dapat dipastikan. Pada umumnya orang tani tidak mempunyai pakaian rangkap yang dapat disimpan. Satu lembar pakaian itupun kadang-kadang sudah koyak atau bertambal.⁹⁾

Pemilik sepeda hanya satu dua orang di seluruh desa, yakni prabot desa atau orang yang tergolong mampu. Lainnya harus berjalan kaki ke mana-mana. Hanya lurah yang mampu menyekolahkan anaknya di HIS yakni sekolah rakyat dengan bahasa Belanda. Lainnya mengirinkan anaknya ke sekolah desa, sekolah angka dua. Itulah sekolah rakyat yang sebenarnya pada masa itu. Kebanyakan anak petani tidak bersekolah. Sejak kecil ia sudah belajar membantu bekerja ayahnya di sawah atau berjualan untuk menambah nafkah. Anak petani kecil belajar menggembalakan ternak dan menyangkul, tidak belajar membaca dan menulis. Yang belajar membaca dan menulis adalah anak prabot desa, karena mereka tidak perlu membantu bekerja di ladang setiap hari. Demikianlah kehidupan rakyat desa di daerah yang sudah disebut daerah makmur, apalagi di daerah minus.

Akibat kesulitan untuk mencari kehidupan itu, maka tidak mengherankan banyak keluarga yang bersedia dipindahkan ke tanah seberang, terutama ke daerah Lampung. Mereka melihat, bahwa di Jawa tidak ada lagi kemungkinan yang luas untuk mencari penghidupan yang layak. Kecuali mereka yang telah pulang sebagai kuli perkebunan tidak mau transmigrasi lagi karena menurut pertimbangannya mereka lebih sulit mencari uang. Maka lebih baik di rumah menganggur sambil menantikan kesempatan untuk menjadi kuli kontrak di perkebunan Sumatera Utara.

Dengan pendapat ini maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kehidupan masyarakat di desa sangat jelek. Keadaan yang jelek dan merundung dalam kehidupan rakyat ini dilaporkan para pangreh praja ke atasannya dalam keadaan yang baik saja. Jadi tidak sesuai dengan kenyataannya.

C. INTERAKSI TERHADAP KEPARTAIAN/ORGANISASI

1. PNI Baru dan Partindo

Karena penangkapan terhadap pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan pengawasan yang ketat terhadap keaktifan anggota-anggotanya di berbagai cabang akhirnya oleh Mr. Sartono pada bulan April 1931 PNI dibubarkan, kemudian pada tahun itu pula oleh bekas pemimpin PNI, lalu didirikan organisasi baru "Partai Indonesia" dengan disingkat Partindo. Beberapa pemimpin PNI lainnya yang tidak puas atas pembubaran PNI ini lalu menamakan dirinya "golongan merdeka" sebagai kelanjutan PNI dan kemudian golongan ini mendirikan PNI yang baru dengan nama "Pendidikan Nasional Indonesia".

Pada bulan Agustus 1931 ketika Mohammad Hatta pulang dari Negeri Belanda, lalu masuk PNI Pendidikan. Sementara itu Sukarno yang mendapat potongan hukuman seke luarnya dari penjara lalu masuk Partindo pada Juli 1932. Dengan adanya perpecahan partai ini, maka bagi daerah-daerah termasuk juga Yogyakarta yang statusnya berdiri suatu cabang timbul pula peristiwa yang serupa. Oleh karena itu ada sebagian grup berfihak dan mengikuti Partindo, tetapi ada pula sekelompok yang mendukung Pendidikan Nasional Indonesia. Antara keduanya saling berlomba untuk meningkatkan diri dan memperbanyak kader. Pendukung PNI mengutamakan pendidikan kader-kader politik di bawah pimpinan Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Sedang

Ir. Sukarno melakukan kegiatan mempropagandakan Indonesia Merdeka. Karena ketakutan Belanda terhadap pemimpin rakyat ini maka pada tahun 1934 diadakan lagi penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin Partindo dan Pendidikan Nasional Indonesia. Ir. Sukarno ditangkap lagi dan dibuang ke Ende Flores.

2. Partai Sarekat Islam Indonesia

Di alam penjajahan kata "nasional" dan "Indonesia" yang digunakan sebagai nama gerakan merupakan anti tesis yang tajam dari "pemerintah" atau "penjajah". Partai Sarekat Islam adalah gerakan nasional dan nama Sarekat Islam ada yang memandang belum cukup mencerminkan gagasan kenasionalan atau ke-Indonesia-an. Maka diusulkan oleh Sukiman agar Partai Sarekat Islam dilengkapi dengan kata Indonesia untuk mencerminkan gagasan kenasionalan. Timbulnya gagasan itu bertalian erat dengan peningkatan kesadaran nasional yang diikrarkan oleh kongres Pemuda pada tahun 1928. Usul itu diterima dalam bulan Januari 1929; jadi tiga bulan sesudah ikrar Sumpah Pemuda. Sejak itulah maka Partai Sarekat Islam bernama Partai Sarekat Islam Indonesia. Nama baru itu diharapkan membawa kesegaran dan kehidupan baru dalam partai, karena semenjak perpecahan pada tahun 1921 keanggotaan partai menjadi susut sekali. Gerakan Pan Islamisme yang dilancarkan Haji Agus Salim tidak banyak membawa perubahan. Dalam bidang sosial keagamaan PSII mendapat saingan berat dari Muhammadiyah yang semata-mata bergerak dalam bidang sosial keagamaan; dalam bidang politik mendapat saingan berat dari partai politik yang berhaluan nasional, terutama dari pihak *Indonesische Studieclub*, yang sering memberikan kecaman pedas kepada Partai Sarekat Islam. Kecaman itu dirasakan sebagai penghinaan kepada Agama Islam dan menyebabkan Partai Sarekat Islam tidak kerasan dalam PPPKI dan akhirnya mengundurkan diri. Kegagalan dalam bidang politik dan bidang sosial sebenarnya akibat sikap partai yang setengah-setengah, kurang bulat memilih bidang dan kurang bulat menentukan sikap terhadap pemerintah. Dalam kongresnya tanggal 24 – 27 Januari 1930 di Yogyakarta Partai Sarekat Islam memutuskan untuk mengadakan reorganisasi: kembali pada sistem cabang dengan penghapusan batas (jadi tidak seperti Sarekat Islam lokal); dengan demikian maka terciptalah kesatuan organisasi PSII sebagai bagian

dari masyarakat Islam sedunia. Partai dipimpin oleh *Majelis Tahkim*, yakni badan legislatif; dan *Majelis Tanfidzyah*, yakni badan eksekutif dipimpin oleh Sangaji dan Sukiman. Pimpinan harian ada di tangan Dewan Partai: Cokroaminoto dan Agus Salim.

Semenjak Partai Sarekat Islam Indonesia meninggalkan PPPKI, sebagai partai terasing dari kawan-kawannya, karena sebagian besar perkumpulan nasional tergabung dalam PPPKI. Krisis ini meningkat justru karena timbulnya keretakan lagi dari dalam. Pada tahun 1933 timbul perselisihan faham dari dalam. Pada tahun 1933 timbul perselisihan faham antara pihak Sukiman - Suryopranoto dan pihak Cokroaminoto - Salim mengenai Sarekat Sekerja Pegadaian atau *Pandhuisbond*, yang ada di bawah pimpinan Salim dan Suryopranoto. Perselisihan itu pada dasarnya hanya mengenai perbedaan pandangan tentang tekanan. Pihak Salim dan Cokroaminoto sesuai dengan wataknya yang religius nasional menekankan pada watak keagamaan- sedangkan Sukiman, Suryopranoto pada kebangsaan sesuai pula dengan wataknya. Perselisihan itu menghebat sedemikian, sehingga pihak Salim-Cokroaminoto mengambil tindakan kepartaian untuk memecat Sukiman - Suryopranoto, sedangkan perselisihan itu tidak mempunyai sangkut paut dengan disiplin kepartaian. Tindakan Salim-Cokroaminoto itu dikecam sebagai tindakan diktatorial oleh pihak pers. Namun tindakan telah terlanjur diambil. Demikianlah pihak Sukiman - Suryopranoto lalu mendirikan partai Islam baru pada pertengahan tahun 1935 dengan nama Partai Islam Indonesia disingkat PARII. Partai Islam Indonesia menyesuaikan diri dengan suasana jaman. Pada waktu itu soal kebangsaan sedang hangat. Partai Islam Indonesia tampil ke muka dengan tujuan: menyelenggarakan kemajuan yang selaras (harmonis) bagi nusa dan bangsa berdasarkan Islam. Partai dipimpin oleh Sukiman dan Wali Al Fatah. Krisis Partai Sarekat Islam masih mengganas. Pada tanggal 17 Desember 1934 Cokroaminoto meninggal. Dengan meninggalnya Cokroaminoto PSII kehilangan pimpinan yang gigih sejak pada awal pembentukannya sampai berjangkitnya krisis dalam Partai Sarekat Islam. Cokroaminoto adalah pemimpin Islam nasional, yang berkaliber besar, cakap dan gigih dalam perjuangan. Sepeinggalnya Cokroaminoto Sukiman ingin menggabungkan diri lagi dengan PSII, namun tidak berhasil- karena pada waktu itu PSII dipimpin oleh Agus Salim.

Pada tahun 1930 sebagai partai politik grafik PSII sangat

menurun, maka kemudian geraknya beralih dari bidang politik ke bidang ekonomi. Tepat sekali saat itu Indonesia dan termasuk di daerah Yogyakarta sedang dilanda krisis ekonomi baik di kota-kota besar sampai di pelosok-pelosok desa yang terpencil yang meliputi segenap lapisan masyarakat.

Untuk perbaikan ekonomi yang sangat bobrok itu, maka PSII telah menyampaikan beberapa usul antara lain:

- a. Agar diadakan gerakan swadesi seperti dikerjakan Mahatma Gandhi dari India. Rakyat dianjurkan meningkatkan ekonomi pangan dan sandang dengan perluasan pertanian dan penanaman kapas demi keperluan pertenunan.
- b. PSII telah menyusun rencana mengatasi krisis terutama anjuran kepada pemerintah untuk menurunkan pajak dan anjuran kepada petani membentuk sarakat-sarakat tani sebagai dasar ekonomi rakyat.
- c. Penggantian alat-alat pertanian dari yang sederhana ke tingkat modern dan usul kepada pemerintah membuka tanah-tanah tandus dan pembayaran pajak secara natura.
- d. PSII aktif memberi bantuan kepada rakyat untuk mengatasi keadaan.

Meskipun dalam tubuh PSII sendiri sedang terjadi kerincuhan atau perpecahan, namun masih berkesempatan pula memikirkan keadaan nasib penghidupan rakyat yang merosot itu. Di antara tokoh-tokoh Sukiman, Wiwoho, Kasman Singadimejo, Farid Makruf, dan Kyai Haji Mansur. Gerak PSII ini meluas bukan hanya di daerah Yogyakarta saja tetapi juga di daerah-daerah lainnya. Pada tahun 1939 PARII diubah menjadi PII (karena nama PARII agak mirip dengan "Pari"-nya Tan Malaka — Partai Republik Indonesia — sesudah Tan Malaka diisolasi dari PKI).

Kecuali Muhammadiyah sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial maupun beberapa organisasi politik di antaranya PSII dan lain-lainnya, maka perlu diketahui pula bahwa di Yogyakarta juga berdiri *Pakempalan Kawulo Ngayogyakarta* (PKN). PKN ini didirikan pada tanggal 29 Juni 1930 oleh Pangeran Suryodiningrat. Perkumpulan ini mempunyai tempat tersendiri di antara perkumpulan yang tidak terbuka untuk bangsa Indonesia seumumnya. PKN adalah perkumpulan rakyat umum penduduk anak negeri kesultanan Yogyakarta.

Adapun tujuan dari KPN ialah:

- a. Memperkuat kasultanan dan raja serta keluarganya agar tercapai pemerintahan kasultanan yang sebaik-baiknya, berdasarkan demokrasi.
- b. Mempertinggi derajat dan perekonomian anak negeri Kasultanan.

Pada penghabisan tahun 1930 PKN telah beranggota 30.000. Dalam bulan Mei 1931 waktu konggres yang pertama jumlah anggota telah menjadi 110.000. Dalam konggres yang diadakan tanggal 23 – 29 Mei 1931 antara lain dibicarakan bahwa pegawai-pegawai gubernemen bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di daerah kesultanan, sebaiknya dijadikan anak negeri Kasultanan, dan lagi mendirikan fonds untuk belajar, supaya pajak kepala dihilangkan perbaikan perekonomian rakyat.

Pada konggresnya yang diadakan bulan Juli – 1932 PKN mengajukan permintaan agar pajak tanah yang dirasakan oleh rakyat tani sangat berat diturunkan dan juga supaya diadakan *Bale Agung*. Dalam tahun itu jumlah anggotanya bertambah terus dan menunjukkan perhatiannya terhadap gerakan swadesi. Selanjutnya pada tahun itu pula PKN telah memiliki lebih kurang 80 koperasi perpakaian (*verbruikscooperative*).

Konggres PKN yang diselenggarakan Juli 1933 di Yogyakarta menerima beberapa mosi; penambahan sekolah desa (sekolah rakyat pertama), tidak mufakat dengan permintaan kaum penyewa tanah supaya uang sewa dijadikan separonya dan supaya bermacam-macam pajak menurut adat dihilangkan. Bulan Nopember tahun itu jumlah anggota telah menjadi 229.680; pada tanggal 29 Juni 1938 ketika mengadakan *perayaan windon* (umur 8 tahun) beranggota 253.218 di antaranya 30.471 perempuan. Anggota yang demikian banyak hampir semuanya orang tani. Perlu dicatat di sini bahwa jumlah anggota perkumpulan rakyat ini dipimpin oleh golongan bangsawan tidak menjadi besar lantaran perintah dari atas atau paksaan; sebaliknya bahkan tidak semua Pangreh Praja memberi bantuan ia bertambah besar.

Barang-barang yang agak besar dan penting belum dapat dicapai (meskipun terdapat juga sebagai buah usahanya penaikan harga padi dalam tahun 1933 dan 1935, pendirian koperasi dan pemberantasan buta huruf), tetapi PKN dapat membangunkan perhatian di kalangan rakyat jelata terhadap kepentingan umum.

Untuk memperkuat hal ini didirikan *PKN bagian Wanita* dan bagian Muda. *PKN Muda* mempunyai anggota 10.000 dan terutama bekerja di lapangan pengajaran, agar anak rakyat jelata dapat bangkit maju.

Atas pertimbangan, bahwa adanya PKN saja, tidak mencukupi untuk memperhatikan kepentingan seluruh penduduk Yogyakarta oleh karena anak negeri Pakualaman sering berlainan kepentingan dengan anak negeri kasultanan, maka pengurus-pengurus Rukun Kampung dalam daerah Pakualaman dengan para bangsawan, pada tanggal 30 Juni 1940 semufakat mendirikan suatu perkumpulan rakyat melulu untuk daerah Pakualaman. Nama, peraturan dan daftar waktu pecah perang masih akan ditetapkan.

3. Parindra

Pada tanggal 24 Desember 1935 bertempat di Gedung Habiproyo di kota Surakarta Hadiningrat diselenggarakan suatu malam resepsi untuk menyambut kelahiran Partai Indonesia Raya atau disingkat Parindra. Resepsi ini dihadiri putera dan puteri bangsa Indonesia, dari lapisan atas dan bawah, ningrat maupun rakyat kebanyakan; yang semuanya hendak menyaksikan kejadian yang luar biasa itu.

Kongres Indonesia Raya ini semula akan diadakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1933 di kota Surakarta, tetapi karena larangan dari pihak pemerintah adalah akibat pentrapan politik tangan besi yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal De Jonge yang tidak menyukai timbulnya gerakan nasional yang radikal yang dijalankan Partindo.

Parindra ini merupakan fusi antara Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) pimpinan Dr. Sutomo dan Budi Utomo yang dipimpin RMA Wuryadiningrat. Akhirnya keluarlah Dr. Sutomo sebagai Ketua Parindra, sedang Wuryaningrat menjadi Wakil ketua.

Keadaan Gedung Habiproyo pada malam fusi itu sangat indah dan hebat dalam pandangan mata. Gedung yang luas itu diterangi dengan lampu-lampu yang cukup banyak dan terang, sehingga nampaklah perhiasannya yang lebih megah. Tiang-tiang dibelit belit dengan hiasan daun beringin dan daun nyiur muda, sedang dikeliling serambi dihias dengan padi, sebuah lambang kesuburan tanah air kita, dihiasi pula dengan bendera partai baru itu ialah

warna hijau — merah — putih. Sebagai gantinya slinger dibuatnya ronce buah-buahan hasil tanaman negeri kita, misalnya terong, lada, kacang, daun pisang. Meskipun bahan-bahan perhiasan itu sederhana belaka, tetapi karena diatur sangat elok, cukuplah menarik perhatian para pengunjung konggres itu. Di muka gedung tempat berkonggres berkibar dua buah bendera ialah *merah putih* dari Budi Utomo dan *Hijau merah* dari PBI. Sedang di tengah-tengah agak ke muka dipasangnya bendera partai baru itu.

Pada pukul 8.30 gedung Habiproyo telah penuh dengan tamu-tamu dan wakil-wakil perhimpunan, wakil pers, dan para kongresten. Di antara orang-orang ternama dan terpelajar, terlihat tuan-tuan K.P.H. Mulyokusumo sebagai utusan dari Susuhunan di Surakarta, Prins Hadiwijoyo Ketua Balai Agung, Mr. Suyudi, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, Mr. Singgih, Mr. Susanto, Dr. Kodiyat dan beberapa lagi kaum kedokteran, M.H. Thamrin, R.P. Suroso, Ki Hajar Dewantara dan beberapa lagi pemuka kaum pergerakan.

Dari pihak pemerintah datang pula Gobel dan Datuk Tu-menggung dan wakil polisi lengkap. Pada malam itu, perasaan gembira dan suasana meriah karena sesuatu yang dicita-citakan yakni perasaan persatuan Budi Utomo dan PBI telah terwujud, karena juga telah diidam-idamkan dan yang diharap akan membawa nusa dan bangsa untuk selangkah lagi lebih dekat pada maksud yang dituju, kemuliaan, kemerdekaan dan kejayaan. "Perwujudan dari persatuan itu terbukti dengan berdirinya Partai Indonesia Raya", demikian dikatakan Dr. Sutomo.

Setelah Parindra terbentuk kemudian masuk di dalamnya beberapa perkumpulan lain, ialah Sarekat Selebés, Sarekat Sumatera, Sarekat Ambon, Perkumpulan Kaum Tani dan Tirtayasa. Semua meleburkan diri di dalam Parindra.

Tentang asas Partai Indonesia Raya adalah untuk mencapai cita-cita yang terakhir mencapai Indonesia Merdeka yang segera dikerjakan selekasnya memberikan pendidikan kepada rakyat dalam hal politik, ekonomi, sosial sehingga rakyat Indonesia singkat dapat menjalankan pemerintahan sendiri. Tujuan dan cita-cita kemuliaan Indonesia.

Sebagai syarat akan mencapai tujuan dalam soal politik:

- a. Susunan pemerintahan yang demokratis, bersandar atas kepentingan Indonesia.

- b. Alat pemerintahan yang berdasar dan ditujukan bagi kepentingan Indonesia serta dipegang sendiri oleh bangsa Indonesia.
- c. Kedudukan yang sama bagi segala penduduknya.
- d. Hak dan kewajiban yang sama tiap-tiap orang.

Dalam hal ekonomi mencapai alat ekonomi dan menjalankan perdagangan dengan luar negeri.

Dalam bidang sosial mencapai:

- a. Perguruan Kebangsaan.
- b. Kesehatan Rakyat.
- c. Memajukan pendidikan jasmani.
- d. Hak bekerja, perlindungan kaum buruh, larangan bekerja bagi anak, mencegah keadaan yang tidak baik.

Dalam soal perhubungan kebudayaan dengan luar negeri hendak dicapai cita-cita:

- a. Memajukan kerja sama dengan negeri luaran dalam berbagai hal, istimewa tentang kebudayaan.
- b. Mengangkat wakil-wakil di luar negeri untuk keperluan orang-orang yang tinggal atau bersekolah di negeri itu.
- c. Memajukan pelajaran bahasa asing dengan mendirikan klub asing.

Dalam kongresnya di Sala 24 – 26 Desember 1935 telah diambil dua mosi, yaitu tentang hal menyewakan tanah oleh anak negeri kepada pabrik gula menurut kontrak baru yang bertentangan dengan kepentingan rakyat dan tentang pengajaran di Indonesia yang dipandang tidak sesuai dengan cita-cita nasional; segala sekolah harus memperhatikan kebutuhan nasional, baik lahir maupun batin.

Baru dalam waktu yang singkat saja telah tumbuh 53 cabang dengan 2.425 anggota. Untuk daerah Yogyakarta dalam menyambut berdirinya Parindra ini sebagai daerah yang selalu menjadi tempat memberikan dorongan dan semangat tidak ketinggalan pula dan bahkan sangat penting peranannya. Fusi Budi Utomo dengan PBI dalam satu wadah Parindra ini termasuk yang ada di daerah Yogyakarta telah ikut aktif. Parindra makin bertambah anggotanya naik menjadi 3.425 yang tergabung dalam 57 cabang. Rukun tani yang dengan pimpinannya bekerja dalam lapangan

agraria dan ekonomi pada tahun 1936 mempunyai 2.700 anggota.

Di konggresnya yang pertama yang diadakan pada 15 – 18 Mei 1937 di Jakarta telah mengambil beberapa keputusan antara lain ada dua mosi. Mosi pertama mengenai perlunya memperbaiki pelayaran perahu bangsa Indonesia; kepada Pemerintah akan di-desak, supaya sedapat-dapatnya membuka sekolah dengan selekas-lekasnya untuk mendidik pelayar-pelayar bangsa Indonesia. Mosi yang kedua mengandung anjuran supaya menambah cabang Rukun Tani sebanyak-banyaknya; oleh sebab itu umpamanya akan diminta kepada Pemerintah, supaya pengawasan atas "badan-badan hukum anak negeri" (*Inlandsche rechtspersonen*). Mosi ini berlaku juga untuk cabang-cabang Parindra yang ada di daerah termasuk di daerah Yogyakarta.

4. Gapi

Dalam hubungannya dengan konsentrasi Nasional yang dibentuk pada tanggal 21 Mei 1939 atas prakarsa Parindra, yakni federasi dari perkumpulan-perkumpulan politik yang dinamakan Gabungan Politik Indonesia, disingkat Gapi. Maksud federasi ini ialah untuk menghadapi kemungkinan perang dunia kedua. Dalam Gapi itu duduk Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia. Sekretariat Gapi dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso dari PSII, Amir Syarifuddin dari Gerindo dan Muhammad Husni Thamrin dari Parindra. Pergerakan Penyadar tidak turut serta dalam Gapi disebabkan oleh karena pihak PSII berpendirian, bahwa PSII tidak akan ikut serta, jika Pergerakan Penyadar diajak. Penganjur pembentukan Gapi yakni Sam Ratulangi dan Persatuan Minahasa dan Muh. Husni Thamrin dari Parindra memilih PSII. Sebenarnya formatur Gapi itu bermaksud untuk menghimpun partai-partai politik Indonesia yang mempunyai asas nasionalis. Oleh karena Pergerakan Penyadar meskipun bergerak dalam bidang nasional, namun asasnya ialah agama Islam, maka tidak diajaknya. Namun asas nasionalis itu kenyataannya tidak dipegang teguh. Maka akhirnya terjadilah perpecahan antara PSII dengan Pergerakan Penyadar yang makin mendalam. Pergerakan Penyadar yang ingin melanjutkan asas PSII tidak kecewa tidak diikuti sertakan dalam Gapi. Demikian pula terhadap MIAI yakni Majelis Islamil A'la Indonesia juga tidak tergabung di dalam Gapi.

Dalam menanggapi pembentukan dan gerak langkah Gapi ini maka bagi organisasi yang ada di daerah termasuk Yogyakarta telah pula memberikan sambutan dalam Gapi itu seperti ditunjukkan masuknya PSII.

5. MIAI

Sejak diadakan kongres Sentral Komite Al Islam di Malang tahun 1933 – 1937 selama hampir empat tahun itu tidak mengadakan suatu kegiatan apapun. Dalam masa itu Sentral Komite Al Islam terasa sunyi sebagai menemui ajalnya. Pada bulan September 1937 antara lain atas anjuran pemimpin-pemimpin Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama berdirilah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI, juga disebut orang Majelis Islam Luhur). Selanjutnya badan inilah yang akan mengusahakan kongres-kongres Al Islam. Dengan dukungan dari Muhammadiyah akan berdiri MIAI ini berarti untuk umat Islam di daerah Yogyakarta telah menunjukkan kegiatannya.

Dalam tahun 1938 oleh badan baru ini diadakan Kongres Al-Islam yang ke II; adapun yang menjadi sebab ialah tulisan Nona Siti Sumandari tentang Islam yang dianggapnya sangat menghina agama Islam dan minta kepada pemerintah agar lekas menetapkan sikap tentang hal ini. Juga diputuskan meminta kepada Pemerintah agar penyelesaian urusan waris diserahkan kepada Raad Agama (jadi diambil lagi dari Landraad).

Kongres ke 12 berlangsung di Solo Mei 1939. Dalam kongres ini diulangi putusan-putusan kongres yang sudah (penghinaan agama Islam dan peraturan urusan waris) dan seterusnya antara lain juga diambil putusan:

- a. Pekerjaan propaganda di daerah kolonisasi diserahkan kepada Muhammadiyah (NU juga memperhatikan hal ini, tidak menggabungkan diri).
- b. Meminta kepada Pemerintah jangan mencabut pasal 177 *Indische Staatsregeling*.
- c. JIB diwajibkan berhubungan dengan organisasi-organisasi pemuda Islam lainnya untuk pembentukan satu badan persatuan antara perkumpulan-perkumpulan ini semuanya.
- d. Di samping sekretariat MIAI didirikan satu departemen buat urusan luar negeri.

Demikian kontak antara organisasi satu dengan lainnya dengan MIAI.

6. Petisi Sutarjo

Perjuangan nasional melalui *Volksraad* telah disadari, bahwa duduknya para wakil bangsa Indoensia dalam *Volksraad* tersebut sesungguhnya tidak merupakan dewan perwakilan rakyat yang benar-benar dapat membawa aspirasi suara rakyat. Namun demikian para nasionalis golongan koperator mencoba untuk memanfaatkan semaksimal mungkin cita-cita rakyat, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Beberapa partai dan organisasi nasional mempunyai wakil dalam *Volksraad* untuk memperkuat persatuan di antara wakil-wakil bangsa Indonesia, pada tanggal 27 Januari 1930 Moh. Husni Thamrin membentuk Fraksi Nasional. Seperti partai/organisasi nasional lainnya, Fraksi Nasional dengan tidak melanggar hukum menuntut adanya perubahan tatanegara dan penghapusan terhadap diskriminasi yang terdapat di bidang politik, ekonomi dan sosial. Masalah politik seperti penangkapan dan pembuangan semena-mena diperdebatkan dalam sidang *Volksraad*. Juga masalah sosial-budaya seperti Ordonansi Sekolah Liar, pertahanan dan akibat depresi ekonomi terhadap rakyat diperdebatkan dalam sidang ini.

Perjuangan nasionalis di *Volksraad* ini kadang-kadang dapat menjadi hangat, umpamanya perjuangan yang dilakukan oleh Muh. Husni Thamrin untuk membela sekolah liar, bila tidak diindahkan oleh pemerintah, ia mengancam akan ke luar dari dewan itu. Karena dikuatirkan akan diikuti oleh wakil-wakil Indonesia lainnya sehingga *Volksraad* akan kehilangan arti, pemerintah akhirnya mencabut Ordonansi itu.

Kelumpuhan Pergerakan Nasional akibat politik penindasan kolonial telah menimbulkan ide petisi Sutarjo yang meminta diberikannya pemerintahan sendiri kepada Indonesia secara sangat berangsur-angsur dalam jangka waktu 10 tahun. Sebagian besar dari partai-partai, tokoh-tokoh nasional dan golongan dalam masyarakat termasuk di daerah-daerah misalnya Yogyakarta menyokong petisi tersebut. Golongan Arab, Indo dan Cina menyokong petisi dengan harapan bahwa kelak dalam Indonesia yang berdiri sendiri, hak dan kepentingan mereka diakui dan dilindungi. Untuk memperkuat petisi, beberapa aksi dijalankan terutama dalam

rapat-rapat umum di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Central Comite Petisi Sutarjo.

7. Gerakan Indonesia Berparlemen

Kegagalan petisi makin meyakinkan Pergerakan Nasional bahwa *Volksraad* bukanlah dewan perwakilan yang sejati. Di samping itu mendorong usaha penggabungan partai-partai Parindra, PSII, Pasundan, Gerindo, PII, Katolik, PPPKI, Persatuan Minahasa (PM), yang kemudian terjelma dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tahun 1939. Penggabungan ini bukanlah karena didasarkan atas ideologi, tetapi karena aksi bersama. Dari semula sudah jelas bahwa GAPI harus berjuang di bidang politik praktis. Lagi pula sudah semestinya kegiatannya harus disesuaikan dengan keadaan yang mengharuskan partai-partai itu menyatukan kekuatan mereka dalam satu ikatan yang kuat.

GAPI mulai dengan aksinya pada saat yang tepat dan mendapat sambutan meriah yakni dengan semboyan "Indonesia Berparlemen". Tuntutan ini dikeluarkan dan ditujukan kepada Pemerintah Kolonial pada tahun 1939, di mana saat itu sedang berkecamuknya Perang Dunia II yang mana Nederland akan tersangkut pula di dalamnya.

Hasil dari tuntutan GAPI itu dengan dibentuknya Komisi Visman oleh pemerintah dengan tugas menyelidiki hasrat dan keinginan golongan-golongan masyarakat yang ada di Indonesia.

Dalam pada itu juga telah diperjuangkan pemakaian bahasa Indonesia dalam sidang *Volksraad*. Begitu pun perubahan kata *Inlander* menjadi Indonesia, *Nederlands Indie* menjadi Indonesia (daerah Indonesia). Penghapusan diskriminasi berdasarkan patokan warna kulit juga dituntut.

Pada tanggal 22 Nopember 1939 GAPI mengadakan rapat umum yang ketiga, di mana diputuskan supaya cabang-cabang dan partai yang menjadi anggota secara gotong royong mengorganisasi suatu aksi umum untuk suatu Parlemen Indonesia. Di mana tidak terdapat cabang GAPI, agar di daerah itu dibentuk Komite Parlemen Indonesia dan mengadakan hubungan dengan Sekretariat GAPI. Dianjurkan agar pada tanggal 17 Desember 1939 di mana-mana diadakan rapat umum untuk memperkuat aksi. Selanjutnya diputuskan untuk mengorganisasi konggres, yaitu konggres Rakyat Indonesia. GAPI berseru kepada semua lapisan rakyat untuk memberi bantuan baik moril maupun material.

Jawaban pertama atas seruan GAPI itu datang dari PB Taman Siswa di Yogyakarta (28 Nopember). Diterangkan bahwa orang bergembira setelah mendengar tentang Konggres Rakyat itu. Orang percaya penuh, bahwa ia akan mampu menarik jiwa dan kekuatan rakyat Indonesia untuk berusaha mencapai kedudukan yang lebih tinggi dan terhormat. Sambutan selanjutnya diikuti dari PII dengan memerintahkan semua cabang-cabangnya aktif untuk mencapai parlemen yang sempurna. Kemudian Pasundan, MIAI, Persekutuan Kaum Muslimin juga setuju terhadap seruan GAPI. Demikian pula perkumpulan-perkumpulan lain. Dengan beberapa pernyataan dari bermacam-macam organisasi tersebut, merupakan suatu bukti, bahwa tuntutan Indonesia Berparlemen disambut di beberapa daerah termasuk di Yogyakarta. Tetapi pada akhirnya tuntutan itu semua ditolak oleh Belanda dengan janji akan dibicarakan sesudah Perang Pasifik selesai.

D. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG

1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda

Pada akhir bulan Agustus 1939 terjadi krisis dunia akibat Perang Dunia II makin memuncak. Udara politik di Indonesia mulai panas. Rakyat yang telah jemu mendengar janji manis Pemerintah jajahan lalu memperhebat tuntutanannya. Tuntutan Indonesia makin santer. Pemerintah Belanda menjadi bingung menghadapi momen aksi itu.

Dalam bulan Juni 1940 dan sidang-sidang selanjutnya dalam *Volksraad* suara reaksioner Belanda sudah tidak seberapa kedengaran lagi. Pemerintah Belanda mau memperhatikan lagi mosi Wiwoho yang pernah diabaikan itu. Pembicaraan untuk menanggapi mosi yang ditujukan kepada pemerintah yang semula diulur-ulur, maka mengingat gentingnya situasi dunia akhirnya diadakan pembicaraan antara GAPI dengan Komisi Visman.

Mula-mula Komisi Visman akan mengisolir GAPI tetapi pemimpin-pemimpin GAPI awas akan tindakan yang licik itu. Partai-partai politik yang secara langsung akan diajak bicara menyatakan penolakannya, apabila tanpa melalui GAPI. Demikian tekad bulat partai-partai politik di Indonesia itu.

Meskipun GAPI telah mengajukan memorandumnya, namun

Komisi Visman rupanya hanya cukup mendengar saja, dan tanggapannya tetap dingin. Komisi Visman tak membuat situasi jernih, dan bahkan menimbulkan hati yang semakin tidak memuaskan. Maka setelah Komisi Visman ini kembali datanglah di Indonesia pada bulan Mei 1941 Welter dengan membawa janji yang muluk-muluk dan bagus. Janji itu untuk membujuk pemimpin-pemimpin Indonesia agar bersama rakyat memberi bantuan kepada pemerintah dalam menghadapi perang. Setelah itu akan diadakan konperensi antara Nederland, Indonesia, Suriname dan Curasao untuk pembicaraan perubahan tata negara menurut keinginan rakyat. Apa yang dijanjikan pemerintah Belanda itu ternyata tidak memenuhi harapan rakyat. Bahkan sebaliknya rakyat diberi beban baru dengan dibukanya "Milisi Bumiputera".

Sebetulnya tentang hal tersebut telah lama diusulkan oleh Sutarjo dengan adanya bahaya perang, tetapi disambut dengan penolakan. Baru setelah perang di ambang pintu dan rakyat telah terlanjur benci kepada pemerintah milisi disorongan. Akibatnya banyak pemuda Indonesia yang segan masuk milisi, karena tidak lain hanya dijadikan umpan peluru saja untuk kepentingan Belanda.

Perang Dunia menjalar ke benua Asia. Maka terjadilah perebutan jajahan antara Jepang dengan negara Barat di Asia yang berlangsung dari 1941 — 1945 yang terkenal dengan Perang Pasifik. Pada tanggal 8 Desember 1942 Jepang menyerang Pearl Harbour yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika yang terbesar di Pasifik. Setelah Jepang menyerang Hindia Belanda menyatakan perang kepada Jepang. Dalam perang Pasifik ini Jepang dengan gerak cepat menuju ke selatan. Malaya, Birma, Pilipina dan Indonesia yang diduduki Belanda direbutnya.

Dalam keadaan yang serba terkepung rasa kekhawatiran itu, maka pemerintah Belanda berusaha mengambil hati bangsa Indonesia. Maka sebelum Jepang datang Belanda telah mengadakan persiapan antara lain:

- a. Di tiap daerah termasuk Yogyakarta diadakan LBD (*Lucht Bescherming Dienst*) ialah perlindungan bahaya udara untuk menghadapi bahaya serangan Jepang. LBD ini diadakan dengan suka rela. Dalam menanggapi adanya LBD ini, bangsa Indonesia ada yang mau memasuki dan ada pula yang tidak mau karena sifatnya suka rela. Maka selanjutnya di kota

Yogyakarta pemerintah membuat pos-pos Belanda di dekat Sentul (Sewondanan). Di situlah ada kantor LBD.

- b. Pemerintah Belanda membentuk *stadswacht* ialah semacam Hansip yang terdiri dari bangsa kita. *Stadswacht* ini menjaga keamanan kota. Sedang penjaga keamanan di daerah-daerah kabupaten dibentukulah *Stadswacht*. Tempat-tempat yang penting di seluruh daerah Yogyakarta dijaga oleh *Stadswacht* ini. Misalnya penjagaan di pantai selatan Yogyakarta.
- c. Persiapan lain ialah dengan dibentuknya EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken), ialah pertolongan pertama pada kecelakaan. Pada saat itu EHBO mempunyai pos di PKU sekarang. Adapun anggota EHBO ini pemuda-pemuda yang pernah bersekolah, karena hal ini memerlukan kecerdasan pula.

Pada menjelang keruntuhan pemerintahannya di Indonesia, maka pemerintah Hindia Belanda tetap mengadakan hubungan dengan raja-raja Jawa Tengah termasuk juga dengan kesultanan Yogyakarta. Kekuasaan untuk mengadakan hubungan ini diberikan kepada Gubernur Jenderal dan kemudian menelorkan adanya *kontrak politik*. Kontrak politik ini terakhir diadakan dengan kasultanan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1941 yang disebut *Overeenkomst tusschen het Gouvernement van Nederlandsch Indie en het Sultanaat Yogyakarta 18 Maart 1940* dan diundangkan dalam *Staatsblad* 1941 No. 47. Sedang dengan Pakualaman disebut "*Zelfsbestuur regelen Pakualaman*" yang diundangkan dalam *Staatsblad* 1941 No. 577.¹⁰⁾

Sekalipun nama dari tersebut di atas berlainan, tetapi jiwa dan isinya pada hakekatnya sama. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa pada garis besarnya mengatur hubungan politik antara Daerah Swapraja dan Gubernemen Hindia Belanda. Pada pasal 21 ayat 12 IS (*Indische Staatsregeling*) tersebut menentukan bahwa perundang-undangan Pemerintah Belanda hanya berlaku terhadap Daerah-daerah Swapraja sepanjang sesuai dengan hak Swapraja itu.¹¹⁾

Selanjutnya hubungan politik itu lebih jauh diatur dalam *Politieke-Contract/Zelf bestuurregelen* di antaranya yang penting dalam ikatan *politiek contract* tersebut ialah:¹²⁾

- a. Penegasan tentang kedudukan hukum Daerah Swapraja.
- b. Penegasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah Hindia

Belanda dengan alat-alat kekuasaannya dan kekuasaan Kepala Daerah Swapraja.

- c. Tambahan kekuasaan kepada Kepala Daerah Swapraja dalam lapangan perundang-undangan, sehingga lambat laun tidak akan ada dualisme/hal-hal yang dulu diatur dalam *reglementen* dan *keuren van politie* oleh Residen/Gubernur lambat laun akan hilang, karena Kepala Daerah Swapraja diberi kekuasaan untuk membuat peraturan yang berlaku terhadap golongan *Gouvernements Onderhoorigen*, sepanjang hal-hal yang diatur di dalamnya sama dengan urusan-urusan yang sudah diserahkan kepada daerah-daerah otonom di Daerah Gubernemen (*Provincie, Kabupaten, Stadsgemeenten*).

Dalam kontrak politik itu tidak disebutkan secara terperinci tentang urusan yang dapat diatur oleh Kepala Daerah Swapraja, melainkan di situ diformulasi urusan apa yang tetap akan diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda sendiri.

Dalam lampiran yang dimaksud ditentukan 22 jenis urusan yang kompetensinya untuk mengatur, tetap berada pada Pemerintah Hindia Belanda, di antaranya urusan pertahanan, urusan senjata api dan bahan peledak, urusan kewarganegaraan Belanda dan lain-lainnya. Di samping itu masih ada beberapa pasal yang menentukan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yaitu pasal 27 tentang hak memberi grasi, amnesti, dan abolisi, pasal 33 ayat (1) tentang *accijnzen*, pasal 37 ayat (2) tentang pengajaran, pasal 38 ayat (2) tentang pencegahan atau pemberantasan penyakit menular, pasal 39 ayat (1) tentang hak tanah kepada bangsa asing, pasal 42 ayat (1) tentang perusahaan pertanian besar, pasal 43 ayat (1) tentang pertambangan pasal 44 tentang kehutanan.¹³⁾

Kontrak politik ini diadakan setiap diadakan pergantian raja. Hubungan antara wilayah dari kerajaan-kerajaan itu ada yang secara langsung dengan pemerintah Hindia Belanda, tetapi ada juga yang tidak langsung. Wilayah yang langsung berhubungan dengan pemerintah Hindia Belanda ialah wilayah kerajaan yang pada waktu pemerintahan Hindia Belanda berkuasa di Indonesia ada di bawah kekuasaannya. Kontrak yang dibuat Belanda dengan kerajaan-kerajaan tersebut dapat dibedakan menjadi *Lang contract* dan *Korte Verklaring*. Dalam *Lang contract* ditetapkan satu persatu kekuasaan Belanda mengenai hubungannya dengan kerajaan yang bersangkutan. Sedang dalam *Korte Verklaring* memuat

pernyataan, bahwa kerajaan mengakui kekuasaan Belanda dan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan semacam tersebut dari penjajahan Belanda berlangsung sampai pecahnya Perang Pasifik pada akhir 1941.

Orang-orang Jepang yang pada waktu itu sudah lama di kota Yogyakarta sebagai tokowan di Malioboro diadakan penangkapan. Selanjutnya orang Jepang yang telah ditangkap ini dikirim pulang ke negerinya. Waktu itu Hawaii belum dibom oleh Jepang. Memang sebelum Jepang menyerang Indonesia telah dimasukkan warganya ke Indonesia sebagai penunjuk jalan (mata-mata).¹⁴⁾ Sebelum itu orang-orang Jepang Hidup sebagai pedagang. Misalnya ada yang tinggal di Klaten, dan ada pula yang bertempat tinggal di Kulon Progo. Di sana mereka membeli gablek dan juga panili lalu diperdagangkan. Memang pada saat itu Jepang menjalankan politik dagangnya ialah politik *dumping*.¹⁵⁾ Dengan menjalankan politik itu barang-barang yang dijual orang Jepang lebih laris dari yang lainnya dari toko-toko milik Belanda dan toko-toko milik orang Cina. Bahkan sebagian besar toko lainnya mati, karena tidak dapat bersaing dengan orang-orang Jepang. Lebih-lebih pelayanan yang diberikan orang Jepang lebih baik dan sangat menyenangkan para pembelinya.

Maka dengan uraian di atas dapatlah disimpulkan, bahwa dalam masa kedatangan Jepang pemerintah kolonial Belanda bersikap lunak karena mengambil hati bangsa Indonesia. Suatu langkah dalam usaha mendapatkan bantuan rakyat itu orang-orang yang cacad diberinya pekerjaan.

Kepada kaum pergerakan yang dianggap membahayakan pemerintah selalu tak luput dari pengawasannya. Sedang sebagian dari pimpinan partai dan organisasi politik telah banyak yang dibuang ke Digul. Pemerintah sendiri merasa khawatir. Jangan-jangan orang-orang yang dianggap penting dari bangsa Indonesia menjadi alat Jepang dan memusuhi Belanda.

Para tawanan politik yang ada di Endeh di antaranya Bung Karno pada waktu itu oleh pemerintah Belanda dipindahkan ke Bengkulu. Sebagian dari mereka yang dibuang ke Digul dibawa oleh Van Mook ke Australia. Demikian pula para Direktur-direktur juga dipindah ke Australia dengan perhitungan apabila sewaktu-waktu Belanda menang perang pemerintahan di Indonesia dapat diatur serta dipersiapkan dari Australia. Hal ini sesuai dengan rencana waktu Jepang jatuh ternyata kedatangan Nica di Indonesia

telah dipersiapkan dari Australia.

Pada pagi hari tanggal Desember 1941 angkatan Udara Jepang menggempur Pearl Harbour dan angkatan lautnya beraksi di seluruh Pasifik. Angkatan daratnya mendarat di Indokhina, Malaya dan kemudian Pilipina. Kapal penempur *Prince of Wales* dan *Repulse* ditenggelamkan di Teluk Siam.

Sejak hari itu pecahlah Perang Asia Timur Raya. Amerika Serikat memaklumkan perang kepada Jepang, Jerman dan Italia. Perang menjadi "sempurna" merupakan peperangan seluruh dunia.

Pada hari permulaan pecah Perang Asia Timur Raya itu Kaisar Jepang, Hirohito mengeluarkan sabda memaklumkan pernyataan "perang suci" yang disebut perang Asia Timur Raya untuk mengusir penjajahan bangsa kulit putih. pidato itu selalu membangkitkan semangat rakyat Jepang supaya mentaati "perang suci" itu dengan sungguh-sungguhnya.

Pemerintah Hindia Belanda ikut pula, "Memaklumkan perang" kepada Jepang selaras dengan perjanjian front ABCD. 16) Rakyat Indonesia tidak diajak berunding, pemimpin-pemimpin politik tidak diminta pertimbangannya suara rakyat dianggap sepi saja.

Permakluman perang kepada Jepang itu tidak segera dibalas. Tokio merasa terlalu besar untuk segera menyambut pernyataan perang dari Batavia itu. Barulah pada tanggal 11 Januari 1942 ketika Jepang akan melakukan pendaratan di Menado, Tarakan dan Balikpapan dimaklumkanlah bahwa sejak hari itu Jepang berperang dengan Belanda.

Pada waktu itu udara gerakan politik di kalangan Indonesia sedang keruh karena perselisihan di antara para pemimpin Gabungan Gerakan Islam "Majelis Islam A'la Indonesia" (MIAI) ke luar dari GAPI karena perselisihan perseorangan di antara Abi Kusno — Wondo Amiseno dengan Amir Syarifuddin — Sukarjo Wiryopranata. Perpecahan antara Islam dan Nasionalis yang belum lama berpisah telah menjadi kecil yang sudah tumbuh sejak pertengahan tahun 1930-an. Perpecahan dengan kaum Parindra, dan dengan kaum nasionalis yang berkecenderungan ke kiri, Wondo, timbul persaingan dan perpecahan yang semakin tajam. Ir. Sukarno sudah lama diam di Belanda (dari tahun 1933-1934) namun beliau tidak dapat menampung satu politik yang masih sebagai orang buangan. Demikian pula Muhammad Hatta, Syahrir dan Dr. Cipto yang dibawa dari Banda ke Sukabumi masih non aktif.

Untuk mengatasi krisis karena perpecahan itu GAPI lalu membentuk Majelis Rakyat Indonesia (MRI) diketuai oleh Sartono, Sukarjo dan Atik Suardi (Gerindo, Parindra dan Pasundan). Badan ini selaku Badan Pekerja Konggres Rakyat Indonesia untuk menghadapi perundingan dengan Belanda yang katanya akan "meninjau kembali" keinginan rakyat Indonesia yang dulu dianggap sepi saja oleh Pemerintah jajahan.

Demikianlah pada bulan Januari 1942 itu di Yogyakarta dilangsungkan pertemuan antara wakil-wakil Pemerintah dengan wakil-wakil Majelis Rakyat Indonesia. Pihak Pemerintah diwakili oleh Dr. H.J. Levelt, Dr. Indenburg dan Mr. Sastromulyono, sedang pihak MRI, diwakili oleh Sartono, Sukarjo, Kasimo, Otto Iskandardinata, Mr. Singgih, Ruslam Wongsokusumo, Atik Suardi dan Samiono. Tempat pertemuan di gedung Sonobudoyo Yogyakarta.

Hasil dari perundingan ini adalah nihil. Pihak pemerintah memang hanya sengaja mendengarkan keinginan rakyat saja, lain tidak. Kepada wakil-wakil rakyat itu dijanjikan bahwa kelak sehabis perang akan segera diadakan perubahan tata negara di Indonesia.

Di dalam keadaan sukar karena perang di Pasifik itu belum masanya mengadakan perundingan atau tawar-menawar untuk menentukan status Indonesia di kemudian hari.

Demikianlah konperensi yang diselenggarakan di Yogyakarta tetap kosong. Sampai saat Hindia Belanda jatuh (Palembang, Singapura, Menado, Ambon jatuh) pemerintah Belanda tetap reaksioner, tidak hendak mengindahkan tuntutan rakyat. Sejak mosi *Volksraad* 1918 sampai tuntutan Indonesia berparlemen 1939 Pemerintah Hindia Belanda masih menganggap bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk merdeka.

Keadaan masyarakat

Ekonomi

Setelah pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, mereka melakukan taktik bumi hangus dengan menghancurkan obyek-obyek vital terutama instalasi tambang minyak bumi. Itulah sebabnya pada masa pertama pendudukan Jepang hampir seluruh kehidupan ekonomi lumpuh. Karena itu maka di kemudian hari langkah pertama yang dilakukan pemerintah Jepang

adalah mengadakan rehabilitasi sarana ekonomi seperti memperbaiki jembatan, dan telepon. Pemerintah pendudukan langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, karet dan teh. Pemerintah juga memegang monopoli pembelian dan menentukan harga penjualan hasil perkebunan. Hasil perkebunan yang sangat penting telah dibumi hanguskan oleh pemerintah Belanda. Maka bagi ekonomi rakyat sangat kurangnya dan menimbulkan kesengsaraan hidupnya. Masalah sandang sangat tergantung kepada impor. Dalam suasana Perang Dunia itu bahan-bahan impor tidak dapat lancar karena di mana-mana terjadi blokade pada kapal-kapal. Demikian sulitnya keadaan ekonomi rakyat akibat adanya perang dunia itu.

b. Sosial

Keadaan sosial bagi masyarakat belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah kolonial. Hanya sebagian orang yang dapat dijadikan alat melaksanakan maksud-maksud kolonialnya diberi kesempatan menduduki dalam jabatan pamong praja dan pegawai-pegawai lainnya di beberapa instansi. Perhatian terhadap usaha sosial ini bahkan tumbuh dari masyarakat atas usaha badan swasta. Misalnya usaha pemeliharaan anak yatim piatu, pemeliharaan orang jompo, pendirian rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah bersama Aisyiah. Dengan usaha ini ternyata telah dapat meringankan beban penderitaan rakyat miskin. Demikian pula rumah sakit mata yang didirikan oleh Dr. Yap di Yogyakarta. Usaha ini benar-benar dirasakan manfaatnya bagi bangsa kita untuk mendapat perhatian lagi. Badan-badan lainnya pun tidak ketinggalan pula berusaha dalam meningkatkan keadaan sosial rakyat ialah ditangani oleh Missi Katolik dan Zending.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan langkah meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia pun kebanyakan atas inisiatif Badan-badan swasta. Misal Taman Siswa, Muhammadiyah yang kian hari bertambah pesat. Perkembangan pendidikan Taman Siswa yang makin pesat berkembang itu menakutkan pihak pemerintah kolonial Belanda. Meskipun telah ada sekolah yang didirikan oleh Gubarnemen, tetapi kesempatan bagi anak bangsa Indonesia masih terbatas. Maka menyadari akan hal ini Muhammadiyah giat melakukan pendidikan baik melalui media madrasah maupun dengan kursus dan pengajian secara terus menerus.

Maka untuk mengetahui seberapa jauh langkah usaha Muhammadiyah dalam hal pendidikan dapat dilihat sepintas lintas dalam daftar Lampiran

Sebagai kelanjutan adanya *Onderwijs Ordonantie* yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, maka selama dua tahun mulai tahun 1934 hingga tahun 1936 terjadi hujan larangan mengajar. Di antara guru Taman Siswa yang menjadi korban lebih dari 60 orang dengan alasan yang tidak sah. Malah ada cabang sekolah yang ditutup setahun lamanya. Pada waktu itu polisi ikut campur soal pengajaran, murid ditanya macam-macam, perguruan digeledah, rumah pamong digeledah, juga rumah murid yang ada di luar tanggung jawab guru. Jika guru dan murid Taman Siswa tidak suka memberi hormat pada waktu pegawai bangsa Eropa atau Bumiputera datang, dikenakan larangan hak mengajar dan perguruan ditutup.

Mulai bulan Pebruari 1935 Taman Siswa mendapat cobaan lagi soal "Kinder toelage", hak orang tua murid pegawai negeri atau tunjangan anaknya yang bersekolah.

Ada yang boleh memberi surat keterangan *kinder toelage* ada yang tidak. Adapun sikap Taman Siswa, mengembalikan soal tersebut kepada Pemerintah, karena itu bukan haknya Taman Siswa, tetapi hak orang tua murid sendiri. Jika tidak semua perguruan Taman Siswa dapat menerima hak atas *kinder toelage* untuk orang tua murid pegawai negeri. Lebih baik tidak menerima sama sekali. Secara tegas semua menerima atau semua tidak menerima. Kemudian mulai tahun 1938 peraturan tersebut dicabut.

Bersamaan dengan *kinder toelage*, ada lagi soal "*Vrijkaart dan vrijbiljet*" Anak pegawai Jawatan Kereta Api mulai tahun 1935 yang berguru pada Taman Siswa tidak diberi lagi kartu bebas guna menengok orang tua. Setelah diperjuangkan, dengan keputusan Inspektur kepala tanggal 20 September 1940 peraturan tersebut dicabut pula.

Bahkan mulai tahun 1935 orang-orang Taman Siswa juga akan dikenakan "Pajak Upah" atau *loonbelasting*. Padahal dalam hal ini Taman Siswa secara prinsip menolak tidak suka membayar pajak upah karena dalam Taman Siswa tiada bersifat majikan dan buruh. Sebagai penduduk suka membayar pajak penghasilan, walaupun jumlahnya boleh lebih banyak dari pajak upah.

Tentang hal ini yang oleh Taman Siswa dianggap prinsip,

sampai lama sekali diperjuangkan. Pada tanggal 17 Desember 1937 Ki Hajar Dewantara memaksa diri datang bertemu dengan Gubernur Jenderal di Cipanas untuk menjelaskan dengan lisan ujudnya organisasi Taman Siswa yang berdasar atas kekeluargaan dan sama sekali tidak mengenal hubungan majikan dan buruh. Dan selama itu peraturan terus diundur-undur, hingga sampai dicabutnya, orang Taman Siswa tetap tidak dikenakan pajak upah. Kemudian dengan surat keputusannya tanggal 15 Juli 1940 No. LBI/16/6 Direktur Keuangan memutuskan orang-orang Taman Siswa dibebaskan dari pajak upah dan seperti biasa dikenakan pajak penghasilan.

Pada waktu yang terpenting itu yaitu pada saat-saat Taman Siswa memperjuangkan menentang ordonansi liar 1932 dengan berakibat hujannya larangan hak mengajar bagi guru-gurunya, menentang peraturan larangan hak orang tua murid menerima *kindertoelage* dan kartu biljet penerima untuk anak-anaknya, kemudian menentang pajak upah bagi guru-gurunya, pusat Taman Siswa ada di jalan Tanjung. Kemudian membeli rumah dan pekarangan itu kemudian didirikan pendapa dengan sokongan para pencinta, dan "benggol bulanan" dan pada murid, yang dibuka resmi bertepatan dengan pembukaan kongres Taman Siswa yang ketiga hari 16 Nopember 1938.

Demikianlah perjuangan Taman Siswa dalam menghadapi kekejaman pemerintah kolonial, tetapi gigih dan dengan penuh keberanian menentang segala peraturan yang dipaksakan untuk menekan bangsa Indonesia.

d. Kebudayaan

Krida Beksa Wirama yang didirikan sejak tanggal 17 Agustus 1918 dan merupakan induk segala perkumpulan tari yang ada di daerah Yogyakarta khususnya, makin berkembang berkat usaha pendirinya para tokoh seni dan karawitan. Ahli seni tari ialah kawula keraton Yogyakarta. Perkumpulan Krida Beksa Wirama tersebut bermaksud mendorong serta memajukan pelajaran seni tari serta kerawitan Krida Beksa Wirama makin tampak kemajuannya pada tahun 1931 sewaktu Jong Java dilebur menjadi Indonesia Muda.

Pada tahun 1931 Krida Beksa Wirama diformulasi dalam pendidikan kebangsaan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa mengembangkan tari-tarian tersebut, sehingga kesenian itu masuk

dalam mata pelajaran di Taman Siswa kepada anak-anak. Adanya dolanan anak-anak lalu diiringi dengan gamelan itu dimulai oleh Taman Siswa. Jadi permainan anak yang lalu menyangkut gending, gerak itu dimulai di Taman Siswa.

Krida Beksa Wirama mendapat bantuan banyak dari Sri Sultan Hamengku Buwana VIII bukan saja berupa ijin atau moril, melainkan pula bantuan uang. Pada tanggal 16 Desember tahun 1939 maka di Jakarta (dulu Batavia) telah didirikan cabang Krida Beksa Wirama di bawah pimpinan Dr. Priyono.

Atas inisiatif R.M. Jayadipura maka pada tahun 1925 didirikan sebuah sekolah dalang yang diberi nama *Habiranda*, singkatan *Hamurwani Biwara Rancangan Dalang*. Pada waktu itu telah dirasakan kebutuhannya untuk memperbaiki mutu para dalang. Habiranda ini mendapat tunjangan dari Keraton.

Di samping perkembangan kesenian yang diusahakan oleh golongan masyarakat pertengahan itu, maka perkembangan *Stambul Jawi* yang selanjutnya menjadi sandiwara Ketoprak itu, di daerah Yogyakarta tampak maju pesat. Ketoprak yang terdapat di Kampung-kampung ini mempunyai lesung, mandolea, rabana, gesek, biola dan kentongan. Lakon yang diambil dalam pertunjukan ketoprak ini dari cerita Mesir: Ambya, Yusup, Amir Hambyah. Pertunjukan ini dengan memakai gamelan yang pertama-tama ialah di Joyodipuran. Bentuk fragmen Panji dan ketopraknya Joyodipuran ikut membuatnya. Dalam turut memancarkan lebih luas tentang kesenian ini dengan disiarkan dari NIROM.

Dengan adanya model siaran radio serta lahirnya Mavro, maka tumbuh banyak sekali perkumpulan kerawitan seperti cendawan di musim hujan, seperti: Musbararas, Mardi gending, Deyapradangga dan lain sebagainya. Adapun kesenian yang dekat dan mudah dimiliki oleh masyarakat desa, ialah wayang kulit dan wayang topeng, wayang kulit dan wayang topeng tersebut tidak dapat dipisahkan dengan gamelan, niyaga dan dalang-dalangnya. Di desa Ngentak serta desa lainnya kelurahan Kedokan kecamatan Depok pada tahun 1938 masih terdapat rombongan pemain wayang topeng. Malahan R. Pringgawiharja lurah desa Prambanan mempunyai delapan buah topeng yang dianggapnya sebagai pusaka.

Rombongan wayang topeng terdapat di desa Mlati, kelurahan Burikan, desa Warak, (dalang Cermokarso) desa Seyegan kelurahan Gentan, desa Turen kediaman pak Cermowarsana dan Widi-

pawira. Sebuah topeng Gunungsari dianggap pusaka ialah terdapat di desa Warak. Almarhum dalang Gandasana telah mengadakan wayang topeng dengan cerita Kudanarawangsa di kediaman Ki Hajar Dewantara pada tahun 1923. Begitu pula ialah rombongan pemain wayang topeng dari Godean.

Di daerah kabupaten Gunung Kidul banyak terdapat desa kediaman rombongan penari topeng seperti Gari kecamatan Wonosari; Tepus, kecamatan Tepus; Beji kecamatan Patuk; Logandeng, Getas dan Teguhan kecamatan Playen; Ngabrak Panggul dan Sempon kecamatan Semanu. Malahan topeng-topeng dibuat dari desa Beji, Ngebrak dan Merak kecamatan Paliyan; Gondokarya dari dukuh Gelung Wonosari mempunyai lima buah topeng klana panji, Blancir, pentul dan tembung yang dipelihara sebagai pusaka. Begitu juga Kramasemita dari Ngebrak mempunyai topeng Jayakertala sebagai pepunden.

Di dalam kota Yogyakarta sendiri pada kira-kira tahun 1928 tempat pembuatan topeng seperti Pugeran (R.P. Jayapragola), Pakualaman (dalang Jayangsaryana) dan krida Beksa Wirama, R.M. Jayadipura sendiri juga seorang ahli pembuat topeng.

Di desa Gari (Wonosari) terdapat wayang "Gendreh", dengan dua *wanda* yaitu wanda gendreh dan kinanti. Yang wanda gendreh diberi nama kembang dan "Gendreh" sedang wanda Kinanti disebut Dukun dan Kinanti. Wayang gendreh ini dipelihara sebagai pepunden. Kalau rakyat desa mengadakan rawatan, karena sawah atau ladangnya diserang hama tikus maka harus minta sawabnya wayang Gendreh.

Pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 1935 ialah bertepatan 50 tahun berdirinya Archaeologische Museum, maka di Yogyakarta diresmikan pembuatan museum Sanabudaya milik Java Instituut oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.

Dalam pembukaan peresmian Museum Sanabudaya itu Sri Sultan Hamengku Buwono ke VIII bersabda seperti berikut :

"Tuan *Voorzitter*, tuan-tuan *Bestuur* dari *Java Instituut* dan dari Sana Budaya. Saya merasa senang sekali, saya mempunyai hati yang ini hari saya dapat berhadlir untuk membuka museum ini dengan officieel.

Sebab saya percaya, bahwa museum ini tidak sedikit artinya bagi kemajuan kultur Bumi Putera, lebih-lebih untuk kesenian dan bacaan buku-buku.

Oleh karena itu sudah sepantasnya, museum ini dapat bantuan dari mana-mana. Tuan *Voorzitter*, tadi tuan menyerahkan kepada saya *Beschermheerschap* dari museum ini. Maka penyerahan itu saya terima dengan segala senang hati. Begitu juga dari sebab hari membukanya museum ini kebetulan hari kelahiran saya Rebo Wage, tuan-tuan *Bestuur* memberi selamat kepada saya, maka saya mengucapkan terima kasih atas pemberian selamat tuan-tuan itu.

Kemudian pujikan mudah-mudahan museum ini akan hidup subur dan dapat tercapai apa yang dimaksud, sehingga buahnya akan menambah kemajuan Negeri dan penduduknya. Nyonya-nyonya dan tuan-tuan, atas permintaannya tuan-tuan *Bestuur* dari *Java Instituut* supaya saya membuka museum ini, maka permintaan itu saya kabulkan dengan segala senang hati dan sekarang saya menyatakan, bahwa museum ini saya buka. ¹⁸⁾

Sri Sultan Hamengku Buwono VIII besar sekali minat perhatiannya atas perkembangan serta kemajuan kebudayaan di wilayahnya. Oleh karena itu maka tidak sedikit sumbangan serta sokongan yang beliau berikan kepada badan-badan yang bertujuan membina dan memajukan buah seni budaya bangsa seperti kepada Sana Budaya, Krida Beksa Wirama, Habiranda dan lain sebagainya.

Di samping pemeliharaan Museum Sana Budaya, maka dibuka pula suatu sekolah seni kerajinan (*Kunstambachtschool*) beserta asrama sekali pada tahun 1939. Sekolah tersebut bermaksud untuk mendidik serta menyempurnakan keahlian orang dewasa yang telah bekerja sesuatu kejurusan dari Jawa, Madura dan Bali. Pelajaran-pelajarannya diutamakan pekerjaan praktek sehingga dengan demikian pertukangan akan makin maju dalam segala seginya ekonomi, seni dan tekniknya. Lama kursus ialah dua tahun dan untuk sementara waktu baru meliputi pertukangan emas, perak dan kayu.

Pun pula di Kota Gede telah terdapat sebuah sekolah menggambar (*Teckenschool*) akan tetapi sayang sekali, bahwa dalam putusan sidang Pengurus "Pakaryan Ngayogyakarta" pada tanggal 11 Oktober 1934 untuk sementara waktu terpaksa ditutup.

Itulah selintas keadaan seni budaya yang tidak hanya berkembang di lingkungan Kraton tetapi meluas di dalam masyarakat.

e. A g a m a

Persebaran agama Islam makin lama bertambah pesat. Di mana-mana pengajian dapat diselenggarakan. Madrasah sebagai tempat pendidikan berdiri di beberapa daerah. Komunikasi dalam usaha penyebaran agama Islam tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi hubungan itu dengan gerakan Islam ataupun badan-badan di luar negeri. Pernah dari Lahore dan Qodiyon datang utusannya ke Yogyakarta dengan tujuan untuk mengajak kepada kepercayaannya, begitu juga dari Bombay, Irak, Sudan dan Palestina atas nama persyarikatannya maupun personnya sendiri. Demikian pula datang dari Mesir dan Hadramaut.

Perselisihan yang diadu dombakan oleh pihak lain antara kaum Muslimin dan dengan gerakan kebangsaan boleh dikatakan lenyap, karena masing-masing merasa tak ada gunanya. Kecuali apabila dari ummat Islam itu akan merasa tersinggung apabila agama Islamnya pasti akan membalas sebagaimana mestinya, sehingga menghambat maksud masing-masing. Bilamana perserikatan antara yang satu dengan lainnya percekcockannya telah dapat diselenggarakan tetapi bahkan timbul perselisihan di antara perserikatan itu sendiri ialah Bestuur dengan anggota-anggotanya. Ada juga perserikatan kaum Muslimin yang tidak dapat tutup, karena terserang malaise, pun ada pula yang malah bangun serta mendirikan perkumpulan, karena adanya malaise itu. Dengan perselisihan yang demikian itu para pemimpin perserikatan yang sadar berusaha untuk memulihkan persatuan itu.

Jong Islamieten Bond semakin besar, cabangnya ada 55 tempat dan sudah menjadi perkumpulan yang tidak hanya mempersambungkan pemuda-pemuda Islam kepada perkumpulan yang dianggap tua di dalam politik dan sosial Islam, akan tetapi juga sudah bekerja mempraktekkan sendiri sebagai mengadakan sekolah-sekolah.

Penyebaran agama Islam kecuali diusahakan oleh Muhammadiyah juga lebih diperluas lagi dengan adanya usaha-usaha yang antara lain diadakan oleh:

- 1) Musyawaratuth-thalibin di Banjarmasin yang suka bertabligh dan membuka madrasah.
- 2) Sinar Putri Indonesia di Mataram yang berasaskan Islam dan bermaksud akan menentang ma'siat lima.
- 3) Syaukatul Muluk di Sumatra Timur, perkumpulannya Sul-

than-sulthan di sana, yang tentunya ada perhatiannya kepada Islam.

- 4). Syarikat Persatuan Bong Mataram, ialah kumpulannya dukun-dukun tukang sunat, yang menjalankan perintah Islam.
- 5). Partai Islam Indonesia yang didirikan oleh pemuda-pemuda pembela rayeeran PSII di Mataram dan berasas politik.
- 6). Partay Tiong Hwa Islam Indonesia di Mataram, yang memperhatikan ke Islaman bangsanya dan menambah tersiarnya.
- 7). Dan lain-lain persyarikatan Islam yang baru timbul.

Maka untuk mengetahui apa kegiatan dan seberapa jauh perkembangan Islam yang ada di daerah Yogyakarta dapat diperiksa pada Lampiran II.

Sedang agama Katholik pun dengan dipindahkannya Semnari Agung untuk tempat mendidik Pastur di Muntiran (1936) ke Mertoyudan (1938) dan selanjutnya di Yogyakarta 1940, berarti agama tersebut juga bertambah meluas. Agama Kristen yang ditangani Zending dengan pembinaan umatnya di gereja dan lewat usaha sosial dan lain-lain lagi juga berkembang.

3. *Sikap Masyarakat terhadap Pemerintah Hindia Belanda.*

Bangsa Indonesia yang telah beberapa kali ditipu dengan janji manis, tetapi akhirnya hasilnya kosong itu, maka merasa jemu dan tidak menaruh kepercayaan lagi dengan seruan dan janji yang muluk-muluk dari Pemerintah Hindia Belanda. Maka dalam menanggapi seruan Pemerintah agar rakyat membantu dan bekerja yang sebaik-baiknya bersama pemerintah disambut dengan apriori L.B.D. maupun *Stadswacht* yang diadakan pemerintah hanya dimasuki bagi mereka secara suka rela. Mereka berpendapat tidak ada manfaatnya lagi membantu usaha pemerintah yang selalu penuh dengan janji kosong itu. Partai politik yang tergabung dalam Gapi, maupun di luar itu tetap gagal menuntut ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan yang dapat membawakan suara rakyat. Bagi partai yang menganut asas non koperasi tetap melawannya dengan gigih sedang yang bersifat koperatif ingin bekerja sama dengan pemerintah dengan

tujuan mencari kesempatan yang sangat baik memukul pemerintahan kolonial dengan perjuangan di forum parlemen.

Kecuali sikap yang demikian itu masih ada pula dari sebagian bangsa anak yang sudah lupa untuk perjuangan karena sudah diberinya kedudukan yang baik dari pihak pemerintah kolonial.

4. Keadaan Pemerintah Hindia Belanda di Daerah pada saat terakhir.

a. Sesudah Perang Dunia pecah di Eropa

Perang Dunia yang pecah pada tahun 1939 telah menyeret beberapa negara di dalamnya. Negara-negara Eropa termasuk Nederland terlibat dalam perang dunia itu. Dengan adanya perang itu maka hubungan antara Eropa dengan Indonesia sudah mulai terganggu tidak lancar lagi. Hasil bumi yang telah ratusan tahun memberi keuntungan yang besar itu, maka dengan adanya perang tidak begitu memasukkan uang karena terganggu dalam perjalanan. Mulai saat itu Belanda telah mulai mengadakan persiapan dalam sewaktu-waktu menghadapi menjalarnya bahaya perang. Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang-sidangnya menanggapi mosi yang diajukan kepada pemerintah Belanda masih ditanggapi dengan reaksioner. Sikap yang demikian itu karena sebagian besar anggota dalam persidangan itu termasuk orang-orang yang reaksioner. Maka karena suara reaksioner lebih banyak daripada orang yang progresif, maka tuntutan Indonesia Ber-parlemen dianggap sepi. Tentang tuntutan beberapa partai dengan diadakannya keanggotaan Parlemen yang lebih luas, maka pemerintah telah mengambil sikap tidak merintanginya selama mereka itu tidak melanggar ketentuan umum.

Demikian pula keadaan di daerah kedudukannya masih merasa kuat.

b. Sesudah negeri Belanda diduduki Nazi Jerman.

Pada tanggal 10 Mei 1940 tentara Jerman mulai menyerang ke Nederland, Belgia dan Luxemburg. Tanah Belanda yang hanya sempit itu dalam waktu singkat digulung oleh tentara Nazi. Dalam seminggu saja habislah perlawanan tentara kerajaan. Kota Den Haag, Rotterdam dan Amsterdam, Breda, Leiden dan lain-lainnya hancur lebur dibom oleh angkatan udara Jerman

yang menjatuhkan bomnya berton-ton di Nederland. Ratu Wilhelmina dan Pemerintah Nederland menyingkir ke London. Nederland diduduki Jerman. Pelabuhan Rotterdam yang sangat besar dan dibangun dengan uang laba pemerasan dari bangsa Indonesia habis musnah dalam sekejap mata. Jembatan-jembatan raksasa, kapal-kapal dagang dan gedung-gedung indah yang ditegakkan dengan uang keuntungan dari tanah jajahan Hindia Belanda, lenyap seperti ditelan bumi. Kemegahan negeri Belanda selama tiga ratus tahun karena dapat menguasai rakyat Indonesia, telah musnah dimakan bom Jerman. Baru sesudah Nederland diduduki Jerman ini mosi Thamrin ialah penghapusan istilah *Nederlands Indie* supaya diganti "Indonesia" dan *Inlander* menjadi "Indonesier" dikabulkan (23 Agustus 1940). Maka sejak waktu itu terpakailah istilah Indonesia dan *Indonesier* sebagai pengganti Hindia Belanda dan *Inlander*.

Mulai pendudukan Jerman di Nederland itu mulai kacaulah fikiran Belanda di Indonesia dan daerah-daerah, karena mereka yakin bahwa mau tidak mau perang akan menjalar juga serta mengancam kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Dalam keadaan yang demikian itu goyahlah kedudukannya baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Untuk memperkuat kedudukannya maka pemerintah Hindia Belanda mulai membuka buat yang pertama kali memberikan kesempatan yang luas kepada bangsa Indonesia untuk masuk pendidikan perwira dan mengadakan milisi. Milisi itu merupakan salah satu jalan yang ditempuhnya secara politis menampung kekuatan dalam usaha perang. Belanda telah memberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi perwira dan lain-lainnya. Dan kesempatan tersebut digunakan oleh pemuda-pemuda Indonesia sehingga untuk pertama kali di saat-saat terakhir kekuasaan Belanda, bangsa Indonesia mendapat kesempatan untuk berlatih keprajuritan itu.

Demikianlah di daerah-daerah para pemuda ditampungnya. Dengan ini pemerintah kolonial telah merasa was-was dan goyah kedudukannya dengan kemungkinan penyerangan Jepang.

c. Sesudah Perang Pasifik pecah.

Menjelang pecah Perang Dunia II dan Perang Pasifik Je-

pang sudah mulai memasukkan agen-agensya ke Indonesia untuk mempersiapkan *Field Preparation* yaitu persiapan di lapangan untuk membantu invasi mereka.

Dengan pecahnya Perang Pasifik, maka pemimpin-pemimpin nasional sudah memperhitungkan, bahwa peristiwa itu akan membawa masa yang sangat menentukan bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam usaha mencapai Indonesia merdeka. Peristiwa akan meledaknya Perang Pasifik membuka sesuatu bagi bangsa Indonesia karena perang itu akan memungkinkan bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan.

Pecahnya Perang Pasifik akan membawa kesempatan yang menentukan. Jepang mencetuskan Perang Pasifik adalah untuk menguasai Asia Tenggara. Dalam pergolakan dunia waktu itu jelas sekali kelihatan politik dan strategis Jepang itu yakni Asia Tenggara adalah Indonesia yang diharapkan dapat memberikan bukan saja posisi yang strategis, tetapi juga sumber kekuatan untuk melanjutkan peperangan seterusnya.

Di lain pihak, negara-negara Barat yang ada di Asia Tenggara dan Belanda yang bercokol di Indonesia tidak bersedia berperang karena mereka adalah negara-negara kolonial yang sedang berperang di Eropa, sehingga tidak cukup kekuatannya untuk menghadapi Jepang. Apalagi Belanda yang pada saat-saat itu menganut "politik netral" Belanda anti persekutuan militer. Bila bersekutu terkena konsekwensinya sebagaimana jalannya perkembangan perang. Sehingga persiapanya di dalam Perang Pasifik itu praktis tidak ada.

Bagi pergerakan kebangsaan Indonesia akan meletusnya Perang Pasifik itu sudah diperhitungkan dan direncanakan untuk membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Maka Belanda menyusun kekuatan baik menghimpun milisi bangsa Indonesia maupun mencari kawan untuk berlandung dalam keadaan yang panik itulah Belanda selalu menawarkan slogan kosongnya kepada bangsa Indonesia.

E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG

1. Propaganda Jepang yang terasa di daerah.

Tidak hanya Belanda saja, akan tetapi juga Jepang pandai menjalankan tipu muslihatnya. Sebelum mengadakan pendaratan di tanah air kita. Dari siaran-siaran radio senantiasa ter-

dengar bangunan hebat propagandanya untuk menarik hati rakyat banyak. Sering-sering terdengar dilagukannya lagu kebangsaan "Indonesia Raya", yang kalau jaman Belanda sangat jarang terdengar atau memang takut orang menyanyikannya "Kemakmuran bersama di Asia Raya", "Satu warna satu bangsa", Dai Nippon sebagai "saudara tua" akan memimpin Indonesia sebagai "saudara muda" dan lain-lainnya lagi sangat menarik hati orang banyak yang memang hidupnya sangat tertekan dan penghidupannya susah sekali.

Jepang berusaha menyerahkan semua orang Asia untuk usaha perangnya. Jawatan propaganda Jepang giat melancarkan propaganda yang pokoknya Jepang mengobarkan Perang Asia Timur Raya untuk membebaskan seluruh Asia dari penjajahan Barat dan mempersatukannya di dalam "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" di bawah pimpinan Jepang. Kantor propaganda Jepang kemudian mendirikan "Pergerakan Tiga A" yang berdasarkan semboyan: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia. Pergerakan Tiga A tersebut mengadakan kursus-kursus untuk pemuda, dengan tujuan menanamkan semangat pro Jepang. Pergerakan Tiga A ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, bekas anggota Parindra waktu jaman Hindia Belanda.

Pergerakan Tiga A ini mula-mula disambut oleh rakyat dengan hati gembira karena dengan datangnya Jepang itu dan sesuai apa yang dipropagandakan akan bebaslah dari cengkeraman pemerintah kolonial Belanda. Sambutan ini dengan arti sambil menanti apakah propaganda yang manis itu akan dapat di realisasi atau tidak. Demikian menariknya propaganda Jepang ini sehingga bagi mereka yang belum begitu menyadari apa latar belakang kemanisan propaganda tersebut menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Barulah orang tahu kebohongan dari propaganda itu setelah Jepang berkuasa di Indonesia memerintah dengan kejamnya. Mulai saat itu orang tidak percaya lagi kepada propaganda Jepang.

2. Waktu Kedatangan Pasukan Jepang.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang masuk, diterima dengan sangat gembira oleh rakyat banyak. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat kepada Jepang.

Sejak itu beralihlah dari penjajahan kolonial Belanda ke penjajahan Jepang. Berbeda dengan jaman Hindia Belanda di mana terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada jaman Jepang terdapat pemerintahan militer. Pulau Jawa dan Sumatra diperintah oleh Angkatan Darat, sedangkan daerah Indonesia lainnya diperintah oleh Angkatan Laut Jepang.

Kedatangan Jepang ini didahului dengan perampokan-perampokan oleh penduduk. Yang menjadi sasaran adalah toko-toko dan pabrik-pabrik serta gudang-gudang. Keadaan ini menimbulkan kekacauan di bidang ekonomi. Keadaan makin bertambah buruk lagi karena pegawai-pegawai pemerintah sampai beberapa bulan tidak menerima gaji. Maka lalu timbul lapangan kerja baru ialah pencatutan. Setiap orang berjualan asam dan menurut istilah Mr. Kasman menukarkan barang-barangnya dengan dan bahan makanan. Maka dengan demikian dapat dikatakan ada kata pemasaran baru. Sebuah tulisan dari jaman itu yang ditulis oleh Saudara Sujono Hadinoto dalam *Pandji Pustaka* yang berjudul "Perniagaan sepanjang jalan", antara lain dikatakan bahwa di bulan-bulan Maret, April, dan Mei 1942 di tepi jalan raya Jakarta dan Surakarta terdapat banyak orang yang menawarkan barang bekas yang tadinya tidak pernah ada. Dikatakan pula, bahwa barang-barang gula dan beras membumbung tinggi. Singkong mulai dimakan atau menurut istilahnya "naik singgasana."

Kenaikan harga ini mula-mula ditindak tegas oleh tentara Jepang dan diberi hukuman yang kejam. Seperti pernah terjadi di Tulungagung ada seorang penjual tebes (makanan kuda) yang menaikkan harganya, kemudian dilaporkan kepada tentara pendudukan. Sebagai propaganda kejam, penjual tersebut dijemur di tempat panas matahari dan siapa yang lewat boleh memukulnya. Tetapi ternyata, bahwa harga-harga tidak dapat dikendalikan lagi, meskipun pada awal pendudukan banyak berita tentang tindakan yang diambil terhadap kenaikan harga.

Kenaikan harga ini disebabkan oleh kurangnya barang kebutuhan dan uang yang tidak ada harganya. Lebih-lebih setelah tentara pendudukan sendiri membeli barang-barang bahan makanan, dengan maksud untuk mempertahankan harga pasar dan untuk menolong penduduk desa yang sudah menjual hasil tanamannya. Demikian sulit dan buruk keadaan perekonomian pada saat Jepang menduduki di Indonesia. Pada tang-

gal 6 Maret 1942 Jepang masuk kota Yogyakarta. Iring-iringan truk yang ditumpangi bala tentara Jepang disaksikan oleh orang-orang di sepanjang jalan dengan rasa tidak ketakutan. Iringan tentara Jepang itu melewati jalan Malioboro menuju ke arah selatan ialah ke Senisono sambil menyerukan: "Nippon Indonesia sama-sama merdeka" dan sebagainya untuk mendapat perhatian masyarakat di sepanjang jalan. Di sana sini itulah gambar raja Belanda ditusuk-tusuk dengan bayonetnya bala tentara Jepang. Dalam waktu singkat saja kota Yogyakarta dikuasai Jepang dan sebagai markas tentara Jepang di hotel Garuda Yogyakarta sekarang.

3. Sikap Jepang terhadap aparatur Pemerintah Hindia Belanda.

Dengan berkuasanya pemerintah Jepang di Indonesia, maka berdasarkan suatu penyerahan tanpa syarat, maka baik pemerintahan Belanda yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di daerah tinggal mengikutinya. Orang-orang Belanda tidak dapat berbuat apa-apa lagi kecuali harus meletakkan segala jabatan pemerintahan dan semua jabatan penting dalam berbagai perusahaan yang ada dilepas tanpa syarat apapun. Serdadu Belanda ditangkap oleh Jepang. Gedung Agung Yogyakarta yang pada waktu itu berkedudukan di tempat tersebut digantikan oleh pimpinan penguasa Jepang. Perusahaan-perusahaan digantikan orangnya dari orang Belanda dengan bangsa Indonesia di bawah pimpinan Jepang. Senisono yang pada waktu penjajahan dipergunakan sebagai kamar bolanya orang Belanda dan tertutup bagi umum kecuali para pangeran dan *Regent*, maka dengan kedatangan Jepang di Yogyakarta itu orang-orang umum dapat memasukinya. Hotel Mutiara sekarang yang pada jaman Belanda dipakai Sekolah Netral dipergunakan untuk memakai orang-orang Australia, Amerika, Inggris, Cina Tiongkok (Ciang Kai Shek), dan juga orang-orang Belanda. Orang-orang Australia dan Inggris pada waktu banyak yang memegang pimpinan serdadunya KNIL-nya Belanda.

4. Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia.

Setelah keadaan agak reda maka kira-kira satu bulan lamanya maka Gokang ialah Kepala Daerah bangsa Jepang ber-

tempat di Gedung Agung. Di muka Gedung Agung ini dijaga oleh militer Jepang. Orang-orang yang akan menghadap pemerintah Jepang maupun melewati di muka penjagaan tersebut diwajibkan seikerei kepada Jepang.

Pemerintah Jepang kemudian mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan ialah ada yang diangkat dalam jawatan-jawatan. Begitu pula ada juga dari bangsa Indonesia disertai jabatan Direktur Pendidikan yang pada waktu itu duduk Lukman Jayadiningrat dan bertempat tinggal di Jakarta. Ada pula dari para pejabat bangsa kita yang dinaikkan pangkatnya. Kesemuanya itu tidak lain untuk mengambil hati saja.

Di samping kekejaman yang dilakukan, tetapi pemerintah Jepang juga mengadakan perbaikan dalam bidang ekonomi ialah usaha pertanian dengan dibuatnya saluran Mataram yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Penanam jarak dan kapas sebagai bahan pakaian ditanam juga oleh para petani dengan bimbingan Jepang. Demikian pula penanaman rami di mana-mana diadakan pula.

Dari golongan pemuda dibentuklah PETA. (Pembela Tanah Air), yang pada waktu itu menjaga tempat-tempat yang dianggap penting diawasi. Misalnya pantai Parangtritis dan tempat-tempat lain yang dianggap strategis.

Sekolah-sekolah yang menjelang datangnya Jepang. Jepang banyak yang tutup kurang lebih selama 3 bulan, maka setelah Jepang berkuasa di kota Yogyakarta ada usaha untuk membuka sekolah kembali. Sebelum itu maka dibentuklah Badan kontak yang berusaha memajukan pendidikan dan untuk saling bantu membantu dari guru-guru swasta. Pengurus Badan kontak ini terdiri dari sekolah-sekolah swasta. Setelah Pengurus Badan Kontak ini menghubungi pemerintah Jepang untuk membuka sekolah-sekolah yang sudah lama tutup. Maka Kapten Yamato mengijinkannya asal tidak dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan Inggris, tetapi dengan bahasa Nippon dan juga dapat dengan bahasa Indonesia.

Jepang mempunyai sistem yang khusus di dalam menghadapi masyarakat di Jawa, yang lain dengan yang ditempuh oleh pemerintah kolonial Belanda. Setiap mobilita vertikal, setiap perubahan status seseorang, membawa dinamika yang besar. Ini digunakan Belanda dalam menampung kekuatan-kekuatan

yang timbul. Tetapi pemerintah Jepang mempunyai sistem yaitu dalam kenaikan status seseorang tidak banyak dikeluarkan biaya tetapi tujuannya tercapai.

Sebelum maupun pada waktu perang Asia Timur Raya Jepang mempunyai cita-cita tertentu tentang seseorang satria atau *Bushi*. Salah satu syarat dari seorang *bushi* ialah: berbakti pada tuannya (majikan). Yang sangat mereka pentingkan adalah semangat. Mereka mengatakan, " Apabila orang tidak mendapat latihan semangat tentu mereka akan berbuat yang kurang terhormat dan apabila orang takut mati tidak akan ia berbuat berani pada waktu negerinya tertimpa mala petaka, semangat ini pula yang mereka minta dari masyarakat yang mereka duduki. Mereka yang mempunyai semangat besar mendapat pujian, diberi ijazah-ijazah yang tidak dimengerti oleh penduduk. Bangsa Indonesia diberi kedudukan di dalam badan-badan yang dibentuk Jepang. Segi materi tidak banyak diperhatikan dan orang takut juga untuk menuntut perbaikan kebendaan karena menurut pihak pemerintah tentara Jepang. Walaupun telah berpangkat tinggi dan menjadi Jendral, *Bushi* tetap sederhana dan sekali-sekali tidak akan menuntut kemewahan. Dengan adanya harapan untuk dipuji dan di lain pihak adanya rasa ketakutan kepada *Kempetai* atau Polisi Militer Jepang maka ditanamkan semangat tempur pada bangsa Indonesia.

Suatu sistem lain yang dijalankan terhadap masyarakat Indonesia ialah dipersatukannya badan-badan yang sekiranya memberikan bantuan kepada Jepang. Misalnya: kepanduan mula-mula masih diperbolehkan berdiri, Pada tanggal 29 Juli 1942, 10 buah kepanduan yaitu KBI, SI, AP, POP, IPO, NATIPY, Pandu Maluku, Pandu Minahasa, NIPD dan PI digabungkan menjadi satu di dalam *Gerpi* atau Gerakan Pandu Indonesia. Tahun berikutnya kepanduan-kepanduan diganti dengan satu gerakan pemuda yang baru yaitu *Seinendan*. Setiap hari kerja, dari jam 15.00 s/d 18.00 mereka dilatih baris-berbaris dan latihan perang.

Sikap antara pendudukan Jepang terhadap kaum Muslimin di Jawa mencerminkan percampuran dan pada kedua sistem tersebut di atas. Di satu pihak diadakan perubahan status daripada Kyai yang disertai dengan penanaman semangat, dilain pihak diadakan satu badan yang menampung semua gerakan

Islam di Jawa. Sebelumnya, yaitu pada bulan September 1937, sudah terbentuk badan semacam ini yang bernama Majlisul Islamil A'la Indonesia. Pada tanggal 24 Oktober 1943 MIAI ini diganti dengan badan baru yang didirikan oleh tentara pendudukan Jepang. Karena pemerintah pendudukan Jepang membutuhkan bantuan para Muslimin di Jawa khususnya, maka diadakan tindakan yang menguntungkan para Muslimin, di samping terasa pula adanya kekangan dari Jepang. Oleh Jepang didirikan suatu bagian Agama tersendiri dan dengan demikian para pengawasan langsung dari pada bupati seperti pada jaman Belanda tetap langsung di bawah pengawasan pemerintah pusat. Para Kyai 19 Syu (karesidenan) di dalam bulan Juli 1943 dilatih di Jakarta, suatu hal yang tidak pernah terjadi di dalam jaman Kolonial Belanda. Di dalam kalangan pemimpin agama Islam terjadi mobilitas vertikal besar-besaran. Para Pengulu ke bawah sejak jaman Jepang tidak lagi berada di bawah pengawasan bupati. Di samping itu kepada para pemimpin agama diberikan juga kesempatan untuk menjadi bupati kepala daerah. Lebih-lebih dengan adanya kemungkinan untuk menjadi opsir pada Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, maka percampuran golongan penduduk menjadi sangat intensip, seperti halnya *Seinendan* mencampurkan beberapa lapisan penduduk menjadi satu.

Pada permulaan pendudukan Jepang telah mulai pula membentuk pasukan tentara yang terdiri atas orang-orang Indonesia. Tetapi menurut penduduk terhadap ini hanya terbatas pada golongan-golongan bawahan dari penduduk. Kedudukan mereka yang memasuki persatuan ini hanya sebagai pembantu serdadu atau *Heiho*. Juga diadakan *Kenpeiho*, atau pembantu Polisi Militer Jepang yang terkenal kejam.

Setelah diadakan pembentukan PETA perhatian penduduk sangat besar. Yang memasuki PETA bukan hanya dari golongan bawahan, tetapi juga dari golongan bangsawan yang hingga kini masih menjadi anggota TNI. Suatu hal yang menarik perhatian bahwa banyak di antara perwira atau opsir PETA datang dari kalangan guru.

Di kalangan masyarakat kedudukan dalam PETA merupakan status yang tinggi. Di dalam kenyataannya kerap kali status mereka lebih tinggi daripada kepala daerah.

Di samping pemerintah Jepang memberikan kesempatan

dalam beberapa segi, tetapi sikapnya terhadap pergerakan politik nyata-nyata menunjukkan sangat keras. Partai-partai politik dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Demikian pula orang-orang yang dianggap membahayakan pemerintah disekap serta diinternir dalam suatu pembuangan.

Orang-orang yang melewati penjagaan di Gedung Agung Yogyakarta menuju ke utara yang tidak mau hormat kepadanya lalu dipukulinya. Pengerukan harta kekayaan milik penduduk berupa hasil pertanian dan hasil lainnya diangkut oleh pemerintah Jepang demi mencukupi kebutuhan Perang Asia Timur Raya. Kepedihan akibat penekanan terhadap rakyat banyak sangat terasa sekali. Jepang mengumpulkan macam-macam bahan makanan dari rakyat.

Pengambilan beras di desa-desa melalui koperasi pada hakikatnya merupakan badan-badan pemungut pajak di bawah pengawasan *Syomin Kumisi-Sodyan-Dyo* atau Jawatan Penerangan Koperasi dan Perdagangan, dibantu oleh Jawatan Pertanian. Di dalam cara menjalankan badan koperasi pertanian (bagian padi) pada lampiran ke II dikatakan bahwa "Tiap-tiap penduduk desa terutama yang membayar pajak bumi bisa menjadi anggota koperasi. Pada pasal lain disebut pula, "setelah panen dimulai, pajak bumi lekas-lekas dipungut, berupa padi buat tiap-tiap f. 1,50 pajak, harus dibayar 100 kg padi. Kelebihan uang kelak dikembalikan."

Dari pasal ini kita lihat, bahwa harga padi yang ditetapkan oleh tentara Jepang adalah lebih rendah daripada pemerintah Belanda.

Untuk musim 1940/1941 harga padi telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai berikut:

Padi cere per 100 kg: f. 3,25 dan padi bulu per 100 kg.: f. 3,60. Di sini tentara Jepang menurunkan sampai lebih dari separo, padahal dalam kenyataannya harga beras makin membumbung. Sayang sekali statistik untuk zaman pendudukan tidak ada, bila ada tidak dapat dipercayai sepenuhnya karena bersifat propaganda.

Selanjutnya disebutkan pula, bahwa padi-padi yang terkumpul harus dijual ke pabrik beras, tentu saja dengan harga pemerintah. Ada lagi pasal yang kelihatannya sangat lemah yaitu setelah diterima uang pembelian padi dari penggilingan beras, maka uang pendapatannya setelah dipotong pajak, segera harus

dikembalikan pada rakyat. Yang penting kita ketahui di sini bahwa Jepang minta pajak *innatura* berupa padi. Jika dahulu semasa masih dalam bentuk uang dirasa sangat berat, sekarang bagaimana keadaannya dalam zaman Jepang?

Di sini kita lihat, bahwa khususnya bagi petani produsen padi keadaan pendudukan Jepang lebih menguntungkan daripada zaman Belanda. Lain halnya bagi mereka yang tidak mempunyai tanah. Tetapi keadaan ini hanya berlaku sebentar, atau hanya di atas kertas. Pada akhir tahun 1942 sudah disinyalir, bahwa pabrik padi tidak mau membayar jumlah uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tentara pendudukan, sehingga hal ini merugikan petani. Maka diputuskan agar pemerintah sendiri membeli padi dari orang tani, sedang pabrik-pabrik padi diwajibkan beli padi pemerintah. Kelihatannya pemerintah tentara pendudukan betul-betul memperhatikan nasib orang tani, tetapi dengan bertambah buruknya keadaan peperangan, tindakannya lebih kejam. Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah mengadakan hubungan langsung dengan rakyat tetapi selalu menggunakan perantara tetapi kini pemerintah tentara pendudukan Jepang langsung berhubungan dengan petani, ke luar masuk desa sendiri, sehingga dengan demikian pengaruh pemerintah baru ini langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Pertengahan tahun 1943 keadaan peperangan sudah parah. Pada tanggal 16 Juni 1943 perdana menteri Tojo dalam sidang parlemen Jepang telah mengumumkan, bahwa daerah yang diduduki tentara Jepang akan diberi kesempatan untuk turut menyusun politik dalam negeri. Ucapan ini disusul dengan ucapan dari *Saiko Sikikan* atau Panglima tentara pendudukan di Jawa, bahwa akan dibentuk badan-badan penasehat. Di pusat dibentuk *Cuo Sangiin* dan di tiap Karesidenan *Sangi-kai*. Di samping itu didudukkan beberapa orang dalam jabatan penting, baik di pusat maupun di daerah.

Pada bulan Agustus 1943 serangan udara dari pihak Sekutu ditujukan pada daerah-daerah di luar Jawa, misalnya pada 18 Agustus 1943 pesawat udara Sekutu nampak tujuh kali di atas Makasar. Tengah mula 17 Agustus 1943 tiga pelembar bom Amerika nampak di Balikpapan. Demikian pula Kupang diserang. Segala sesuatunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap desa karena desa diminta beras lebih banyak lagi dan di samping itu harus pula memberikan tenaga manusia berupa

romusha. Menjelang akhir 1944 dikeluarkan petunjuk baru, diserukan agar "Pengerahan *romusha* harus dilanjutkan dengan cepat dan berfaedah menurut rancangan. Di samping ini mengerahkan *romusha* harus tidak boleh diabaikan. Dianjurkan agar mempergunakan cara-cara yang tepat di dalam pertanian, dianjurkan pula agar lebih banyak digunakan tenaga hewan segala sesuatu agar jumlah pekerja dapat dikurangi dan tenaganya dapat digunakan sebagai tenaga *romusha*. Wanita umur 16 - 25 tahun atau lebih harus dapat juga digunakan untuk keperluan *romusha*.

Di daerah-daerah dibentuk Panitia Pengerahan *romusha*, (P.P.R.) yang berkewajiban untuk mengerahkan tenaga *romusha* berdasarkan apa yang disebut laporan sementara atau daftar sementara. Di dalam prakteknya daftar ini adalah daftar tunjukan yang dikarang sendiri oleh Kepala daerah setempat. Hal ini jelas nampak dari kalimat-kalimat selanjutnya yang mengatakan, " calon yang telah ditetapkan, atau orang yang mau ikut rombongan dengan kehendaknya sendiri." Dengan adanya dua kemungkinan ini, maka di samping yang sukarela, ada pula yang karena paksaan. Propaganda dilakukan melalui *Cuo Sangiin* dan *Sangikai*, karesidenan. Demikian pula dilakukan propaganda melalui Rukun Tetangga atau *Tonari Kumi*. Maka tidak pula mengherankan bahwa pada tahun itu Rukun Tetangga Organisasinya disempurnakan, dalam pasal 3 ayat 3 dari peraturan penyempurnaan ini antara lain disebut, bahwa R.T. harus menganjurkan penambahan hasil.

Di samping itu di antara putera-putera petani itu ada yang turut mendaftarkan diri sebagai *Heiho* atau pembantu serdadu Jepang. Dalam pada itu keharusan penyerahan padi kepada Jepang makin lama makin diperkeras. Bahwa penyerahan padi pada pemerintah tentara pendudukan mengakibatkan kesengsaraan dapat terbukti dalam catatan-catatan (*verslag*) stenografis tentang jalannya sidang dari *Sanyo Kaigi* pada tanggal 8 Januari 1945 satu hal yang menarik dalam laporan ini ialah bahwa di daerah orang-orang kaya dan orang-orang yang berpengaruh tidak ditarik untuk menyertakan padinya.

Keadaan di kota berbeda, karena tekanan untuk menjadi *romusha* tidak begitu berat seperti di desa, meskipun di sini terdapat kemelaratan dan kesengsaraan. Dari piramida-piramida penduduk yang terkumpulkan selama itu selalu ternyata,

bahwa golongan umur antara 20 - 25 tahun selalu lebih kecil daripada golongan umur di atas dan dibawahnya. Hal ini dapat dimengerti, karena angka kematian dalam akhir tahun Perang Pasifik meningkat, sedangkan angka kelahiran turun. Tetapi dalam pada itu di kota dibuka industri-industri kecil seperti misalnya pabrik kancing. Tukang seorang dokter gigi yang sekarang ternama membuat sikat gigi dengan dibubuhi namanya, pabrik yang membuat tempat air dari tempurung untuk keperluan *Heiho* dan sebagainya.

Dalam pada itu keadaan pegawai negeri sebagai konsumen sangat menderita. Dibandingkan dengan keadaan sebelum perang gajinya sangat tidak cukup dan terpaksa menjual barang-barang yang tadinya dikumpulkan pada waktu masih makmur.

5. Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Jepang.

Kedatangan Jepang di Yogyakarta pada permulaannya disambut dengan penuh harapan akan niat pemerintah Jepang untuk membuat kemakmuran bangsa Indonesia. Lebih-lebih dengan sikap lunaknya dengan mengikut sertakan bangsa dalam pemerintahan dan memegang jabatan di berbagai bidang, tidak ada kecurigaan sama sekali timbulnya penindasan yang kejam. Semuanya diterima dengan rasa tanpa syak wasangka.

Tetapi lama kelamaan sikap Jepang tampaknya lunak itu sudah lembek dan bertindak dengan kejamnya. Lebih-lebih kaki tangan Belanda merasa celaka hidupnya, karena jika tidak dibunuh, juga akan sulit hidupnya. Sebaliknya para pemimpin pergerakan kita ada merasa "kita sekarang merdeka" dan tiada lain hanya Dai Nippon lah yang dapat memerdekakan kita "paling tidak, sekarang kita merdeka dari cengkeraman Belanda seterusnya entah!". 20)

Tidak hanya orang-orang dari luar, tetapi juga dari kaum Taman Siswa banyak yang penuh kepercayaannya kepada Jepang. "Kita toh sudah merdeka, maksud kita sudah tercapai, Taman Siswa tidak perlu ada lagi, kita serahkan saja kepada pemerintah, kita menjadi pegawai negeri. Demikianlah keadaannya perguruan-perguruan kita Taman Siswa, ada yang murid-muridnya ditanggalkan guru-gurunya menjadi orang-orang pemerintah," ada yang boleh buka terus, dan ada pula yang memang tidak boleh dibuka oleh pihak pemerintah seperti halnya di

daerah Priangan, Pekalongan, Bojonegoro, Probolinggo dan Besuki. Sedang guru-gurunya tetap mempertahankan menunggu ijin diperbolehkannya buka. Karena lama dinanti-nantikanlah tiada hasilnya, sebagian dan mereka pindah tempat ditarik ke Yogyakarta atau usaha lain. Pada tiap tempat keadaannya berbeda tergantung "pembesarnya" masing-masing.

Pusat Taman Siswa sendiri di Yogyakarta waktu Jepang masuk hanya libur 10 hari, dan selanjutnya buka terus. Tamabahnya murid bukan main banyaknya, sehingga pada tahun-tahun pengajaran baru jumlah murid lebih kurang ada 3.500 anak dibagi mejadi 69 kelas, yaitu bagian Taman Indriya, Taman Anak dan Taman Muda 13 kelas, bagian Taman Dewasa 42 kelas, Taman Madya 7 kelas dan Taman Guna juga 7 kelas dengan sejumlah 76 anggota perguruan.

Kebesaran Taman Siswa Mataram tidak dapat dipertahankan, diteruskan begitu saja Jepang mengetahui pendidikan Taman Siswa bukan pendidikan Jepang dan sebagian besar bagian Taman Dewasa bukan anak kecil lagi. Pemerintah ingin memegang mereka langsung di tangan sendiri agar dapat dipergunakan menurut kehendaknya. Berhubung dengan itu lalu dikeluarkan peraturan tentang "Sekolah Partikelir" yang hanya diperbolehkan membuka sekolah kejuruan (vak) kecuali pendidikan guru, misalnya urusan rumah tangga, pertanian, perindustrian dan lain-lainnya.

Dalam pada itu keadaannya di luar perjuangan, keadaan politik, sudah ada perubahan. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) dibentuk dengan pimpinan "empat serangkai" yaitu Bung Karno, Bung Hatta, K.H. Dewantoro dan Kyai Haji Mas Mansur.

Sejak keluarnya peraturan pemerintah mengenai sekolah partikelir, suasana agak menggelisahkan. Pada 18 Maret 1944 ada keputusan Taman Dewasa diubah menjadi Taman Tani; Taman Madya dan Taman Guru dibubarkan.

Dengan kekejaman pemerintah Jepang para pemimpin partai politik bergerak di bawah tanah menantikan kesempatan yang tepat untuk menumbangkan Jepang. Kebencian terhadap pemerintah Jepang makin merajalela. Para pemimpin pergerakan mau bekerja sama dalam arti untuk menyiapkan diri mengadakan perlawanan.

BAB V

PENUTUP

Sejarah perkembangan sesuatu bangsa adalah sebagai suatu barang yang hidup, artinya selalu tumbuh sejalan dengan peredaran waktu. Ibarat pohon, maka selalu bersemi, makin lama makin besar dan tinggi, bercabang dan berdaun rimbun, tunas yang lama diganti dengan tunas yang baru dan demikian seterusnya sejarah itu senantiasa bertambah panjang dan bercabang beranting yang beraneka warna bentuknya.

Khususnya sejarah periode Pergerakan atau Kebangkitan Nasional, maka periode ini merupakan zaman yang amat penting dalam sejarah perjuangan bangsa, di mana kaum terpelajar Indonesia sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia baik yang tergabung dalam partai politik maupun organisasi massa, berjuang untuk meniadakan diskriminasi politik dan sosial budaya serta membulatkan cita-cita kebangsaan dalam rangka mengantarkan Rakyat Indonesia, ke gerbang Kemerdekaan.

Demikian pula daerah Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah wilayah Indonesia, dalam periode Pergerakan Nasional itu, ternyata mempunyai andil yang besar dalam ikut berpartisipasi dan mengisi era perjuangan dan pergerakan nasional di daerah.

Sebagaimana yang telah kami uraikan pada bagian di muka, maka sebelum lahirnya pergerakan nasional di daerah Yogyakarta telah ada usaha yang merupakan benih-benih timbulnya kebangunan nasional, yaitu adanya usaha yang dilakukan oleh suatu golongan orang-orang terkemuka di antaranya Dr. Wahidin, Pangeran Notodirodjo, R. Dwidjosewojo, Mas Budiardjo, dan R. Sosrosugondo untuk mendirikan *Studie fonds* (beasiswa bagi anak-anak yang cakap atau pandai tetapi tidak mampu).

Kecuali itu di dalam kalangan kaum wanita, pada menjelang lahirnya pergerakan nasional di daerah Yogyakarta terutama di kalangan putri-putri Pakualaman Yogyakarta, telah terdapat pula usaha untuk mengadakan persatuan kaum wanita, guna meneruskan cita-cita R.A. Kartini.

Dalam pada itu dengan lahirnya pergerakan nasional, yang

diawali berdirinya organisasi Budi Utomo hingga saat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, maka dalam periode itu daerah Yogyakarta tidak pernah absen dalam ikut mengisi era perjuangan nasional pada waktu itu. Terbukti dari banyaknya organisasi atau perkumpulan baik yang bercorak politik, sosial ekonomi maupun budaya, yang didirikan di Yogyakarta pada periode itu. Organisasi-organisasi yang bercorak politik yang didirikan di Yogyakarta itu antara lain Sarekat Islam, *Indische Partij*, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia dan sebagainya. Sedangkan organisasi yang bercorak sosial budaya antara lain ialah Budi Utomo, Muhammadiyah, gerakan-gerakan buruh, Taman Siswa dan sebagainya.

Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila di daerah Yogyakarta ini kemudian bermunculan tokoh pergerakan baik di bidang politik seperti Suwardi Surjaningrat, Mr. Sujudi, Mr. Ali Sastroamidjojo, Dr. Sukiman Wirjosandjojo dan sebagainya maupun tokoh pergerakan di bidang sosial budaya seperti Ki Hadjar Dewantoro, Kyai H. Ahmad Dahlan, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Surjopranoto dan masih banyak lagi.

Di samping itu, dalam periode pergerakan nasional ini, ternyata Yogyakarta merupakan "kancah" pergolakan politik, sosial dan budaya. Segala aktifitas politik seperti kongres, rapat umum dan sebagainya, Yogyakarta ternyata tak pernah absen dalam kegiatan tersebut. Demikian pula kegiatan sosial budaya seperti mendirikan dana belajar, memperbaiki dan memajukan pendidikan dan pengajaran, memperbaiki kesehatan rakyat, menggali, membina dan mengembangkan seni budaya daerah dan sebagainya, merupakan aktifitas yang menonjol di daerah Yogyakarta pada periode pergerakan nasional itu.

Berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa Yogyakarta merupakan "Kota Budaya" di samping "Kota Pergerakan". Artinya, Yogyakarta adalah pusat seni budaya Jawa dan juga "Tempat" atau "Kancahnya" gerakan-gerakan baik yang bercorak politik, sosial maupun budaya serta sebagai kota yang banyak melahirkan para tokoh pergerakan.

DAFTAR CATATAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Lihat lebih lanjut dalam D.M.G. Koch, "Menuju Kemerdekaan Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampai 1942", terjemahan, Abdoel Moeis, diktat.
2. Lihat lebih lanjut, "Pola Penelitian dan Kerangka Laporan Tematis Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen P dan K, 1977/1978, halaman 4 (diktat)

BAB II : KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD 19

- 1) Sejak tahun 1927 wakil-wakil pemerintah Belanda di tingkat Provinsi itu diberi pangkat Gubernur.
- 2) Tentang ciri-ciri kepemimpinan kharismatis dan otoritas tradisional, lihat lebih lanjut R. Bendix Max Weber: *An Intellectual Portrait*, New York, 1962, 298 dan seterusnya.
- 3) Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoenet Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, "Sejarah Nasional Indonesia", Jilid IV, edisi ke 2, Balai Pustaka Jakarta, 1977, hal. 16.
- 4) Para kerabat raja ini mempunyai pengaruh besar dalam pemerintahan, karena nasehatnya serta pendapatnya biasa didengar oleh raja.
- 5) Perincian Daerah Wilayah Negara Agung dapat dibaca pada Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah D.I.Y., tahun 1976/1977, hl. 114.
- 6) Ibid, hal 115, dapat dibaca pula pada Serat Pustaka Redjo Purwo, dalam J. Brandes, *"Register of de proza-omzetting van de Babad Tanah Djawi (Uitgave van 1874)"* dalam V.B.G., LI, bagian Empat, 1900 (Lampiran II), 150-152, 164-168, 181-182.
Lihat juga B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies II, (Ruler and Realm in Early Jawa)*, s'Gravenhage, 1959, 179-185.
- 7) Perincian daerah ini terdapat pula dalam Serat Pustoko Rodjo Purwo, ibid, 164 - 168

- 8) Dr. Soekanto, *Sekitar Yogyakarta 1755 - 1825*, hal. 59.
- 9) *Ibid.*, hal. 90.
- 10) *Ibid.*., hal 95.
- 11) 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional Departemen Penerangan R.I., Jakarta, 1975, hal. 8.
- 12) Drs. J.B.A.F. Mayor Polak, *Tentang Cultuurstelsel dan Penggantiannya*, dalam majalah *Penelitian Sejarah*, September 1961, No. 4 tahun ke II, hal. 22.
- 13) Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, hal. 125.
- 14) Prof. Dr. Slametmuljono, *Nasionalisme sebagai modal perjuangan bangsa Indonesia*, jilid I, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1968, hal. 103.
- 15) Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun, *Kota Yogyakarta 200 tahun*, hal. 68.
- 16) *Ibid.*, hal. 69.
- 17) Juga dapat dibaca pada buku *Sejarah Indonesia*, Jilid III, hal. 107 s/d 108, karangan Anwar Sanusi.
Lihat pula, Raden Ngabei Kartoasmoro, *Ngayogyakarta Pagelaran*, tahun 1927, hal. 31.
- 18). Prof. Dr. R.M. Sutjipto Wirjosuparto M.A. Ph. D. *Glimpes of Cultural History of Indonesia*, Indira, 1964, hal. 14.
- 19) *Ibid.*, hal. 1.
- 20) Soedarsono, *Beberapa catatan tentang Seni Pertunjukkan Indonesia*, Yogyakarta, 1974, hal. 10.
- 21) Lihat, Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke 3, Pranyaparamita, Jakarta, 1962, hal. 94.
- 22) *Ibid.*, hal. 95.
- 23) Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Op.cit.*, hal. 11.
- 24) *Ibid.*, hal: 12
- 25) Drs. R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Jilid III, Penerbit Nasional Trikarya, Jakarta, 1959, hal.35.

- 26) R. Ng. Ronggowarsito, Paramayoga, Yogyakarta, 1906, hal. 120.

BAB III : KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1900 – 1928

- 1) Drs. I. Nyoman Dekker, Sejarah Indonesia Baru, 1900 - 1945 (Pergerakan Nasional). Lembaga Penerbitan IKIP Malang, hal. 23.
- 2) Dr. TH. Pigeud, *Nederlands Javaans Handwoorden boek*, Bij. J.B.Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. Groningen, Batavia, 1948, hal. 142.
- 3) *Studiefonds* adalah suatu dana bantuan atau bea-siswa bagi anak yang tidak mampu tetapi memiliki kepandaian dan kecerdasan.
- 4) Cabang Budi Utomo kota Yogyakarta ini kemudian dikenal dengan Cabang Yogyakarta I. Di samping itu di *Kweekschool* (Sekolah Guru) Yogyakarta, juga berdiri Cabang Budi Utomo yang kemudian dikenal dengan Cabang Yogyakarta II.
- 5) Dr. H. Roeslan Abdulgani, Alm. Dr. Soetomo yang saya kenal, Yayasan Idayu, Jakarta, 1976, hal. 25.
- 6) 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1975, hal. 17.
- 7) Ki Hajar Dewantoro, Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan, N.V. Pustaka Penerbit Endang Jakarta, 1952, hal. 10.
- 7a) "Rajiman Mangunhusodo" adalah sama dan identik dengan "Dr. Rajiman Wedyodiningrat". Adapun nama "Rajiman Mangunhusodo" digunakan untuk menunjukkan kerabatnya yaitu "Mangunhusodo". Sedang nama Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat digunakan /didapat setelah beliau bekerja dan menjadi pemimpin pada Jawatan Ketabiban di swapraja Surakarta (mendapat titel "Kanjeng Raden Tumenggung dan kemudian oleh Sri Susuhunan Surakarta dianugerahi "Wedyodiningrat", dan sejak itulah beliau terkenal sebagai Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat).
- 8) Mr. A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Pustaka Rakyat Jakarta, tahun 1949, hal. 11.
- 9) Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro,

Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V, hal. 187.

- 10) Mr. A.K. Pringgodigdo, *op cit.*, hal-15
- 11). D.M.G. Koch, Menuju Kemerdekaan, Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampai 1942, terjemahan Abdoel Moeis; diktat, hal. 24.
- 12). Drs. Susanto Tirtoprodjo S.H., Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, cetakan ke 4, P.T. Pembangunan Jakarta, 1970, hal. 28.
- 13) Margono, Ikhtisar Sejarah Pergerakan Nasional (1908-1945) Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971, hal. 35.
- 14) Baru pada tahun 1923 sentral Sarekat Islam diambil namanya menjadi Partai Sarekat Islam.
- 15) Margono, *op cit.*, hal. 40.
- 16) Suratman, Masalah Kelahiran Taman Siswa, Pusoro Jilid 25 No. 1 – 2, 1964, hal. 37 – 38.
- 17) Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *op cit.*, hal. 249 – 250.
- 18) Alasan-alasan berdirinya Taman Siswa yang diterima baik dalam kongres ini adalah hampir sama dengan ketujuh prinsip yang diumumkan dalam kongres tahun 1923.
- 19) Prof. Dr. Slametmuljono, Nasionalisme sebagai modal perjuangan bangsa Indonesia, jilid I, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1968, hal. 208.
- 20) Mr. A.K. Pringgodigdo, *op cit.*, hal 41.
- 21) Pada Kongres I PNI, Mei 1928 di Surabaya, kota Perserikatan kemudian diubah menjadi kota "Partai".

BAB IV

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 – 1942

- 1) Wawancara dengan Ki Himodigdoyo, Harjowinatan, Yogyakarta Nopember 1977.
- 2) Muhammad Dimiyati, Sejarah Perjuangan Indonesia, Wijaya, Jakarta, hal. 31.
- 3) Slametmulyono, Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia, Jilid I, hal. 191.
- 4) *Ibid.*
- 5) Mantoro Tirtonegoro, Sejarah Pergerakan Pemuda Kerakyatan dan di sekitar Proklamasi, Agustus 1945, hal. 6.
- 6) *Ibid.*
- 7) Slametmulyoni, *op cit.*, hal. 193.
- 8) *Ibid.*, hal. 219
- 9) *Ibid.*, hal. 220.
- 10) *Kota Yogyakarta 200 tahun*, hal. 40.
- 11) *Ibid.*, hal. 41.
- 12) *Ibid.*,
- 13) *Ibid.*,
- 14) Hasil wawancara dengan Ki Himohudoyo, Herjowinatan, Yogyakarta, Nopember 1977.
- 15) Politik *dumping* ini dijalankan oleh Jepang ialah menjual barang-barang dagangannya yang lebih murah dari pada harga pasaran umum dengan maksud untuk menjatuhkan perdagangan bangsa lain. Dengan demikian, maka barang-barang perdagangan Jepang akan laku, karena harganya lebih murah.
- 16) Yang termasuk negara-negara A.B.C.D. ialah (Amerika, Britania, Cina dan Dutch).
- 17) Hoofdbestuur Moehammadiyah, *Berita Tahunan Muhammadiyah 1932*, hal. 118 – 119.
- 18) *Kota Yogyakarta 200 tahun*, *op cit.*, hal. 118.
- 19) *Berita Tahunan Muhammadiyah 1932*, hal. 89.
- 20) *Buku Peringatan Taman Siswa 30 Tahun 1932 – 1952*, hal. 245.

DAFTAR SUMBER

1. Abdulgani Ruslan Dr. H., *Alm. Dr. Soetomo yang saya kenai*; Yayasan Idayu Jakarta, 1976.
2. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, *Lahirnya Republik Indonesia*; P.T. Kinta, 1972.
3. Bendix. R. Max Weber, *An Intellectual Portrait*; New York, 1962.
4. *Buku Peringatan Taman Siswa 30 tahun (1922 – 1952)*.
5. Dekker, Drs. I. Nyoman, *Sejarah Indonesia Baru, 1900 – 1945* (Pergerakan Nasional; Lembaga Penerbitan IKIP, Malang)
6. Dekker, Drs. I. Nyoman, *Bunga Rampai Sejarah*; Lembaga Penerbitan "Almamater" J.P.T.P. IKIP Malang, 1974.
7. Dewantoro, Ki Hajar, *Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan*; N.V. Pustaka, Penerbit Endang, Jakarta, 1952.
8. Dimiyati Muhammad, *Sejarah Perjuangan Indonesia*; Wijaya, Jakarta, 1951.
9. *Dua puluh Mei Hari Kebangkitan Nasional*; Departemen Penerangan R.I. Jakarta, 1975.
10. Hoofdbestuur Muhammadiyah, *Berita Tahunan Muhammadiyah*, Yogyakarta; 1932.
11. Koch D.M.G., *Menuju Kemerdekaan, Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampai 1942*; terjemahan Abdoel Moeis, diktat.
12. Mantoro Tirtonegoro, *Sejarah Pergerakan Pemuda Kerakyatan dan di sekitar Proklamasi Agustus 1945*; diktat.
13. Margono, *Ikhtisar Sejarah Pergerakan Nasional (1908-1945)*; Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971.
14. Margono Djojohadikusumo, *Kenang-kenangan dari Tiga Zaman*; (Terjemahan Muhammad Radjab), P.T. Indira, Jakarta.
15. Mustafa Kamal Pasha, Chusman Yusuf, *Muhammadiyah sebagai gerakan Islam*, Persatuan; Yogyakarta, 1975.

16. Nasution, A.H., *Sejarah Perjuangan Nasional di bidang Bersenjata*; Mega Bookstore, Jakarta, 1966.
17. Panitia Penyusun Biro Pemuda, Departemen P.D. & K. *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia*; P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1965.
18. Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun, *Kota Yogyakarta 200 tahun*; Sub. Panitia Penerbit, Yogyakarta, 1956.
19. Pigeud, Dr. Th., *Nederlands Javaans Handwoorden boek*; Bij, J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij N.V., Groningen, Batavia, 1948.
20. Pluvier, Y.M., *Sejarah Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia*; tahun 1930 – 1942; diktat.
21. Polak, Drs. J.B. A.F. Mayor, "Tentang Cultuurstelsel dan Penggantiannya," majalah *Penelitian Sejarah*; September 1961, No. 4, Th. ke II.
22. Prajudi Atmosudirdjo, Prof. Dr. Mr., *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid I; Cetakan ke 3, Pradnyaparamita, Jakarta, 1962.
23. Pringgodigdo, Mr. A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*; Pustaka Rakyat Jakarta, 1949.
24. Ronggowarsito, R. Ng. Paromoyogo; Yogyakarta, 1906.
25. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoned Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV, & Jilid V; Edisi ke 2; Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
26. Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies*, part II, (Ruler and Realm in Early Jawa); S'Gravenhage, 1959.
27. Sitorus, L.M., *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*; Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakyat, Jakarta.
28. Slametmuljono, Prof. Dr., *Nasionalisme sebagai modal perjuangan bangsa Indonesia*, Jilid I & Jilid II; P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1968.
29. Soedarsono, *Beberapa Catatan tentang Seni Pertunjukan Indonesia*; Konservatori Tari Indonesia, Yogyakarta, 1974.
30. Soekanto, Dr., *Sekitar Yogyakarta 1755 – 1825*.

31. Soekmono, Drs. R., *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*; Jilid III; Penerbit Nasional Trikarya, Jakarta, 1959.
32. Sudono Banjaransari, *Sejarah Pemerintahan Kota Yogyakarta*; *Jawatan Penerangan Kotapraja Yogyakarta*.
33. Suratman, "Masalah Kelahiran Taman Siswa"; *Pusara*, Jilid 25 No. 1 – 2, Yogyakarta, 1964.
34. Susanto Tirtoprodjo, Drs. S.H., *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Cetakan ke 4; P.T. Pembangunan, Jakarta, 1970.
35. Sutjipto Wirjosuparto, Prof. Dr. R.M. MA. Ph. D., *Glimpses of Cultural History of Indonesia*; Indira, 1964.
36. Yunus Anis, *Riwayat Hidup Nyai Ahmad Dahlan*; Yayasan Mercu Suar, Yogyakarta, 1968.
37. Yunus Salam, *Riwayat Hidup K.H.A. Dahlan Amal dan Perjuangannya*; Depot Pengajaran Muhammadiyah, Jakarta, 1968.
38. Wawancara dengan Ki Himodigdoyo, Harjowinatan, Yogyakarta.

001363.1

G3.2



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA